PROSPEKTUS AWAL

JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	5 – 17 November 2026	Tanggal Perdagangan Waran Seri I *(Pasar Reguler & Negosiasi)*	:	1 Desember 2026 – 29 November 2028
Tanggal Efektif	:	23 November 2026			
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	24 – 27 November 2026	Tanggal Perdagangan Waran Seri I *(Pasar Tunai)*	:	1 Desember 2026 – 30 November 2028
Tanggal Penjatahan	:	27 November 2026			
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 November 2026	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Juni 2027 – 1 Desember 2028
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	30 November 2026	Akhir Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Desember 2028
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 Desember 2026			

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kantor Pusat:
JL. Plaju No.11, Kebon Melati,
Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230
Telepon: 021-66691319

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com
Situs web: www.andalan-nusantara.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran Awal sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189,- (seratus delapan puluh sembilan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (**"Sistem e-IPO"**) harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (**"RDN"**) pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek (**"SRE"**) pemesanan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar-besarnya Rp316.764.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I, atau setara dengan sebesar 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 7 (tujuh) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I berjumlah sebesar-besarnya Rp166.403.155.000,- (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan, mulai dari tanggal 1 Juni 2027 sampai dengan tanggal 1 Desember 2028. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMBERI KERJA UTAMA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2026

PT Andalan Artha Primanusa Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 361/AAP/EXT/VIII/26 tanggal 26 Agustus 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("**UUP2SK**"), dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-12796/BEI.PP3/10-2026 tanggal 7 Oktober 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk menjadi efektif, Perseroan akan menggunakan kode perdagangan efek "ANDA". Sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek:

1. Dalam hal permohonan Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif, maka permohonan kode perdagangan tersebut menjadi batal.
2. BEI akan mencatatkan efek Perseroan di Papan Pengembangan apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan BEI dipenuhi.

Dalam hal ini, Perseroan akan senantiasa memenuhi seluruh ketentuan BEI yang berlaku terkait pencatatan saham pada Papan Pengembangan, termasuk ketentuan mengenai pemenuhan saham free float sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setiap pihak Afiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Henan Putihrai Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
RINGKASAN xvii
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 10
III. PERNYATAAN UTANG 16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 40
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 46
VI. FAKTOR RISIKO 63
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 68
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 69
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 69
1. Riwayat Singkat Perseroan 69
2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan 73
3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 74
4. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 74
5. Perizinan Perseroan 78
6. Perjanjian – Perjanjian Penting 79
7. Keterangan Tentang Aset 99
8. Asuransi 101
9. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan 110
10. Informasi Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan 111
11. Pengurusan Dan Pengawasan 116
12. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) 122
13. Upaya Pengelolaan Risiko 127
14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility - CSR) 129
15. Struktur Organisasi Perseroan 131
16. Sumber Daya Manusia 132
17. Perkara Yang Dihadapi Perseroan Serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan 135
B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 135
1. Umum 135
2. Visi dan Misi Perseroan 135
3. Kegiatan Usaha Perseroan 136
4. Keunggulan Kompetitif 137
5. Kecenderungan Usaha 137
6. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 138
7. Persaingan 139
8. Strategi Usaha 139
9. Prospek Usaha 140
10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan 145
11. Kebijakan Riset dan Pengembangan 145
12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Pemerintah, Pemasok, dan Pelanggan 145
IX. EKUITAS 146
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 148
XI. PERPAJAKAN 149
XII. PENJAMIN EMISI EFEK 152
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 154
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 157
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 163
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 170
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 171
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 172

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"Afiliasi" : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Akuntan Publik" **:** Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Anggaran Dasar" **:** Berarti anggaran dasar Perseroan sebagaimana pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

		No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tahun 2014, Tambahan No. 49184 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 308 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0072377.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227937 tanggal 10 Agustus 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0197245.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026.
"Anggota Bursa"	:	Berarti perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
"Biro Administrasi Efek atau BAE"	:	Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
"Bank Kustodian"	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam dan LK"	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UUP2SK.
"BEI atau Bursa Efek"	:	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, di mana seluruh saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham"	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di

		KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	:	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
"Efek"	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"Efektif/Pernyataan Efektif"	:	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 45/2024, yaitu: Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - Pada Hari Kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau - Pada Hari Kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
"Harga Penawaran"	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham. Untuk kepentingan Pernyataan Pendaftaran ke OJK, rentang Harga Penawaran sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189,- (seratus delapan puluh sembilan Rupiah).
"Hari Bursa"	:	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"Kemenkum"	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama

		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	:	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti PT Henan Putihrai Sekuritas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK Nomor 25/2025.
"Masa Penawaran Umum"	:	Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan, yang dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham. Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu selama 4 (empat) Hari Bursa, terhitung sejak tanggal 24 November 2026 sampai dengan tanggal 27 November 2026.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkum"	:	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal" atau "*Single Investor Identification*" yang selanjutnya disingkat "SID"	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

"OJK atau Otoritas Jasa Keuangan"	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"Papan Pengembangan"	:	Berarti papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang. Perusahaan Tercatat dapat tetap tercatat di Bursa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Bab V Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 7 Oktober 2026.
"Partisipan Admin"	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas.
"Partisipan Sistem"	:	Berarti perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	:	Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK. Dalam hal ini, Pemegang Saham Utama dari Perseroan adalah Billy Theristine Lim, PT Bumi Artha Caraka, dan PT Arkara Danatama Nusantara.
"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemilik Manfaat Terakhir atau *Ultimate Beneficial Owner*"	:	Berarti setiap Pihak yang berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Efek. Hak dan/atau penerimaan manfaat tersebut dapat diperoleh baik langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian, atau melalui hubungan atau cara apapun. Dalam hal ini, Pemilik Manfaat Terakhir atau *Ultimate Beneficial Owner* dari Perseroan adalah Billy Theristine Lim.
"Penawaran Awal"	:	Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No.

IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.

"Penawaran Umum Perdana Saham"	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
"Penjatahan Pasti"	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
"Penjatahan Terpusat"	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Penjatahan Terpusat Ritel"	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas.
"Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Peraturan No.IX.A.2"	:	Berarti Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45/2024.
"Peraturan No.IX.A.7"	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum,
"Peraturan No.IX.J.1"	:	Berarti Peraturan No.IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
"Peraturan OJK No.3/2021"	:	Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana

		dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 45/2024 dan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Utang dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
"Peraturan OJK No.7/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No.8/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No.13/2025"	:	Berarti Peraturan OJK No.13/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
"Peraturan OJK No.14/2025"	:	Berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No.17/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No.23/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No.25/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No.33/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
"Peraturan OJK No.34/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
"Peraturan OJK No.35/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.40/2025"	:	Berarti Peraturan OJK No.40/POJK.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No.41/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

"Peraturan OJK No.42/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan OJK No.45/2024"	:	Berarti Peraturan OJK No.45/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.55/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No.56/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-030/SHM/KSEI/0826 tanggal 2 September 2026 yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 106 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 48 tanggal 8 Oktober 2026, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 108 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 50 tanggal 8 Oktober 2026, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 105 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 243 tanggal 28 Oktober 2026, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW"	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 107 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk, dibuat oleh Perseroan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017.

"Perpres No. 13/2018"	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Perseroan"	:	Berarti PT Andalan Artha Primanusa Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek"	:	Berarti Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-12796/BEI.PP3/10-2026 tertanggal 7 Oktober 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk.
"Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas"	:	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.
"Perusahaan Efek"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Prospektus"	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.
"Prospektus Awal"	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	:	Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
"PPh"	:	Berarti Pajak Penghasilan
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum"	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
"RKAB"	:	Berarti adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
"Rupiah (Rp)"	:	Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
"RUPS"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
"RUPSLB"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham Baru"		Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham yang Ditawarkan"	:	Berarti Saham Baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama atau sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"SEOJK No. 25/2025"	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 25/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
"Sub Rekening Efek"	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti Tanggal Pembayaran atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi.

"Tanggal Pencatatan"	:	Berarti Tanggal Pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
"UU Ketenagakerjaan"	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UU OJK"	:	Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUP2SK"	:	Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"Waran"	:	Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

ISTILAH TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Cadangan Terbukti (*proven*)	:	Bagian dari Sumber Daya Terukur (*Measured Resources*) yang dapat ditambang secara ekonomis, setelah mempertimbangkan seluruh faktor pengubah (*modifying factors*), termasuk aspek teknis, ekonomi, hukum, lingkungan, sosial, dan pemerintah, serta telah didukung oleh tingkat keyakinan geologi yang tinggi.
Cadangan Terkira (*probable*)	:	Bagian dari Sumber Daya Tertunjuk (*Indicated Resources*), dan dalam kondisi tertentu dapat berasal dari Sumber Daya Terukur, yang dapat ditambang secara ekonomis setelah mempertimbangkan seluruh faktor pengubah, dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan Cadangan Terbukti.
Hauling	:	Kegiatan pengangkutan material tambang (antara lain bijih nikel atau batubara) dari lokasi penambangan ke lokasi tujuan yang ditetapkan dalam rencana tambang atau kontrak kerja, melalui jalur angkut (*hauling road*) menggunakan alat angkut darat. Volume pekerjaan umumnya diukur dalam satuan metrik ton (MT) atau *wet metric ton* (WMT) sesuai ketentuan kontrak.
Overburden Removal	:	Kegiatan pengupasan dan pemindahan material penutup (*overburden*), berupa tanah dan/atau batuan yang tidak mengandung bahan tambang ekonomis, untuk membuka akses terhadap lapisan bijih atau batubara yang akan ditambang. Volume pekerjaan umumnya diukur dalam satuan *bank cubic meter* (BCM).
Coal Winning	:	Kegiatan penambangan dan pengambilan batubara dari seam/lapisan batubara yang telah tersingkap, termasuk proses pemuatan (*loading*) ke alat angkut untuk dipindahkan ke ROM stockpile atau fasilitas pengolahan.
Overburden Overdistance	:	Pekerjaan pengangkutan material penutup (*overburden*) yang melebihi jarak dasar (*base hauling distance*) sebagaimana ditetapkan dalam kontrak atau perencanaan tambang. Volume pekerjaan dihitung berdasarkan tambahan jarak angkut aktual di atas jarak standar yang disepakati.
Coal Winning Overdistance	:	Pekerjaan pengangkutan batubara hasil coal winning yang melebihi jarak angkut dasar (*base hauling distance*) sesuai ketentuan kontrak atau rencana tambang. Tambahan biaya dihitung berdasarkan selisih jarak aktual terhadap jarak standar.
Rise and Fall	:	Penyesuaian harga atau tarif jasa yang disebabkan oleh perubahan faktor biaya utama, seperti harga bahan bakar, inflasi, nilai tukar, atau komponen biaya lainnya sesuai dengan formula eskalasi yang disepakati dalam kontrak.
Mud Removal	:	Pekerjaan pengangkatan dan pembersihan material lumpur (*mud/slurry*) di area tambang, seperti di pit, sump, haul road, atau disposal area, guna menjaga keselamatan operasional dan kelancaran kegiatan produksi.

Ore Mining	:	Kegiatan penambangan bijih nikel yang mencakup penggalian dan pemuatan bijih dari area penambangan untuk selanjutnya diangkut ke lokasi yang ditentukan sesuai rencana tambang atau kontrak kerja.
Limonite	:	Bijih nikel berkadar rendah (sekitar <1,6%) yang dapat diproses menggunakan teknologi HPAL untuk menghasilkan mixed nickel cobalt hydroxide precipitate (MHP), sebagai bahan baku baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik.
Saprolite	:	Bijih nikel berkadar tinggi (sekitar >1,6%) yang dapat diproses menggunakan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk turunan nikel, seperti nickel-in-matte, nickel pig iron, dan ferronickel, yang merupakan bahan baku dalam produksi baja anti karat (*stainless steel*).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“APE”	:	PT Arkara Prathama Energy
“BBA”	:	PT Bukit Bara Alam
“BGG”	:	PT Budi Gema Gempita
“IBP”	:	PT Intan Bumi Persada
“POS”	:	PT Position
“PTRO”	:	PT Petrosea Tbk
“SBS”	:	PT Satria Bahana Sarana

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Mengenai Perseroan

PT Andalan Artha Primanusa Tbk (dahulu didirikan dengan nama PT Nusa Karya Realti, selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang pada saat didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tahun 2014, Tambahan No. 49184 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No.15/2020 dan (iv) Peraturan OJK No. 14/2025 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 308 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU- 0072377.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227937 tanggal 10 Agustus 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0197245.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026 ("**Akta No. 308/2026**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Saat ini, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam Akta No. 308/2026 adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);
b. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210);
c. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42992);
d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
e. Aktivitas Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905); dan
f. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203)

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan (secara riil) adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Prospek Usaha

Prospek usaha jasa kontraktor pertambangan batu bara di Indonesia pada tahun 2026–2027 diperkirakan tetap menunjukkan peluang yang menarik, meskipun dihadapkan pada dinamika harga komoditas dan penyesuaian

kebijakan produksi nasional, kebutuhan terhadap jasa kontraktor yang efisien, adaptif, dan berpengalaman tetap menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan operasional para pemilik tambang.

Permintaan batu bara global masih relatif terjaga, terutama dari negara-negara dengan kebutuhan energi berbasis pembangkit listrik tenaga uap seperti China dan India. Berdasarkan berbagai publikasi lembaga internasional seperti International Energy Agency, konsumsi batu bara di kawasan Asia diperkirakan tetap menjadi penopang utama permintaan global dalam jangka menengah.

Selain itu, Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen nikel utama dunia dan memegang peran strategis dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global. Permintaan nikel dalam jangka menengah didorong oleh pengembangan industri hilirisasi, pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, serta agenda transisi energi global.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham baru
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Rentang Harga Penawaran	:	Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189,- (seratus delapan puluh sembilan Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar-besarnya Rp316.764.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 7 (tujuh) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I, atau setara dengan sebesar 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebesar-besarnya Rp166.403.155.000,- (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	24 – 27 November 2026
Tanggal Pencatatan di BEI	:	1 Desember 2026

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama

dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Sekitar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) atau sebesar Rp107.010.219.050,00 (seratus tujuh miliar sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

    a. Sekitar 21,26% (dua puluh satu koma dua puluh enam persen) atau sebesar Rp65.007.271.055,00 (enam puluh lima miliar tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas seluruh sisa pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk; dan
    b. Sekitar 13,74% (tiga belas koma tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp42.002.947.995,00 (empat puluh dua miliar dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Sisanya sekitar 65,00% (enam puluh lima koma nol nol persen) akan digunakan untuk Modal Kerja Operasional Perseroan, meliputi pembelian suku cadang (*spare parts*) alat berat, pelumas (*lubricants*), ban (*tires*) untuk truk dan alat berat, serta bahan bakar (*fuel*) dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO), serta pembiayaan upah, tunjangan, dan fasilitas penunjang tenaga kerja operasional langsung di lapangan.

Kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dengan urutan skala prioritas sumber pendanaan sebagai berikut:
1. Porsi Modal Kerja dari Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana Saham (sekitar 65,00%);
2. Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I (dalam hal Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang waran); dan
3. Sisa kekurangan kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dari arus kas internal hasil operasional Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh para pemegang waran, akan dialokasikan seluruhnya untuk penambahan modal kerja operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan bakar (*fuel*), pembelian suku cadang (*spare parts*), pelumas (*lubricants*), dan ban (*tires*) untuk truk dan alat berat, serta pembiayaan operasional penunjang di lapangan.

Dalam hal hasil bersih Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase alokasi yang tercantum dalam Prospektus ini, dan kekurangannya akan dibiayai menggunakan arus kas internal Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0014619.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068536 tanggal 3 Maret 2026 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.09-0115371 tanggal 3 Maret 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0046849.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026 ("**Akta No. 21/2026**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0148196 tanggal 4 Maret 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 ("**Akta No. 23/2026**"). yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**		**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%	1.500.000.000	15.000.000.000	22,47%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%	500.000.000	5.000.000.000	7,49%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%	250.000.000	2.500.000.000	3,75%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%	250.000.000	2.500.000.000	3,75%
Masyarakat	-	-	-	1.676.000.000	16.760.000.000	25,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**	**6.676.000.000**	**66.760.000.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**		**13.324.000.000**	**133.240.000.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**		**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	22,47%	1.500.000.000	15.000.000.000	21,69%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,08%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,08%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	7,49%	500.000.000	5.000.000.000	7,23%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	3,75%	250.000.000	2.500.000.000	3,61%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	3,75%	250.000.000	2.500.000.000	3,61%
Masyarakat	1.676.000.000	16.760.000.000	25,10%	1.676.000.000	16.760.000.000	24,24%
Waran Seri I	-	-	-	239.429.000	2.394.290.000	3,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**6.676.000.000**	**66.760.000.000**	**100,00%**	**6.915.429.000**	**69.154.290.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**13.324.000.000**	**133.240.000.000**		**13.084.571.000**	**130.845.710.000**	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen dalam laporannya pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan nomor 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 yang ditandatangani oleh Damajanti Tanumihardja, CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 2103) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dengan laporan auditor independen yang diterbitkan kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dengan nomor 00119/2.0829/AU.1/05/0671-3/1/V/2026 yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA., CPI., CFI., CLI., ACPACC., SH. (Registrasi Akuntan Publik No. 0671) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Aset Lancar	238.068.002.588	173.203.511.535	184.724.376.884	138.199.613.277
Aset Tidak Lancar	618.643.134.983	547.690.085.336	645.354.699.165	426.503.166.858
Total Aset	856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135
Liabilitas Jangka Pendek	338.233.235.095	433.415.519.144	414.781.834.753	265.248.137.556
Liabilitas Jangka Panjang	282.195.342.336	103.006.871.399	235.856.381.049	126.940.745.104
Total Liabilitas	620.428.577.431	536.422.390.543	650.638.215.802	392.188.882.660
Total Ekuitas	236.282.560.140	184.471.206.328	179.440.860.247	172.513.897.475

Ringkasan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Pendapatan Neto	200.115.618.505	219.150.940.820	368.823.532.926	415.427.104.287	517.030.479.808
Laba Bruto	51.809.775.461	43.177.267.965	74.625.900.411	68.563.918.939	154.030.215.803
Laba Neto Tahun Berjalan	11.772.627.765	3.261.221.025	5.142.241.704	1.206.933.408	66.854.228.298
Penghasilan (beban) komprehensif lain	538.726.047	-	(111.895.623)	220.029.364	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	12.311.353.812	3.261.221.025	5.030.346.081	1.426.962.772	66.854.228.298
Laba per saham	2,84	3,11	4,79	1,36	133,71

**tidak diaudit*

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	-8,69%	59,37%	-11,22%	-19,65%	64,58%
Laba (Rugi) Bruto	19,99%	-1020,71%	8,84%	-55,49%	94,83%
Laba Bersih (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	260,99%	109,75%	326,06%	-98,19%	66,89%
Jumlah Aset	18,84%	-5,93%	-13,15%	46,99%	31,92%
Jumlah Liabilitas	15,66%	-10,02%	-17,55%	65,90%	22,27%
Ekuitas	28,09%	8,90%	2,80%	4,02%	60,80%
Rasio Keuangan (x)					
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	0,70	0,52	0,40	0,45	0,52
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	1,38	1,33	1,34	1,28	1,44
Jumlah Liabilitas / Ekuitas (*Debt to Equity*)	2,63	3,00	2,91	3,63	2,27
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (*Debt to Asset*)	0,72	0,75	0,74	0,78	0,69

Interest Bearing Debt to Equity Ratio	2,04	2,35	1,98	2,18	1,48
*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)***	0,86	0,83	0,54	0,62	1,09
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,69	1,16	1,17	1,05	3,62
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor / Pendapatan (*Gross Profit Margin*)	25,89%	19,70%	20,23%	16,50%	29,79%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)	5,88%	1,49%	1,39%	0,29%	12,93%
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	9,96%	3,34%	2,79%	0,67%	38,75%
Laba Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	2,75%	0,84%	0,71%	0,15%	11,84%

**tidak diaudit*

***EBITDA yang digunakan dalam hitungan Debt Service Coverage Ratio merupakan laba rugi yang telah disetahunkan*

Rasio yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit

Perseroan belum memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian kredit. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut:

Kreditur	Rasio yang dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Nilai pemenuhan 30 Juni 2026	Status Pemenuhan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*Current Ratio (CR) minimal 1,0* [5]	1,00	0,70	Akan Dievaluasi per 31 Des 2026
	Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,20 [3]	2,20	2,04	
	Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% [1]	100%	86%	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Debt to Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 300%* [3]	300%	204%	Akan Dievaluasi per 31 Des 2026
	Interest Coverage Ratio (ICR) minimal sebesar 150% [2]	150%	169%	
	Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,1x [1]	1,10	0,86	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Debt Service Coverage (DSC) ≥ 1,25* [1]	1,25	0,86	Belum Terpenuhi, *waiver* telah diterima
	Debt to EBITDA ≤ 2,00 [4]	2,00	2,69	
	Debt to Equity Ratio ≤ 2,00 [3]	2,00	2,04	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Interest Coverage Ratio (ICR) minimal 150%* [2]	150%	169%	Akan Dievaluasi per 31 Des 2026
	Debt to Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 400% [3]	400%	204%	

	Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,1x [(1)]	1,10	0,86	
PT Bank Central Asia Tbk	*Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,00x* [(1)]	1,00	0,86	Akan Dievaluasi per 31 Des 2026
	Current Ratio (CR) minimal 1,00 [(5)]	1,00	0,70	
	Debt to Equity Ratio ≤ 3,00 [(3)]	3,00	2,04	

Keterangan:

(1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dihitung Dengan EBITDA Dibagi Dengan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Dan Beban Keuangan Tahun Berjalan.

(2) Interest Coverage Ratio Dihitung Dari EBIT Dibagi Dengan Beban Keuangan Tahun Berjalan.

(3) Debt To Equity Ratio Dihitung Dari Total Utang yang Berbunga Perseroan Dibandingkan Dengan Nilai Total Ekuitas Perseroan.

(4) Debt To EBITDA Dihitung Dari Total Utang yang Berbunga Perseroan Dibagi Dengan EBITDA.

(5) Current Ratio Dihitung dari Aset lancar Dibagi Dengan Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan belum memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan surat *waiver* atas batasan-batasan tertentu pada perjanjian pinjaman bank sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan yaitu Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Bank	No. Surat	Tanggal
PT Bank Central Asia Tbk	No. 00397/SLK/2026	25 Mei 2026
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	No. 130/AAP-BRI/EXT/II/26 No. 270/AAP-BRI/EXT/V/26 No. 308/AAP-BRI/EXT/VII/26	24 Februari 2026 29 Mei 2026 29 Juni 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	No. CMB.CM6/MNE.125/SPPK/2026 No. CMB.CM6/MNE.429/SPPK/2026	10 April 2026 7 Oktober 2026

Khusus untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, batasan-batasan tertentu (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit baru wajib dipenuhi dan dievaluasi berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2026. Per 30 Juni 2026 tidak terdapat pelanggaran kovenan yang mensyaratkan adanya surat persetujuan (*waiver*).

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

RISIKO USAHA

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Terhadap Pemberi Kerja Utama

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Pengurangan Volume Produksi Akibat Penyesuaian RKAB Pemberi Kerja
2. Risiko Cuaca dan Bencana Alam
3. Risiko Gangguan Operasional atau Kerusakan Alat Berat
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Biaya Operasional

6. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Tunai
7. Risiko Fluktuasi Harga Komoditas
8. Risiko Persaingan Usaha
9. Risiko Tidak Diperpanjangnya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko Umum Yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Aturan Pemerintah
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro dan Global

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dan Ekonomi yang Dapat Mempengaruhi Permintaan dan Likuiditas Saham Perseroan
2. Risiko Perubahan Rencana Penggunaan Dana dan Tidak Terealisasinya Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
4. Risiko Performa Keuangan yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh koma nol nol persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, kinerja usaha Perseroan serta rencana pengembangan atau ekspansi oleh Perseroan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Adapun besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam hal pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (jika ada).

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama atau sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran awal sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189,- (seratus delapan puluh sembilan Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar-besarnya Rp316.764.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I, atau setara dengan sebesar 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 7 (tujuh) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I berjumlah sebesar-besarnya Rp166.403.155.000,- (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan, mulai dari tanggal 1 Juni 2027 sampai dengan tanggal 1 Desember 2028. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan UUPT dan UUPM.

ANDALAN

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kantor Pusat:
JL. Plaju No.11, Kebon Melati,
Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230
Telepon: 021-66691319

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com
Situs web: www.andalan-nusantara.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMBERI KERJA UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21/2026 *juncto* Akta No. 23/2026**,** yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM BARU

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**		**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%	1.500.000.000	15.000.000.000	22,47%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%	500.000.000	5.000.000.000	7,49%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%	250.000.000	2.500.000.000	3,75%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%	250.000.000	2.500.000.000	3,75%
Masyarakat	-	-	-	1.676.000.000	16.760.000.000	25,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**	**6.676.000.000**	**66.760.000.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**		**13.324.000.000**	**133.240.000.000**	

PENERBITAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I, atau setara dengan sebesar 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 7 (tujuh) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 107 tanggal 24 Agustus 2026 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I berjumlah sebesar-besarnya Rp166.403.155.000,- (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan, mulai dari tanggal 1 Juni 2027 sampai dengan tanggal 1 Desember 2028. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I**			**Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I**		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			**Nilai Nominal Rp10,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**		**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	22,47%	1.500.000.000	15.000.000.000	21,69%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,08%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	18,72%	1.250.000.000	12.500.000.000	18,08%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	7,49%	500.000.000	5.000.000.000	7,23%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	3,75%	250.000.000	2.500.000.000	3,61%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	3,75%	250.000.000	2.500.000.000	3,61%
Masyarakat	1.676.000.000	16.760.000.000	25,10%	1.676.000.000	16.760.000.000	24.24%
Waran Seri I	-	-	-	239.429.000	2.394.290.000	3,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**6.676.000.000**	**66.760.000.000**	**100,00%**	**6.915.429.000**	**69.154.290.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**13.324.000.000**	**133.240.000.000**		**13.084.571.000**	**130.845.710.000**	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1. **Hak Atas Waran Seri I**
   a. Setiap pemegang saham yang memiliki 7 (tujuh) Saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi

Efek pada Tanggal Penjatahan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Emiten, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Emiten, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Emiten di kemudian hari.

2. **Bentuk dan Denominasi**

Waran Seri I diterbitkan seluruhnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan dicatatkan secara elektronik dalam sistem penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kepemilikan Waran Seri I dibuktikan dengan pencatatan dalam rekening efek pemegang Waran Seri I pada KSEI. Emiten tidak menerbitkan dan tidak akan menerbitkan bukti kepemilikan Waran Seri I dalam bentuk fisik.

Setelah lewatnya Jangka Waktu Pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Emiten dan Emiten tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Emiten dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

3. **Hak Untuk Membeli Saham Perseroan**

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Waran Seri I dan seluruhnya tunduk pada mekanisme dan pencatatan dalam sistem penitipan kolektif KSEI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4. **Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran berarti setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2027 sampai dengan tanggal 1 Desember 2028.

5. **Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
b. Pelaksanaan waran dilakukan secara elektronik melalui sistem KSEI melalui perusahaan efek atau bank kustodian tempat Pemegang Waran Seri I membuka rekening efek;
c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I, wajib menyerahkan instruksi Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I wajib menyampaikan instruksi pelaksanaan melalui

sistem KSEI serta melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan secara *in good funds* ke rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konfirmasi penerimaan instruksi pelaksanaan dan pembayaran Harga Pelaksanaan dilakukan secara elektronik melalui sistem KSEI dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I;

d. Instruksi pelaksanaan Waran Seri I yang telah disampaikan melalui sistem KSEI tidak dapat ditarik kembali setelah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem KSEI;

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyampaikan instruksi pelaksanaan melalui sistem KSEI dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat melaksanakan Waran Seri I tersebut menjadi Saham;

f. Setelah instruksi pelaksanaan dan pembayaran Harga Pelaksanaan diterima dan diverifikasi dalam sistem KSEI, maka: (i) Waran Seri I akan didebet dari Rekening Efek Pemegang Waran Seri I; dan (ii) Saham Hasil Pelaksanaan akan dikreditkan ke Rekening Efek Pemegang Waran Seri I melalui sistem KSEI. Pelaksanaan Waran Seri I dianggap sah dan mengikat setelah tercatat dalam sistem KSEI;

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, pelaksanaan dilakukan berdasarkan jumlah Waran Seri I yang tercatat dalam rekening efek Pemegang Waran Seri I tanpa memerlukan pemecahan sertifikat atau dokumen fisik;

h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;

i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;

j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Emiten wajib segera memberitahukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai penyesuaian tersebut beserta fakta yang mendasarinya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa yang menyebabkan penyesuaian, dan penyesuaian tersebut berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; dan

l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Emiten.

6. **Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \text{ x A}$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \text{ x B}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

7. **Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Saham Waran Seri I;

b. Pengalihan Waran Seri I dilakukan melalui: (i) perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau (ii) pemindahbukuan secara elektronik dalam sistem penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan ketentuan

KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Pengalihan tersebut tidak memerlukan penggunaan formulir pengalihan maupun penyerahan dokumen fisik;

c. Dalam hal pengalihan Waran Seri I terjadi karena hibah, pewarisan, atau sebab hukum lainnya, pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I wajib melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam sistem KSEI, termasuk melalui perusahaan efek atau bank kustodian, dengan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku dalam sistem tersebut.;

d. Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Emiten tidak melakukan verifikasi atau persetujuan secara manual atas pengalihan Waran Seri I, dan pencatatan kepemilikan Waran Seri I sepenuhnya dilakukan berdasarkan data dalam sistem KSEI;

e. Karena Waran Seri I diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless), tidak terdapat penerbitan kembali ataupun penggantian dokumen fisik sehubungan dengan pengalihan Waran Seri I;

f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I dimiliki secara bersama-sama oleh lebih dari satu pihak, para pihak tersebut wajib menunjuk satu pihak sebagai wakil dalam Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI, dan hanya pihak yang tercatat dalam sistem KSEI yang akan dianggap sebagai pemegang Waran Seri I yang sah dan berhak untuk melaksanakan hak-haknya;

g. Pengalihan hak atas Waran Seri I dianggap sah, mengikat, dan mempunyai akibat hukum setelah tercatat dalam sistem penitipan kolektif KSEI;

h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;

i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan KSEI.

8. **Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Lantai 2
Jakarta 10120
Telp.: (021) 350 8077
Email: deone@datindo.com

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

9. **Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dari saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

10. **Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

b. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Emiten sebagai perusahaan penerus), maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila Emiten akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Emiten.

11. **Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk secara khusus Peraturan Pasar Modal, Emiten dapat mengubah penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan (kecuali sehubungan dengan formula perhitungan penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan pada huruf G lampiran ini) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;

b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

12. **Jumlah Waran yang Masih Beredar**

Tidak terdapat jumlah Waran yang masih beredar.

13. **Ketentuan Material dari Waran**

Tidak terdapat ketentuan material lainnya dari Waran.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, termasuk seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan sebelumnya, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk. No. S-12796/BEI.PP3/10-2026 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 7 Oktober 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama atau sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 6.676.000.000 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham, sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya apabila Waran Seri I telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham

baru adalah sebanyak-banyaknya 6.915.429.000 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 26 Agustus 2026, Billy Theristine Lim sebagai Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan menjadi efektif.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (*TREASURY STOCK*).

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) atau sebesar Rp107.010.219.050,00 (seratus tujuh miliar sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Sekitar 21,26% (dua puluh satu koma dua enam persen) akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas seluruh sisa pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman (Kreditur)	PT Radana Bhaskara Finance Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Kreditur
Nomor dan Tanggal Perjanjian	• Fasilitas 1: Akta Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. 94 dan No. 95 tanggal 22 April 2025 (Notaris Benhard Sihite, S.H.) • Fasilitas 2: (i) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010505 tanggal 13 Agustus 2025; (ii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010494 tanggal 13 Agustus 2025; (iii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010504 tanggal 13 Agustus 2025; (iv) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010499 tanggal 13 Agustus 2025; (v) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010502 tanggal 13 Agustus 2025; (vi) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010493 tanggal 13 Agustus 2025; dan (vii) Akta Perjanjian Jual dan Sewa Balik (*Sale & Lease Back*) No. 73 tanggal 12 Agustus 2025. • Fasilitas 3: (i) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000538 tanggal 27 Maret 2026; (ii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000539 tanggal 27 Maret 2026; (iii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000534 tanggal 27 Maret 2026; dan (iv) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000512 tanggal 27 Maret 2026. • Fasilitas 4: Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000521 tanggal 27 Maret 2026; Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000530 tanggal 27 Maret 2026; dan Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000522 tanggal 27 Maret 2026
Nilai Fasilitas Pinjaman	Fasilitas 1: Rp35.874.090.000 Fasilitas 2: Rp40.479.722.000 Fasilitas 3: Rp13.716.901.671 Fasilitas 4: Rp11.283.102.327 Rp101.353.815.998 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)
Saldo Utang per 30 November 2026	Fasilitas 1: Rp22.648.149.006 Fasilitas 2: Rp25.633.432.445

	Fasilitas 3: Rp8.934.033.306 Fasilitas 4: Rp7.791.656.298 Rp65.007.271.055 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)	
Nilai Pinjaman yang Akan Dilunasi	Rp65.007.271.055 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)	
Saldo Utang Setelah Pelunasan Lebih Awal	Rp0 (seluruh fasilitas dibayar penuh / lunas)	
Tingkat Bunga per Tahun & Jatuh Tempo	• Fasilitas 1: Bunga 11,4% p.a. (efektif) dan Jatuh Tempo 24 Maret 2029 • Fasilitas 2: Bunga 14% p.a. (efektif) dan Jatuh Tempo 20 Agustus 2028 • Fasilitas 3: Bunga 7,47% p.a. (flat) / setara 15,00% p.a. (efektif) dan Jatuh Tempo 29 Februari 2028 • Fasilitas 4: Bunga 7,47% p.a. (flat) / setara 15,00% p.a. (efektif) dan Jatuh Tempo 6 Maret 2028	
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Sewa Pembiayaan dan Modal Kerja (*Sale & Leaseback*)	
Target Waktu & Prosedur Pelunasan	Pelunasan direncanakan pada bulan Desember 2026. Biaya denda pelunasan dipercepat sebesar 5% dari nilai pembiayaan yang masih terhutang (berlaku untuk seluruh fasilitas kecuali Fasilitas 2) akan ditanggung sepenuhnya oleh kas internal Perseroan.	
Alasan Pelunasan Lebih Awal atas Seluruh Pinjaman	Pembayaran tersebut bertujuan untuk menurunkan beban bunga, memperbaiki rasio keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas arus kas operasional Perseroan.	
Jaminan Fasilitas Kredit	Sehubungan dengan jaminan yang diberikan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Radana, untuk masing-masing fasilitas *leasing*, jaminan yang diberikan adalah barang yang dibiayai berdasarkan fasilitas *leasing* tersebut. Adapun rincian barang yang dijaminkan adalah sebagai berikut:	
	• Fasilitas 1:	2 (dua) unit Bulldozer
	• Fasilitas 2:	4 (empat) unit Excavator 6 (enam) unit Rigid Dump Truck (RDT) 5 (lima) unit Dump Truck (DT) 1 (satu) unit Bulldozer 1 (satu) unit Motor Grader
	• Fasilitas 3:	2 (dua) unit Excavator 4 (empat) unit Articulated Dump Truck (ADT) 4 (empat) unit Rigid Dump Truck (RDT)
	• Fasilitas 4:	4 (empat) unit Articulated Dump Truck (ADT) 9 (sembilan) unit Dump Truck (DT)
	Dalam hal seluruh kewajiban berdasarkan fasilitas *leasing* terkait telah dilunasi sepenuhnya, jaminan atas barang yang dibiayai berdasarkan fasilitas *leasing* tersebut akan berakhir dan dilepaskan seluruhnya.	

b. Sekitar 13,74% (tiga belas koma tujuh empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Pemberi pinjaman (Kreditur)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Kreditur
Nomor dan Tanggal Perjanjian	Akta No. 41 Perjanjian Kredit Investasi 2 No. WCO.KP/2752/KI/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum tanggal 9 Juli 2026 *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CMB.CM6/MNE.360/SPPK/2026 tanggal 24 Agustus 2026
Nilai Fasilitas Pinjaman	Rp203.000.000.000
Saldo Utang per 30 November 2026	Rp127.770.582.517
Nilai Pinjaman yang Akan Dibayar	Rp42.002.947.995
Saldo Utang Setelah Dibayar Sebagian	Rp85.767.634.522
Tingkat Bunga per Tahun	9,5% per tahun
Jatuh Tempo	11 Oktober 2028
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pembiayaan pembelian alat berat baru untuk *bouwheer* yang diaksep yaitu PT Budi Gema Gempita.
Target Waktu & Prosedur Pembayaran	Pembayaran sebagian pokok pinjaman direncanakan pada bulan Desember 2026. Denda pembayaran dipercepat sebesar 5% (lima persen) dari baki debet akan dibayarkan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan.
Alasan Percepatan Pembayaran Sebagian Pokok Pinjaman	Pembayaran tersebut bertujuan untuk menurunkan beban bunga, memperbaiki rasio keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas arus kas operasional Perseroan.
Jaminan Fasilitas Kredit	a. Mesin-mesin (alat berat) atas nama Perseroan berupa Main Equipments, Road Maintenance Equipments dan Support Equipments yang merupakan objek yang dibiayai oleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini; b. Mesin-mesin (alat berat) atas nama Perseroan berupa Off Highway Truck CAT 773, Dump Truck HINO FM280JD, dan Excavator PC200-10MO; c. Penjaminan Pribadi atas nama Billy Theristine Lim; d. Penjaminan Pribadi atas nama Tony Law; e. Penjaminan Pribadi atas nama Willy Christine; f. Jaminan Perusahaan dan Cash Deficit Guarantee dari PT Arkara Prathama Energi; g. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Billy Theristine Lim; h. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Ivan Victor; i. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Freddy Hartono; dan j. Gadai saham dari PT Arkara Prathama Energi yang dimiliki oleh Ivan Victor. Jaminan akan dilepaskan apabila seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian fasilitas yang bersangkutan telah dilunasi secara penuh. Namun demikian, mekanisme pelepasan jaminan sehubungan dengan pelunasan sebagian fasilitas Bank Mandiri dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan mengikuti kebijakan dan prosedur internal Bank Mandiri.

2. Sisanya sekitar 65,00% (enam puluh lima koma nol nol persen) akan digunakan untuk Modal Kerja Operasional Perseroan, dengan rincian alokasi dari total dana hasil Penawaran Umum sebagai berikut:
   a. Sekitar 20,14% untuk pembelian bahan bakar (*fuel*) armada dan alat berat secara lunas melalui mekanisme *Purchase Order* (PO) kepada pemasok pihak ketiga (non-afiliasi), seperti PT Pertamina Patra Niaga, PT Twin Berkah Energi, PT Sumber Karya Anugerah dan PT Indo Lautan Energi, untuk periode Desember 2026 sampai dengan Mei 2027.
   b. Sekitar 30,98% untuk pembiayaan upah, tunjangan, dan fasilitas tenaga kerja operasional langsung di lapangan (operator alat berat, mekanik, dan kru pendukung) yang merupakan karyawan tetap Perseroan, untuk periode bulan Desember 2026 sampai dengan April 2027. Pembiayaan ini berkaitan dengan penambahan tenaga kerja guna mendukung operasional site yang sudah ada (existing), yaitu proyek PT Petrosea Tbk - Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) karyawan, PT Budi Gema Gempita - Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) karyawan, PT Position - Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara sebanyak 212 (dua ratus dua belas) karyawan, dan PT Satria Bahana Sarana - Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) karyawan, serta untuk ekspansi operasional site baru, yaitu proyek PT Intan Bumi Persada - Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 81 (delapan puluh satu) karyawan, PT Bukit Bara Alam - Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karyawan, dan PT Arkara Prathama Energi - Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 21 (dua puluh satu) karyawan. Perseroan tidak memiliki tunggakan atas kewajiban gaji/upah karyawan.
   c. Sekitar 13,88% untuk pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance & repair*), meliputi pengadaan suku cadang (*spare parts*), pelumas (*lubricants*), dan ban (*tires*) untuk truk dan alat berat, untuk periode Desember 2026 sampai dengan Mei 2027. Pengadaan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme *Purchase Order* (PO) kepada distributor resmi pihak ketiga (non-afiliasi) berdasarkan permohonan kebutuhan aktual setelah diterimanya dana hasil Penawaran Umum. Meskipun penerbitan PO dilakukan secara *on-demand*, Perseroan telah menyusun perencanaan pengadaan secara terukur dan terperinci, termasuk estimasi volume kebutuhan dan target distribusi untuk periode tersebut. Adapun estimasi waktu penerimaan suku cadang, pelumas, dan ban adalah sekitar 11 hari kerja sejak tanggal penerbitan PO, sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang berlaku.

Kategori	Jumlah	Distributor*
Suku Cadang (*spare parts*) Contoh: Hitachi (Secondary Fuel Filter), Caterpillar (Steering Oil Filter), Volvo (Air Cleaner Outer)	±5.798 unit	PT United Tractors Tbk, PT Trakindo Utama, PT Kobexindo Tractors Tbk, PT Hexindo Adiperkasa Tbk, PT Indotruck Utama, PT Sany Perkasa, dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment
Pelumas (*lubricants*)	±150.840 liter pelumas	PT Prima Karya Nusa
Ban (*tires*) untuk Truk dan Alat Berat	±199 unit	PT Trakindo Utama, PT Kobexindo Tractors Tbk, PT Hexindo Adiperkasa Tbk, PT Sany Indonesia Heavy Equipment, dan PT Abuhasdha

**Mengingat Perseroan tidak memiliki kontrak induk jangka panjang dengan pemasok, maka dokumen Purchase Order (PO) itu sendiri secara hukum mengikat sebagai Perjanjian, yang diterbitkan berdasarkan kesesuaian harga, ketersediaan pasokan, dan spesifikasi teknis operasional Perseroan.*

Nilai yang sebenarnya dibutuhkan oleh Perseroan untuk modal kerja operasional adalah sebesar Rp607.257.648.000 (enam ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Desember 2026 sampai dengan November 2027.

Kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dengan urutan skala prioritas sumber pendanaan sebagai berikut:

1. Porsi Modal Kerja dari Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana Saham (sekitar 65,00%);
2. Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I (dalam hal Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang waran); dan

3. Sisa kekurangan kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dari arus kas internal hasil operasional Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh para pemegang waran, akan dialokasikan seluruhnya untuk penambahan modal kerja operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan bakar (*fuel*), pembelian suku cadang (*spare parts*), pelumas (*lubricants*), dan ban (*tires*) untuk truk dan alat berat, serta pembiayaan operasional penunjang di lapangan.

Dalam hal hasil bersih Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase alokasi yang tercantum dalam Prospektus ini, dan kekurangannya akan dibiayai menggunakan arus kas internal Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam dalam POJK No. 17/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 dan pihak BMRI dan Radana bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 1 dan 2 di atas merupakan penggunaan dana oleh Perseroan sendiri pada level 1 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 40/2025.

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam setiap RUPS tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib:

a. memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai diatas 10% dari total Penawaran Umum Perdana Saham; atau

b. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Perdana sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●]% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar [●]%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [●]%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [●]% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [●]%;

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar [●]%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [●]%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar [●]%; dan biaya jasa Notaris sebesar [●]%;

- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar [●]%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

Biaya lain-lain sebesar [●]%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, sertifikat, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas pada tanggal 30 Juni 2026 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen dalam laporannya pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan nomor 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 yang ditandatangani oleh Damajanti Tanumihardja, CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 2103) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dengan laporan auditor independen yang diterbitkan kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dengan nomor 00119/2.0829/AU.1/05/0671-3/1/V/2026 yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA., CPI., CFI., CLI., ACPACC., SH. (Registrasi Akuntan Publik No. 0671) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	46.548.288.549
Utang usaha	
Pihak ketiga	66.418.709.115
Pihak berelasi	9.048.153.053
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	25.625.615.628
Pihak berelasi	25.330.179.414
Utang pajak	561.480.388
Beban akrual	54.012.924
Pendapatan diterima di muka	2.745.057.280
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman bank	93.700.590.254
Liabilitas sewa	53.286.379.885
Liabilitas sewa pembiayaan	14.914.768.605
Total Liabilitas Jangka Pendek	338.233.235.095
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun	

Pinjaman bank	169.753.696.639
Liabilitas sewa	77.612.084.884
Liabilitas sewa pembiayaan	11.356.466.437
Utang lain-lain – pihak ketiga	2.459.720.000
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7.297.145.728
Liabilitas pajak tangguhan	13.716.228.648
Total Liabilitas Jangka Panjang	282.195.342.336
TOTAL LIABILITAS	620.428.577.431

RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp 46.548.288.549 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
PT Bank Central Asia Tbk	19.721.694.478
PT Bank Saqu Indonesia	11.981.794.072
PT BPR Universal	14.844.799.999
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek	**46.548.288.549**

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 12 April 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit ("SPPK") No. 00123 GMD SPPK 2022 dengan plafon sebesar Rp 6.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 2,65% per tahun. Fasilitas tersebut mensyaratkan penempatan deposito berjangka pada BCA sebesar Rp 6.000.000.000 atas nama Arief Ramon serta pembukaan rekening giro pada BCA.

Pada tanggal 14 April 2022 dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 00293/0980S/SPPK/2022 Perusahaan dan BCA menyetujui perubahan fasilitas yaitu kredit lokal dengan plafon sebesar Rp 5.000.000.000 dan kredit investasi sebesar Rp 7.000.000.000 dengan suku bunga masing-masing 8% per tahun.

Pada tanggal 22 Juli 2024 BCA dan Perusahaan melakukan perubahan perjanjian kredit dengan No. 00434/PPK/GMD/2024 yang mengubah ketentuan pasal 2 Perjanjian kredit menjadi pemberian fasilitas kredit lokal dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 16.000.000.000 dengan tujuan untuk membiayai persediaan barang dan piutang usaha. Perusahaan diwajibkan untuk membayar bunga sebesar suku bunga tertinggi deposito berjangka yang diserahkan sebagai Agunan ditambah 0,9% per tahun.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk:

a. Menyerahkan copy akta perubahan pengurus dan pemegang saham Debitor setiap kali ada perubahan baik sebelum maupun sesudah Initial Public Offering (IPO).
b. Apabila terdapat Corporate Action berupa Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maka Debitor wajib memberitahukan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan tersebut.

c. Debitor wajib memberikan informasi tertulis mengenai susunan pemegang saham setiap 1 (satu) bulan sekali.
d. Debitor wajib mempertahankan pengendalian atas Perseroan berada pada Ibu Billy Theristine Lim (baik secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan efektif saham sebesar sekurang-kurangnya 20,73% dari modal disetor.
e. Selama terdapat pinjaman di BCA, Debitor wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila:
   - Mengubah anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham publik) Perusahaan dengan kondisi kepemilikan saham ultimate shareholder dari Bu Billy Theristine Lim dan keluarga (secara langsung dan tidak langsung) adalah mayoritas atau minimal sebesar 27,96%.
   - Melakukan pembagian dividen selama masih memenuhi *financial covenant* dan memenuhi kewajiban debitur di BCA (perubahan syarat dividen baru berlaku apabila debitur melakukan IPO dan menyerahkan akta terbaru Perusahaan).
f. Debitor harus menyerahkan minimal 1 (satu) set prospectus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO serta setiap tahun menyerahkan company profile tahun kepada BCA.
g. Seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada laporan keuangan.
h. Menjaga rasio DSC ≥ 1x, C/R ≥1x DAN D/E ≤ 3x.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Memperoleh pinjaman uang/kredit/hutang/leasing baru/tambahan bank/lembaga keuangan/pihak lain lebih dari Rp 500.000.000 kecuali tambahan hutang back to back, termasuk mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain;
b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitor;
d. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.

PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait perubahan status kelembagaan Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perusahaan setelah melakukan IPO berdasarkan surat No. 00401/SLK/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Fasilitas ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 17 Juni 2025 dengan addendum perjanjian pemberian fasilitas kredit No. 00168/GMD/SPPK/2025 untuk perpanjangan fasilitas kredit yang berakhir menjadi 21 April 2027.

Pada tanggal 14 April 2026, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 275/GMD/SPPK/2026 dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). Melalui SPPK tersebut, BCA menyetujui pemberian fasilitas Kredit Lokal 1 sebesar Rp 3.750.000.000 dengan suku bunga 10% per tahun dan Kredit Lokal 2 sebesar Rp 16.000.000.000 dengan suku bunga 3,9% per tahun, sehingga total fasilitas mencapai Rp 19.750.000.000. Perusahaan menyerahkan agunan berupa bilyet deposito berjangka milik Sukamdani Kencana Y dan properti milik Arief Ramon.

PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait perubahan status kelembagaan Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dan perubahan syarat kredit Perusahaan setelah melakukan IPO berdasarkan surat No. 00401/SLK/2026 dan No. 00397/SLK/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Pada tanggal 12 Juni 2026, Perusahaan dan BCA menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 00171/PPK/GMD/2026 untuk fasilitas Kredit Lokal 2 sebesar Rp 16.000.000.000. Perjanjian ini mengatur

perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 21 Juni 2026, serta akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan penghentian dari para pihak.

Pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 Perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 13.604.756.880, dan nihil dan melakukan pembayaran masing-masing nihil, Rp 2.333.333.340 dan Rp 2.333.333.340.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 19.721.694.478, Rp 19.705.429.611, Rp 19.684.342.215 dan Rp 8.371.225.675.

PT Bank Saqu Indonesia (dahulu PT Bank Jasa Jakarta)

Pada tanggal 6 April 2022, SAQU dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Membuka Kredit No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 dengan batas fasilitas awal sebesar Rp 4.500.000.000 untuk modal kerja. Pada tanggal 15 Agustus 2024, berdasarkan Addendum No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 Tamb.I, SAQU dan Perusahaan menyetujui perubahan fasilitas menjadi Fasilitas Pinjaman Aksep dengan peningkatan plafon sebesar Rp 12.000.000.000. Pada tanggal 6 April 2026, Perusahaan dan SAQU menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kredit yang memperpanjang jangka waktu fasilitas dari semula berakhir pada 6 April 2026 menjadi berakhir pada 6 April 2027. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 4 lembar Bilyet Deposito Bank Saqu Indonesia dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000.

PT Bank Saqu Indonesia telah menyetujui permohonan Perusahaan atas pencabutan ketentuan terkait pembagian dividen dan pembayaran sebelum jatuh tempo atas utang pihak ketiga, serta penyesuaian ketentuan terkait perubahan susunan pengurus, perubahan anggaran dasar, pengalihan saham pengendali, merger/akuisisi, dan perubahan status perseroan melalui surat No. 1524/RB/IV/2026 tanggal 6 April 2026 dan surat No. 2222/RB/V/2026 tanggal 13 Mei 2026.

Pada tahun 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 Perusahaan tidak menerima pinjaman selama tahun tersebut dan melakukan pembayaran masing-masing nihil, Rp 5.650.187.168, Rp 6.717.256.377, dan Rp 5.898.070.608.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 11.981.794.072, Rp 11.987.409.367, Rp 16.277.164.066 dan Rp 3.302.947.981.

PT BPR Universal

Pada tanggal 1 Oktober 2025 BPR Universal dan Perusahaan melakukan perjanjian pemberian fasilitas kredit dengan nomor 368/U-BTR/X/2025 yang berupa:

a. Pinjaman Revolving Reguler 1 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 10 Oktober 2025 dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan bunga 14,5% per tahun dan jangka waktu 12 bulan yang terhitung dari tanggal perjanjian ditandatangani.

Agunan dari fasilitas ini adalah sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik NIB No. 09.03.0000337939.0/Kembangan Selatan atas nama Arief Ramon.
- Sertifikat Hak Milik NIB No. 09.03.000037906.0/Kembangan Selatan atas nama Arief Ramon.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6571/Pegadungan atas nama Arief Ramon
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6548/Pegadungan atas nama Arief Ramon.

b. Pinjaman Revolving Reguler 2 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 011/BTR/UKD/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan limit kredit sebesar Rp 5.000.000.000 yang digunakan untuk stand by loan untuk jasa

penambang batubara Perusahaan dengan bunga 7% per tahun dan jangka waktu 12 bulan yang terhitung dari tanggal perjanjian ditandatangani.

Agunan dari fasilitas ini adalah Deposito Berjangka PT BPR Universal sejumlah Rp 5.000.000.000 atas nama Arief Ramon berikut dengan segala bentuk perpanjangan, penambahan dan/atau perubahan atas Deposito Berjangka tersebut.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Merubah susunan pengurus dan anggaran dasar Perusahaan.
b. Merubah susunan pemegang saham Perusahaan.

PT BPR Universal telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan surat nomor 195/AAP-BPRU/EXT/IV/26.

Pada tahun 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan menerima pinjaman sebesar nihil dan Rp 15.000.000.000 dan melakukan pembayaran di 30 Juni 2026 dan 31 December 2025 sebesar nihil dan Rp 155.200.605.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 14.844.799.999, Rp 14.844.799.395, nihil dan nihil.

PT BPR Bangun Solusi Bersama

Pada tanggal 27 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT BPR Bangun Solusi Bersama di dalam Akta No. 11, yang dibuat dihadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Perusahaan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Baru, dengan limit kredit sebesar Rp 1.500.000.000 dan jangka waktu 12 bulan terhitung dari tanggal 27 Juni 2024 sampai 27 Juni 2025.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 24 Juni 2026 berdasarkan Akta No. 7, berupa perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan tanggal 24 Juni 2028.

Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman tersebut disajikan sebagai utang bank jangka panjang. Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil, Rp 1.500.000.000, Rp 1.500.000.000 dan nihil.

Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp 75.466.862.168, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Pihak ketiga	
PT Prima Karya Nusa	4.933.333.722
Jaya Bersama Diesel	4.544.710.423
Mitra Jaya Diesel	4.422.411.377
PD Diesel Cahaya Pratama	3.736.053.783
Anugrah Jaya Diesel	3.690.619.976
Berkah Sejahtera Dieselindo	3.633.984.826

CV Putra Mandiri Teknik	2.924.064.463
Prima Teknik Diesel	2.655.832.083
Diesel Power Indonesia	2.611.831.946
PT Citra Anugrah Sukses	2.289.371.598
PT Paruh Artho Moro	2.246.238.180
Tom n Jerry	2.234.731.690
PT Indonesia Weda Bay Industri	2.168.367.337
PT Servistama Pro Indonesia	1.576.381.459
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.476.009.322
PT Karya Sukses Mandiri	1.069.185.000
PT Pacific Firstrack Indonesia	811.891.387
PT Kobexindo Tractors Tbk	782.505.679
PT Trakindo Utama	634.346.867
PT Indonusa Mitra	421.512.172
PT Abuhasdha	411.588.000
PT Mulia Abadi Partindo	339.259.568
CV Karya Lestari Listrindo	282.505.225
PT Riodi Jaya	-
CV Prima Internusa	-
PT Selaras Bhakti	-
	-
PT Akindo Inti Manunggal	-
Lain-lain (dibawah Rp1 Miliar)	16.521.973.032
Pihak berelasi	
PT Andalan Bhumi Nusantara	9.048.153.053
Jumlah Utang Usaha	75.466.862.168

Analisa Umur Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2026, analisa umur utang usaha di atas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026
Belum jatuh tempo:	28.748.572.025
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	7.059.946.164
30 – 60 hari	3.504.446.181
60 – 90 hari	2.474.032.420
Lebih dari 90 hari	33.679.865.378
Total	**75.466.862.168**

Utang Lain-Lain

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp 53.415.515.042 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	**30 Juni 2026**
Pihak ketiga	

PT Batu Energi Perdana	15.036.678.082
Tn. Oey Albert	13.001.372.000
Lain-lain	47.285.546
Sub-total	28.085.335.628
Pihak berelasi	25.330.179.414
Sub-total	53.415.515.042
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(50.955.795.042)
Bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**2.459.720.000**

Berdasarkan akta No. 9 tanggal 14 Agustus 2024 dan akta No. 7 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh notaris Inggraini Yamin S.H., Perusahaan menerima pinjaman dari Tn. Oey Albert untuk keperluan operasional dengan total pinjaman masing-masing Rp 18.975.000.000 dan Rp 12.650.000.000. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Pada tanggal 2 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Batu Energi Perdana, dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000 digunakan untuk keperluan modal kerja dan pembiayaan kegiatan umum Perusahaan, dengan bunga sebesar 5% per tahun dan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2026.

Utang Pajak

Per tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp 561.480.388 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
PPN Keluaran	-
PPh 4 ayat 2	39.651.285
PPh 21	485.866.000
PPh 23	35.963.103
PPh 25	-
PPh 29	-
Jumlah Utang Pajak	**561.480.388**

Utang Bank Jangka Panjang

Per tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang sebesar Rp 169.753.696.639 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Pinjaman bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	151.202.885.274
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.938.333.333
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	44.485.000.000
PT BPR Arta Kedaton	7.170.918.685

PT BPR Intidana	4.157.149.601
PT BPR Bangun Solusi Bersama	1.500.000.000
PT Bank Jasa Jakarta	-
Sub-total	**263.454.286.893**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(93.700.590.254)
Bagian jangka panjang	**169.753.696.639**

Berikut adalah perjanjian-perjanjian pinjaman bank jangka panjang yang dilakukan oleh Perusahaan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 10 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. SME.AJPM/0339/P3/2022.

Fasilitas atas Perjanjian Kredit ini lokasi sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Investasi, dengan limit kredit sebesar Rp 49.000.000.000 yang bersifat *Non-Revolving* dengan jangka waktu fasilitas selama 42 bulan terhitung dari tanggal 10 November 2022. Jangka waktu angsuran 36 bulan terhitung dari tanggal sejak penarikan kredit.
b. Fasilitas Kredit Mandiri SME Card dengan limit kredit sebesar Rp 500.000.000 yang bersifat *unadvised* dan *uncommitted* dengan jangka waktu berlaku sesuai dengan periode yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja sama.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi lokasi sebagai berikut:

a. Objek investasi akan diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar total Rp 70.375.691.200 atas nama Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
    i. 4 unit ADT Volvo A40G dengan nominal Rp 29.557.243.200
    ii. 8 unit DT Hino FM 280 JD dengan nominal Rp 10.212.448.000
    iii. Rigid Terex TR50D dengan nominal Rp 30.636.000.000
b. Personal Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee atas nama Billy Theristine Lim dan atas nama Arief Ramon yang akan dilakukan pembaharuan secara notarial.

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini lokasi sebagai berikut:

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk antara lain:
a. Menjaga CASA minimal sebesar 5% dari total limit kredit dan menjaga ketersediaan saldo blokir sebesar minimal 2 (dua) kali kewajiban angsuran.
b. Menyerahkan laporan kondisi obyek Kredit Investasi setiap triwulan yang meliputi laporan penggunaan dan kondisi kelayakan operasional yang dirinci per bulan dan diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 30 hari sejak periode laporan.
c. Melakukan perubahan status hukum atau Anggaran Dasar (AD) Perusahaan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank Mandiri, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank Mandiri.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Mengambil bagian dividen.

b. Mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi termasuk dalam bentuk piutang kepada pemegang saham.
c. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman lain dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
d. Melunasi atau menurunkan hutang kepada pemegang saham atau pihak berelasi.
e. Menambah atau memberikan piutang kepada pemegang saham atau pihak berelasi.
f. Memindahkan aset yang dibiayai berdasarkan fasilitas kredit di lokasi tambang PT Budi Gema Gempita ke lokasi lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri.

Perjanjian kredit No. SME.AJPM/0339/P3/2022 telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 23 Januari 2026, sehingga ketentuan pembatasan yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 40 atas Kredit Investasi dengan limit Rp 14.749.798.333 dan Akta No. 41 atas Kredit Investasi dengan limit Rp 203.000.000.000 dengan tujuan untuk pembelian alat berat, yang berlaku sampai dengan 29 April 2026 dengan bunga sebesar 9,5% per tahun.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah sebagai berikut:
a. Mesin-mesin (alat berat) milik Debitur yang terdiri atas Main Equipment, Road Maintenance Equipment, dan Support Equipment, khusus untuk akta No. 40;
b. Mesin-mesin (alat berat) milik Debitur yang terdiri atas Off Highway Truck CAT 773, Motor Grader CAT 160K, Dump Truck HINO FM280JD, dan Excavator PC200-10MO. Aset tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai objek sebesar Rp 253.968.350.000 berdasarkan nilai pembelian, khusus untuk akta No. 40;
c. Alat berat yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 284.148.350.000, khusus untuk Akta No.41;
d. *Personal Guarantee atas nama nyonya Billy Theristine Lim, tuan Tony Law, dan nyonya Willy Christine*;
e. *Personal Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Arkara Prathama Energi; dan
f. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada dan PT Arkara Prathama Energi.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk memelihara rasio laporan keuangan yang tercermin sejak posisi tanggal 31 Desember 2025 dengan parameter sebagai berikut:
- *Debt Security Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar atau sama dengan 1,25
- Total EBITDA lebih kecil atau sama dengan 2,00
- *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 2,00
- *Net Cash Flow* operasional positif

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:
a. Mengadakan *merger*, akuisisi atau mengubah permodalan, perubahan pengurus pemegang saham pengendali serta komposisi kepemilikan saham.
b. Melakukan perubahan pemegang saham.
c. Memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali untuk transaksi yang wajar.
d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari pihak kreditur lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative, kecuali fasilitas kredit dari anak usaha Bank selama memenuhi *financial covenant*.
e. Melunasi hutang kepada pihak terkait/afiliasi/pemegang saham.
f. Membagikan dividen.

Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Akta No. 40 telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 23 April 2026. Pada 30 Juni 2026 tidak terdapat saldo terutang atas fasilitas berdasarkan Akta No. 40, sedangkan fasilitas berdasarkan Akta No. 41 masih terutang sebesar Rp 151.202.885.274

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus Perusahaan, Penawaran Umum Perusahaan, pembagian dividen dan pembatasan keuangan berdasarkan surat nomor CMB.CM6/MNE.125/SPPK/2026 tanggal 10 April 2026.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait *Waiver Covenant* mengenai perolehan fasilitas kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Universal, perolehan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia, pengikatan diri sebagai Corporate Guarantor serta persetujuan pelaksanaan *negative covenant* pelunasan utang pemegang saham berdasarkan surat No. CMB.CM6/MNE.1701/SPPK/2026 tanggal 29 April 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 201.123.023.690, dan Rp 21.182.216.160 dan melakukan pembayaran masing masing Rp 10.820.641.798, Rp 61.496.352.762, Rp 34.613.901.710 dan Rp 29.570.325.263.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 151.202.885.274 Rp 162.023.527.025, Rp 223.519.879.781 dan Rp 57.010.757.798.

PT BPR Arta Kedaton Makmur

Pada tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT BPR Arta Kedaton Makmur di dalam Akta No. 26, yang dibuat dihadapan Intan Avita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung atas Fasilitas Kredit sejumlah Rp 15.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak 24 Juli 2024 dengan *grace period* 6 bulan.

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. 6 unit Volvo Articulated 40T Load Capacity.
b. 1 unit Komatsu Motor Grader GD705A-4.
c. 1 unit Komatsu Motor Grader GD535-5.
d. 1 unit Doosan-Hydraulic Excavator DX225LCA.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Menerima kredit dari bank lain.
b. Mengingatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
c. Memindahtangankan barang jaminan.
d. Meminjamkan atau menyewakan barang jaminan.

Berdasarkan surat No. 224/AAP-BAK/EXT/IV/26 tanggal 30 April 2026, PT BPR Arta Kedaton Makmur telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait perubahan redaksi ketentuan perjanjian kredit yang memperkenankan menerima fasilitas kredit dari bank lain dan mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dengan persetujuan tertulis dari pihak PT BPR Arta Kedaton Makmur.

Pada tahun 2026, 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 26.235.000.000, dan nihil serta melakukan pembayaran masing-masing Rp 2.982.301.460, Rp 8.891.541.549, Rp 1.284.656.810 dan nil.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.170.918.685, Rp 9.681.843.977, Rp 14.999.000.000 dan Rp 7.256.943.846.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 17 Maret 2026, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.184. Perusahaan mendapatkan fasilitas atas Perjanjian Kredit ini adalah Kredit Investasi (Refinancing) dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal 17 Maret 2026 dengan bunga sebesar 9% per tahun yang bertujuan untuk membiayai kembali 3 unit alat berat dengan total project cost sebesar Rp 12.954.913.889.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah objek investasi yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 12.954.913.889.

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
- Komposisi Aktiva Lancar (tidak termasuk piutang karyawan dan piutang afiliasi ke grup usaha) dikurangi komposisi Hutang Lancar (tidak termasuk hutang jangka panjang bank yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun) harus positif.
- EBITDA dan Laba Bersih tahun berjalan harus positif.
- Interest Coverage Ratio minimal sebesar 200%
- Komposisi total kewajiban terhadap ekuitas maksimal 400%
- DSCR (EBITDA / Kewajiban Angsuran Pokok dan Bunga) minimal sebesar 1,1x.
- Menjaga komposisi rasio aset berupa alat berat yang dibiayai terhadap pinjaman bank BRI sebesar 125%
- Menjaga coverage modal kerja selalu terjaga minimal 143%.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:
a. Melakukan penjualan asset perusahaan senilai lebih dari 50% total assetnya.
b. Melunasi hutang kepada pemegang saham atau menurunkan hutang pemegang saham/hutang afiliasi/hutang pada persero serta memberikan piutang kepada pemegang saham/piutang afiliasi/hutang pada persero serta memberikan piutang kepada pemegang saham/piutang afiliasi/piutang pada persero tanpa seizin dari Bank BRI.
c. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
d. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain.
e. Melakukan perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan yang dapat mengganggu cashflow usaha debitur dalam jangka waktu 1 tahun.
f. Mengikat Gadai Notariil dan pengikatan selanjutnya atas agunan kredit Bank BRI kepada pihak/kreditur lain.
g. Menyewakan aset yang diagunkan di Bank BRI, apabila telah timbul perjanjian sewa menyewa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit oleh pihak Debitur dan pihak Bank, Debitur wajib melakukan addendum perjanjian sewa menyewa tersebut dengan pihak penyewa dan menambahkan klausula sewa – menyewa.

Pada tanggal 5 November 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. R.1645-ROJKT/COD/11/2025 atas Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing) dengan limit kredit sebesar Rp 41.400.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan terhitung dari tanggal 5 November 2025 yang bertujuan untuk membiayai kembali 11 unit alat berat dengan total project cost sebesar Rp 41.400.000.000.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah objek investasi yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 54.078.129.167.

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:
Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Net Working Capital selalu positif.
- Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%.
- Interest Coverage Ratio minimal sebesar 150%.
- Debt Service Coverage Ratio minimal sebesar 1,1x.
- Menjaga komposisi rasio aset berupa alat berat yang dibiayai terhadap pinjaman sebesar 125%.
- CASA Rasio minimal ≥ 15% dan harus terpenuhi minimal 6 bulan sejak tanggal realisasi. Jika rasio CASA yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka akan dikenakan suku bunga counter yang berlaku.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go public.
b. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
c. Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
d. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang arus kas tidak terganggu serta NWC Positif.
e. Memberikan piutang kepada pemegang saham, kecuali yang sudah ada saat ini.
f. Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
g. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
h. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
i. Menerima pinjaman baru dari bank lain atau Lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
j. Melakukan perikatan dengan pihak lain yang berhubungan dengan proyek yang dibiayai dan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain.
k. Melakukan penjualan aset yang diagunkan nasabah.
l. Mengikat hak tanggungan dan pengikatan selanjutnya atas agunan kredit BRI kepada pihak/kreditur lain.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait pencabutan pembatasan perbankan atas merger dan akuisisi, penjualan aset dan penawaran umum Perusahaan, perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan permodalan, pembagian dividen, serta ketentuan Interest Coverage Ratio (ICR) minimum 150%

Berdasarkan surat No. R.525-RO.08-JKT/COD/02/2026 tanggal 16 Maret 2026, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Addendum I Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi Refinancing No. 183 pada tanggal 17 Maret 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai Penawaran Umum Perusahaan, perubahan susunan pengurus Perusahaan, pembagian dividen, Interest Coverage Ratio minimal 150% berdasarkan surat No. 130/AAPBRI/EXT/II/26 tanggal 24 Februari 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah menyetujui permohonan pencabutan beberapa kovenan pembatas (*negative covenants*) pada Perjanjian Kredit 1 dan 2 dalam rangka menyelaraskan ketentuan kredit dengan rencana IPO Perusahaan berdasarkan surat No. 212/AAP-BRI/EXT/IV/26 tanggal 17 April 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai Debt Service Coverage Ratio minimal 1,1x berdasarkan surat nomor 270/AAP-BRI/EXT/V/26 tanggal 29 Mei 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait pembebasan dan/atau pernyataan tidak ada keberatan atas potensi ketidakterpenuhan rasio keuangan Perusahaan, serta menyetujui agar evaluasi terhadap pemenuhan rasio keuangan dilakukan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2026 berdasarkan surat No. 308/AAP-BRI/EXT/VII/26 tanggal 29 Juni 2026.

Pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan menerima pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 41.400.000.000 serta melakukan pembayaran sebesar Rp 6.045.000.000 and Rp 870.000.000.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 December 2025, sebesar Rp 44.485.000.000 dan Rp 40.530.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 13 Mei 2026, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Notaris Dr. M. Kholid Artha, S.H., M.Kn No. 62 atas perjanjian kredit investasi refinancing dengan limit Rp 55.400.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan terhitung sejak 12 Mei 2026 dengan bunga sebesar 9% per tahun yang bertujuan untuk membiayai kembali pembelian Gedung kantor di Jl. Plaju No. 11 Jakarta Pusat.

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor di Jl. Plaju No. 11 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 1039 (sedang proses balik nama).
b. Company Guarantee PT XAX Lintas Nusantara.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

a. Mempertahankan Current Ratio minimal 1,0x, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.
b. Mempertahankan Debt to Equity Ratio maksimum 2,20x, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.
c. Mempertahankan Debt Service Coverage minimal 100%, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

a. Memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, dan/atau memberikan hak atas agunan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain atau menjadikannya di bawah penguasaan pihak lain.
b. Menggadaikan atau dengan cara lain membebankan agunan dalam bentuk apa pun, termasuk saham perusahaan, kepada pihak mana pun.
c. Menjual, menyewakan, atau menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada BNI kepada pihak lain.
d. Memindahtangankan usaha/barang yang dibiayai oleh fasilitas kredit kepada pihak lain.
e. Memperoleh kredit dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali apabila pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
f. Mengubah Anggaran Dasar (kecuali peningkatan modal perusahaan), termasuk memindahtangankan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
g. Melakukan akuisisi atau pengambilalihan aset milik pihak ketiga.

h. Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan saham perusahaan lain.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut diatas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. PLM/2/453/R atas kredit investasi dengan limit Rp 26.500.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak 29 Agustus 2023.

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. 1 unit mobil Dump Truck Hino FM 260 JD tahun 2019 senilai Rp 785.000.000.
b. 6 unit mobil Dump Truck Hino Profia 700 ZS 4141 tahun 2018 senilai Rp 6.317.00.000.
c. Kendaraan dan atau alat berat dengan total nilai RAB Rp 38.295.000.000.
d. Persediaan senilai Rp 7.527.244.636.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

a. Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
b. Mengubah susunan Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
c. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
d. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
e. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
f. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
g. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
h. Menarik kembali modal yang sudah disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing masing sebesar Rp 55.400.000.000, nihil, nihil dan Rp 16.083.900.000 dan melakukan pembayaran masing masing Rp 461.666.667, Rp 8.936.000.000, Rp 5.361.300.000 dan Rp 1.787.100.000. Pada 31 Desember 2025 Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 54.938.333.333 nihil, Rp 8.935.500.000 dan Rp 14.296.800.000.

PT Bank Inti Dana Sentosa (BPR Intidana)

Pada tanggal 29 Juli 2024 BPR Intidana dan Perusahaan melakukan perjanjian pemberian pinjaman uang kepada Perusahaan sebesar Rp 11.235.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja dengan bunga sebesar 8% pertahun, dengan jangka waktu 36 bulan sampai dengan tanggal 29 Juli 2027. Perusahaan menyerahkan kepada Bank barang jaminan berupa, 2 unit Hitachi Hydraulic Excavator dan 5 unit Landasan Mobil Barang Hino FM260JD.

PT BPR Inti Dana Sentosa telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus anggaran dasar, perubahan kepemilikan, dan pembagian dividen berdasarkan nomor surat 152/AAP-BPRI/EXT/III/2026 tanggal 1 Februari 2026.

Pada tahun 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 11.235.000.000, dan nihil dan melakukan pembayaran masing-masing Rp 1.903.632.500, Rp 3.418.184.921, Rp 1.284.656.810 dan nihil.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.157.149.601, Rp 6.532.158.269, Rp 9.949.543.190 dan nihil.

Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Analisis jatuh tempo:	
Tahun 1	67.828.816.057
Tahun 2	60.791.306.274
Tahun 3	27.130.314.912
Tahun 4	1.419.262.568
Total	157.169.699.811
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(68.201.148.490)
Liabilitas sewa – neto setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	88.968.551.321
a. Liabilitas sewa operasi terdiri atas:	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:	
Pihak ketiga	
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	57.230.417.315
PT Caterpillar Finance Indonesia	43.585.104.616
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	14.819.223.818
PT Buana Finance Tbk	7.444.673.397
PT Orix Indonesia Finance	3.486.542.333
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	3.290.430.015
PT Astra Sedaya Finance	1.042.073.275
PT Indomobil Finance Indonesia	-
PT Hexa Finance Indonesia	-
PT SMFL Leasing Indonesia	-
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-
Total	130.898.464.769
b. Liabilitas sewa pembiayaan terdiri atas:	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:	
Pihak ketiga	
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	21.245.892.006
PT Orix Indonesia Finance	1.856.360.064
PT Dipo Star Finance	1.528.895.705
PT Mandiri Utama Finance	899.102.744
PT Bank Central Asia	740.984.523
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-
PT Astra Credit Company	-
PT Mandiri Tunas Finance	-
Total	26.271.235.042

Perusahaan telah mengasuransikan aset hak-guna dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

Peralatan berat Perusahaan telah diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Wahana Tata, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, dan PT Asuransi Tri Prakarta pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 294.009.211.000, Rp 521.560.712.932, Rp 468.506.361.600 dan Rp 80.252.591.600.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Perusahaan.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CLIPAN)

Pada tanggal 30 April 2026, Perusahaan dan CLIPAN menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 16.964.119.350. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 November 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,50% per tahun.

PT Astra Sedaya Finance

Pada tanggal 23 April 2026, Perusahaan dan ASF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 1.127.228.260. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 April 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,50% per tahun.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Pada tanggal 18 Februari 2026, Perusahaan dan ADMF menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa dengan total sebesar Rp 3.780.486.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 18 Januari 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,25% per tahun.

PT Orix Indonesia Finance

Pada tanggal 20 April 2026, Perusahaan dan ORIX menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa masing-masing sebesar Rp 1.345.920.000 dan Rp 479.232.000. Fasilitas sewa berakhir pada 30 April 2029. Tingkat suku bunga masing-masing fasilitas adalah 5,39% dan 5,95% per tahun.

Pada tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan dan ORIX menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 504.984.000. Fasilitas sewa berakhir pada 26 Februari 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,25% per tahun.

Pada tanggal 21 November 2025, Perusahaan dan ORIX menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 1.762.680.000. Fasilitas sewa berakhir pada 28 November 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia

Pada tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 3.001.523.250. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 27 Juli 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

Pada tanggal 19 Februari 2026, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 33.371.481.225. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 27 Juli 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

Pada tanggal 20 September 2024, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 23.354.400.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 29 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,99% per tahun.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 8.214.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 16 Agustus 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,99% per tahun.

Pada tanggal 19 September 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 7.104.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 Agustus 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

Pada tanggal 9 September 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 4.817.400.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 9 Agustus 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 7.104.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 21 Juni 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

PT Chandra Sakti Utama Leasing

Pada tanggal 29 Mei 2023, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 1.203.240.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 1 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana AAP mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 1.776.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 9 September 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 3.043.176.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 September 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 8 Juni 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 13.390.617.579. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 8 Juni 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 1.032.849.600. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 Juli 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 22.317.695.965. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 24 Mei 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 25 Maret 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 2.352.625.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 Maret 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,75% per tahun.

PT Buana Finance Tbk

Pada tanggal 28 Agustus 2025, Perusahaan dan Buana Finance menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 3.960.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 15% per tahun.

Pada tanggal 21 Juni 2025, Perusahaan dan Buana Finance menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 9.471.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 24 Mei 2028 dan 26 Mei 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 15% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan dan HFI menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa dengan total sebesar Rp 24.871.450.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 14 Maret 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

Pada tanggal 4 Oktober 2022, Perusahaan dan HFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 8.538.675.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 4 Oktober 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT SMFL Leasing Indonesia

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 6.287.040.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11% per tahun.

PT Indomobil Finance Indonesia

Pada tanggal 22 Desember 2022, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 12.076.642.468. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 Desember 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2023, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 4.004.966.400. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 20 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

Pada tanggal 19 Juni 2023, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 53.940.249.600. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Pada tanggal 27 Maret 2026, Perusahaan dan RBF menandatangani beberapa fasilitas kredit jual dan sewa balik dengan total sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas jual dan sewa balik berakhir pada tanggal 29 Februari 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

Pada tanggal 12 Agustus 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 17.549.950.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 28 Agustus 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit jual dan sewa balik sebesar Rp 22.929.772.000. Fasilitas jual dan sewa balik berakhir pada tanggal 13 Agustus 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

Pada tanggal 22 April 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 35.874.090.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 April 2030. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,4% per tahun.

PT Dipo Star Finance (DIPO)

Pada tanggal 13 Maret 2026, Perusahaan dan DIPO menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.347.200.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 13 Maret 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

Pada tanggal 29 Mei 2026, Perusahaan dan DIPO menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 306.360.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 29 April 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

PT BCA Finance

Pada tanggal 24 Juli 2024, Perusahaan dan BCA menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 2.080.000.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 24 Juli 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 7,48% per tahun.

PT Mandiri Utama Finance

Pada tanggal 11 Desember 2024, Perusahaan dan Mandiri menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 300.300.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 11 Desember 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 4,93% per tahun.

Pada tanggal 24 Januari 2025, Perusahaan dan Mandiri menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.457.300.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 24 Januari 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 4,93% per tahun.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Per tanggal 30 Juni 2026, Perseroan memiliki liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp 7.297.145.728 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Saldo awal tahun	8.270.856.441
Biaya jasa kini	1.507.950.882
(Keuntungan) kerugian aktuaria	(690.674.419)
Pembayaran manfaat	(1.857.120.940)
Biaya jasa masa lalu	(305.635.567)
Biaya bunga	371.769.331
Saldo akhir tahun	**7.297.145.728**

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan metode "*Projected Unit Credit*" adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026
Tingkat diskonto	7,28%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI IV
Tingkat cacat	5% dari TMI IV
Umur pensiun normal	55

PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI

1. Perjanjian Kerjasama PT Budi Gema Gempita (BGG)

Pada tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan BGG tentang Pekerjaan Jasa Penambangan Batubara yang berlokasi di Kabupaten Lahat, berdasarkan Perjanjian No. 09/BGG-AAP/VIII/2018, yang mana Perjanjian tersebut telah diaddendum atas kontrak tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan addendum kontrak No. 02/ADDM-BGG-AAP/I/2022. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

2. Perjanjian tentang pekerjaan pengadaan jasa produksi penunjang (SPPH-05852) PT Satria Bahana Sarana ("SBS")

Pada tanggal 30 Desember 2024, SBS dan Perusahaan menandatangani Perjanjian No. 56A/PJJ-HO/DIR/XII/2024 terkait pengadaan jasa penunjang produksi (SPPH-05852). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berkewajiban menyediakan peralatan untuk menunjang kegiatan produksi SBS di wilayah kerja SBS di Tanjung Enim/USTE dan berhak menerima pembayaran berdasarkan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2029 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Total nilai pekerjaan dengan Alat Bulldozer CAT D10T/ setara kelas 600-700HP sebanyak 2 unit dengan asumsi jam kerja per bulan sebanyak 400 jam kerja. Dengan estimasi masa pekerjaan selama 60 bulan, dengan tarif (Rp/jam) berdasarkan perjanjian sebesar Rp 1.980.000 dengan nilai pekerjaan berdasarkan perjanjian sebesar Rp95.040.000.000, nilai tersebut exclude PPN.

Perusahaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), sebesar 5% (lima persen) dari total harga sewa pertahun yaitu dalam porsi mata uang Rupiah sebesar Rp 1.054.944.000 yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Bank Pemerintah/Devisa yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Addendum III No. 325/AAP-SBS/EXT/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 yang mengubah dan menambah ketentuan dalam perjanjian sebelumnya. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian judul perjanjian menjadi Pekerjaan Penambangan, Pengangkutan, dan Konstruksi Pertambangan, penambahan armada alat berat operasional beserta alat penunjang dan kewajiban penambahan jaminan pelaksanaan. Berdasarkan addendum tersebut, peningkatan target volume pekerjaan menjadi 2.236.971 BC dan total nilai kontrak menjadi Rp 208.942.000.000.

3. PT Position (POS)

Perjanjian pekerjaan penambangan bijih nikel

Pada tanggal 1 April 2026, Perusahaan dan POS menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penambangan Bijih Nikel No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26 untuk pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi penambangan tanah penutup dan bijih nikel (limonit dan saprolit) di wilayah Desa Maba Sangaji dan Desa Wailukum,

Halmahera Timur, Maluku Utara. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2026.

Selama periode 4 (empat) tahun perjanjian, total estimasi target penambangan bijih nikel (ore) adalah sebesar 5.728.000 WMT, dan estimasi total pekerjaan pemindahan tanah penutup (waste) adalah sebesar 2.511.000 BCM.

Selama masa berlakunya perjanjian, Perusahaan diwajibkan untuk mengadakan dan memelihara asuransi terkait kerugian aset atau alat berat, kompensasi karyawan, serta tanggungan atas cedera fisik dan kerusakan harta pihak ketiga.

Berdasarkan Perjanjian No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26, terdapat ketentuan tambahan mengenai pembangunan sarana penunjang berupa Mess Facility. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut, Perusahaan menerbitkan SPK No. 059/MGT/AAP-SPK/II/2026 kepada PT Andes Persada Nusantara sebagai subkontraktor dengan nilai kontrak Rp 9.235.116.000. Seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perusahaan dan dicatat sebagai piutang/tagihan reimbursement kepada POS. Setelah pembangunan Mess Facility selesai dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani, POS wajib mengganti seluruh biaya kepada Perusahaan, dan kepemilikan aset Mess Facility secara sah beralih sepenuhnya kepada POS.

4. PT Petrosea Tbk (PTRO)

Pada tanggal 14 April 2026, Perusahaan mengadakan Perjanjian Subkontraktor dengan PT Petrosea Tbk (PTRO) berdasarkan Perjanjian No. 4320001903 yang berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2029, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 991.735.241.096.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan melaksanakan jasa penambangan batubara yang meliputi land clearing, pemindahan top soil, dan pemindahan overburden di wilayah kerja PTRO di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

5. PT Intan Bumi Persada (IBP)

Pada tanggal 1 April 2026, Perusahaan dan IBP menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan No. 001/AGR/AAP/IBP/IV/2026 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2030. Perusahaan sepakat untuk melaksanakan jasa pertambangan yang meliputi antara lain land clearing, pengupasan top soil, overburden removal, kegiatan drilling dan blasting, coal getting, pengangkutan material penutup ke disposal area, pembangunan dan pemeliharaan jalan angkut, pengelolaan disposal area dan dewatering, serta pemuatan batubara ke armada kontraktor untuk pengangkutan ke ROM stockpile.

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan dan IBP menandatangani Perjanjian Pekerjaan Cut & Fill beserta Penunjang No. 002/IBP-AAP/WC/VI/26., di mana Perusahaan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan cut & fill (penggalian, pengangkutan material, dan penimbunan pemadatan berlapis) di wilayah Tambang Batubara IBP di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya Work Order No. IBP-SPK-06.1.2026-001 pada tanggal 6 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.

Ruang lingkup pekerjaan cut & fill mencakup total volume sebesar 325.000 BCM dengan tarif pengerjaan sebesar Rp 33.000 per BCM. Selain pelaksanaan pekerjaan, Perusahaan juga menyewakan alat berat penunjang kepada IBP berupa unit Excavator, Bulldozer, Motorgrader, Compactor, Dump Truck, Fuel Truck, dan Water Truck dengan sistem tarif lumpsum bulanan.

6. PT Arkara Prathama Energi (APE)

Pada tanggal 12 Maret 2026, Perusahaan melakukan Perjanjian Pekerjaan Jasa Pertambangan antara Perusahaan dengan APE terkait Pekerjaan Jasa Penambangan, berdasarkan Perjanjian No. 112/APE-AAP/OPR/LEG/III/2026 yang berlaku hingga 31 Desember 2030. Berdasarkan perjanjian kerja, Perusahaan berkewajiban melaksanakan kegiatan jasa pertambangan sesuai target produksi, rencana tambang, dan jadwal tambang yang ditetapkan untuk wilayah kerja APE di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembersihan lahan (*land clearing*), pemindahan tanah penutup (*overburden removal*) termasuk kegiatan penggalian, pemuatan, pengangkutan dan pembuangan material, pengelolaan area pembuangan (disposal area), pembangunan dan pemeliharaan jalan angkut, pengelolaan lingkungan dan air tambang termasuk dewatering, serta pengangkutan batubara yang didasarkan pada tonase hasil penimbangan dan survei bersama.

7. PT Andalan Bhumi Nusantara (ABN)

Perjanjian Sewa Alat Berat

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan ("Penyewa") menandatangani Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. 004/AAP-ABN/SEWA/VI/26 dengan ABN ("Pemberi Sewa").

Perjanjian ini mencakup penyewaan alat berat pertambangan berupa excavator (Hitachi ZX490, ZX350, dan ZX200), dump truck (Foton 380HP 30T), water truck, fuel truck, lube truck, serta crane truck untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan kepemilikan alat tetap berada pada Pemberi Sewa. Jangka waktu sewa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Tarif sewa ditetapkan per bulan berdasarkan jenis, jumlah unit, serta periode penggunaan.

Pada tanggal 1 April 2025, Perusahaan ("Pemberi Sewa") menandatangani Perjanjian Sewa Alat Berat No. 001/AAP-ABN/IV/25 dengan PT Andalan Bhumi Nusantara ("Penyewa"). Perjanjian ini mencakup penyewaan alat berat berupa bulldozer (D8R dan D85ESS), motor grader (160K), light vehicle (DC 4x4), dump truck (4045), dan lighting tower (AS4006) untuk mendukung kegiatan operasional Penyewa, dengan kepemilikan alat tetap berada pada Pemberi Sewa. Masa sewa dimulai sejak alat tiba di lokasi proyek Penyewa dan berakhir pada tanggal yang disepakati bersama, serta pada akhir masa sewa alat wajib dikembalikan dalam kondisi semula dengan memperhatikan keausan wajar.

Tarif sewa ditetapkan per bulan berdasarkan jenis dan jumlah unit dan ditagihkan setiap akhir tahun secara akumulatif sejak tanggal penyerahan alat, sehingga total nilai kontrak bergantung pada lamanya penggunaan.

8. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Billy Theristine Lim)

Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 8 Oktober 2024, Perusahaan menerima pinjaman dari Billy Theristine Lim sebesar Rp 33.500.000.000. Jangka waktu pinjaman tersebut berlaku sampai dengan hutang Perusahaan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dinyatakan lunas. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dalam bentuk apapun.

Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham No. 002/AAP-BT/EXT/VI/24 tanggal 21 Oktober 2024 Perusahaan menerima pinjaman dari Billy Theristine Lim dengan limit pinjaman sebesar Rp 35.000.000.000 dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2026, tidak terdapat bunga atas pinjaman tersebut. Pada 30 Juni 2026, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman pemegang saham dari Billy Theristine Lim.

9. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Arief Ramon)

Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham No. 001/AAP-AR/EXT/VI/24 tanggal 3 Juni 2024 Perusahaan menerima pinjaman dari Arief Ramon dengan limit pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 2 tahun terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2026, tidak terdapat bunga atas pinjaman tersebut.

Pada tanggal 10 Februari 2026, terdapat Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 259/AAP-AR/EXT/II/26 untuk meningkatkan limit fasilitas pinjaman menjadi sebesar Rp 30.000.000.000.

Pada tanggal 2 Juni 2026 terdapat Addendum II Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan nomor 319/AAP-AR/EXT/VI/26 untuk melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang semula berakhir pada 3 Juni 2026 menjadi 3 Juni 2027.

10. PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Pada tanggal 8 Mei 2026, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 123 oleh Notaris Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn., dengan CLIPAN sebagai Lessor. Fasilitas sewa pembiayaan tersebut digunakan untuk pengadaan 10 unit Dump Truck Foton dan 2 unit Hitachi Hydraulic Excavator dengan nilai perolehan Rp 16.964.119.350 dengan jangka waktu 31 bulan sejak akta perjanjian ini.

11. PT Astra Sedaya Finance

Pada tanggal 27 Agustus 2025, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate guarantee) kepada PT Astra Sedaya Finance. Jaminan ini diberikan untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban utang ABN yang timbul dari satu perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan dengan No. 01100910002506177 pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk pengadaan 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G dengan nilai perolehan sebesar Rp 1.787.100.000. Jangka waktu perjanjian ini 36 bulan sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2028 dengan bunga sebesar 5,67% per tahun.

12. PT Berkarya Sinar Bersama

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Alat Berat dengan PT Berkarya Sinar Bersama (BSB) Nomor 001/AAP-BSB/SEWA/VI/26, dimana Perusahaan bertindak sebagai Pihak Pertama yang menyewakan sejumlah alat berat pertambangan untuk mendukung kegiatan usaha BSB di wilayah Bantuas, Palaran, Kalimantan Timur.

Perjanjian sewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Objek sewa meliputi unit alat berat berupa Excavator 30 Ton, Excavator 20 Ton, dan Dump Truck 20 Ton dengan skema perhitungan harga sewa berdasarkan tarif per jam (rental rate per hour) dan tarif bulanan (rental rate per month). Harga sewa tersebut sudah mencakup penyediaan operator, mekanik, biaya perawatan/perbaikan, serta perangkat keselamatan (safety device), namun belum termasuk PPN, PPh Pasal 23, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan Perjanjian, PT Berkarya Sinar Bersama berhak mengenakan denda berupa pemotongan tagihan kepada Perusahaan apabila kinerja alat berada di bawah standar yang disepakati, yaitu Physical Availability (PA) di bawah 85% dan Mechanical Availability (MA) di bawah 80%.

13. PT Bukit Bara Alam

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Kesepakatan Bersama No. 001-KB/BBA-AAP/VI/206 dengan BBA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Perusahaan dan BBA menyetujui pembatalan sewa alat berat dengan nilai sebesar Rp 6.896.250.000 dan BBA berkewajiban membayar kompensasi kepada Perusahaan sebesar Rp 5.172.187.500 yang setara dengan 75% dari nilai perjanjian sewa tersebut. Pembayaran kompensasi tersebut wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kesepakatan. Apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka BBA tetap berkewajiban membayar kompensasi tersebut beserta bunga sebesar 10% per tahun.

PERUBAHAN LIABILITAS/PERIKATAN KEUANGAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2026

Tidak terdapat perubahan liabilitas/perikatan keuangan setelah tanggal setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 30 JUNI 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 30 JUNI 2026 SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen dalam laporannya pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan nomor 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 yang ditandatangani oleh Damajanti Tanumihardja, CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 2103) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dengan laporan auditor independen yang diterbitkan kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dengan nomor 00119/2.0829/AU.1/05/0671-3/1/V/2026 yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA., CPI., CFI., CLI., ACPACC., SH. (Registrasi Akuntan Publik No. 0671) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	12.523.219.336	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242
Piutang usaha				
Pihak ketiga	73.433.784.730	84.901.048.230	122.353.992.726	91.488.290.930
Pihak berelasi	-	6.757.680.000	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	6.091.229.399	6.992.770.153	5.662.071.731	5.980.798.252
Pihak berelasi	5.172.187.500	20.790.002.447	-	-
Persediaan	30.403.970.343	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864
Aset Kontrak	79.835.301.722	-	-	-
Pajak dibayar di muka	7.785.710.240	-	14.035.793.524	-
Uang muka	16.149.170.907	8.609.165.200	6.831.385.853	4.922.689.815
Beban dibayar dimuka	6.673.428.411	4.413.972.854	2.974.681.491	3.799.239.174
Total Aset Lancar	238.068.002.588	173.203.511.535	184.724.376.884	138.199.613.277
Aset Tidak Lancar				
Uang muka aset tetap	8.113.295.366	6.167.567.576	4.344.144.150	3.171.934.699
Aset tetap	436.419.633.067	414.275.903.367	453.470.131.346	209.463.520.029
Aset hak guna	165.822.524.414	115.794.075.203	182.215.782.464	213.867.712.130
Taksiran klaim pajak penghasilan	8.287.682.136	11.452.539.190	5.324.641.205	-
Total Aset Tidak Lancar	618.643.134.983	547.690.085.336	645.354.699.165	426.503.166.858
TOTAL ASET	856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135

(dalam Rupiah)

LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	46.548.288.549	48.037.638.373	37.461.506.281	11.674.173.656
Utang usaha				
Pihak ketiga	66.418.709.115	47.385.323.313	113.200.950.511	101.216.140.549
Pihak berelasi	9.048.153.053	-	-	-
Utang lain – lain				
Pihak ketiga	25.625.615.628	10.980.912.500	53.364.798.822	9.142.929.188
Pihak berelasi	25.330.179.414	69.747.881.004	52.899.392.500	2.000.000.000
Utang pajak	561.480.388	446.984.505	330.633.549	6.356.352.683
Beban akrual	54.012.924	5.241.209	4.099.232.222	-
Pendapatan diterima di muka	2.745.057.280	16.261.159.040	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman bank	93.700.590.254	212.706.747.169	91.709.154.144	59.967.184.556
Liabilitas sewa	53.286.379.885	25.947.352.693	59.119.321.754	73.276.332.635
Liabilitas sewa pembiayaan	14.914.768.605	1.896.279.338	2.596.844.970	1.615.024.289
Total Liabilitas Jangka Pendek	338.233.235.095	433.415.519.144	414.781.834.753	265.248.137.556
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian lancar yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank	169.753.696.639	6.060.782.102	172.302.086.522	40.630.099.377
Liabilitas sewa	77.612.084.884	69.882.200.890	27.175.722.205	67.507.699.811
Liabilitas sewa pembiayaan	11.356.466.437	981.225.964	1.690.313.807	875.587.703
Utang lain-lain – pihak ketiga	2.459.720.000	7.730.534.000	18.272.238.000	3.805.252.822
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7.297.145.728	8.270.856.441	7.868.205.264	6.114.344.911
Liabilitas pajak tangguhan	13.716.228.648	10.081.272.002	8.547.815.251	8.007.760.480
Total Liabilitas Jangka Panjang	282.195.342.336	103.006.871.399	235.856.381.049	126.940.745.104
TOTAL LIABILITAS	620.428.577.431	536.422.390.543	650.638.215.802	392.188.882.660
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham				
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham Modal dasar – 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.000.000.000 saham untuk tahun 2026 dan dengan nilai nominal 1.000.000 per saham untuk 10.500 saham tahun 2025, 2024 dengan 5.000 saham seri A dan 5.500 saham seri B serta 5.000 saham untuk tahun 2023	50.000.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	5.000.000.000
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	184.182.560.140	173.971.206.328	168.940.860.247	167.513.897.475
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	2.100.000.000	-	-	-
TOTAL EKUITAS	236.282.560.140	184.471.206.328	179.440.860.247	172.513.897.475
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
PENDAPATAN NETO	200.115.618.505	219.150.940.820	368.823.532.926	415.427.104.287	517.030.479.808

BEBAN POKOK PENDAPATAN	(148.305.843.044)	(175.973.672.855)	(294.197.632.515)	(346.863.185.348)	(363.000.264.005)
LABA BRUTO	51.809.775.461	43.177.267.965	74.625.900.411	68.563.918.939	154.030.215.803
Beban umum dan administrasi	(24.277.365.408)	(20.909.019.600)	(33.231.161.592)	(36.287.891.197)	(36.144.960.965)
Pendapatan operasi lainnya	7.135.409.129	761.089.476	6.144.460.063	829.418.167	1.853.299.158
Beban operasi lainnya	(137.426.413)	-	(2.917.366.064)	(2.446.024.759)	(1.285.283.873)
LABA USAHA	34.530.392.769	23.029.337.841	44.621.832.818	30.659.421.150	118.453.270.123
Pendapatan keuangan	1.176.536.325	81.103.584	208.004.190	111.522.879	52.377.551
Beban keuangan	(20.451.293.055)	(19.849.220.400)	(38.174.316.452)	(29.086.015.414)	(32.718.877.033)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	15.255.636.039	3.261.221.025	6.655.520.556	1.684.928.615	85.786.770.641
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	-	-	(13.054.514.223)
Tangguhan	(3.483.008.274)	-	(1.513.278.852)	(477.995.207)	(5.878.028.120)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(3.483.008.274)	-	(1.513.278.852)	(477.995.207)	(18.932.542.343)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	11.772.627.765	3.261.221.025	5.142.241.704	1.206.933.408	66.854.228.298
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak diakui ke dalam laporan laba rugi					
Kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	690.674.419	-	(91.717.724)	282.088.928	-
(Beban) manfaat pajak penghasilan terkait	(151.948.372)	-	(20.177.899)	(62.059.564)	-
(BEBAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF - Neto	538.726.047	-	(111.895.623)	220.029.364	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12.311.353.812	3.261.221.025	5.030.346.081	1.426.962.772	66.854.228.298
LABA PER SAHAM DASAR	2,84	3,11	4,79	1,36	133,71

**tidak diaudit*

ARUS KAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	26.406.701.898	58.343.728.133	116.065.280.218	60.856.488.545	151.894.566.028
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(52.991.105.117)	(7.968.747.189)	(9.687.415.999)	(217.674.354.755)	(55.063.518.900)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	18.510.399.047	(47.825.661.743)	(101.331.839.350)	153.117.747.607	(90.219.829.480)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK	(8.074.004.172)	2.549.319.201	5.046.024.869	(3.700.118.603)	6.611.217.648

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	20.597.223.508	15.551.198.639	15.551.198.639	19.251.317.242	12.640.099.594
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	12.523.219.336	18.100.517.840	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242

**tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	-8,69%	59,37%	-11,22%	-19,65%	64,58%
Laba (Rugi) Bruto	19,99%	-1020,71%	8,84%	-55,49%	94,83%
Laba Bersih (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	260,99%	109,75%	326,06%	-98,19%	66,89%
Jumlah Aset	18,84%	-5,93%	-13,15%	46,99%	31,92%
Jumlah Liabilitas	15,66%	-10,02%	-17,55%	65,90%	22,27%
Ekuitas	28,09%	8,90%	2,80%	4,02%	60,80%
Rasio Keuangan (x)					
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	0,70	0,52	0,40	0,45	0,52
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	1,38	1,33	1,34	1,28	1,44
Jumlah Liabilitas / Ekuitas (*Debt to Equity*)	2,63	3,00	2,91	3,63	2,27
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (*Debt to Asset*)	0,72	0,75	0,74	0,78	0,69
Interest Bearing Debt to Equity Ratio	2,04	2,35	1,98	2,18	1,48
*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)***	0,86	0,83	0,54	0,62	1,09
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,69	1,16	1,17	1,05	3,62
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor / Pendapatan (*Gross Profit Margin*)	25,89%	19,70%	20,23%	16,50%	29,79%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)	5,88%	1,49%	1,39%	0,29%	12,93%
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	9,96%	3,34%	2,79%	0,67%	38,75%
Laba Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	2,75%	0,84%	0,71%	0,15%	11,84%

**tidak diaudit*

***EBITDA yang digunakan dalam hitungan Debt Service Coverage Ratio merupakan laba rugi yang telah disetahunkan*

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Perseroan belum memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian kredit. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut:

Kreditur	Rasio yang dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Nilai pemenuhan 30 Juni 2026	Status Pemenuhan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*Current Ratio (CR) minimal 1,0* [(5)]	1,00	0,70	Akan dievaluasi per 31 Des 2026
	Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,20 [(3)]	2,20	2,04	

	Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% [(1)]	100%	86%	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Debt to Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 300%* [(3)]	300%	204%	Akan dievaluasi per 31 Des 2026
	Interest Coverage Ratio (ICR) minimal sebesar 150% [(2)]	150%	169%	
	Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,1x [(1)]	1,10	0,86	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Debt Service Coverage (DSC) ≥ 1,25* [(1)]	1,25	0,86	Belum terpenuhi, *Waiver* telah diterima
	Debt to EBITDA ≤ 2,00 [(4)]	2,00	2,69	
	Debt to Equity Ratio ≤ 2,00 [(3)]	2,00	2,04	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*Interest Coverage Ratio (ICR) minimal 150%* [(2)]	150%	169%	Akan dievaluasi per 31 Des 2026
	Debt to Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 400% [(3)]	400%	204%	
	Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,1x [(1)]	1,10	0,86	
PT Bank Central Asia Tbk	*Debt Service Coverage (DSC) minimal 1,00x* [(1)]	1,00	0,86	Akan dievaluasi per 31 Des 2026
	Current Ratio (CR) minimal 1,00 [(5)]	1,00	0,70	
	Debt to Equity Ratio ≤ 3,00 [(3)]	3,00	2,04	

Keterangan:

(1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dihitung Dengan EBITDA Dibagi Dengan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Dan Beban Keuangan Tahun Berjalan.

(2) Interest Coverage Ratio Dihitung Dari EBIT Dibagi Dengan Beban Keuangan Tahun Berjalan.

(3) Debt To Equity Ratio Dihitung Dari Total Utang yang Berbunga Perseroan Dibandingkan Dengan Nilai Total Ekuitas Perseroan.

(4) Debt To EBITDA Dihitung Dari Total Utang yang Berbunga Perseroan Dibagi Dengan EBITDA.

(5) Current Ratio Dihitung dari Aset lancar Dibagi Dengan Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan belum memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan surat *waiver* atas batasan-batasan tertentu pada perjanjian pinjaman bank sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan yaitu Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

Perseroan tidak memperoleh surat waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran terhadap batasan-batasan tertentu (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit, karena pelanggaran tersebut terjadi berdasarkan posisi keuangan per 30 Juni 2026 yang merupakan periode pelaporan tengah tahun. Berdasarkan komunikasi dengan pihak bank, surat *waiver* akan dipertimbangkan dan diterbitkan apabila pelanggaran tersebut masih terjadi berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2026.

Oleh karena itu, hingga tanggal Prospektus ini, belum terdapat surat *waiver* yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

Bank	No. Surat	Tanggal
PT Bank Central Asia Tbk	No. 00397/SLK/2026	25 Mei 2026
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	No. 130/AAP-BRI/EXT/II/26 No. 270/AAP-BRI/EXT/V/26 No. 308/AAP-BRI/EXT/VII/26	24 Februari 2026 29 Mei 2026 29 Juni 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	No. CMB.CM6/MNE.125/SPPK/2026 No. CMB.CM6/MNE.429/SPPK/2026	10 April 2026 7 Oktober 2026

Khusus untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, batasan-batasan tertentu (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit baru wajib dipenuhi dan dievaluasi berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2026. Per 30 Juni 2026 tidak terdapat pelanggaran kovenan yang mensyaratkan adanya surat persetujuan (*waiver*).

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

Tanggal yang berakhir pada	Nilai kurs rata-rata
30 Juni 2026	17.856
30 Juni 2025*	16.233
31 Desember 2025	16.782
31 Desember 2024	16.162
31 Desember 2023	15.416

**tidak diaudit*

Catatan:
Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen dalam laporannya pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan nomor 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 yang ditandatangani oleh Damajanti Tanumihardja, CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 2103) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dengan laporan auditor independen yang diterbitkan kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dengan nomor 00119/2.0829/AU.1/05/0671-3/1/V/2026 yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA., CPI., CFI., CLI., ACPACC., SH. (Registrasi Akuntan Publik No. 0671) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara pada saat didirikan pertama kali, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tahun 2014, Tambahan No. 49184. ("**Akta Pendirian**"). Perusahaan memulai operasinya sejak tahun 2014.

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 21/2026 *juncto* Akta No. 138/2026.

Perseroan saat ini berkedudukan dan berkantor di Jl. Plaju No.11, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230. Perseroan beroperasi pada tahun 2018. Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21/2026, Perseroan berusaha dalam bidang sebagai berikut:

(i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)*;*
(ii) Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210);
(iii) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916);
(iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
(v) Aktivitas Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905); dan
(vi) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203)

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar (secara riil) dijalankan saat ini adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru, amandemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2026

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"

  Amendemen PSAK 109 ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen PSAK 109 juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

  Amandemen ini mengubah persyaratan 'penggunaan sendiri' dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Amendemen ini hanya berlaku untuk kontrak yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak-kontrak ini dikenal sebagai 'kontrak dengan referensi listrik yang bergantung pada alam'.

  Standar baru, interpretasi dan amandemen baru yang belum efektif

  Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

  PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional". PSAK 118 menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Manajemen saat ini sedang menilai secara rinci implikasi penerapan standar baru ini pada laporan keuangan Perusahaan. Dari penilaian awal, secara garis besar, dampak potensial berikut telah diidentifikasi:

1. Meskipun adopsi PSAK 118 tidak akan berpengaruh pada laba neto Perusahaan, Perusahaan mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi. Dari penilaian dampak garis besar yang dilakukan Perusahaan, pos-pos berikut mungkin berpotensi memengaruhi laba operasi:

   (a) Perbedaan nilai tukar yang saat ini digabungkan dalam pos 'pendapatan lain dan keuntungan/ (kerugian) lain - neto' dalam laba operasi mungkin perlu dipisahkan, dengan beberapa keuntungan atau kerugian dari nilai tukar disajikan di bawah laba operasi.

   (b) PSAK 118 memiliki persyaratan khusus mengenai kategori di mana keuntungan atau kerugian derivatif diakui - yaitu kategori yang sama dengan pendapatan dan beban yang dipengaruhi oleh risiko yang dikelola oleh derivatif tersebut. Meskipun Perusahaan saat ini mengakui beberapa keuntungan atau kerugian dalam laba operasi dan lainnya dalam biaya keuangan, mungkin akan terjadi perubahan mengenai tempat di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui, dan Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi kebutuhan untuk melakukan perubahan.

2. Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama mungkin akan berubah akibat penerapan konsep 'ringkasan terstruktur yang berguna' dan prinsip yang ditingkatkan mengenai agregasi dan disagregasi. Selain itu, karena goodwill akan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, Perusahaan akan memisahkan goodwill dan aset tidak berwujud lainnya serta menyajikannya secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3. Perusahaan tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam informasi yang saat ini diungkapkan dalam catatan, karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi material etap tidak berubah; namun, cara pengelompokan informasi tersebut mungkin berubah sebagai akibat dari prinsip agregasi/disagregasi. Selain itu, akan ada pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan untuk:

   (i) UKTM;
   (ii) rincian jenis beban untuk pos-pos yang disajikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi laporan laba rugi - rincian ini hanya diperlukan untuk beberapa jenis beban tertentu; dan
   (iii) untuk periode tahunan pertama penerapan PSAK 118, rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara angka yang telah disajikan ulang berdasarkan penerapan PSAK 118 dan angka yang sebelumnya disajikan berdasarkan PSAK 201.

4. Dari perspektif laporan arus kas, akan ada perubahan cara penyajian bunga diterima dan bunga dibayar. Bunga dibayar akan disajikan sebagai arus kas pendanaan dan bunga diterima akan disajikan sebagai arus kas investasi, yang merupakan perubahan dari penyajian saat ini sebagai bagian dari arus kas operasi.

3. ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel di bawah adalah perkembangan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Pendapatan Neto	200.115.618.505	219.150.940.820	368.823.532.926	415.427.104.287	517.030.479.808
Beban Pokok Pendapatan	(148.305.843.044)	(175.973.672.855)	(294.197.632.515)	(346.863.185.348)	(363.000.264.005)
Laba Bruto	51.809.775.461	43.177.267.965	74.625.900.411	68.563.918.939	154.030.215.803
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	15.255.636.039	3.261.221.025	6.655.520.556	1.684.928.615	85.786.770.641
Laba Neto Tahun Berjalan	11.772.627.765	3.261.221.025	5.142.241.704	1.206.933.408	66.854.228.298
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	12.311.353.812	3.261.221.025	5.030.346.081	1.426.962.772	66.854.228.298

**tidak diaudit*

Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Pendapatan

Pendapatan Perseroan per Juni 2026 menurun sebesar Rp19.035.322.315 atau 8,7% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan pengupasan lapisan tanah dari BGG. Namun demikian, dampak penurunan tersebut sebagian diimbangi dengan dimulainya kontribusi pendapatan dari pemberi kerja lainnya, yaitu PTRO, POS, IBP, BSB, dan SBS.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan sebagai persentase terhadap pendapatan menurun dari Rp175.973.672.855 (80,3%) pada Juni 2025 menjadi Rp 148.305.843.044 (74,1%) pada Juni 2026. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban bahan bakar dari 25% menjadi 15% terhadap pendapatan. Penurunan beban bahan bakar terutama dipengaruhi oleh proyek PTRO dan SBS, di mana biaya bahan bakar ditanggung oleh Pemberi Kerja, sehingga mengurangi beban bahan bakar yang ditanggung oleh Perseroan. Selain itu, penurunan beban pokok pendapatan juga dipengaruhi oleh menurunnya beban *spare parts* sehubungan dengan pelaksanaan program *preventive dan predictive maintenance* atas alat berat. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan beban gaji seiring dengan bertambahnya proyek baru dari PTRO dan POS.

Laba bruto

Laba bruto meningkat sebesar Rp8.632.507.496 atau 20% dibandingkan periode sebelumnya, meskipun terjadi penurunan pendapatan. Peningkatan ini didorong oleh penurunan beban pokok pendapatan, khususnya beban bahan bakar tersebut menyebabkan margin laba bruto Perseroan juga meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.368.345.808 atau 16% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya karyawan, yang mengakibatkan peningkatan beban gaji dan tunjangan karyawan kantor pusat.

Beban keuangan/bunga

Beban keuangan/bunga mengalami kenaikan sebesar Rp602.072.655 atau 3%, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dari penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang diimbangi dengan menurunnya beban bunga atas liabilitas sewa guna usaha.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan

Laba komprehensif periode berjalan meningkat sebesar Rp9.050.132.787 atau 277,5% dibandingkan periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto, yang berdampak positif terhadap laba komprehensif periode berjalan.

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan

Pendapatan Perseroan menurun sebesar Rp46.603.571.361 atau 11% dibandingkan periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh penyesuaian rencana produksi dari pelanggan yang berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan sehingga penurunan target produksi tersebut secara langsung mempengaruhi realisasi pendapatan.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan menurun secara proporsi terhadap pendapatan, beban pokok pendapatan mengalami penurunan dari 83,5% pada tahun 2024 menjadi 79,8% pada tahun 2025.

Beban pokok pendapatan mengalami penurunan dari konsumsi bahan bakar dari 31,9% pada tahun 2024 menjadi 23,7% pada tahun 2025 seiring dengan peningkatan efisiensi operasional dan optimalnya program peremajaan aset yang pada tahun 2024 belum memberikan dampak penuh karena belum beroperasi selama satu tahun penuh, sehingga mengakibatkan peningkatan beban penyusutan sebesar Rp21.395.166.011 dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan penambahan aset tetap pada tahun 2024. Penyusutan atas aset tersebut telah dibebankan selama satu tahun penuh pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2024 belum dibebankan untuk periode satu tahun penuh.

Laba bruto

Laba bruto meningkat sebesar Rp6.061.981.472 atau 8,84% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terjadi penurunan pendapatan akibat turunnya rencana produksi dari pelanggan. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan struktur biaya dan efisiensi beban pokok pendapatan yang disebabkan karena program peremajaan aset 2024 sudah optimal di 2025 sehingga margin laba bruto meningkat dari 16,5% pada tahun 2024 menjadi 20,3% pada tahun 2025.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari Rp33.231.161.592 untuk tahun yang berakhir 2025 dibandingkan dengan Rp36.287.891.197 untuk tahun yang berakhir 2024.

Beban keuangan/bunga

Beban keuangan/bunga meningkat sebesar Rp9.088.301.038 atau 31% terutama akibat peningkatan beban bunga liabilitas sewa guna atas mesin dan alat berat yang ditambahkan pada pertengahan tahun 2024, yang pada tahun 2025 telah dibebankan untuk periode satu tahun penuh.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan

Laba komprehensif periode berjalan meningkat sebesar Rp3.603.383.309 atau 252,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu meningkatkan profitabilitas meskipun volume produksi mengalami penurunan melalui strategi peremajaan aset yang telah berjalan optimal serta pengendalian biaya yang lebih efektif sehingga bisa menghasilkan perbaikan margin dan memperkuat kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025.

Kebijakan Manajemen untuk Meningkatkan Kondisi Kinerja Keuangan

Kebijakan manajemen dalam meningkatkan kondisi kinerja keuangan difokuskan pada optimalisasi produksi melalui peningkatan utilisasi alat berat dan perencanaan operasional yang terstruktur, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan output yang maksimal. Perseroan juga menerapkan pengendalian biaya secara ketat melalui pengelolaan operasional (*operational management discipline*), termasuk pengendalian biaya operasional dan perencanaan pemeliharaan yang efektif. Di sisi teknis, implementasi program *preventive* dan *predictive maintenance* memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan, meminimalkan risiko *breakdown*, serta menjaga keandalan alat dan efisiensi biaya perawatan.

Selain itu, Perseroan menerapkan pendekatan "*safety-driven performance*" dengan menjadikan aspek keselamatan kerja sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas operasional. Budaya keselamatan yang kuat, kepatuhan terhadap standar K3, serta pengawasan yang disiplin tidak hanya menekan risiko kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi *downtime*. Di sisi lain, diversifikasi usaha terus dilakukan untuk memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis, sehingga memperkuat ketahanan perusahaan. Pendekatan terintegrasi antara efisiensi biaya, disiplin keselamatan, dan keandalan operasional ini diharapkan mampu menjaga stabilitas margin serta mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp101.603.375.521 atau 19,6% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tertundanya dimulainya aktivitas produksi pada Januari 2024 karena persetujuan RKAB PT Budi Gema Gempita baru diperoleh pada 26 Januari 2024. Keterlambatan awal tahun tersebut berdampak pada berkurangnya volume produksi secara keseluruhan.

Selain itu, pada periode Februari hingga Juni 2024, tingkat produksi tidak mencapai target yang direncanakan akibat kondisi cuaca dengan curah hujan yang lebih tinggi dan terjadi longsor dinding lereng tambang yang mempengaruhi kegiatan operasional.

Beban pokok pendapatan

Beban Pokok Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp16.137.078.657 atau 4,4% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, sejalan dengan penurunan volume produksi.

Namun demikian, secara persentase proporsi terhadap pendapatan, Beban Pokok Pendapatan meningkat dari 70,2% pada tahun 2023 menjadi 83,5% pada tahun 2024.

Peningkatan beban pokok pendapatan terutama dipengaruhi oleh:

- Kenaikan beban penyusutan dari Rp64 Milyar pada tahun 2023 menjadi Rp82,7 Milyar pada tahun 2024, seiring dengan penambahan dua armada alat berat sebagai bagian dari program optimalisasi dan peremajaan armada.
- Peningkatan proporsi biaya bahan bakar dari 26,1% menjadi 31,9% dipengaruhi oleh penurunan pendapatan akibat penurunan volume produksi serta intensitas penggunaan alat berat dalam kondisi operasional yang kurang optimal akibat curah hujan yang tinggi di semester pertama tahun 2024, serta kegiatan penanganan longsor dan normalisasi area kerja.

Laba bruto

Laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp85.466.296.864 atau 55,5% pada akhir tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Margin laba bruto turut menurun dari 29,8% pada akhir tahun 2023 menjadi 16,5% pada akhir tahun 2024. Penurunan margin kotor tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya proporsi Beban Pokok Pendapatan terhadap pendapatan, sebagaimana telah dijelaskan, serta belum optimalnya penyerapan biaya tetap akibat penurunan volume produksi.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari Rp36.287.891.197 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Rp36.144.960.965 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban keuangan/bunga

Beban keuangan/bunga menurun sebesar Rp 3.632.861.619 atau sebesar 11% dari tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya beban bunga atas liabilitas sewa guna usaha yang sebagian masa sewa guna usaha tersebut sudah berakhir di akhir tahun 2023.

Laba komprehensif periode berjalan

Laba komprehensif periode berjalan turun sebesar Rp65.427.265.526 atau 98% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan Perseroan yang diikuti dengan penurunan laba bruto, serta meningkatnya tekanan terhadap margin usaha. Kombinasi penurunan volume produksi dan meningkatnya proporsi biaya tetap terhadap pendapatan memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas Perseroan pada tahun 2024.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

ASET

Tabel berikut menyajikan rincian aset pada tanggal 30 Juni 2026 serta 31 Desember 2025, 2024, dan 2023:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Aset Lancar	238.068.002.588	173.203.511.535	184.724.376.884	138.199.613.277
Aset Tidak Lancar	618.643.134.983	547.690.085.336	645.354.699.165	426.503.166.858
Total Aset	856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135

Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025

Aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 64.864.491.053 atau 37,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset kontrak yang berasal dari kontrak kerja baru dengan PTRO, POS dan IBP, serta meningkatnya persediaan suku cadang (*spare parts*) untuk mendukung kebutuhan operasional alat berat pada proyek PTRO dan POS.

Perbandingan Aset Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset lancar Perseroan menurun sebesar Rp11.520.865.349 atau 6,2% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh saldo lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN) pada tahun 2024 yang telah dikompensasikan pada tahun 2025.

Perbandingan Aset Lancar Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp46.524.763.607 atau 34%, yaitu dari Rp138.199.613.277 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp184.724.376.884 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar

Rp30.865.701.796 atau 34%, yang sejalan dengan peningkatan *Days Sales Outstanding* (DSO) dari 65 hari pada tahun 2023 menjadi 108 hari pada tahun 2024. Peningkatan DSO tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian termin pembayaran kepada pemberi kerja. Manajemen menilai saldo piutang usaha tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan, mengingat piutang berasal dari pemberi kerja yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Selain itu, kenaikan aset lancar juga dipengaruhi oleh peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp14.035.793.524, yang sebagian besar merupakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian mesin dan alat berat. Saldo lebih bayar PPN tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran Perseroan pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025

Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp70.953.049.647 atau 13%, terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna (*right-of-use assets*) yang berasal dari penambahan aset sewa guna usaha berupa mesin dan alat berat untuk mendukung pelaksanaan proyek baru. Selain itu juga ada penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan.

Perbandingan Aset Tidak Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar Perseroan menurun sebesar Rp97.664.613.829 atau 15%, yaitu dari Rp645.354.699.165 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp547.690.085.336 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak guna selama periode berjalan.

Perbandingan Aset Tidak Lancar Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp218.851.532.307 atau 51%, yaitu dari Rp426.503.166.858 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp645.354.699.165 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap sebagai bagian dari program peremajaan aset Perseroan guna mendukung pencapaian target produksi pada tahun 2024.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas pada tanggal 30 Juni 2026 serta 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Liabilitas Jangka Pendek	338.233.235.095	433.415.519.144	414.781.834.753	265.248.137.556
Liabilitas Jangka Panjang	282.195.342.336	103.006.871.399	235.856.381.049	126.940.745.104
Jumlah Liabilitas	620.428.577.431	536.422.390.543	650.638.215.802	392.188.882.660
Jumlah Ekuitas	236.282.560.140	184.471.206.328	179.440.860.247	172.513.897.475

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025

Liabilitas jangka pendek Perseroan menurun sebesar Rp 95.182.284.049 atau 21,9%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sebagian pinjaman bank dari liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka panjang setelah Perseroan memperoleh surat persetujuan *waiver* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas *financial* dan *non-financial covenant*.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp18.633.684.391 atau 4,49%, yaitu dari Rp414.781.834.753 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp433.415.519.144 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sebagian pinjaman bank menjadi liabilitas jangka pendek sehubungan dengan sisa jatuh tempo pinjaman yang kurang dari satu tahun. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan utang usaha sejalan dengan menurunnya aktivitas Perseroan, serta pelunasan utang jangka pendek dan utang lain-lain pada tahun 2025.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp149.533.697.197 atau 56%, yaitu dari Rp265.248.137.556 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp414.781.834.753 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pinjaman dari pihak ketiga dan pihak berelasi, pinjaman rekening koran, pinjaman bank, serta uang muka untuk pembelian aset alat berat.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025

Liabilitas jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp 179.188.470.937 atau 173,9%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sebagian pinjaman bank dari liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka panjang setelah Perseroan memperoleh *waiver* atas *financial* dan *non-financial covenant*, serta penambahan liabilitas sewa guna usaha berupa mesin dan alat berat untuk mendukung pelaksanaan proyek baru.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang Perseroan menurun sebesar Rp132.849.509.650 atau 56%, yaitu dari Rp235.856.381.049 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp103.006.871.399 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sebagian pinjaman Bank menjadi liabilitas jangka pendek.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp108.915.635.945 atau 85,8%, yaitu dari Rp126.940.745.104 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp235.856.381.049 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pinjaman bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebagai bagian dari program peremajaan aset Perseroan.

Total Ekuitas

Perbandingan Ekuitas Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025

Total ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp51.811.353.812 atau 28%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan setoran modal sebesar Rp39.500.000.000 dan total penghasilan komprehensif yang diperoleh Perseroan selama periode berjalan sebesar Rp12.311.353.812.

Perbandingan Ekuitas Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp5.030.346.081 atau 3%. Peningkatan tersebut terutama berasal dari laba bersih Perseroan selama periode 2025.

Perbandingan Ekuitas Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp6.926.962.772 atau 4%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh laba bersih yang dibukukan Perseroan pada tahun 2024 sebesar Rp1.206.933.408. Selain itu, pada periode yang sama Perseroan juga melakukan penambahan modal sebesar Rp5.500.000.000 yang meningkatkan saldo modal disetor.

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

4. SEGMEN OPERASI

Perusahaan menggolongkan segmen usaha dalam dua segmen utama yaitu jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat. Segmen jasa kontrak pertambangan meliputi kontrak pertambangan secara menyeluruh mulai dari pengupasan lapisan penutup tanah, pengeboran, peledakan, pengangkutan, penggalian, jasa penambangan.

Perusahaan memperoleh pendapatan signifikan dari PT Budi Gema Gempita (BGG) masing-masing sebesar Rp 104.545.276.107 atau 52% dari total pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, sebesar Rp 212.567.778.977 atau sebesar 97% dari total pendapatan pada 30 Juni 2025, sebesar Rp 348.021.873.217 atau sebesar 94% dari total pendapatan pada tahun 2025, serta sebesar 100% dari total pendapatan pada tahun 2024 dan 2023 atau masing-masing sebesar Rp 415.427.104.287 dan Rp 517.030.479.808.

PT Petrosea Tbk (PTRO) sebesar Rp 30.564.859.068 atau 15% untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan PT Satria Bahana Sarana sebesar Rp 26.011.755.152 atau 13% untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026. Pendapatan tersebut berasal dari segmen jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat.

30 Juni 2026	Jasa kontrak pertambangan	Sewa alat berat	Total
Pendapatan	175.487.808.717	24.627.809.788	200.115.618.505
Laba usaha	28.107.927.350	6.422.465.419	34.530.392.769
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	87,69%	12,31%	100,00%
Kontribusi terhadap Total laba usaha	81,40%	18,60%	100,00%
Profitabilitas per segmen	16,01%	26,07%	17,25%

30 Juni 2025 (tidak diaudit)	Jasa kontrak pertambangan	Sewa alat berat	Total
Pendapatan	212.567.778.977	6.583.161.843	219.150.940.820
Laba usaha	18.871.916.096	4.157.421.745	23.029.337.841
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	97,00%	3,00%	100,00%
Kontribusi terhadap Total laba usaha	81,95%	18,05%	100,00%
Profitabilitas per segmen	8,88%	63,15%	10,51%

31 Desember 2025	Jasa kontrak pertambangan	Sewa alat berat	Total
Pendapatan	348.021.873.217	20.801.659.709	368.823.532.926
Laba usaha	43.279.975.030	1.341.857.788	44.621.832.818
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	94%	6%	100%
Kontribusi terhadap Total laba usaha	97%	3%	100%
Profitabilitas per segmen	12.44%	6.45%	12.10%

31 Desember 2024	Jasa kontrak pertambangan	Sewa alat berat	Total
Pendapatan	415.427.104.287	-	415.427.104.287
Laba usaha	30.659.421.150	-	30.659.421.150
Kontribusi terhadap Pendapatan	100%	-	100%
Kontribusi terhadap laba usaha	100%	-	100%
Profitabilitas per segmen	7.38%	-	7.38%

31 Desember 2023	Jasa kontrak pertambangan	Sewa alat berat	Total
Pendapatan	517.030.479.808	-	517.030.479.808
Laba usaha	118.453.270.123	-	118.453.270.123
Kontribusi terhadap Pendapatan	100%	-	100%
Kontribusi terhadap laba usaha	100%	-	100%
Profitabilitas per segmen	22.91%	-	22.91%

Perbandingan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 30 Juni 2025

Segmen Jasa Kontrak Pertambangan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar Rp37 miliar atau 17% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pengupasan tanah dari BGG, yang sebagian diimbangi oleh dimulainya kontribusi pendapatan dari pemberi kerja baru, yaitu PTRO, POS, SBS dan IBP. Meskipun pendapatan mengalami penurunan, namun laba usaha segmen meningkat sebesar Rp9,24 miliar, terutama didukung oleh penurunan beban pokok pendapatan. Kondisi

tersebut mendorong peningkatan profitabilitas segmen, yang tercermin dari kenaikan margin laba usaha (OPM) dari 8,88% menjadi 16,01%.

Segmen Sewa Alat Berat mencatatkan pendapatan sebesar Rp24,6 miliar, yang berkontribusi sebesar 12,3% terhadap total pendapatan. Pendapatan segmen Sewa Alat Berat meningkat sebesar Rp18 miliar atau 274% dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan penambahan alat berat yang disewa oleh SBS di periode berjalan dan dari pemberi kerja baru yaitu IBP dan BSB. Segmen tersebut juga mencatatkan laba usaha sebesar Rp6,4 miliar, yang berkontribusi sebesar 18,60% terhadap total laba usaha, dengan margin laba usaha (OPM) sebesar 26,07%.

Perbandingan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Segmen Jasa Kontrak Pertambangan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar Rp67,41 miliar atau 16,23% menjadi Rp348,02 miliar pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh penyesuaian rencana produksi dari pelanggan yang berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan sehingga penurunan target produksi tersebut secara langsung mempengaruhi realisasi pendapatan. Namun demikian, laba usaha segmen ini melonjak 41,16% menjadi Rp43,28 miliar seiring efisiensi biaya operasional, yang berhasil meningkatkan profitabilitas (OPM) segmen secara signifikan dari 7,38% menjadi 12,44%.

Sementara itu, terdapat diversifikasi lini bisnis melalui Segmen Sewa Alat Berat sebagai segmen operasi baru di tahun 2025. Segmen baru ini berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp20,80 miliar (berkontribusi 6% terhadap total pendapatan) dan laba usaha sebesar Rp1,34 miliar (berkontribusi 3% terhadap total laba usaha) dengan tingkat profitabilitas (OPM) sebesar 6,45%.

Total pendapatan Perseroan turun 11,22% menjadi Rp368,82 miliar karena penurunan di segmen utama, meskipun berhasil sedikit diredam oleh segmen baru. Namun, berkat efisiensi operasional, total laba usaha tumbuh pesat sebesar 45,54% menjadi Rp44,62 miliar, yang mendorong peningkatan profitabilitas total dari 7,38% di tahun 2024 menjadi 12,10% pada tahun 2025.

Perbandingan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Segmen Jasa Kontrak Pertambangan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar Rp101,60 miliar atau 19,65% menjadi Rp415,43 miliar pada tahun 2024, yang dipengaruhi oleh longsor dan jembatan putus, sehingga berdampak pada berkurangnya volume produksi secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, laba usaha segmen ini mengalami penurunan signifikan sebesar 74,12% menjadi Rp30,66 miliar pada tahun 2024 dari Rp118,45 miliar di tahun sebelumnya, sehingga menekan profitabilitas (OPM) segmen secara tajam dari 22,91% menjadi 7,38% akibat lonjakan beban operasional.

Sementara itu, untuk Segmen Sewa Alat Berat, Perseroan belum membukukan pendapatan maupun laba usaha pada tahun 2024 dan 2023, sehingga segmen jasa kontrak pertambangan masih menjadi segmen operasi tunggal yang memberikan kontribusi penuh sebesar 100% terhadap total pendapatan dan laba usaha Perseroan pada kedua periode tersebut.

Total kinerja keuangan total Perseroan sepenuhnya mencerminkan pergerakan segmen tunggal tersebut, di mana total pendapatan turun 19,65% menjadi Rp415,43 miliar dan total laba usaha merosot 74,12% menjadi Rp30,66 miliar pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan marjin profitabilitas Perseroan secara keseluruhan tertekan dari semula 22,91% pada tahun 2023 menjadi 7,38% pada tahun 2024.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat. Perseroan menilai tidak ada kecenderungan atas permintaan, perikatan dan/atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Per 30 Juni 2026, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan menilai bahwa likuiditas yang dihasilkan dari pendapatan perseroan dan sumber pendanaan Perseroan yang berasal dari setoran modal pemegang saham memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas atas kegiatan operasi untuk memelihara dan menjaga likuiditas dan sumber pendanaan perseroan

Analisa Arus Kas
Arus kas Perseroan mengikuti karakteristik bisnis jasa pertambangan, dimana penerimaan kas terutama berasal dari Pemberi Kerja berdasarkan volume atau progres pekerjaan, sedangkan pengeluaran kas terutama digunakan untuk membiayai kegiatan operasional proyek, seperti tenaga kerja, bahan bakar, dan pemeliharaan alat berat.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	26.406.701.898	58.343.728.133	116.065.280.218	60.856.488.545	151.894.566.028
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(52.991.105.117)	(7.968.747.189)	(9.687.415.999)	(217.674.354.755)	(55.063.518.900)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	18.510.399.047	(47.825.661.743)	(101.331.839.350)	153.117.747.607	(90.219.829.480)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK	(8.074.004.172)	2.549.319.201	5.046.024.869	(3.700.118.603)	6.611.217.648
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	20.597.223.508	15.551.198.639	15.551.198.639	19.251.317.242	12.640.099.594
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	12.523.219.336	18.100.517.840	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242

**tidak diaudit*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih dari aktivitas operasi periode Juni 2026 menurun sebesar Rp31,94 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan pembayaran dari pelanggan dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana sebagian besar pendapatan proyek baru dilaksanakan di kuartal II 2026 sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut belum jatuh tempo.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Faktor pendorong utamanya adalah kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp30,91 miliar, yang mencerminkan

peningkatan realisasi pendapatan tunai dan efektivitas penagihan piutang. Kenaikan penerimaan kas tersebut mampu mengimbangi peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp91,03 miliar atau 59,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas dari pelanggan sejalan dengan penurunan aktivitas usaha pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, serta meningkatnya pengeluaran kas untuk kegiatan operasional, termasuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pajak penghasilan. Akibatnya, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar Rp45,02 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kas untuk perolehan tanah dan bangunan pada periode berjalan.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp207,99 miliar atau 95,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran untuk perolehan aset tetap, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp217,67 miliar, sedangkan pada tahun 2025 hanya sebesar Rp9,99 miliar. Selain itu, pada tahun 2025 Perseroan juga memperoleh penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp300 juta. Dengan menurunnya belanja modal pada tahun 2025, kebutuhan kas untuk aktivitas investasi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp162,61 miliar atau 295,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pengeluaran untuk perolehan aset tetap dalam rangka program peremajaan aset Perseroan. Investasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp66,34 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp65,4 miliar.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman bank jangka panjang serta menurunnya penerimaan pinjaman selama tahun berjalan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan meningkat dari arus kas keluar bersih sebesar Rp90,22 miliar pada tahun 2023 menjadi arus kas masuk bersih sebesar Rp153,12 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pinjaman bank jangka panjang selama tahun berjalan. Penerimaan pinjaman tersebut mampu mengimbangi dan melampaui pembayaran kewajiban pendanaan yang dilakukan Perseroan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pendanaan pada tahun 2024 menghasilkan arus kas masuk bersih, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencatat arus kas keluar bersih.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Aset tetap				
Tanah	33.085.509.535	-	-	-
Bangunan	9.175.740.466	-	-	-
Mesin dan alat berat	1.982.984.187	5.316.515.400	298.977.007.037	48.300.000.000
Peralatan	3.718.054.702	1.185.865.402	2.648.183.997	2.143.718.215
Inventaris kantor	278.659.099	169.756.125	376.781.607	763.015.146
Kendaraan	-	2.004.317.857	4.866.135.135	1.450.020.251
Unit pendukung	10.943.457.128	921.600.000	2.554.797.560	2.507.464.278
Total belanja modal	**59.184.405.117**	**9.598.054.784**	**309.422.905.336**	**55.164.217.890**

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

7. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki porsi pinjaman bank dan liabilitas sewa (*leasing*) yang cukup signifikan untuk mendukung pendanaan aset serta armada operasional. Oleh karena itu, perubahan suku bunga acuan (seperti BI-Rate atau suku bunga pasar terkait) dapat memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan secara material melalui peningkatan beban keuangan secara konsolidasian.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian tidak normal atau jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

9. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2026	2025*	2025	2024	2023
Pendapatan denda dan penalti	5.172.187.500	-	-	-	-
Klaim asuransi	1.033.151.149	-	5.255.598.928	522.025.228	358.308.932

Peningkatan pendapatan operasional lainnya terutama disebabkan oleh pendapatan kompensasi dari PT BBA atas pembatalan sewa alat berat sebesar Rp5,2 miliar serta pendapatan klaim asuransi dari PT Asuransi Raksa Pratikara sebesar Rp1,0 miliar.

10. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN

Tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih yang terjadi terkait kenaikan harga, volume atau jumlah jasa yang dijual.

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN

Perubahan harga komoditas pada industri pertambangan pada umumnya dapat mempengaruhi tingkat aktivitas produksi pemilik tambang. Namun demikian, Perseroan sebagai kontraktor pertambangan tidak secara langsung terekspos terhadap fluktuasi harga komoditas, karena pendapatan Perseroan berdasarkan produksi yang sudah ditentukan di LOI atau kontrak kerja sesuai RKAB dari klien. Dengan demikian, selama kegiatan operasional tambang tetap berjalan sesuai rencana produksi yang telah disepakati dalam kontrak, perubahan harga komoditas tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan Perseroan.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN SECARA LANGSUNG

Kebijakan pemerintah memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja usaha dan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur berbagai aspek kegiatan usaha di sektor pertambangan;
b. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dapat mempengaruhi struktur biaya tenaga kerja Perseroan. Perubahan tersebut berpotensi memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil usaha, serta prospek usaha Perseroan.
c. Kebijakan pemerintah terkait penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi mempengaruhi struktur biaya operasional Perseroan, terutama sebagai akibat dari fluktuasi harga yang dapat meningkatkan atau menurunkan beban biaya operasional;

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Tabel berikut menyajikan perincian kewajiban dan komitmen kontraktual untuk tanggal 30 Juni 2026:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2026			
	Jumlah tercatat	Kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Pinjaman bank jangka pendek	46.548.288.549	46.548.288.549	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	263.454.286.893	93.700.590.254	131.091.231.895	38.662.464.744
Pinjaman pembiayaan konsumen	5.025.343.036	2.762.605.661	1.215.807.238	1.046.930.137
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	467.172.275.252	209.255.825.400	219.012.853.021	38.903.596.831

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Terhadap Pemberi Kerja Utama

Perseroan memiliki risiko operasional terkait konsentrasi pendapatan pada pemberi kerja utama. Risiko utama yang dihadapi Perseroan apabila terjadi gangguan pada pemberi kerja utama ini meliputi, namun tidak terbatas pada: risiko penurunan volume target produksi (*overburden removal* maupun produksi komoditas) yang diakibatkan oleh dinamika internal operasional atau kondisi keuangan pemberi kerja tersebut, risiko keterlambatan pembayaran piutang jasa penambangan, serta risiko pemutusan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja sama secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir.

Apabila pemberi kerja utama memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, mengurangi volume pekerjaan, atau mengalami gangguan operasional dan finansial akibat penurunan harga komoditas, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan, profitabilitas, arus kas, serta kelangsungan usaha Perseroan.

Pemberi kerja utama Perseroan saat ini adalah BGG. Pendapatan yang diperoleh dari BGG berasal dari jenis jasa pengupasan lapisan tanah (*overburden removal*) dan pengumpulan batu bara (*coal getting*). Sepanjang tahun 2024, 2025, dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, kontribusi pendapatan dari BGG terhadap total pendapatan Perseroan masing-masing adalah sebesar 100%, 94,03%, dan 52,25%. Penurunan persentase ketergantungan yang signifikan pada tahun 2026 ini merupakan hasil dari strategi diversifikasi portofolio klien Perseroan, di mana Perseroan saat ini telah menghasilkan pendapatan komersial dari pemberi kerja lainnya, antara lain SBS, POS, dan DBK.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pengurangan Volume Produksi Akibat Penyesuaian RKAB Pemberi Kerja

Penyesuaian RKAB Pembeli Kerja terutama disebabkan oleh penyesuaian kuota produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, yang kemudian berdampak pada volume produksi dan RKAB Pembeli Kerja. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan volume pekerjaan dan pendapatan Perseroan.

Penurunan pendapatan tersebut dapat menekan margin keuntungan, mengganggu arus kas operasional, dan pada akhirnya berdampak material terhadap penurunan profitabilitas serta kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Risiko Cuaca dan Bencana Alam
Aktivitas penambangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Peningkatan curah hujan dapat membatasi kegiatan operasional karena menyebabkan area pit menjadi terlalu basah untuk ditambang serta mengakibatkan jalan hauling menjadi licin, tergenang, atau sulit dilalui oleh alat berat dan kendaraan operasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat bahkan menghentikan sementara kegiatan operasional sebagai langkah mitigasi terhadap risiko keselamatan kerja. Selain itu, cuaca ekstrem juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang berpotensi merusak infrastruktur tambang, mengganggu proses produksi dan pengangkutan bijih nikel, serta pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan volume produksi Perseroan.

Risiko Gangguan Operasional atau Kerusakan Alat Berat
Kegiatan usaha Perseroan, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai kontraktor pertambangan, sangat bergantung pada tingkat ketersediaan fisik (*physical availability*) dan keandalan armada alat berat. Risiko gangguan operasional dapat timbul apabila terjadi kerusakan alat berat di luar jadwal pemeliharaan rutin (*unscheduled breakdown*), yang dapat disebabkan oleh beban kerja yang tinggi, kondisi medan yang ekstrem, maupun faktor usia teknis alat.

Mengingat porsi pendapatan Perseroan didominasi jasa kontraktor pertambangan, kerusakan alat berat dapat menghambat pencapaian target produksi, menurunkan efisiensi operasional akibat efek domino pada unit lain, serta meningkatkan biaya perbaikan yang menekan margin. Selain itu, pada segmen penyewaan, kerusakan alat juga menyebabkan hilangnya billable hours yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Risiko Sumber Daya Manusia
Perseroan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional. Tingkat turnover karyawan yang tinggi akibat ketatnya persaingan tenaga kerja di industri pertambangan, keterbatasan tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai di antaranya operator alat berat bersertifikasi Surat Izin Operator (SIO) serta pengawas operasional dengan sertifikasi minimal Pengawas Operasional Pertama (POP), serta penurunan tingkat produktivitas dapat mempengaruhi efektifitas operasional Perseroan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan, menurunkan efisiensi operasional, serta berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Biaya Operasional
Kontraktor tambang memiliki biaya operasional yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terutama meliputi bahan bakar *(fuel)*, suku cadang dan pemeliharaan alat berat, serta biaya tenaga kerja operasional di lapangan. Sementara itu, biaya tetap terutama mencakup beban penyusutan alat berat, gaji karyawan kantor pusat, asuransi, dan sewa fasilitas. Jika terjadi fluktuasi kenaikan harga BBM, depresiasi nilai tukar Rupiah yang berdampak pada harga unit alat berat dan suku cadang, atau kenaikan UMR, hal ini dapat menggerus margin keuntungan Perseroan.

Risiko Terkait Kemampuan Perseroan dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Tunai
DSCR Perseroan pada periode pelaporan tercatat sebesar 0,86x, yang menunjukkan bahwa arus kas operasional yang dihasilkan dari aktivitas penambangan belum sepenuhnya mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara penuh, sehingga kondisi tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan. Apabila kondisi ini berlanjut dan DSCR tetap tidak terpenuhi, Perseroan berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap likuiditas Perseroan dan mempengaruhi kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara konsisten mengoptimalkan utilisasi dan physical availability alat berat guna meningkatkan volume produksi dan pendapatan operasional, disertai dengan pemantauan ketat terhadap pengeluaran operasional. Perseroan juga mengambil langkah-langkah strategis dan taktis yang disesuaikan dengan siklus bisnis jasa kontraktor pertambangan, antara lain melalui pemilihan armada yang lebih efisien dari sisi biaya serta memaksimalkan proses penagihan (*billing*) atas pekerjaan kepada Pemberi Kerja agar selaras dengan ketentuan pembayaran (*term payment*) dalam Kontrak. Selain itu, penambahan kontrak-kontrak baru yang diperoleh Perseroan pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan volume pekerjaan dan pendapatan operasional secara bertahap, sehingga mendukung penguatan arus kas operasional dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas
Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas pertambangan di pasar global maupun domestik. Penurunan harga komoditas secara signifikan dapat mendorong pemberi kerja untuk menurunkan target produksi, menunda pengembangan tambang, atau melakukan efisiensi operasional. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi volume pekerjaan yang diberikan kepada Perseroan sebagai kontraktor tambang, sehingga dapat berdampak pada penurunan pendapatan serta memengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional dan kinerja bisnis Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha
Industri jasa penunjang pertambangan merupakan industri yang kompetitif dengan tingkat persaingan yang dipengaruhi oleh jumlah pelaku usaha serta kapasitas layanan yang tersedia di pasar. Munculnya perusahaan baru maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pesaing yang telah ada dapat meningkatkan intensitas persaingan di industri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap tarif jasa serta memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memperoleh maupun mempertahankan kontrak kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja usaha, pendapatan, dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Tidak Diperpanjangnya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kepemilikan izin operasional, khususnya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yang saat ini berlaku hingga Desember 2027 dan memerlukan persetujuan perpanjangan secara berkala dari instansi pemerintah yang berwenang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa permohonan perpanjangan izin di masa depan akan selalu disetujui tepat waktu oleh instansi pemerintah terkait. Keterlambatan atau kegagalan dalam memperpanjang izin tersebut dapat mengakibatkan penghentian sementara atau permanen atas operasional Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan senantiasa mengevaluasi berbagai opsi pertumbuhan, termasuk rencana aksi korporasi dan ekspansi usaha. Akan tetapi, Perseroan akan mengkaji rencana tersebut secara mendalam mengingat tidak terdapat jaminan keberhasilan atas setiap investasi maupun aksi korporasi yang dilaksanakan. Kegagalan dalam merealisasikan target investasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perubahan Kebijakan atau Aturan Pemerintah
Industri pertambangan merupakan sektor yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Kegiatan usaha Perseroan sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksananya. Perubahan terhadap ketentuan tersebut, termasuk kebijakan Pemerintah terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Biaya (RKAB), ketentuan operasional pertambangan, maupun kewajiban lingkungan hidup, dapat mempengaruhi kegiatan operasional pemegang izin usaha pertambangan yang merupakan pelanggan Perseroan.

Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Kondisi perekonomian makro dan global secara langsung mempengaruhi permintaan atas jasa Perseroan melalui kebijakan target produksi Pemberi Kerja. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik dapat memicu volatilitas harga komoditas, yang mendorong Pemberi Kerja untuk menurunkan target penambangan. Di sisi beban, tingginya inflasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan meningkatkan biaya operasional Pemberi Kerja. Tekanan ini dapat diperberat oleh kenaikan suku bunga dan gangguan stabilitas sistem keuangan yang memperketat likuiditas dan membatasi kemampuan pendanaan belanja modal Pemberi Kerja. Akumulasi dari faktor-faktor tersebut dapat memaksa Pemberi Kerja untuk melakukan efisiensi dan menunda ekspansi tambang, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan volume pekerjaan dan permintaan atas jasa kontraktor Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Kondisi Pasar Modal Indonesia dan Ekonomi yang Dapat Mempengaruhi Permintaan dan Likuiditas Saham Perseroan

Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Perubahan Rencana Penggunaan Dana dan Tidak Terealisasinya Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Risiko perubahan rencana penggunaan dana dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat timbul apabila realisasi tidak berjalan sesuai rencana yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Hal tersebut berpotensi terjadi karena dinamika kondisi usaha, penyesuaian strategi usaha, perubahan kebutuhan operasional, keterlambatan pelaksanaan rencana usaha, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun faktor lain di luar kendali Perseroan, yang dapat berdampak pada kinerja usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan POJK No. 40/2025, termasuk kewajiban menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta persetujuan RUPS sebagaimana dipersyaratkan.

Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses Penawaran Awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia.
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang.

- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan.
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal.
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

Risiko Performa Keuangan yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, akan tergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa depan. Di masa depan jumlah dan pembayaran dividen akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, belanja modal, komitmen kontraktual, dan beban yang dikeluarkan sehubungan dengan ekspansi Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi Perseroan dalam melakukan pembagian dividen ini. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan kredit yang ada dan yang akan dibuat di masa depan untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu yang akan disepakati oleh para pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat menandatangani perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa mendatang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau memiliki liabilitas yang dapat mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham, investor mungkin dapat tidak menerima pengembalian investasi di saham Perseroan kecuali apabila investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Oktober 2026 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Andalan Artha Primanusa Tbk (dahulu didirikan dengan nama PT Nusa Karya Realti) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tahun 2014, Tambahan No. 49184 ("**Akta Pendirian**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian pertama kali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Tn. Heru Sumbogo	1.000	1.000.000.000	50%
Tn. Sudiyo	1.000	1.000.000.000	50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.000**	**2.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	**-**

Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi ketiadaan penyetoran modal pertama kali yang telah dilakukan oleh para pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU- 0014619.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068536 tanggal 3 Maret 2026 ("**Akta No. 21/2026**").

Lebih lanjut, Perseroan menegaskan bahwa seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini telah disetor penuh secara sah, sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2026.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No.15/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 14/2025 yakni sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 21/2026.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 308 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU- 0072377.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227937 tanggal 10 Agustus 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkum di bawah No. AHU-0197245.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026 ("**Akta No. 308/2026**"), pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, antara lain:

1. Menyetujui penawaran umum perdana oleh Perseroan kepada masyarakat melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Andalan Artha Primanusa menjadi PT Andalan Artha Primanusa Tbk, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

3. Menyetujui dalam rangka penawaran umum perdana:

    a. penerbitan sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) ("**Saham Yang Ditawarkan**") dari dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana, dimana para pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan tersebut dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana. Seluruh pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;

    b. penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 558.667.000 (lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru Perseroan (yang namanya akan tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal penjatahan sehubungan dengan penawaran umum perdana), yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI. Dalam hal ini, jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ialah sebanyak-banyaknya 239.429.000 dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham. Para Pemegang Saham mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I; dan

4. Menyetujui seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan termasuk di dalamnya mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam akta dalam rangka:

    (i) perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan:

        a. Peraturan No. IX.J.1,

        b. Peraturan OJK No. 15 /2020,

        c. Peraturan OJK No. 33 /2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

        d. Peraturan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan

        e. peraturan di bidang pasar modal lainnya sebagaimana relevan,

    (ii) perubahan-perubahan terhadap ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

        Khusus untuk perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang semula tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana

disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.

5. Menyetujui pencatatan atas seluruh saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya penawaran umum perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI.

6. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan antara lain:

    a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka penawaran umum perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I;

    b. menyetujui harga penawaran penawaran umum perdana sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan;

    c. pengeluaran saham baru melalui penawaran umum perdana, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran Saham Yang Ditawarkan dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; dan

    d. menyetujui rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum perdana termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    a. membuat, mempersiapkan, menandatangani, dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum perdana dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penawaran umum perdana kepada OJK, KSEI dan BEI;

    b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan penawaran umum perdana, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

    c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*) dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

    d. menetapkan harga penawaran umum perdana sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

    e. menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

    f. menetapkan kepastian jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri I yang akan dikeluarkan, serta penentuan pelaksanaan rencana penerbitan Waran Seri I;

    g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan KSEI;

    h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI;

    i. menetapkan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris;

j. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

k. melakukan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana;

l. melakukan segala tindakan yang diperlukan diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penawaran umum perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan;

n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun; dan

o. dalam hal penawaran umum perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya penawaran umum perdana.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar terakhir ialah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 308/2026 yakni berusaha dalam bidang (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; (ii) Aktivitas Perusahaan Induk; (iii) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (v) Aktivitas Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan (vi) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

(i) **KBLI No. 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya):** Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

(ii) **KBLI No. 42992 (Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan):** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

(iii) **KBLI No. 43905 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator):** Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

b. Kegiatan usaha penunjang:

(i) **KBLI No. 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk):** Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Kelompok ini tidak mencakup (i) bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri; (ii) aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak; (iii) provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat; (iv) manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan.

(ii) **KBLI No. 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya):** Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

(iii) **KBLI No. 70203 (Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan)**: Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia konsultasi Pemasaran, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait pembangunan strategi pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, membangun dan mengembangkan merek, memberikan layanan dan meningkatkan nilai penjualan dan fungsi manajemen lainnya di bidang pemasaran.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21/2026 *juncto* Akta No. 23/2026 yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**	**-**

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Tahun	Keterangan
2014	Pendirian PT Andalan Artha Primanusa Tbk (dahulu didirikan dengan nama PT Nusa Karya Realti) berdasarkan Akta Pendirian.
2018	Penandatangan kontrak dengan BGG untuk pekerjaan jasa penambangan batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan perjanjian tertanggal 8 Agustus 2018. Kontrak ini merupakan proyek operasional pertama Perseroan dan menjadi fondasi dalam membangun rekam jejak (*track record*) serta kapabilitas operasional di sektor jasa pertambangan batubara.
2024	Penandatangan kontrak dengan SBS untuk pekerjaan pengadaan jasa penunjang produksi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan perjanjian tertanggal 30 Desember 2024. Kerja sama ini memperkuat keberlanjutan pendapatan Perseroan serta meningkatkan diversifikasi layanan di area operasional yang telah dikuasai.
2025-Sekarang	Addendum penambahan nilai kontrak dari SBS, terdiri dari tambahan volume produksi dan angkutan material. Penambahan volume pekerjaan serta nilai kontrak ini menandai kepuasan pemberi kerja terhadap kinerja Perseroan.
2026	Perseroan memperoleh letter of award dari POS untuk pekerjaan pengembangan dan operasi penambangan di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, berdasarkan surat tertanggal 22 Januari 2026. Perolehan proyek ini menandai langkah strategis Perseroan dalam melakukan ekspansi usaha ke sektor jasa penambangan nikel. Diversifikasi ke komoditas nikel ini diharapkan dapat memperkuat portofolio proyek, serta mendorong pertumbuhan dan daya saing Perseroan secara berkelanjutan.

4. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sepanjang periode tahun 2023. Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas No. 58 tanggal 31 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0015914.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 6 Agustus 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0229595 tanggal 6 Agustus 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-02229596 tanggal 6 Agustus 2018, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah AHU-0102123.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 6 Agustus 2018. Para pemegang saham telah menyetujui, antara lain:

a. penambahan modal ditempatkan dan disetorkan semula sebesar Rp2.000.000.000 yang terbagi atas 2.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp5.000.000.000, yang terbagi atas 5.000 saham, dengan penambahan setoran sebesar 3.000.000.000 yang terbagi atas 3.000 saham yang diambil bagian oleh (i) PT Tambang Lancar Indonesia (d.h. PT Tower Light Indonesia) dan (ii) Arief Ramon, yang disetor secara tunai dan penuh ke dalam kas Perseroan berdasarkan Akta No. 58/2018; dan

b. menyetujui pemindahan hak atas saham dalam Perseroan (i) sebanyak 1.000 saham milik Heru Sumbogo kepada Arief Ramon dan (ii) 1.000 saham milik Sudiyo kepada PT Tambang Lancar Indonesia.

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Tambang Lancar Indonesia	2.500	2.500.000.000	50%
Tn. Arief Ramon	2.500	2.500.000.000	50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Pengalihan saham antara Heru Sumbogo dan Arief Ramon dilakukan berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak atas Saham tanggal 30 Juli 2018 dengan harga keseluruhan saham sebesar Rp1.000.000.000, serta pengalihan saham antara Sudiyo dan PT Tambang Lancar Indonesia dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak atas Saham tanggal 30 Juli 2018 dengan harga keseluruhan saham sebesar Rp1.000.000.000.

Tahun 2024-2025

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 07 tanggal 7 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0064645.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 10 Oktober 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0200026 tanggal 10 Oktober 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0217468.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Oktober 2024 ("**Akta No. 07/2024**"). Berdasarkan Akta No. 07/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Penambahan modal dasar semula sebesar Rp5.000.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp10.500.000.000 yang terbagi atas sebanyak 10.500 saham yang terdiri atas (i) Rp5.000.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan (ii) Rp5.500.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.500 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

2. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor semula sebesar Rp5.000.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp10.500.000.000 yang terbagi atas sebanyak 10.500 saham yang terdiri atas (i) Rp5.000.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan (ii) Rp5.500.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.500 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000, dengan penambahan sebesar Rp5.500.000.000 yang terbagi atas sebanyak 5.500 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.0000 yang diambil bagian oleh:

   (i) PT Tambang Lancar Indonesia sebesar Rp1.500.000.000, yang terbagi atas sebanyak 1.500 saham seri B; dan

   (ii) Billy Theristine Lim sebesar Rp4.000.000.000, yang terbagi atas sebanyak 4.000 saham Seri B.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sepanjang tahun 2024 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**5.000 saham seri A** **5.500 saham seri B**	**5.000.000.000** **5.500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	4.000 saham Seri B	4.000.000.000	38.10%
PT Tambang Lancar Indonesia	2.500 saham Seri A 1.500 saham Seri B	2.500.000.000 1.500.000.000	38.10%
Tn. Arief Ramon	2.500 saham Seri A	2.500.000.000	23.80%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000 saham Seri A** **5.500 saham Seri B**	**5.000.000.000** **5.500.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Berdasarkan Bukti transfer dana rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 24 September 2024, Billy Theristine Lim telah melakukan penyetoran modal secara tunai sebesar Rp4.000.000.000 sehubungan dengan pengambilan modal berdasarkan Akta No. 07/2024. Lebih lanjut, berdasarkan bukti transfer dana rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 25 September 2024, PT Tambang Lancar Indonesia telah melakukan penyetoran modal secara tunai sebesar Rp1.500.000.000 berdasarkan Akta No. 07/2024.

Adapun klasifikasi saham Seri A dan Seri B di atas ditujukan untuk membedakan hak perolehan dividen dari laba bersih Perseroan, di mana saham Seri A berhak atas dividen sejak Perseroan didirikan, sedangkan saham Seri B berhak atas dividen sejak tercatat dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar diterbitkan. Klasifikasi saham tersebut saat ini sudah tidak berlaku berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, dan sejak pendirian hingga saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen.

Tahun 2026

A. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 5 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0006685.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 6 Februari 2026, serta telah

diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034505 tanggal 6 Februari 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0022103.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 6 Februari 2026 ("**Akta No. 23/2026**"). Berdasarkan Akta No. 23/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Menyetujui bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan klasifikasi saham Perseroan terdiri dari (i) Seri A dengan hak untuk memperoleh dividen yang berasal dari laba bersih yang diperoleh Perseroan sejak pendirian Perseroan dan (ii) Seri B dengan hak untuk memperoleh dividen yang berasal dari laba bersih yang diperoleh Perseroan sejak saham Seri B tercatat atas nama masing-masing pemegang saham dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar atas Keputusan tersebut telah diterbitkan. Perseroan bermaksud untuk mengubah klasifikasi tersebut menjadi 1 (satu) saham biasa atas nama ("**Reklasifikasi Saham**") sehingga hanya terdapat 1 (satu) klasifikasi saham dalam Perseroan.

   Pertimbangan Perseroan melakukan reklasifikasi saham dari beberapa seri (termasuk Seri B) menjadi satu kelas saham adalah dalam rangka persiapan Penawaran Umum Perdana (IPO) untuk menciptakan struktur permodalan yang lebih transparan dan efisien. Langkah ini diambil guna menjamin kesetaraan hak (*equal rights*) bagi seluruh pemegang saham, termasuk calon pemegang saham publik, sehingga memiliki kedudukan yang sama atas hak suara dalam RUPS, hak atas dividen, maupun hak-hak lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan satu kelas saham bertujuan untuk menyederhanakan administrasi saham serta mengikuti standar praktik pasar modal yang lebih umum dan akomodatif bagi investor publik.

2. Peningkatan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp10.500.000.000 menjadi Rp200.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp10.500.000.000 menjadi Rp50.000.000.000 dengan cara menerbitkan 395.000.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp39.500.000.000, yang akan diambil bagian oleh pihak-pihak secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

   a. Billy Theristine Lim sebesar Rp9.500.000.000 berdasarkan bukti setor dana rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 30 Januari 2026;
   b. PT Bumi Artha Caraka sebesar Rp12.500.000.000 berdasarkan bukti setor dana rekening Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2026;
   c. PT Arkara Danatama Nusantara sebesar Rp12.500.000.000 berdasarkan bukti setor dana rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 30 Januari 2026;
   d. PT Bhumi Caraka Persada sebesar Rp5.000.000.000 berdasarkan bukti setor dana rekening Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2026.

3. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000 menjadi masing-masing Rp100.

Keterangan	**Nilai Nominal Rp100,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	135.000.000	13.500.000.000	27%
PT Bumi Artha Caraka	125.000.000	12.500.000.000	25%
PT Arkara Danatama Nusantara	125.000.000	12.500.000.000	25%
PT Bhumi Caraka Persada	50.000.000	5.000.000.000	10%
PT Tambang Lancar Indonesia	40.000.000	4.000.000.000	8%
Tn. Arief Ramon	25.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**500.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**-**

B. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2026 *juncto* Akta No. 23/2026,

Berdasarkan Akta No. 21/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain untuk perubahan nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100 menjadi masing-masing Rp10.

Berdasarkan Akta No. 23/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan saham sebanyak 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.500.000.000 milik PT Tambang Lancar Indonesia kepada Billy Theristine Lim.

Pengalihan saham antara PT Tambang Lancar Indonesia kepada Billy Theristine Lim dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 Maret 2026 antara PT Tambang Lancar Indonesia dan Billy Theristine Lim dengan harga keseluruhan saham sebesar Rp1.500.000.000.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ny. Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25%
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10%
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5%
Tn. Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**150.000.000.000**	**-**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 23/2026.

5. Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material Operasional		
1.	Nomor Induk Berusaha No. 8120106821456 tanggal 7 Desember 2021 dengan perubahan ke-2 tanggal 14 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	KBLI No. 09900 – Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 0855 4798 6104 1000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-00233/SKT-WP-CT/KPP.2106/2026 tanggal 3 Maret 2026.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	-
4.	Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 81201068214560001 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan	5 tahun sejak diterbitkannya Izin	-

6. Perjanjian – Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan						
No.	**Perjanjian**	**Para Pihak**	**Hubungan Afiliasi**	**Deskripsi Singkat**	**Nilai Perjanjian**	**Jangka Waktu**
1.	Perjanjian No. 001/AAP-ABN/IV/25 tanggal 1 April 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 231/AAP-ABN/IV/26 tanggal 17 April 2026	Perseroan; dan PT Andalan Bhumi Nusantara	Perseroan dan PT Andalan Bhumi Nusantara dikendalikan oleh pihak yang sama	Perseroan setuju untuk menyewakan dan ABN setuju untuk menyewa alat berat, yakni Bulldozer, Motorgrader, Light Vehicle, Dump Truck dan Lighting Tower.	Harga sewa per barang berkisar Rp7.500.000-Rp145.000.000/bulan	1 April 2025 sampai dengan tanggal yang akan disepakati oleh para pihak
2.	Perjanjian Sewa Alat Berat No. 004/AAP-ABN/SEWA/VI/26 tanggal 5 Juni 2026	Perseroan; dan PT Andalan Bhumi Nusantara	Perseroan dan PT Andalan Bhumi Nusantara dikendalikan oleh pihak yang sama	ABN setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa alat berat, yakni Excavator, Dump Truck, Water Truck, Fuel Truck dan Crane Truck.	Harga sewa per barang berkisar Rp26.150.000-Rp61.000.000/bulan	1 Januari 2026 – 31 Desember 2026
3.	Perjanjian Pekerjaan Jasa Pertambangan No. 112/APE-AAP/OPR/LEG/III/26 tanggal 12 Maret 2026	Perseroan; dan PT Arkara Prathama Energi ("**APE**")	Perseroan dan APE memiliki anggota dewan komisaris yang sama	Perseroan akan menunjang APE dalam melaksanakan operasi tambangnya dengan melaksanakan Pekerjaan dan karenanya Para Pihak sepakat untuk masuk dan menandatangani untuk mengatur syarat-syarat dan kondisi-kondisi dimana Perseroan akan memberikan, mengerjakan, melaksanakan, menyelesaikan	Tarif jasa penambangan adalah sebagai berikut: a. OB: Rp25.935 per BCM b. Mud Removal: Rp32.419 per BCM c. Coal Getting: IDR 8.370 per Ton d. Coal Hauling: Rp1.752 per Ton/KM e. Road Maintenance: Rp 395 per Ton/KM f. OB Overdistance: Rp644 per BCM/100 meter	Berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 sampai dengan (i) 31 Desember 2030 atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak yang dituangkan dalam satu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak; (ii) pengakhiran berdasarkan perjanjian;

				dan menyerahkan Pekerjaan.	g. Mud Overdistance: Rp805 per BCM/100 meter	atau (iii) pengakhiran perjanjian berdasarkan penerapan.
4.	Perjanjian Jasa Pemindahan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden Removal*) Tambang Open Pit No. 08/BBA-ANP/PPLP/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026	Perseroan dan PT Bukit Bara Alam ("**BBA**")	Komisaris Perseroan merupakan Direktur Utama BBA	BBA bermaksud untuk melaksanakan Pemindahan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden Removal*) Tambang Open Pit pada lokasi tambang BBA. Dengan ini, BBA menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa tersebut.	Tarif pekerjaan berkisar sebesar $0,70 *rate overburden*/unit/1000 meter dan mulai dari $0,033 *rate overdistance*/unit/100 meter	1 September 2026 – 31 Agustus 2031
5.	Perjanjian Pekerjaan Penggalian Batubara (*Coal Getting*) No. 009/BBA-AAP/PPPB/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026	Perseroan dan BBA	Komisaris Perseroan merupakan Direktur Utama BBA	BBA menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan penggalian batubara (*coal getting*) dan Perseroan menyatakan bersedia dan menerima atas penunjukkan tersebut.	Tarif pekerjaan adalah sebagai berikut: Fixed rate: USD0,7/MT Jarak: USD0,0136/100m/MT	Sampai dengan 31 Agustus 2031

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, seluruh transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak Afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta rencana penggunaan dananya.

b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan					
No.	**Perjanjian**	**Para Pihak**	**Deskripsi Singkat**	**Nilai Outstanding per 30 Juni 2026**	**Jangka Waktu**
Perjanjian Pembiayaan					
1.	Akta No. 41 Perjanjian Kredit Investasi 2 No. WCO.KP/2752/KI/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV tanggal 19 Oktober 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur	Bank setuju memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur dengan limit kredit maksimal sebesar Rp203.000.000.000 dengan bunga sebesar 9.5% per annum. Fasilitas kredit diberikan oleh bank kepada Debitur dengan tujuan hanya dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembelian alat berat baru untuk bouwheer yang diaksep antara lain PT Budi Gema Gempita.	Rp 151.202.885.274	11 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2028
2.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi Refinancing No. 11 tanggal 5 November 2025, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I (Pertama) No. 183 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang *juncto* (ii) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 212/AAP-BRI/EXT/IV/26 tanggal 17 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur	Bank setuju memberikan fasilitas dengan jumlah plafon sebesar Rp41.400.000.000 dengan bunga sebesar 9% per tahun. Fasilitas diberikan untuk membiayai kembali 11 unit Alat berat dengan rincian *total project cost* (TPC).	Rp 35.310.000.000	48 bulan
3.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi Refinancing No. 184 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang *juncto* Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 212/AAP-BRI/EXT/IV/26 tanggal 17 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur	Bank setuju memberikan fasilitas dengan jumlah plafon sebesar Rp10.000.000.000 dengan bunga sebesar 9% per tahun. Fasilitas diberikan untuk membiayai kembali 3 unit alat berat dengan rincian *total project cost* (TPC).	Rp. 9.175.000.000	36 bulan
4.	Perjanjian Membuka Kredit No. 3813/Krd/JJMK/04/2022.Tamb.I tanggal 15 Agustus 2024 *juncto* (i) Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit (ii) Surat Tanggapan No. 1524/RB/IV/2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Saqu Indonesia (dahulu	Bank dengan ini menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Aksep kepada dan untuk kepentingan serta guna keperluan Debitur sampai	Rp 11.981.794.072	Sampai dengan 6 April 2027.

	tanggal 6 April 2026; dan (iii) Surat Tanggapan No. 222/RB/V/2026 tanggal 13 Mei 2026	Bank Jasa Jakarta) sebagai Kreditur	jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp12.000.000.000 dengan bunga sebesar 7% per tahun. Tujuan penggunaan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur adalah untuk modal kerja.		
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Intan Avita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 3 November 2025, yang dibuat di hadapan Nur Hayati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bandar Lampung *juncto* Surat Permohonan Perubahan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 224/AAP-BAK/EXT/IV/26 tanggal 30 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur sebagai Kreditur	Bank dengan ini menyetujui untuk memberikan pinjaman uang kepada Debitur sejumlah Rp15.000.000.000 dengan bunga pada (i) Bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6 dikenakan bunga sebesar 15,4% per tahun efektif dan (ii) Bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-36 dikenakan buna sebesar 8,5% per tahun flat atas dasar jumlah yang terhutang yang harus dibayar. Tujuan penggunaan adalah untuk keperluan usaha.	Rp 7.170.918.685	36 bulan
6.	Perjanjian Kredit No. 00293/PK/0980S/2022 tanggal 20 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 9 Juli 2026 *juncto (i)* Surat No. 00397/SLK/2026 tanggal 25 Mei 2026 dan (ii) Surat No. 00732/SLK/2026 tanggal 12 Agustus 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") sebagai Kreditur	Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit lokal sebesar Rp3.750.000.000 dengan bunga sebesar 10,5% per tahun. Fasilitas kredit lokal digunakan untuk membiayai persediaan barang dan piutang usaha.	Rp 3.741.255.616	Sampai dengan 21 Juni 2027
7.	Perjanjian Kredit No. 00123/PK/0980S/2022 tanggal 20 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00171/PPK/GMD/2026 *juncto* (i) Surat No, 00401/SLK/2026 tanggal 25 Mei 2026 dan (ii) Surat No. 00732/SLK/2026 tanggal 12 Agustus 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan BCA sebagai Kreditur	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp16.000.000.000 dengan suku bunga tertinggi deposito berjangka yang diserahkan sebagai agunan ditambah 0,9% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas.	Rp 15.980.438.862	Sampai dengan 21 Juni 2026 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya

8.	Akta Perjanjian Pinjaman No. 7 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma. S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi	Perseroan sebagai Debitur PT Bank Perkreditan Rakyat Bangun Solusi Bersama	Fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman modal kerja – Rp1.500.000.000 dengan bunga 15% per tahun.	Rp 1.500.000.000	Sampai dengan 24 Juni 2028
9.	Akta Perjanjian Kredit Kredit Investasi Refinancing Maksimum Rp55.400.000.000 No. 62 tanggal 13 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Doktor Muhammad Kholid Artha, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 62 tanggal 22 Oktober 2026	Perseroan sebagai Debitur; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit dengan maksimum kredit Rp55.400.000.000 dengan bunga 9% per tahun	Rp 59.438.333.333	Sampai dengan 12 Mei 2036
10.	Perjanjian Kredit No. 120/KMK/IDS-P/VIII/2024 tanggal 29 Juli 2024 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 152/AAP-BPRI/EXT/III/26 dan (ii) Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 394/AAP-INTI/EXT/IX/26 tanggal 9 September 2026	Perseroan sebagai Debitur; PT Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa	Fasilitas pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk memberikan pinjaman uang kepada Debitur sejumlah Rp11.235.000.000. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 5.50% flat dan/atau 11.16% effective per tahun.	Rp 4.157.149.601	36 bulan sejak 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2027
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 10 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta *sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Addendum I Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 8 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta*	Perseroan sebagai Debitur; PT Bank Perkreditan Rakyat Universal	Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sejumlah hutang pokok hingga sebesar Rp10.000.000.000 dengan bunga 14,5% per tahun.	Rp14.844.799.999	Sampai dengan 9 Oktober 2027
12.	Perjanjian Pinjaman tanggal 2 Juni 2026	Perseroan sebagai Penerima Pinjaman; dan PT Batu Energi Persada sebagai Pemberi Pinjaman	Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan kepada Penerima Pinjaman, dan Penerima Pinjaman setuju untuk menerima dari Pemberi Pinjaman, suatu pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp15.000.000.000	Rp 15.036.678.082	Sampai dengan 31 Desember 2026

13.	Perjanjian Kredit No. 011/BTR/UKD/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 *sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 008/BTR/UKD/X/2026 tanggal 8 Oktober 2026*	Perseroan sebagai Debitur; PT Bank Perkreditan Rakyat Universal	Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sejumlah hutang pokok hingga sebesar Rp5.000.000.000 dengan bunga 7% per tahun (*spread 1%* di atas suku bunga deposito sebesar 6%).	Rp 4.969.661.111	Sampai dengan 9 Oktober 2027
14.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 01 Tanggal 6 Oktober 2026	Perseroan sebagai Debitur; PT Bank Perekonomian Rakyat Tentram Optimis Pusaka dan PT Bank Perekonomian Rakyat Tentram Akasia Mas sebagai Kreditur (”**Bank Sindikasi**”)	Bank Sindikasi setuju memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur dengan limit kredit maksimal sebesar Rp6.000.000.000	-	12 bulan
15.	Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. 94 dan 95 tanggal 22 April 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk (”**Radana**”) sebagai Kreditur	Fasilitas Sewa Pembiayaan kepada Debitur untuk menyediakan barang yaitu 2 unit Caterpillar/Bulldozer /D10T2/SU-SSR dengan harga unit Rp19.930.050.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp35.874.090.000. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 11.40% efektif P.A.	Rp 26.356.662.016	48 bulan sejak 17 April 2025 sampai dengan 24 Maret 2029
16.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000512 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian 4 (empat) unit TEREX/RIGID DUMPTRUCK/NHL TRX TR50D tahun 2022 dengan harga total sebesar Rp8.800.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp5.118.898.040. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 4.314.191.332	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 29 Februari 2028

17.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000521 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik pembelian (1) satu unit HINO/TRUCK tahun 2019 dengan harga total sebesar Rp625.000.000 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp363.558.099. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 306.405.636	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 6 Maret 2028
18.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000530 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian (4) empat unit XCMG/ADT/XDA40 tahun 2022 dengan harga total sebesar Rp12.972.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp7.545.721.068. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 6.359.510.220	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 6 Maret 2028
19.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000534 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian (4) empat unit VOLVO/ADT/A40G tahun 2022 dengan harga total sebesar Rp13.080.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp7.608.543.908. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 6.412.457.112	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 29 Februari 2028
20.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000522 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian (8) delapan unit HINO/TRUCK/FM 280 JD + DUMP tahun 2022 dengan harga total sebesar Rp5.800.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp3.373.819.160. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 2.843.444.264	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 6 Maret 2028

21.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000538 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian (1) satu unit HITACHI/EXCAVATOR/ZX470L-5G tahun 2021 dengan harga total sebesar Rp969.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp563.660.477. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 475.051.293	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 29 Februari 2028
22.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000539 tanggal 27 Maret 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas Jual dan Sewa Balik untuk pembelian (1) satu unit HITACHI/EXCAVATOR/ZX350H-5G tahun 2019 dengan harga total sebesar Rp732.000.000 dan nilai pembiayaan sebesar Rp425.799.246. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.47% flat P.A.	Rp 358.862.280	24 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 29 Februari 2028
23.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010504 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp5.872.300.000 untuk Debitur dan menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan sebesar Rp4.404.225.000. Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit Caterpillar/Motor Grader/160 tahun 2022 dengan No. Seri. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.	Rp 3.359.088.415	36 bulan sejak 22 September 2025 sampai dengan 22 Agustus 2028
24.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010493 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp7.019.980.000 untuk Debitur dan	Rp2.141.646.573	36 bulan sejak 22 September 2025 sampai dengan 22 Agustus 2028

	tanggal 15 April 2026		menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan Rp2.807.992.000. Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit Terex/Rigid Dumptruck/NHLTR X TR50D tahun 2023 dengan No. Seri T1071-1334. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.		
25.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010502 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp6.564.870 untuk Debitur dan menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan Rp4.923.652.500. Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit Hitachi/Excavator/ZX870LCH-5G tahun 2022 dengan No. Seri JBE93C00050946 . Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.	Rp 3.755.254.114	36 bulan sejak 22 September 2025 sampai dengan 22 Agustus 2028
26.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010499 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp6.610.470.000 untuk Debitur dan menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan Rp4.957.852.500. Fasilitas adalah untuk pembelian tiga (3) unit Hitachi/Excavator/ZX350H-5G tahun 2022. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.	Rp 3.781.338.347	36 bulan sejak 22 September 2025 sampai dengan 22 Agustus 2028
27.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010505 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan	Perseroan sebagai Debitur; dan	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran	Rp1.634.068.403	36 bulan sejak 4 Oktober 2025 sampai dengan 4 September 2028

	Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Radana sebagai Kreditur	untuk membeli barang sebesar Rp2.856.650.000 untuk Debitur dan menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan Rp2.142.487.500. Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit Komatsu/Bulldozer/ D8 5E-SS-2 tahun 2022. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.		
28.	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010494 tanggal 13 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitur; dan Radana sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp4.924.750.000 untuk Debitur dan menyewakannya kembali kepada Debitur dengan nilai pembiayaan Rp3.693.562.500. Fasilitas adalah untuk pembelian lima (5) unit Hino/Truck/FM 280 JD + Dump tahun 2022. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 14.00% efektif P.A.	Rp 2.817.068.375	36 bulan sejak 28 September 2025 sampai dengan 28 Agustus 2028
29.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 8142022500011 tanggal 21 Juni 2025 *juncto* (i) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 156/AAP-BFN/EXT/II/26 tanggal 10 Maret 2026 dan (ii) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 318/AAP-BFN/EXT/VII/26 tanggal 27 Juli 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan PT. Buana Finance Tbk. ("**Buana**") sebagai Lessor	Buana setuju untuk membeli barang modal dari Perseroan dan Perseroan setuju menjual untuk kemudian menyewa balik barang modal dari Buana segera setelah dilakukannya pembelian atau pengadaan barang modal. Fasilitas Jual dan Sewa Balik yang diberikan oleh Buana kepada Perseroan dengan nilai Sewa Pembiayaan Rp5.236.000.000 dengan dikenakan bunga sebesar 15.00% efektif per tahun, bersifat tetap (*fixed rate*) dengan sistem pembayaran dimuka (*in advance*).	Rp 2.738.246.906	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan sejak 21 Juni 2025 dan/atau sejak tanggal ditandatanganinya tanda penerimaan barang oleh Perseroan.

30.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 8142022500012 tanggal 21 Juni 2025 *juncto* (i) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 156/AAP-BFN/EXT/II/26 tanggal 10 Maret 2026 dan (ii) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 318/AAP-BFN/EXT/VII/26 tanggal 27 Juli 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan Buana sebagai Lessor	Buana setuju untuk membeli barang modal dari Perseroan dan Perseroan setuju menjual untuk kemudian menyewa balik barang modal dari Buana segera setelah dilakukannya pembelian atau pengadaan barang modal. Fasilitas Jual dan Sewa Balik yang diberikan oleh Buana kepada Perseroan dengan nilai Sewa Pembiayaan Rp4.235.000.000,00 dengan dikenakan bunga sebesar 15.00% efektif per tahun, bersifat tetap (*fixed rate*) dengan sistem pembayaran dimuka (*in advance*).	Rp 2.214.776.397	Masa Sewa Pembiayaan adalah 36 bulan sejak 21 Juni 2025 dan/atau sejak tanggal ditandatanganinya tanda penerimaan barang oleh Perseroan.
31.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 8142022500013 tanggal 28 Agustus 2025 *juncto* (i) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 156/AAP-BFN/EXT/II/26 tanggal 10 Maret 2026 dan (ii) Surat Permohonan Pencabutan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 318/AAP-BFN/EXT/VII/26 tanggal 27 Juli 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan Buana sebagai Lessor	Buana setuju untuk membeli barang modal dari Perseroan dan Perseroan setuju menjual untuk kemudian menyewa balik barang modal dari Buana segera setelah dilakukannya pembelian atau pengadaan barang modal. Fasilitas Jual dan Sewa Balik yang diberikan oleh Buana kepada Perseroan dengan nilai Sewa Pembiayaan Rp3.960.000.000 dengan dikenakan bunga sebesar 15.00% efektif per tahun, bersifat tetap (*fixed rate*) dengan sistem pembayaran dimuka (*in advance*).	Rp2.491.650.094	Masa Sewa Pembiayaan adalah 36 bulan sejak 28 Agustus 2025 dan/atau sejak tanggal ditandatanganinya Tanda Penerimaan Barang oleh Perseroan.
32.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20004022 tanggal 30 Juli 2024 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 208/AAP-CFI/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; PT Caterpillar Finance Indonesia (“**CFI**”) sebagai Lessor;	CFI menyewakan barang modal kepada Perseroan untuk pekerjaan Proyek Pertambangan Batu Bara. Total biaya yang diinvestasikan oleh Perseroan dalam barang modal tidak akan melebihi Rp10.267.500.000. Tarif uang sewa untuk bulan ke 1	Rp 2.252.243.050	Sejak 16 Agustus 2024 dengan masa sewa 36 bulan.

		Billy Theristine Lim sebagai Penanggung Pribadi; dan Arief Ramon sebagai Penanggung Pribadi	hingga bulan ke-36 adalah 11,99%.		
33.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20004091 tanggal 20 September 2024 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 208/AAP-CFI/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; CFI sebagai Lessor; Billy Theristine Lim sebagai Penanggung Pribadi; dan Arief Ramon sebagai Penanggung Pribadi	CFI menyewakan barang modal kepada Perseroan untuk pekerjaan Proyek Pertambangan Batu Bara. Total biaya yang diinvestasikan oleh Perseroan dalam barang modal tidak akan melebihi Rp29.193.000.000. Tarif uang sewa untuk bulan ke 1 hingga bulan ke-36 adalah 9,99%.	Rp 8.048.533.800	Sejak 29 Oktober 2024 dengan masa sewa 36 bulan.
34.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Skema Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan No. L25J0276E tanggal 21 November 2025 *juncto* Surat Perubahan Pasal Perjanjian Pembiayaan No. 020/ORIF/Mkt7/V/2026 tanggal 7 Mei 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan PT ORIX Indonesia Finance ("**Orix**") sebagai Lessor	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa investasi atas peralatan sebesar Rp1.762.680.000 kepada Lessee untuk menjalankan keperluan usaha Lessee yang sah. Fasilitas adalah untuk pembelian Manitou Telehandler MT-X 733 dengan No Seri MAN00000c011894 2. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 5.95%.	Rp1.463.711.426	28 Desember 2025 – 28 November 2028
35.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Skema Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor No. L26J00152A tanggal 23 Februari 2026 *juncto* Surat Perubahan Pasal Perjanjian Pembiayaan No. 020/ORIF/Mkt7/V/2026 tanggal 7 Mei 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan Orix sebagai Lessor	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa investasi atas kendaraan bermotor sebesar Rp1.762.680.000 kepada Lessee untuk menjalankan keperluan usaha Lessee yang sah. Fasilitas adalah untuk pembelian Toyota Hilux Single Cabin 2.4 MT 4X4 tahun 2026 dan Toyota Lube Car Hilux Pneumatic 4 Module	Rp 467.269.670	26 Maret 2026 – 26 Februari 2029

			tahun 2026. Nilai sewa pembiayaan adalah sebesar Rp504.984.000 dengan bunga yang dikenakan adalah sebesar 5.95% p.a.		
36.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Skema Sewa Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor No. L26J00211A tanggal 20 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan Orix sebagai Lessor	Para Pihak sepakat bahwa objek dari pembiayaan dalam Perjanjian ini adalah (i) 1 (satu) unit Toyota Hilux Single Cabin 2.4 E MT Diesel 4x4 2026; dan (ii) 1 (satu) unit Ambulance Hilux Single Cabin 4x4 2026. Nilai pembiayaan adalah sebesar Rp479.232.000 dengan bunga yang dikenakan adalah sebesar 5.95% p.a.	Rp 489.803.704	36 bulan
37.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Skema Sewa Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor No. L26J00310A tanggal 20 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; dan Orix sebagai Lessor	Para Pihak sepakat bahwa objek dari pembiayaan dalam Perjanjian ini adalah (i) 2 (dua) unit Mitsubishi Triton Single Cabin HDX 4x4 MT 2025; (ii) 2 (dua) unit Karoseri Minimanhaul 2026; dan (iii) 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero GLX 4x4 MT 2026. Nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.345.920.000 dengan bunga yang dikenakan adalah sebesar 5.95% p.a.	Rp 1.366.556.300	36 bulan
38.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1172704321-PK-001 tanggal 24 Juli 2024	Perseroan sebagai Debitur; dan PT BCA Finance sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp2.080.000.000 kepada Debitur untuk pembelian mobil operasional perusahaan/karyawan. Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit mobil penumpang dengan merek Mercedes Benz Tipe S450L tahun 2023 dengan No Mesin	Rp 740.984.523	24 Juli 2024 – 24 Juni 2027

			25693030689964 atas nama Perseroan. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 7.48% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3.75% p.a.		
39.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 805-20004760 tanggal 19 Februari 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 208/AAP-CFI/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; CFI sebagai Lessor; dan Billy Theristine Lim sebagai Penanggung Pribadi	CFI menyewakan barang modal kepada Perseroan. Barang Modal berupa 12 unit mesin/alat berat yang terdiri dari 4 (empat) unit Caterpillar D6GC Track Type Tractor, 1 (satu) unit Caterpillar 120GC Motor Grader, 1 (satu) unit Caterpillar CS10GC Soil Compactor, 2 (dua) unit Caterpillar 330GC Hydraulic Excavator, 2 (dua) unit Caterpillar 320GX Hydraulic Excavator, 1 (satu) unit Caterpillar 320GX Hydraulic Excavator + Breaker, dan 1 (satu) unit Caterpillar 345 Hydraulic Excavator dengan total seharga Rp33.938.250.000 Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp33.371.481.225 dengan tarif uang sewa untuk bulan ke 1 hingga bulan ke-41 adalah 8,75%.	Rp. 30.879.262.089	41 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 27 Juli 2029
40.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 805-20004765 tanggal 23 Februari 2026 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian Kredit No. 208/AAP-CFI/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Lessee; CFI sebagai Lessor; dan Billy Theristine Lim sebagai Penanggung Pribadi	CFI menyewakan barang modal kepada Perseroan. Barang Modal berupa 2 (dua) unit Caterpillar 320GX Hydraulic Excavator dengan nomor seri WKC00474 dan WKC00485 seharga Rp.3.052.500.000 Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp3.001.523.250 dengan tarif uang sewa untuk bulan ke 1 hingga bulan ke-41 adalah 8,75%.	Rp 2.777.390.564	41 bulan sejak 27 Maret 2026 sampai dengan 27 Juli 2029

41.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0027406/2/08/03/2026 tanggal 13 Maret 2026	Perseroan sebagai Debitor; dan PT Dipo Star Finance sebagai Kreditor	Fasilitas adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang yang dibeli oleh Debitor dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran terhadap Kreditor. Barang berupa 4 (empat) unit Mitsubishi L200 All New Triton DC HDX-L 4X4 M/T (2.4 M/T) MY24 2025 Flat White. Nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.347.200.000 dengan bunga sebesar 5,600040% (flat) per tahun.	Rp 1.239.693.882	36 bulan sejak 26 Maret 2026 sampai dengan 26 Februari 2029
42.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian secara Angsuran Nomor 0027475/2/08/04/2026 tanggal 29 Mei 2026	Perseroan sebagai Debitor; dan PT Dipo Star Finance sebagai Kreditor	Fasilitas pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dalam rangka pengadaan 1 unit Mitsubishi L200 All New Triton SC HDX-L 4x4 M/T (2.4L M/T) MY24 2025 yang akan diperoleh dari pemasok yang telah ditentukan dan disetujui oleh Debitur sendiri tersebut. Nilai pembiayaan adalah Rp306.360.000 dengan angsuran sewa per bulan sebesar Rp9.938.800 dan bunga sebesar 5,596553% (Flat) / Tahun dan/atau 11.000528% (Effective) / Tahun.	Rp 289.201.823	36 bulan sejak 29 Mei 2026
43.	Akta Perjanjian Jual dan Sewa-Balik (Sale & Lease Back) No. 73 tanggal 12 Agustus 2025 *juncto* Surat Permohonan Pencabutan, Pengesampingan dan Persetujuan Ketentuan pada Perjanjian No. 209/AAP-RDNA/EXT/IV/26 tanggal 15 April 2026	Perseroan sebagai Debitor; dan Radana sebagai Kreditor	Fasilitas adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang yang dibeli oleh Kreditor untuk disewakan kembali kepada Debitor. Barang berupa 5 (lima) unit Terex/Rigid Dumptruck/NHLTR X TR50D dengan total harga unit sebesar Rp35.099.900.000. Nilai pembiayaan	Rp 13.385.291.072	36 bulan sejak pembayaran angsuran pertama

			adalah sebesar Rp17.549.950.000 dengan bunga sebesar 14,00% efektif p.a.		
44.	Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 14 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dan Oey Albert	Perseroan mengaku telah berhutang karena pinjaman uang dari Oey Albert berjumlah Rp12.650.000.000 dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut tanpa dikenakan bunga. Pertimbangan tidak ditetapkannya tingkat suku bunga dalam perjanjian pinjaman dari Oey Albert adalah berdasarkan kesepakatan komersial hasil negosiasi para pihak. Perseroan menerima fasilitas pinjaman tanpa bunga tersebut karena memberikan manfaat keekonomian secara langsung bagi Perseroan, yakni mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan Perseroan tanpa membebani arus kas dengan biaya pendanaan tambahan (*cost of fund*) serta tidak memuat ketentuan lain yang bersifat memberatkan.	Rp 5.622.220.000	Selama 36 bulan
45.	Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 14 August 2024, yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dan Oey Albert	Perseroan mengaku telah berhutang karena pinjaman uang dari Oey Albert berjumlah Rp18.975.000.000 dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut tanpa dikenakan bunga.	Rp 7.379.152.000	Selama 36 bulan
46.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 263000270001 tanggal 18 Februari 2026 *juncto* Surat Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian No. 363/AAP-ADIRA/EXT/VIII/26 tanggal 21 Agustus 2026	Perseroan dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**Adira**")	Fasilitas sewa pembiayaan yang diberikan oleh Adira kepada Perseroan adalah sebesar Rp1.141.564.200. Fasilitas adalah untuk pembelian 1 unit truck Hino dengan no.	Rp 993.586.971	Sampai dengan 18 Januari 2029

			mesin N04CWYJ39678. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 4,67% (flat).		
47.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 26300026001 tanggal 18 Februari 2026 *juncto* Surat Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian No. 363/AAP-ADIRA/EXT/VIII/26 tanggal 21 Agustus 2026	Perseroan dan Adira	Fasilitas sewa pembiayaan yang diberikan oleh Adira kepada Perseroan adalah sebesar Rp841.864.500. Fasilitas adalah untuk pembelian 1 unit truck Hino dengan no. mesin N04CWYJ39699. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 4,67% (flat).	Rp 732.734.597	Sampai dengan 18 Januari 2029
48.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 26300025001 tanggal 18 Februari 2026 *juncto* Surat Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian No. 363/AAP-ADIRA/EXT/VIII/26 tanggal 21 Agustus 2026	Perseroan dan Adira	Fasilitas sewa pembiayaan yang diberikan oleh Adira kepada Perseroan adalah sebesar Rp1.797.057.000. Fasilitas adalah untuk pembelian 1 unit truck Hino dengan no. mesin J08EWDJ46278. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 4,67% (flat).	Rp 1.564.108.447	Sampai dengan 18 Januari 2029
49.	Akta Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. 123 tanggal 8 Mei 2026	Perseroan dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**Clipan**")	Para Pihak setuju bahwa Clipan akan memberikan pembiayaan untuk investasi melalui fasilitas Sewa Pembiayaan kepada Perseroan dan Perseroan sepakat serta setuju untuk menerima fasilitas Sewa Pembiayaan sejumlah Rp16.964.119.347 tersebut dari Clipan dengan membayar uang sewa pembiayaan atas penyediaan 10 (sepuluh) unit Dump Truck Foton 6x4 380 HP OB Vessel Off The Road 2025 dan 2 (dua) unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX490LC-7G Tahun 2025.	Rp 16.002.452.626	Sampai dengan 25 November 2028

50.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 01100910002605140	Perseroan sebagai Lessee; dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Lessor	Fasilitas adalah kegiatan pembiayaan investasi dengan cara membeli barang dari Lessee dan menyewa pembiayaan-kan kembali barang kepada Lessee (sewa balik). Barang untuk sewa pembiayaan adalah berupa 1 (satu) unit Hitachi HYD Excavator ZX200-5G Heavy Equipment / 2025 dengan nomor rangka HCMDCDF0H00009107 dengan nilai barang sebesar Rp1.489.000.000. Nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.127.228.260. dengan bunga sebesar 5,652% flat atau setara dengan 10,50309% efektif sepanjang jangka waktu pembiayaan.	Rp 1.042.073.275	Selama 24 bulan
51.	Perjanjian Pembiayaan No. 011824003380 tanggal 24 Januari 2025	Gahari Christine sebagai Debitur; dan PT Mandiri Utama Finance ("**MUF**") sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp1.714.300.000 kepada Debitur untuk tujuan konsumtif (pribadi). Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit Toyota/MPV – White Platinum tahun 2024 dengan No Mesin A25A5203144 atas nama Perseroan. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 4.93005%.	Rp 752.358.443	24 Januari 2025 – 24 Desember 2027
52.	Perjanjian Pembiayaan No. 011824003175 tanggal 11 Desember 2024	Arief Ramon sebagai Debitur; dan MUF sebagai Kreditur	Fasilitas pembiayaan melalui pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk membeli barang sebesar Rp428.000.000 kepada Debitur untuk tujuan konsumtif (pribadi). Fasilitas adalah untuk pembelian satu (1) unit BYD/MPV –	Rp 146.741.297	11 Desember 2024 – 11 November 2027

			White Crystal tahun 2024 dengan No Mesin TZ200XSQ4D4061375 atas nama Perseroan. Bunga yang dikenakan adalah sebesar 4.93755%.		
Perjanjian Operasional					
1.	Perjanjian Kerjasama No. 09/BGG-AAP/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Kontrak No. 02/ADDM-BGG-AAP/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	Perseroan dan PT Budi Gema Gempita	Para Pihak sepakat bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Perseroan adalah melakukan kegiatan jasa pertambangan terkait dengan penambangan batubara secara *double rate* di lokasi izin usaha pertambangan BGG.	Rp87.689.932.459,6363	selama 7 tahun
2.	Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Penunjang Produksi No. 230/AAP-SBS/EXT/XII/24 tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum III No. 325/AAP-SBS/EXT/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026	Perseroan dan PT Satria Bahana Sarana	Perseroan wajib menyediakan peralatan untuk pekerjaan pengadaan jasa penunjang produksi dan SBS wajib untuk membayar sesuai nilai/tarif teknis alat.	Rp7.244.125.540,06577	30 Desember 2024 – 29 Desember 2029
3.	Perjanjian Subkontraktor Overburden/Top Soil Removal dan Coal Getting tanggal 14 April 2026	Perseroan sebagai Kontraktor; dan PT Petrosea Tbk sebagai Vendor	Kontraktor berkeinginan supaya Vendor menyediakan jenis jasa, yaitu penyediaan jasa Overburden/Top Soil Removal dan Coal Getting (selanjutnya disebut "**Jasa**") dan Vendor menyatakan bahwa Vendor tersebut memiliki pengalaman dan kualifikasi dalam menyediakan Jasa tersebut dan bersedia melaksanakan persyaratan-persyaratan Jasa tersebut. Site Location adalah pada site PT Daya Bumindo Karunia (sebagai pemberi Kontrak Utama kepada Kontraktor) yang berlokasi di	-	1 Januari 2026 – 31 Desember 2029

			Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.		
4.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. 001/IBP-AAP/WC/IV/26 tanggal 30 April 2026	Perseroan sebagai Kontraktor; dan PT Intan Bumi Persada sebagai Perusahaan	Perusahaan setuju menunjuk Kontraktor sebagai kontraktor jasa pertambangan eksklusif di area tambang, yakni terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.	-	30 April 2026 – 31 Desember 2030 (tergantung pada perpanjangan IUP-OP Perusahaan). Dengan tanggal efektif memulai melakukan pekerjaan penambangan pada 1 Juli 2026.
5.	Surat Perjanjian Kerja Penambangan Bijih Nikel No. 70/POS-AAP/MINE/IV/2026 – No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26 tanggal 1 April 2026	Perseroan; dan PT Position	PT Position menunjuk Perseroan untuk mengelola, melaksanakan dan mengawasi operasi penambangan tanah penutup dan bijih nikel serta aktivitas pendukung lainnya di Desa Maba Sangaji dan Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Indonesia.	Rp 17.704.229.050	Berlaku selama 4 tahun efektif per 1 April 2026.
6.	Akta Sewa Menyewa No. 54 tanggal 7 Oktober 2025	Perseroan sebagai Penyewa; dan Ny. Sriyani qq Ny. Sri Anna sebagai Pemberi Sewa	Pemberi Sewa telah menyewakan sebuah bangunan rumah 3 (tiga) lantai berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 175/Pluit, seluas 180 m² yang terletak di Jalan Pluit Karang Elok 1 Blok CC-5-U Kav Nomor 5 kepada Penyewa untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal (rumah dinas).	-	1 November 2025 – 31 Oktober 2027
7.	Akta Sewa Menyewa No. 116 tanggal 13 Oktober 2025	Perseroan sebagai Penyewa; dan Tjiong Kam Toeng sebagai Pemberi Sewa	Pemberi Sewa telah menyewakan sebuah bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.598/Pluit, seluas 166 m² yang terletak di Jalan	-	1 Desember 2025 – 30 November 2026

			Taman Pluit Kencana Nomor 2 Blok N Kav Nomor 2 kepada Penyewa untuk dipergunakan sebagai Kantor Korespondensi Perseroan saat ini.		

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

7. Keterangan Tentang Aset

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan				
No.	**No.Registrasi BPKB**	**No.Polisi**	**Merek dan Tipe**	**Tahun Pembuatan**
Perseroan				
1.	U-00722120	B 2699 BYB	Toyota Minibus Calya 1.2G A/T	2018
2.	R-00856646	B 4615 THN	Honda Sepeda Motor SOLO	2015
3.	Q-01708216	B 4846 THU	Honda Sepeda Motor SOLO	2015
4.	T-054308699	B 7022 UJA	Mitsubishi Canter FW 84G BC N (4X2) M/T	2022
5.	R-01369647	B 7023 UJA	Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC K (4X2) M/T	2021
6.	R-01369647	B 7023 UJA	Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC K (4X2) M/T	2021
7.	T-05430859	B 7214 UDB	Mitsubishi Canter FW 84G BC N (4X2) M/T	2022
8.	T-05430858	B 7241 UDB	Mitsubishi Canter FW 84G BC N (4X2) M/T	2022
9.	T-05430860	B 7243 UDB	Mitsubishi Canter FW 84G BC N (4X2) M/T	2022
10.	Q-01087688	B 9247 UBC	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H (4X4) MT	2018
11.	O-6635582	B 9294 UDG	Mitsubishi Colt Diesel SHDX H1 GEAR (4X2) M/T	2017
12.	S-03516794	B 9341 UAS	Toyota Hilux 2.4 E DC 4X4 M/T	2022
13.	S-03527212	B 9384 UAS	Toyota Hilux 2.4 E DC 4X4 M/T	2022
14.	S-02401856	B 9553 UBC	Toyota Hilux 2.4 G DC 4X4 M/T	2022
15.	S-02386560	B 9572 UBC	Toyota Hilux 2.4 G DC 4X4 M/T	2022

16.	S-02401834	B 9584 UBC	Toyota Hilux 2.4 G DC 4X4 M/T	2022
17.	P-06193120	B 9610 UFA	Mitsubishi Colt Diesel FE75 Super HD (4X2) M/T	2019
18.	S-03516821	B 9690 UBC	Toyota Hilux 2.4 E DC 4X4 M/T	2022
19.	S-03527330	B 9712 UBC	Toyota Hilux 2.4 E DC 4X4 M/T	2022
20.	S-03612209	B 9750 UBC	Toyota Hilux 2.4 G DC 4X4 M/T	2022
21.	O-06069087	B 9975 UBB	Mitsubishi Triton 2.5L OC HOX-H (4X4) M/T	2017

Aset-aset yang Dijaminkan

Perseroan telah melakukan pemberian jaminan atas aset-aset Perseroan sebagai berikut:

No.	*Jaminan*	*Nomor Akta Perjanjian*	*Penerima Jaminan*
1.	Mesin-Mesin (alat berat) atas nama Perseroan berupa Main Equipments, Road Maintenance Equipments dan Support Equipments	Akta Jaminan Fidusia No. 184 tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Bank Mandiri
2.	Mesin-Mesin (Alat Berat) atas nama Perseroan berupa Off Highway Truck CAT 773, Motor Grader CAT 160K, Dump Truck HINO FM280JD, dan Excavator PC200-10MO	Akta Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin (Alat Berat) No. 42 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara	Bank Mandiri
3.	NHL TRX-RIGID DUMP TRUCK 50T TR50D (112)	Akta Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 5 November 2025, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	BRI
4.	NHL TRX-RIGID DUMP TRUCK 50T TR50D (114)		
5.	NHL TRX-RIGID DUMP TRUCK 50T TR50D (118)		
6.	NHL TRX-RIGID DUMP TRUCK 50T TR50D (110)		
7.	2 unit NHL TRX-RIGID DUMP TRUCK 50T TR50D (115)		
8.	BULLDOZER D85E-SS-2 (DOZZER 709)		
9.	BULLDOZER D85E-SS-2 (DOZZER 710)		
10.	BULLDOZER D85E-SS-2 (DOZZER 711)		
11.	HYDRAULIC EXCAVATOR (EXC 818)		
12.	HYDRAULIC EXCAVATOR (EXC 823)		
13.	3 Bulldozer	Akta Jaminan Fidusia No. 184 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	BRI
14.	4 unit NHL–Rigid Dump Truck 50T TR50 ODB Tahun 2022,	Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 3 November 2025, yang dibuat di hadapan Nur Hayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung	BPR Arta
15.	1 unit Komatsu Motor Grader GD705A-4		
16.	1 unit Komatsu Motor Grader GD535-5		
17.	1 unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A		

18.	3 unit Dump Truck, Type HINO ZS1EPD (6X4)		
19.	3 unit Volvo FMX400 6X4 400HP RIGID C/W 17CUM Scow End Dump Body, GVW : 41.000 Kg, Wheelbase : 4.300 mm		
20.	1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Tahun 2019	Akta Jaminan Fidusia No. 143 tanggal 29 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dewi Shinta Handini Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Metro	BPR Inti
21.	1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Tahun 2018		
22.	4 unit Landasan Mobil Barang Hino FM260JD tahun 2018		
23.	1 unit Liebherr Crawler Tractor PR 734 4 (PR 734 Litronic, Liebherr Diesel Engine 150 kW/2014 HP, Semi U Blade 5,56 m^3)	Akta No. 11 tanggal 30 juni 2025, dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma,S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat	BPR BSB
24.	1 unit XCMG Articulated Dump Truck Model XDA40 dengan bukti INVOICE yang diterbitkan PT Ortus Perkasa Makmur, Jakarta Pusat tertanggal 6 Juni 2022, NO: INV107-3/OPM-AAP/VI/2022	Akta No. 7 tanggal 24 Juni 2026, dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma,S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat	
25.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.01.000021076.0 seluas 562M^2 yang terletak di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2026 tanggal 11 September 2026, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat	BNI
26.	1 unit Kendaraan XCMG Dump Truck Model: XDA40, Tahun 2022, Nomor Seri: XUG00400CMWB02298, Nomor Rangka: J00A040210222, Nomor Mesin: 942.992-C-1038453	Akta Jaminan Fidusia No. 04 tanggal 6 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Wilayah Kerja di Provinsi Banten	Bank Sindikasi

Berikut disajikan nilai buku aset tetap Perseroan per 30 Juni 2026:

Aset Tetap	**Nilai Buku Per 30 Juni 2026** (dalam Rupiah)
Mesin dan Alat Berat	302.506.728.235
Tanah dan Bangunan	42.182.727.164
Peralatan Site	6.624.335.611
Peralatan Kantor	784.074.598
Kendaraan	10.726.061.074
Supporting Unit	19.429.637.019

Perseroan memiliki 33 unit excavator maksimal kelas 100 ton, 112 unit truk maksimal kelas 60 ton, dan 41 unit alat penunjang.

8. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi untuk melindungi aset yang dimilikinya dengan nilai pertanggungan asuransi atas aset yang ditanggung telah memenuhi potensi kerugian yang timbul dengan keterangan sebagai berikut:

No.	**Polis No.**	**Nama Penanggung**	**Nama Tertanggung**	**Obyek Asuransi**	**Nilai Pertanggungan dan Premi**	**Periode**
1.	Cover Note No. 051/CN/HE/IV/20	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	PT Andalan Artha Primanusa	Armor Dewatering Slurry Pump BPM 10 (2021); Tyre	**Nilai Pertanggungan**: Rp22.518.836.125	10 April 2026 sampai dengan 10

	26 tanggal 7 April 2026			Handler (2023); Hydraulic Excavator (2022); Motor Grader (2018); PC-200-10MO (2021); 3 Articulated Damp Truck (2022); 2 Hauler OB (2022) Seluruhnya berada di Sumatera Selatan	**Premi**: Rp123.853.599	April 2027
2.	16215192508000 0073	PT Asuransi Central Asia	PT Radana Bhaskara Finance QQ. PT Andalan Artha Primanusa	Alat Berat – All Risk (Caterpillar Motor Grader Cat 160 (2022))	**Nilai Pertanggungan**: Rp5.872.300.000 **Premi**: Rp114.554.850	22 Agustus 2025 – 22 Agustus 2028 (*kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggung an berada*)
3.	16215192508000 0084	PT. Asuransi Central Asia	PT PT. Radana Bhaskara Finance QQ PT. Andalan Artha Primanusa	**Item 1**: Slow Moving HITACHI Excavator ZX870LCH-5G (2022) **Item 2**: Slow Moving HITACHI Excavator ZX350H-5G (2022) **Item 3**: Slow Moving HITACHI Excavator Zx350H-5G (2022) **Item 4**: Slow Moving HITACHI Excavator ZX350H-5G (2022)	**<u>Item 1</u>** **Nilai Pertanggungan**: Rp6.564.870.000 **Premi**: Rp128.014.965 **<u>Item 2</u>** **Nilai Pertanggungan**: Rp2.203.490.000 **Premi**: Rp42.968.055 **<u>Item 3</u>** **Nilai Pertanggungan:** Rp2.203.490.000 **Premi**: Rp42.968.055 **<u>Item 4</u>** **Nilai Pertanggungan:** Rp2.203.490.000 **Premi**: Rp42.968.055	22 Agustus 2025 – 22 Agustus 2028
4.	01-HVC-00327-000-10-2024	PT. Asuransi Raksa Pratikara	PT. Caterpillar Finance Indonesia	**Item 1**: Caterpillar Hydraulic Excavator 395 2023 – SGD20073	**<u>Item 1</u>** **Nilai Pertanggungan: (i)** All risk:	23 Oktober 2024 – 23 Februari 2028 (*pukul*

	Master Polis: 01-HVC-00001-001-07-2020		QQ Andalan Artha Primanusa, PT	**Item 2:** Caterpillar Hydraulic Excavator 395 2023 – SGD20082	Rp14.596.500.000 **(ii)** RSCC*: Rp14.596.500.000 **(iii)** THFT**: Rp14.596.500.000, dan **(iv)** SUNK***: Rp14.596.500.000 **<u>Item 2</u>** **Nilai Pertanggungan: (i)** All Risk: Rp14.596.500.000 **(ii)** RSCC*: Rp14.596.500.000 **(iii)**THFT**: Rp14.596.500.000, dan **(iv)** SUNK***: Rp14.596.500.000 **<u>Total Insured Values:</u>** Rp29.193.000.000 *RSCC: *Riot, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotion* **THFT: *Theft/Robbery/Burglary* ***SUNK: *Damage to equipment of part of it due to sunk or submerged of the equipment partially or totally to pool of water or mud* **<u>Premi:</u>** Rp583.920.000	*12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada*)
5.	01-HVC-00116-000-07-2025 **Master Polis**: -	PT. Asuransi Raksa Pratikara	PT. Buana Finance, Tbk QQ PT. Andalan Artha Primanusa	(i) HITACHI Hydraulic Excavator ZX870LCH5G (2022) No. JBE93V00050947	**Nilai Pertanggungan**: Rp6.800.000.000 (*untuk tahun 2025 sampai tahun 2027*)	24 Juni 2025 – 24 Juni 2028 (*pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada*)
6.	01-HVC-00171-000-08-2024 **Master Polis**: 01-HVC-00001-001-07-2020	PT. Asuransi Raksa Pratikara	PT. Caterpillar Finance Indonesia QQ Andalan Artha Primanusa,	1 unit Caterpillar D8RY Track Type Tractor	**Nilai Pertanggungan**: Rp10.267.500.000 (*untuk tahun 2024 sampai tahun 2027*) (2) **Premi**: Rp205.410.001	16 Agustus 2024 – 16 Desember 2027 (*pukul 12.00 siang waktu setempat dimana*

			PT (805-20004022)			*objek pertanggungan berada*)
7.	02099022500094	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PT. Andalan Artha Primanusa	**(i)** Alat Berat – Komatsu Bulldozer D85ESS-2 (2022) **(ii)** Tanggung Jawab Pihak Ketiga	**Nilai Pertanggungan: (i)** Alat Berat: Rp2.947.050.000 dan **(ii)** Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000 **Premi:** Rp17.722.300	7 Desember 2025 – 7 Desember 2026 (*pukul 12.00 siang waktu setempat di lokasi tempat Obyek Pertanggungan berada*)
8.	16215192508000 0062	PT. Asuransi Central Asia	PT. Radana Bhaskara Finance QQ PT. Andalan Artha Primanusa	**Item 1 – Certificate #000001:** **Kode SIC**: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: HINO **Tipe Alat Berat**: Dump Truck **Tahun Manufaktur**: 2022 **Nomor Seri:** MJEFM8JN2NJX17 909 **Nomor Mesin Alat Berat:** J08EWDJ21357 **Item 2 - Certificate #000002:** **Kode SIC**: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: HINO **Tipe Alat Berat**: Dump Truck	**Item 1** **Nilai Pertanggungan:** Rp984.950.000 **Premi:** Rp19.206.525 **Item 2** **Nilai Pertanggungan:** Rp984.950.000 **Premi:** Rp19.206.525 **Item 3** **Nilai Pertanggungan:** Rp984.950.000 **Premi:** Rp19.206.525 **Item 4** **Nilai Pertanggungan:** Rp984.950.000 **Premi:** Rp19.206.525 **Item 5** **Nilai Pertanggungan:** Rp984.950.000 **Premi:** Rp19.206.525 **Item 6** **Nilai Pertanggungan:** Rp7.019.980.000 **Premi:** Rp136.889.610	28 Agustus 2025 – 28 Agustus 2028

Tahun Manufaktur: 2022

Nomor Seri: MJEFM8JN2NJX17908

Nomor Mesin Alat Berat: J08EWDJ21356

Item 3 - Certificate #000003:

Kode SIC: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak

Kategori Alat Berat: Fast Moving

Brand Alat Berat: HINO

Tipe Alat Berat: Dump Truck

Tahun Manufaktur: 2022

Nomor Seri: MJEFM8JN2NJX17885

Nomor Mesin Alat Berat: J08EWDJ21333

Item 4 - Certificate #000004:

Kode SIC: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak

Kategori Alat Berat: Fast Moving

Brand Alat Berat: HINO

Tipe Alat Berat: Dump Truck

Tahun Manufaktur: 2022

Nomor Seri: MJEFM8JN2NJX17

Item 7

Nilai Pertanggungan: Rp7.019.980

Premi: Rp136.889.610

Item 8

Nilai Pertanggungan: Rp7.019.980.000

Premi: Rp136.889.610

Item 9

Nilai Pertanggungan: Rp7.019.980.000

Premi: Rp136.889.610

Item 10

Nilai Pertanggungan: Rp7.019.980.000

Premi: Rp136.889.610

941

Nomor Mesin Alat Berat:
J08EWDJ22854

Item 5 - Certificate #000005:

Kode SIC: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak

Kategori Alat Berat: Fast Moving

Brand Alat Berat: HINO

Tipe Alat Berat: Dump Truck

Tahun Manufaktur: 2022

Nomor Seri:
MJEFM8JN2NJX17880

Nomor Mesin Alat Berat:
J08EWDJ21328

Item 6 - Certificate #000006:

Kode SIC: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak

Kategori Alat Berat: Fast Moving

Brand Alat Berat: TEREX

Tipe Alat Berat: Rigid DR TR50

Tahun Manufaktur: 2023

Nomor Seri: RT 1071-1333

Item 7 - Certificate #000007:

Kode SIC: Mesin dan Peralatan

		Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: TEREX **Tipe Alat Berat**: Rigid DR TR50 **Tahun Manufaktur**: 2023 **Nomor Seri:** RT 1071-1326 **Item 8 - Certificate #000008:** **Kode SIC**: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: TEREX **Tipe Alat Berat**: Rigid DR TR50 **Tahun Manufaktur**: 2023 **Nomor Seri:** RT 1071-1332 **Item 9 - Certificate #000009:** **Kode SIC**: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: TEREX **Tipe Alat Berat**: Rigid DR TR50 **Tahun Manufaktur**: 2023

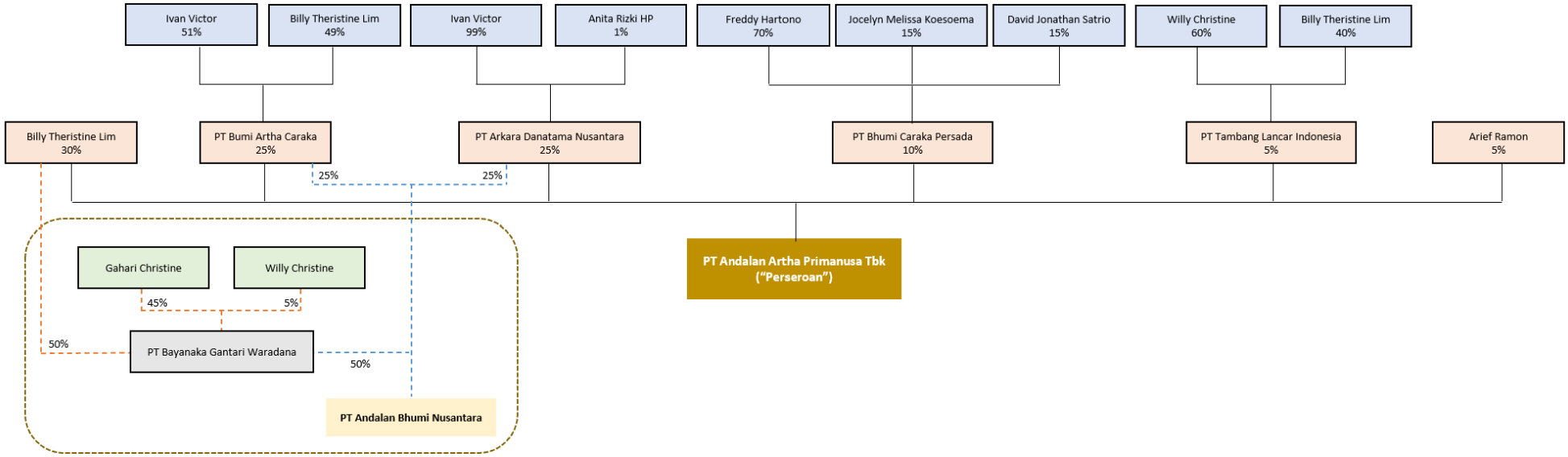
				Nomor Seri: RT 1071-1329 **Item 10 - Certificate #000010:** **Kode SIC**: Mesin dan Peralatan Pertambangan, kecuali Mesin dan Peralatan untuk Ladang Minyak **Kategori Alat Berat**: Fast Moving **Brand Alat Berat**: TEREX **Tipe Alat Berat**: Rigid DR TR50 **Tahun Manufaktur**: 2023 **Nomor Seri:** RT 1071-1315		
9.	01-HVC-00106-000-07-2025	PT. Asuransi Raksa Pratikara	PT. Buana Finance, Tbk QQ PT. Andalan Artha Primanusa	Volvo Articulated Dump Truck A40G	**Nilai Pertanggungan**: Rp5.500.000.000,00 (*untuk tahun 2025 sampai tahun 2027*)	26 Juli 2025 – 26 Juli 2028 (*pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada*)
10.	02099022600002 32	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Perseroan	Komatsu PC200-10MO Excavator EX 817 2022	**Nilai Pertanggungan**: Rp1.180.000.000 **Premi:** Rp6.255.000	22 Juli 2026 – 22 Juli 2027 (*pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada*)
11.	*Heavy Equipment Insurance* tanggal 5 Oktober 2026	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk QQ Perseroan	XCMG Motor Grader GR2605II	**Nilai Pertanggungan:** Rp2.950.000.000 **Premi:** Rp19.220.000	19 September 2026 – 19 September 2027
12.	10010905260002 61	PT Malacca Trust Wuwungan	PT Bank Negara Indonesia (Persero)	Bangunan Kantor (5 lantai) yang berlokasi di Jl. Plaju No. 11,	**Nilai Pertanggungan:** Rp61.617.549.000	18 Mei 2026 – 28 Mei 2027

	Insurance Tbk	Tbk QQ Perseroan	RT11/RW20, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230	**Premi:** Rp20.468.841

Seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

9. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kepemilikan Perseroan

Pihak pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik juncto Peraturan No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Billy Theristine Lim. Penetapan pengendalian oleh Billy Theristine Lim yang dilakukan berdasarkan Akta No. 21/2026 yang kemudian ditegaskan melalui Akta No.308/2026 dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan kepatuhan yang berlaku bagi perusahaan. Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Billy Theristine Lim melakukan pengendalian terhadap Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 44,25% (secara langsung sebesar 30% dan secara tidak langsung melalui (i) PT Bumi Artha Caraka sebesar 12,25% dan (ii) PT Tambang Lancar Indonesia sebesar 2%).

Penetapan Billy Theristine Lim sebagai pengendali tunggal Perseroan melalui RUPS didasarkan pada fakta dan riwayat keterlibatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis Perseroan. Billy Theristine Lim telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 31 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2024, di mana dalam kapasitasnya, ia secara nyata memiliki peran dominan dalam pengendalian kegiatan operasional, kebijakan dan arah strategis Perseroan. Selanjutnya, pada 7 Oktober 2024 Billy Theristine Lim juga menjadi pemegang saham terbesar Perseroan (*single largest shareholder*), sehingga semakin memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam struktur kepemilikan dan pengendalian atas Perseroan.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Billy Theristine Lim menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan yang mencerminkan kesinambungan peran pengendalian dan pengawasan atas Perseroan. Dengan mempertimbangkan kombinasi jabatan manajerial, kepemilikan saham, serta posisi pengawasan tersebut, penetapan Billy Theristine Lim sebagai Pengendali melalui RUPS dilakukan untuk mencerminkan kondisi pengendalian Perseroan yang sebenarnya.

10. Informasi Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut.

PT Bumi Artha Caraka ("BAC")

BAC adalah pemilik/pemegang 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham dalam Perseroan atau mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan Anggaran Dasar terakhir

BAC suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jihan, S.H., Notaris di Garut, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0025703.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 24 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-0070835.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Maret 2025 ("**Akta Pendirian BAC**").

Sejak pendirian, anggaran dasar BAC belum pernah mengalami perubahan Anggaran Dasar.

BAC beralamat di Jl. Ciranjang No. 03, RT 001/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12180

b. Kegiatan usaha

Kegiatan Usaha BAC berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah menjalankan usaha di bidang: (i) Pertambangan dan Penggalian; (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, BAC melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI No. 05100 – Pertambangan Batu Bara
2. KBLI No. 07102 – Pertambangan Bijih Besi
3. KBLI No. 07291 – Pertambangan Bijih Timah
4. KBLI No. 07295 – Pertambangan Bijih Nikel
5. KBLI No. 07301– Pertambangan Emas dan Perak
6. KBLI No. 08995 – Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
7. KBLI No. 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 172 tanggal 16 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0154832 tanggal 16 Maret 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0060664.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 16 Maret 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BAC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	

Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Ivan Victor	1.275	1.275.000.000	51
2. Billy Theristine Lim	1.225	1.225.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.500**	**2.500.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BAC sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 153 tanggal 13 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137733 tanggal 13 Maret 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0056760.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 13 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Billy Theristine Lim

Dewan Komisaris
Komisaris : Ivan Victor

PT Tambang Lancar Indonesia ("TLI")

TLI adalah pemilik/pemegang 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham dalam Perseroan atau mewakili 5,00% (lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan Anggaran Dasar terakhir

TLI suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. TLI didirikan dengan nama "PT Tower Light Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 14 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-39640.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-0065056.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 5 Agustus 2011 ("**Akta Pendirian TLI**").

Anggaran dasar TLI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar TLI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat di hadapan I Wayan Juniantara, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0041619.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Juli 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0142203 tanggal 20 Juli 2023, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0137242.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Juli 2023 ("**Akta No. 13/2023**").

TLI beralamat di Prima Centre Blok A No. 10, Jl. Pool PPD Pesing Polgar No. 11, RT.009/RW.002, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan Usaha TLI berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah menjalankan usaha di bidang: (i) Pertambangan dan Penggalian; (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; (iii) Konstruksi; (iv) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; dan (v) Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, TLI melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

8. KBLI No. 09990 – Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
9. KBLI No. 77392 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya.
10. KBLI No. 77393 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.
11. KBLI No. 77395 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.
12. KBLI No. 42914 – Pengerukan.
13. KBLI No. 42915 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi.
14. KBLI No. 42916 – Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan.
15. KBLI No. 43120 – Penyiapan Lahan.
16. KBLI No. 46100 – Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
17. KBLI No. 46530 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian.
18. KBLI No. 46591 – Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
19. KBLI No. 46593 – Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya.
20. KBLI No. 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
21. KBLI No. 46631 – Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
22. KBLI No. 49432 – Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TLI No. 7 tanggal 8 April 2026, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Willy Christine	3.000	3.000.000.000	60
2. Billy Theristine Lim	2.000	2.000.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TLI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 05 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan I Wayan Juniantara, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214429 tanggal 14 Juni 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0118410.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Billy Theristine Lim

Dewan Komisaris
Komisaris : Willy Christine

PT Arkara Danatama Nusantara ("ADN")

ADN adalah pemilik/pemegang 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham dalam Perseroan atau mewakili 25,00% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan Anggaran Dasar terakhir

ADN suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Adelina Arif, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0098837.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-0269648.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Desember 2024 ("**Akta Pendirian ADN**").

Sejak pendirian, anggaran dasar ADN belum pernah mengalami perubahan Anggaran Dasar.

ADN beralamat di Jalan Ciranjang Nomor 3, Desa/Kelurahan Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12180.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan Usaha ADN berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah menjalankan usaha di bidang: (i) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; (ii) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya; dan (iii) Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, ADN melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI No. 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding.
2. KBLI No. 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
3. KBLI No. 74902 – Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Lainnya.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian ADN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ADN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Ivan Victor	2.475	2.475.000.000	99
2. Anita Rizky HP	25	25.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.500**	**2.500.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ADN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian ADN adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Anita Rizky HP

Dewan Komisaris
Komisaris : Ivan Victor

PT Bhumi Caraka Persada ("BCP")

BCP adalah pemilik/pemegang 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dalam Perseroan atau mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan Anggaran Dasar terakhir

BCP suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 7 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Mega Irdayati Dara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0096792.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-0257470.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 Desember 2023 ("**Akta Pendirian BCP**").

Sejak pendirian, anggaran dasar BCP belum pernah mengalami perubahan Anggaran Dasar.

BCP beralamat di Infiniti Office MTH SQUARE GFA4/A, Jl. MT Haryono Kav 10, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan Usaha BCP berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah menjalankan usaha di bidang Pertambangan dan Penggalian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, BCP melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI No. 05100 – Pertambangan Batu Bara.
2. KBLI No. 07301– Pertambangan Emas dan Perak.
3. KBLI No. 07101– Pertambangan Pasir Besi.
4. KBLI No. 07102 – Pertambangan Bijih Besi.
5. KBLI No. 07291 – Pertambangan Bijih Timah.
6. KBLI No. 07292 – Pertambangan Bijih Timah Hitam.
7. KBLI No. 07293 – Pertambangan Bijih Bauksit.
8. KBLI No. 07294 – Pertambangan Bijih Tembaga.
9. KBLI No. 07295 – Pertambangan Bijih Nikel.
10. KBLI No. 08104 – Penggalian Pasir.
11. KBLI No. 08995 – Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BCP No. 05 tanggal 11 Februari 2026, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086415 tanggal 20 Februari 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036673.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Februari 2026 ("**Akta No. 05/2026**"). struktur permodalan dan susunan pemegang saham BCP adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	**12.000**	**12.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Freddy Hartono	4.200	4.200.000.000	70
2. Jocelyn Melissa Koesoema	900	900.000.000	15
3. David Jonathan Satrio	900	900.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**6.000**	**6.000.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**6.000**	**6.000.000.000**	

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCP sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05/2026 adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Jocelyn Melissa Koesoema

Dewan Komisaris
Komisaris : Freddy Hartono

11. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 23/2026, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Theristine Lim
Komisaris Independen : Yohanes Yudha Indrajati

Komisaris Independen	:	Muhammad Soni Lazuardi
Komisaris	:	Ivan Victor
Komisaris	:	Freddy Hartono

Direksi:

Direktur Utama	:	Gahari Christine
Direktur	:	Hanny Irawan
Direktur	:	Christianto Citra

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Perseroan telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi yang berlaku efektif pada tanggal 3 Maret 2026, dengan pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Gahari Christine	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Penetapan visi, misi dan strategi Perseroan; - Pengawasan atas seluruh kegiatan operasional, keuangan dan administrasi; - Hubungan dengan pemegang saham, regulator, mitra usaha dan pihak eksternal strategis; - Persetujuan kontrak kerja sama dengan pemberi kerja serta keputusan investasi; - Penunjukan dan pemberhentian pejabat eksekutif sesuai kebutuhan Perseroan.
2.	Hanny Irawan	Direktur	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional pertambangan batubara dan nikel; - Pengelolaan produksi, logistik, pengadaan serta distribusi sumber daya di lapangan; - Penerapan standar keselamatan kerja, kesehatan dan lingkungan sesuai regulasi; - Pengawasan kinerja proyek, kontraktor dan subkontraktor; - Penyusunan rencana kerja tahunan operasional dan rekomendasi efisiensi.
3.	Christianto Citra	Direktur	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Penyusunan dan pengendalian anggaran Perseroan; - Pengelolaan arus kas, pembiayaan dan pelaporan keuangan; - Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, perbankan dan regulasi finansial; - Penyusunan laporan keuangan untuk regulator, pemegang saham dan auditor; - Penetapan kebijakan akuntansi serta sistem pengendalian internal; - Pemberian masukan finansial dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Billy Theristine Lim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 46 Tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Sydney pada tahun 2002. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2024 - Sekarang	:	Komisaris Utama PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2021 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Prathama Energi
2018 - Sekarang	:	Komisaris PT Satrio Energy Persada
2018 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Wira Sanjaya
2018 - 2024	:	Presiden Direktur PT Andalan Artha Primanusa



Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 53 Tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Agricultural Technology* dari Universitas IPB, Jawa Barat pada tahun 1995, dan memperoleh gelar *Master of Commerce in Advanced Finance* dari University of New South Wales, Sydney pada tahun 2004. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Komisaris Independen PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2025 - Sekarang	:	Komisaris PT Pilar Bahtera Energi
2024 - Sekarang	:	Komisaris Independen PT Daaz Bara Lestari Tbk
2023 - Sekarang	:	*Principal Capital* Partner PT Batari Pilar Cemerlang
2022 - Sekarang	:	Independent Advisor
2024 - 2025	:	Komite Audit PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk
2021 - 2022	:	Executive Vice President, Head of Corporate Banking PT Bank QNB Indonesia Tbk
2005 - 2021	:	Relationship Manager (2005-2008), Team Head (2009-2014), Director - Head of Mid-Market Enterprise (2014-2016), Director - Head of Business Banking (2016-2019), Director - Head of Network Coverage/Corporate Outer Region (2019-2021) PT Bank HSBC Indonesia
2000 - 2002	:	Deputy Senior Manager Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1996 - 1999	:	Investment Banking Department Assistant Manager PT Bank Ficorinvest Tbk
1996	:	System Analyst for IT Department PT Bank Ciputra



Muhammad Soni Lazuardi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 37 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2012. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Komisaris Independen PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2025 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit PT Diastika Biotekindo Tbk
2022 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit PT Mitra Pack Tbk
2022 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit PT Pelita Teknologi Global Tbk
2020 - Sekarang	:	Direktur PT Asa Capital Indonesia (ASACAP)
2017 - 2020	:	Independent Professional Financial Advisor
2015 - 2017	:	Head Restructuring & Portfolio Analyst Caterpillar Financial Indonesia
2012 - 2015	:	Senior Associate RSM Indonesia



Ivan Victor
Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 47 Tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Fine Arts dari Academy of Arts University, San Francisco pada tahun 2003. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2025 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Daya Nusantara
2024 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Danatama Nusantara
2024 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Bhumi Biru
2022 - Sekarang	:	Komisaris PT Arkara Bentala Nusantara
2020 - Sekarang	:	Komisaris PT XAX Lintas Nusantara
2020 - Sekarang	:	Presiden Direktur PT Satrio Energy Persada
2018 - Sekarang	:	*Chairman* PT Rukun Kreasi Indonesia
2018 - Sekarang	:	Komisaris YF.Inc
2021 - 2026	:	Presiden Direktur PT Arkara Prathama Energi



Freddy Hartono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 64 Tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMA Santo Paulus, Pontianak pada tahun 1981. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2024 - Sekarang	:	Direktur PT Tri Usaha Baru
2020 - Sekarang	:	Direktur PT Mustika Energi Lestari
2011 - Sekarang	:	Direktur PT Mustika Indah Permai (Adaro Group)
2011 - Sekarang	:	Direktur PT Bukit Bara Alam
2008 - Sekarang	:	Direktur PT Bara Alam Utama

Direksi



Gahari Christine
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMP Methodist, Jakarta pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2021 - Sekarang	:	Direktur PT Arkara Prathama Energi
2024 - 2026	:	Direktur PT Andalan Artha Primanusa
2017 - 2019	:	Direktur PT Tambang Lancar Indonesia



Hanny Irawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Institut Teknologi Nasional Malang, Jawa Timur pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Direktur PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2021 - Sekarang	:	General Manager Operation & Development PT Arkara Prathama Energi
2017 - 2020	:	Penanggung Jawab Operasional & Deputy Project Manager PT Cakrawala Langit Sejahtera
2015 - 2017	:	Senior Engineering Surveyor PT Kutai Refinery Nusantara
2011 - 2012	:	Survey & Production Admin Superintendent PT Delma Mining Corporation

2009 - 2011	:	Acting Engineering Superintendent PT Multi Harapan Utama
2006 - 2009	:	Mining Superintendent PT Sanga Coal Indonesia
2003 - 2006	:	Chief Surveyor PT Binamitra Sumberarta



Christianto Citra
Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2009. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

2026 - Sekarang	:	Direktur PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2021 - 2026	:	Finance and Accounting Manager PT Andalan Artha Primanusa Tbk
2013 - 2021	:	Tax Manager PT Mitra Bersama Jaya
2012 - 2013	:	Accounting Assistant Manager PT Pyridam Farma Tbk
2010 - 2012	:	Central Finance Tax PT SMART Tbk
2009 - 2010	:	Senior Tax Officer PT Arya Medic Group
2009	:	Accounting Staff PT Pyridam Farma Tbk

Sifat Hubungan Keluarga Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Nama	Billy Theristine Lim	Yohanes Yudha Indrajati	Muhammad Soni Lazuardi	Ivan Victor	Freddy Hartono	Gahari Christine	Hanny Irawan	Christianto Citra
Billy Theristine Lim		-	-	-	-	Kakak	-	-
Yohanes Yudha Indrajati	-		-	-	-	-	-	-
Muhammad Soni Lazuardi	-	-		-	-	-	-	-
Ivan Victor	-	-	-		-	-	-	-
Freddy Hartono	-	-	-	-		-	-	-
Gahari Christine	Adik	-	-	-	-		-	-
Hanny Irawan	-	-	-	-	-	-		-
Christianto Citra	-	-	-	-	-	-	-	

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan apa pun antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain mana pun berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris terkait Penawaran Umum Saham bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek.

Saat ini, tidak terdapat faktor yang dapat menghambat atau mengurangi efektivitas para anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kualifikasi profesional, termasuk kepemilikan pengalaman yang relevan, pengetahuan industri, serta pemahaman terhadap tanggung jawab hukum dan tata kelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi juga secara rutin mengikuti pelatihan dan program pengembangan kapasitas untuk memastikan kompetensinya tetap sesuai dengan standar terbaru. Selain itu, tidak ada catatan atau situasi hukum, regulasi, atau konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kewajiban mereka terhadap Perseroan.

12. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dewan Komisaris berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib untuk membentuk Komite Audit, dan Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kontrak atau perjanjian khusus dengan anggota Dewan Komisaris terkait pemberian imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (pasca-kerja). Namun demikian, Perseroan mengalokasikan liabilitas imbalan pasca-kerja bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Billy Theristine Lim
Komisaris Independen	:	Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Independen	:	Muhammad Soni Lazuardi
Komisaris	:	Ivan Victor
Komisaris	:	Freddy Hartono

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan telah melangsungkan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris Perseroan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 Maret 2026 dan 22 Juni 2026.

Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran Rapat	%
Billy Theristine Lim	2	100%
Yohanes Yudha Indrajati	2	100%
Muhammad Soni Lazuardi	2	100%
Ivan Victor	2	100%
Freddy Hartono	2	100%

Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Gahari Christine
Direktur	:	Hanny Irawan
Direktur	:	Christianto Citra

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan telah melangsungkan rapat direksi yang dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 9 Maret 2026, 6 April 2026, 4 Mei 2026 dan 6 Juli 2026.

Dewan Direksi	Frekuensi Kehadiran Rapat	%
Gahari Christine	4	100%
Hanny Irawan	4	100%
Christianto Citra	4	100%

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Keterangan	2025	2024	2023
Dewan Komisaris	1,560,000,000	1,440,000,000	600,000,000
Direksi	2,015,000,000	1,985,000,000	600,000,000
Total	**3,575,000,000**	**3,425,000,000**	**1,200,000,000**

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/AAP-SKD/III/26 tanggal 3 Maret 2026 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary & Legal* PT Andalan Artha Primanusa Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Istiningtyas sebagai Sekretaris Perusahaan berlaku sejak tanggal 3 Maret 2026.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui alamat dan kontak sebagai berikut:

JL. Plaju No.11, Kebon Melati,
Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230
Kode Pos: 14440
Telepon: 021-66691319

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com
Situs web: www.andalan-nusantara.com

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) sejak bulan Maret tahun 2026. Memiliki pengalaman kerja sebagai Legal & Corporate Secretary di PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera sejak tahun 2024 hingga 2026, Corporate Secretary di PT Saka Uniti Indonesia sejak tahun 2023 hingga 2024, Executive Legal & Secretary di PT Satria Antaran Prima Tbk. sejak tahun 2022 hingga 2023, dan Legal & Corporate Secretary PT Mitra Bakti United Tractors sejak tahun 2021 hingga 2022.

Beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum Bisnis dari Universitas Brawijaya pada tahun 2020.

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melapor kepada Direktur Utama. Keberadaan Sekretaris Perusahaan di perusahaan diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, terpeliharanya hubungan baik dengan *stakeholders*, terpeliharanya citra baik perusahaan dan terselenggaranya rapat Direksi sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Serta mengelola kegiatan manajemen risiko pada seluruh area Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

4. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan belum terdapat program pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan dan kedepannya akan melakukan pelatihan dengan mengikuti program-program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia ataupun Asosiasi Emiten Indonesia.

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/AAP-SKDK/III/26 tanggal 3 Maret 2026 tentang Pembentukan Komite Audit PT Andalan Artha Primanusa Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	:	**Yohanes Yudha Indrajati** Keterangan singkat mengenai riwayat hidup telah diungkapkan pada Bab VII sub bab 11 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.
Anggota 1	:	**Muhammad Soni Lazuardi** Keterangan singkat mengenai riwayat hidup telah diungkapkan pada Bab VII sub bab 11 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.
Anggota 2	:	**Ariedho Daulay** Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 41 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2026, memiliki pengalaman kerja sebagai *senior manager* di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan *Supervisor* di KAP Hendrawinata, Gani, Hidayat & Rekan sejak tahun 2008 hingga 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan gelar profesi Akuntan dari PPAk FEB UI pada tahun 2008.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 3 Maret 2026. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok kerja. Ketua Komite Audit harus menyetujui agenda sebelum rapat dan menginformasikan kepada semua anggota Komite Audit dan peserta lainnya sebelum hari rapat.

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah paling lama 5 (lima) tahun.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/2014, berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Tbk tanggal 3 Maret 2026, Dewan Komisaris Perseroan akan menjalankan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris telah membentuk pedoman fungsi nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Andalan Artha Primanusa Tbk tanggal 16 Maret 2026.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Andalan Artha Primanusa Tbk. No Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/AAP-SKD/III/26 tanggal 3 Maret 2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, kepengurusan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal (merangkap sebagai Anggota)	:	**Merry Iskandar** Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2026, memiliki pengalaman kerja sebagai *General Manager Finance and Accounting* di Arkara Group sejak tahun 2025 hingga sekarang, sebagai *Finance Controller* (2023-2025), *Assistant Finance Director* (2020-2023), *Assistant Tax Manager* (2014-2020), *Tax Supervisor* (2008-2014) di Schlumberger, sebagai *Internal Auditor* di PT Kota Minyak Internusa (2002-2005), dan sebagai *External Auditor* di Ernst and Young (2000-2002). Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Andalan Artha Primanusa Tbk. tanggal 3 Maret 2026.

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

13. Upaya Pengelolaan Risiko

Berbagai macam risiko tetap akan selalu melekat kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Faktor-faktor risiko tersebut telah diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko. Dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Perseroan diantaranya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan terhadap Pemberi Kerja Utama

Secara historikal, pendapatan perseroan terkonsentrasi pada salah satu pemberi kerja, namun di tahun 2026, Perseroan mendapatkan kontrak - kontrak baru, seperti PT Bukit Bara Alam (BBA), PT Intan Bumi Persada (IBP), PT Arkara Prathama Energi (APE), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Position (POS), sehingga kelangsungan usaha dan kinerja keuangan risiko ketergantungan kepada pemberi kerja utama dapat tersebar di berbagai pemberi kerja.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pengurangan Volume Produksi Akibat Penyesuaian RKAB Pemberi Kerja

Dalam rangka memitigasi risiko pengurangan volume produksi akibat penyesuaian RKAB pemberi kerja, Perseroan melakukan diversifikasi basis pelanggan serta menambah portofolio jenis komoditas. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pelanggan atau satu jenis komoditas tertentu, sehingga apabila terjadi penyesuaian volume produksi pada salah satu proyek, Perseroan tetap memiliki sumber pendapatan dari proyek dan pelanggan lainnya.
Di dalam proyeksi yang dibuat, Perseroan telah memproyeksikan volume produksi sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan oleh pemberi kerja yang telah disesuaikan dengan RKAB yang telah disetujui ESDM.

Risiko Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan Kerja

Perseroan melakukan perencanaan tambang yang mempertimbangkan kondisi cuaca musiman, termasuk pengelolaan drainase, perawatan jalan angkut, dan penguatan lereng tambang. Perseroan juga melakukan monitoring kondisi cuaca secara berkala untuk meminimalkan gangguan operasional. Perusahaan juga memastikan peralatan berada dalam kesesuaian standar keselamatan yang terbaru dan mengadakan asuransi yang mencakup risiko bencana alam dan kecelakaan.
Perseroan akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca berbasis drone sebagai langkah antisipatif tambahan untuk mengurangi dampak curah hujan tinggi terhadap operasional, dengan tetap memperhatikan aspek regulasi, kelayakan teknis, dan efisiensi biaya.

Risiko Gangguan Operasional atau Kerusakan Alat Berat

Perseroan menerapkan program *preventive maintenance* dan *predictive maintenance* secara berkala untuk meningkatkan kesiapan alat (*physical availability*). Perseroan juga menjaga kestabilan dan keberlanjutan ketersediaan suku cadang serta melakukan pengawasan operasional secara ketat guna meminimalkan *downtime*.

Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan menerapkan sistem rekrutmen selektif, program pelatihan, dan sertifikasi berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan operasional.
Perseroan juga membangun budaya kerja berbasis *safety-driven performance* guna menekan risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan disiplin operasional. Selain itu, kebijakan remunerasi yang kompetitif, pengelolaan roster kerja yang efektif, serta penguatan struktur organisasi yang efisien diterapkan untuk menjaga produktivitas, loyalitas, dan kesinambungan operasional.
Dengan pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sekaligus menjaga stabilitas kinerja usaha di tengah persaingan industri pertambangan.

Risiko Biaya Operasional

Perseroan melakukan pengendalian biaya secara berkala melalui pengawasan ketat konsumsi bahan bakar dan suku cadang, serta optimalisasi struktur biaya operasional. Strategi efisiensi bahan bakar dan biaya pemeliharaan diterapkan dengan memilih merek dan tipe unit yang memiliki konsumsi paling efisien sesuai spesifikasi dan kebutuhan proyek, serta mempertimbangkan ketersediaan suku cadang guna meminimalkan *downtime*. Dengan pendekatan tersebut, biaya operasional dapat ditekan secara optimal. Selain itu, Perseroan melakukan negosiasi harga dengan pemasok utama dan mengupayakan pencantuman mekanisme penyesuaian tarif (*cost escalation* atau *rise and fall*) dalam kontrak untuk mengantisipasi kenaikan biaya yang signifikan.

Risiko Terkait Kemampuan Perseroan dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Tunai

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah strategis dan taktis yang disesuaikan dengan siklus bisnis jasa kontraktor pertambangan, di antaranya melalui percepatan penagihan termin pekerjaan (*progress billing*) kepada pemilik tambang dengan memperketat verifikasi data produksi dan hauling harian agar proses pencairan piutang dapat lebih optimal. Selain itu, Perseroan secara konsisten mengoptimalkan utilisasi serta physical availability alat berat guna mendongkrak volume produksi dan pendapatan operasional, diiringi dengan penerapan prioritas ketat pada pengeluaran belanja modal untuk pemeliharaan armada serta penundaan pengadaan alat baru yang belum mendesak. Di samping langkah-langkah internal tersebut, manajemen juga terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang konstruktif dengan pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan selaku kreditur, termasuk melakukan reviu berkala atas proyeksi arus kas.

Sehubungan dengan risiko tidak terpenuhinya DSCR sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman, Perseroan melakukan pemantauan berkala atas pemenuhan ketentuan keuangan tersebut. Apabila terdapat indikasi bahwa DSCR tidak dapat dipenuhi, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur sejak dini. Dalam hal diperlukan, Perseroan akan mengajukan permohonan pengesampingan (*waiver*) atau penyesuaian atas ketentuan keuangan tersebut, maupun penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman, agar tidak menimbulkan kelalaian yang dapat berdampak pada fasilitas pinjaman lainnya. Perseroan juga akan menjajaki sumber pendanaan alternatif apabila diperlukan untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajibannya.

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas

Sebagai kontraktor jasa pertambangan, tidak ada dampak langsung dari fluktuasi harga komoditas. Perseroan berfokus pada kontrak berbasis volume dan berupaya menjaga diversifikasi pelanggan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas atau satu pemberi kerja.

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan berkomitmen untuk tetap menjaga konsistensi kinerja yang baik yang selama ini telah Perseroan tunjukkan kepada pemberi kerja, terutama dalam hal produktivitas dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan kontrak.

Risiko Tidak Diperpanjangnya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Sebagai bagian dari praktik tata kelola yang baik, Perseroan berkomitmen untuk mempersiapkan serta mengajukan perpanjangan IUJP paling lambat pada tanggal 8 Desember 2026, yaitu satu tahun sebelum masa berlaku berakhir, guna menjamin kelangsungan kegiatan operasional tetap terjaga. Perseroan juga secara konsisten menjalin komunikasi intensif dengan instansi pemerintah terkait melalui konsultasi rutin serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, sehingga proses perpanjangan izin dapat berlangsung tepat waktu dan tanpa hambatan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dengan melakukan kajian mendalam serta studi kelayakan (*feasibility study*) secara komprehensif pada setiap rencana investasi, guna menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility - CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”) merupakan komitmen berkelanjutan Perseroan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional Perseroan.

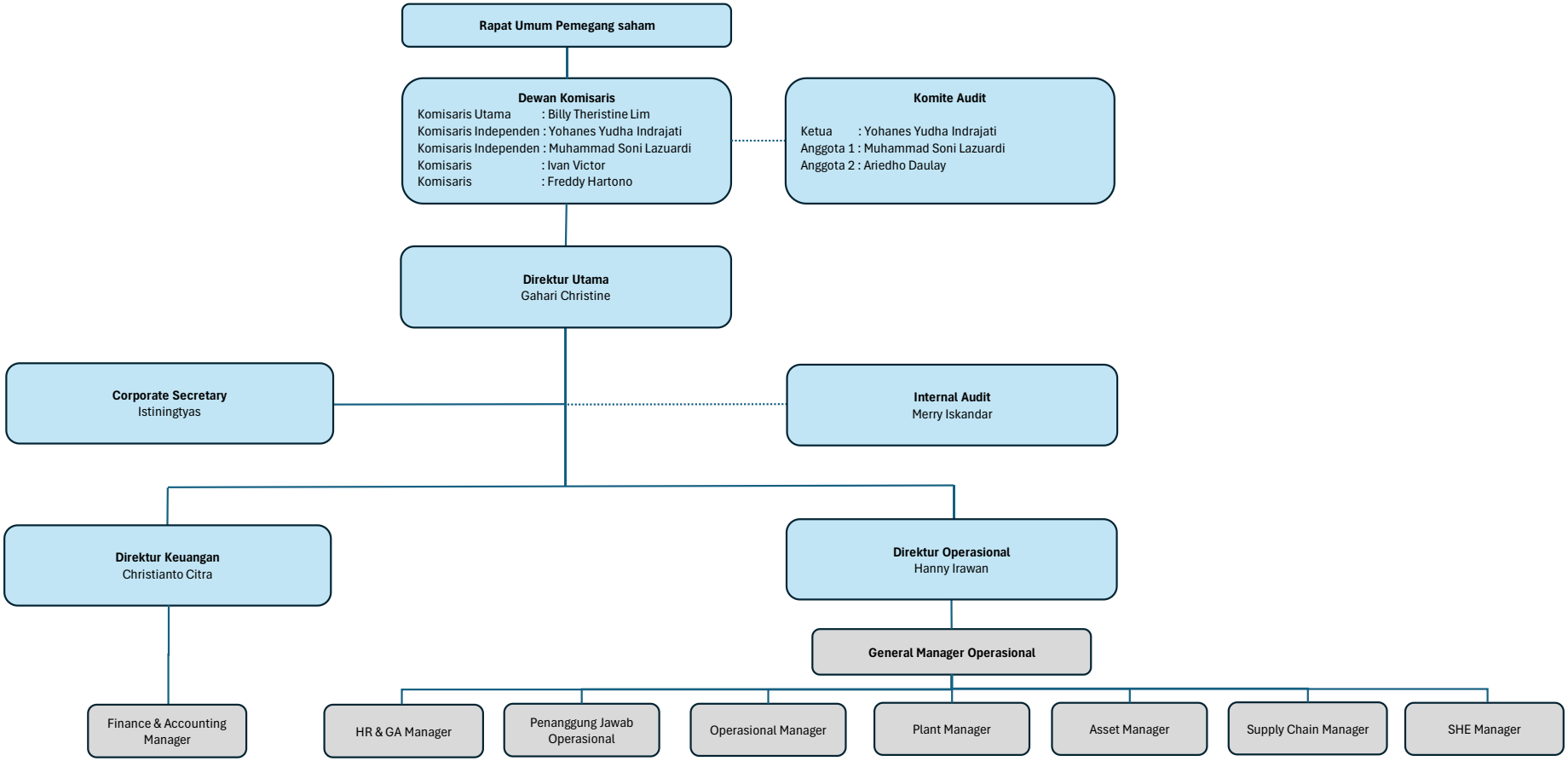
Perseroan melakukan komitmen restorasi ekosistem mangrove selama lima tahun melalui kolaborasi dengan JEJAKIN, perusahaan teknologi iklim berbasis di Indonesia. Inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pemulihan lingkungan pesisir.


ANDALAN x Jejakin
PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN
Komitmen 5 Tahun Restorasi Hutan Bakau Indonesia
18 NOVEMBER 2025
JAKARTA



15. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Perseroan

16. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

Komposisi karyawan
Per tanggal 30 Juni 2026, Perseroan mempekerjakan karyawan sejumlah 762 orang yang semuanya merupakan karyawan tetap. Seluruh karyawan Perseroan tersebar di kantor pusat dan *site* proyek. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
Tetap	762	447	607	531
Kontrak	0	0	0	0
Jumlah	**762**	**447**	**607**	**531**

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
Manajemen	4	4	3	2
Staff	172	110	120	90
Non-Staff	586	333	484	439
Jumlah	**762**	**447**	**607**	**531**

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
Sarjana	130	54	67	58
Diploma	36	21	23	21
SMA dan di bawah SMA	596	372	517	452
Jumlah	**762**	**447**	**607**	**531**

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
>50 tahun	32	26	33	29
41 - 50 tahun	73	111	128	111

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
31 - 40 tahun	259	127	180	135
21 - 30 tahun	398	183	266	256
Jumlah	**762**	**447**	**607**	**531**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
Kantor Pusat	59	48	44	33
Lapangan/*Site*	703	399	563	498
Jumlah	**762**	**477**	**607**	**531**

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
Perseroan				
Over Burden (OB) – Coal	210	210	270	260
Coal Getting (CG) – Coal	100	100	170	122
Ore Getting (OG) – Nickel	117	0	0	0
Rental	7	7	0	0
Administration & Support (Site)	269	112	123	116
Head Office	59	48	44	33
Jumlah	**762**	**477**	**607**	**531**

Pegawai dengan Keahlian Khusus

NO	NAMA	JABATAN	USIA	PENGALAMAN KERJA (TH)	SERTIFIKASI
1	Abdi Ilahi	Safety Officer	32	3	Pengawas Operasional Pertama (POP)
2	Hermawan Syah Manik	She Superintendent	35	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
3	Rangga Adi Jaya	Safety Officer	31	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
4	Yulia Citra	Admin She	31	3	Pengawas Operasional Pertama (POP)
5	Hermawan Syah Manik	She Superintendent	35	1	Audit SMKP
6	Hermawan Syah Manik	She Superintendent	35	1	SMK3
7	Yopie Nugraha Romli	Foreman Equipment	38	7	Pengawas Operasional Pertama (POP)
8	Herwan	Foreman Mining Coal	41	7	Pengawas Operasional Pertama (POP)
9	Emen Suhar Ariansyah	Foreman Mining Ob	49	7	Pengawas Operasional Pertama (POP)
10	M. Rahwi	Foreman Mining Coal	48	6	Pengawas Operasional Pertama (POP)
11	Laju Boy Ardi Harahap	Foreman Mining Coal	28	2	Pengawas Operasional Pertama (POP)
12	Bintang Fernata Putra	Foreman Mining Disposal	32	2	Pengawas Operasional Pertama (POP)
13	Taufiq Khurrahman	Foreman Mining Ob	28	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
14	Mei Alexsander Galingging	Superintendent Production	42	1	Pengawas Operasional Madya (POM)
15	Ely Marluga Banjarnahor	Foreman Ob	28	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
16	Tatang Wandi Sitanggang	Foreman Ob	29	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
17	Muhammad Ilham	Foreman Ob	30	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
18	Jona Riston Pasaribu	Supervisor Produksi	33	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
19	Edi Susanto	Supervisor Produksi	47	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
20	Feri Ruslandi	Foreman Ob	50	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
22	Susanta Hadi Wibowo	Foreman Track	38	3	Pengawas Operasional Pertama (POP)
23	Agus Sediono	Foreman Electrician	43	2	Pengawas Operasional Pertama (POP)
24	Fandy Achmad	Foreman Planner	26	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
25	Diki Zuhury	Foreman Track	27	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
26	Wahyu Ariyanto	Supervisor Track	44	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
27	Bambang Asfianto	Section Head Plant	44	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
28	Hasbullah	Dept Head Plant & Scm	44	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
29	Alfisahri Kurniawan	Foreman Pit Control	29	3	Pengawas Operasional Pertama (POP)
30	Agus Prasetyo	Supervisor Survey	40	2	Pengawas Operasional Pertama (POP)
31	Febri Yuliansyah	Supervisor Mcc	32	1	Pengawas Operasional Pertama (POP)
32	Agus Prasetyo	Supervisor Survey	40	2	Juru Ukur Tambang
33	Ekky Maulana Ramadhan Hutapea	Foreman Pit Control	25	3	Operator Drone
34	Tomy Angriawan Nasution	Foreman Warehouse	31	6	Pengawas Operasional Pertama (POP)
35	Agus Sutomo	Foreman Ga	47	12	Pengawas Operasional Pertama (POP)
36	Mega Persada Putri	Admin Hrga	24	2	Pengawas Operasional Pertama (POP)

Sarana Kesejahteraan

Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

a. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
b. Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Lapangan;
e. Tunjangan Makan;
f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
g. Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
h. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Perjanjian untuk Melibatkan Karyawan dan Manajemen Dalam Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

17. Perkara Yang Dihadapi Perseroan Serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2026, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan sehubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2026, dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta Utara dengan nama "PT Andalan Artha Primanusa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tahun 2014, Tambahan No. 49184 ("**Akta Pendirian**").

2. Visi dan Misi Perseroan

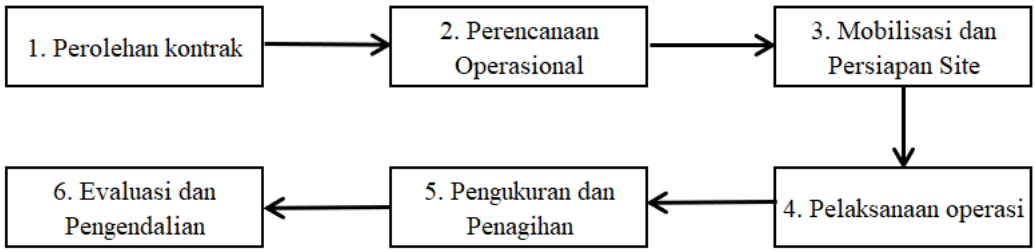
- Visi:
  Menjadi kontraktor pertambangan terpercaya yang berintegritas dan konsisten dalam memberikan kinerja terbaik.

- Misi:
  1) Membangun kepercayaan melalui kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan
  2) Menjalankan operasional dengan integritas dan kepatuhan
  3) Mengelola pekerjaan secara produktif dan efisien
  4) Mengembangkan sistem dan kapabilitas untuk keberlanjutan kinerja

3. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang secara nyata dilakukan mencakup kegiatan jasa penunjang operasional pertambangan, antara lain namun tidak terbatas pada jasa pengupasan lapisan penutup (*overburden removal*), penambangan bijih dan/atau batubara (*ore mining/coal mining*), pengangkutan material tambang (*hauling*), pengelolaan dan perawatan jalan angkut, penyediaan alat berat dan operator, serta kegiatan pendukung lainnya yang terkait dengan aktivitas pertambangan dan penggalian.

Proses Bisnis Perseroan



Keterangan tentang Proses Bisnis Perseroan

1. **Perolehan Kontrak**
   Perseroan memperoleh pekerjaan melalui proses negosiasi langsung maupun tender dengan pemilik konsesi pertambangan. Ruang lingkup pekerjaan, tarif jasa, target produksi, serta jangka waktu kontrak ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

2. **Perencanaan Operasional**
   Setelah kontrak diperoleh, Perseroan melakukan perencanaan teknis dan operasional, termasuk penyusunan rencana kerja, mobilisasi alat berat, penempatan tenaga kerja, serta penyusunan anggaran biaya operasional.

3. **Mobilisasi dan Persiapan Site**
   Perseroan melakukan mobilisasi alat berat, pembangunan fasilitas pendukung sementara, serta persiapan infrastruktur seperti jalan angkut dan area kerja sesuai dengan rencana tambang.

4. **Pelaksanaan Operasi Penambangan**
   Kegiatan operasional meliputi:
   a. Pengupasan lapisan penutup (*overburden removal*)
   b. Penambangan bijih atau batubara (*ore mining/coal mining*)
   c. Pengangkutan material tambang (*hauling*)
   d. Pengelolaan dan pemeliharaan jalan angkut

   Seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku.

5. **Pengukuran dan Penagihan**
   Volume pekerjaan diukur berdasarkan satuan yang disepakati dalam kontrak (misalnya BCM atau metrik ton). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Perseroan melakukan penagihan kepada pemberi kerja sesuai termin pembayaran yang disepakati.

6. **Evaluasi dan Pengendalian Kinerja**
   Perseroan melakukan pemantauan produktivitas alat, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan secara berkala guna memastikan pencapaian target operasional.

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha Perseroan dalam industri jasa kontraktor pertambangan, sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki pengalaman operasional dalam kegiatan jasa kontraktor pertambangan batu bara dan telah memperluas portofolio ke komoditas nikel, sehingga memiliki kapabilitas dalam menangani lebih dari satu komoditas tambang.
2. Perseroan mendapatkan kontrak kerja jangka panjang dari pemberi kerja yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang sangat baik seperti: Grup PT Harum Energy Tbk, Grup PT Bukit Asam Tbk, dan Grup Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
3. Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, dibuktikan dengan diperolehnya kontrak-kontrak jangka panjang baru.
4. Perseroan mengutamakan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk komitmen pembayaran kepada lembaga keuangan dan pemasok.
5. Perseroan menjalankan layanan operasional utama pertambangan, termasuk pengupasan lapisan tanah penutup (*overburden removal*), penambangan, dan pengangkutan, sehingga mampu mendukung kebutuhan operasional pemberi kerja secara menyeluruh di area tambang.
6. Perseroan memiliki struktur biaya yang kompetitif melalui optimalisasi utilisasi alat berat dan pengendalian biaya operasional, yang memungkinkan Perseroan menawarkan jasa dengan harga yang bersaing.
7. Diversifikasi pelanggan dan ekspansi ke komoditas nikel pada tahun 2026 memperkuat struktur pendapatan Perseroan serta mengurangi ketergantungan pada satu pemberi kerja.
8. Perseroan menerapkan standar keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara konsisten untuk menjaga kelancaran operasional dan reputasi usaha, dibuktikan dengan *zero fatality rate* selama 8 (delapan) tahun terakhir sejak mulai beroperasi.

5. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir, Perseroan mencatatkan penurunan pendapatan neto sebesar 8,68% menjadi Rp200,12 miliar per 30 Juni 2026. Penurunan angka pendapatan ini tidak disebabkan oleh penurunan volume produksi (BCM), yang secara kapasitas alat dan operasional tetap stabil. Penurunan ini murni merupakan dampak dari perubahan struktur harga kontrak seiring adanya pergeseran produksi dari proyek lama ke proyek-proyek baru (seperti DBK dan SBS) di mana bahan bakar (*fuel*) disediakan langsung oleh klien.

Hal tersebut berdampak positif secara signifikan terhadap postur beban Perseroan. Beban pokok pendapatan turun menjadi Rp148,31 miliar, didorong oleh efisiensi pengeluaran bahan bakar/solar yang tidak lagi ditanggung Perseroan pada proyek-proyek baru tersebut. Di sisi lain, harga penjualan saat ini lebih bervariasi dan adaptif menyesuaikan struktur komponen bahan bakar pada kontrak, serta masuknya Perseroan ke proyek penambangan komoditas nikel yang memiliki struktur harga relatif lebih tinggi dibandingkan batubara.

Pada pos persediaan, Perseroan mencatatkan peningkatan nilai persediaan menjadi Rp30,40 miliar sejalan dengan pembukaan proyek baru dan mobilisasi alat berat baru untuk mendukung operasional. Secara keseluruhan, pergeseran portofolio pelanggan dan efisiensi beban operasional ini berhasil mendorong lonjakan laba neto Perseroan menjadi Rp11,77 miliar dari sebelumnya Rp3,26 miliar. Prospek Perseroan ke depan dinilai sangat solid, ditopang oleh diversifikasi pelanggan, ekspansi ke komoditas nikel, serta stabilitas kapasitas produksi alat berat yang beroperasi secara optimal.

6. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa Merek sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku	Merek	Kelas
1.	IDM001504010	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	6
2.	IDM001504023	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	4
3.	IDM001503341	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	40
4.	IDM001503313	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	37
5.	IDM001503318	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	42
6.	IDM001510465	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	36
7.	IDM001507452	Sampai dengan 4 Maret 2036	ANDALAN	35

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek-merek pada Kemenkum dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan Pendaftaran	Merek	Kelas	Status
1.	DID2026021541	ANDALAN	7	Pemeriksaan Substantif
2.	DID2026021551	ANDALAN	19	Pemeriksaan Substantif

7. Persaingan

Sehubungan dengan kegiatan usaha penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, berikut adalah beberapa perusahaan kompetitor:

No.	Nama Perusahaan	Kode	Negara
1.	PT Petrosea Tbk	PTRO	Indonesia
2.	PT United Tractors Tbk	UNTR	Indonesia
3.	PT Buma Internasional Grup Tbk	DOID	Indonesia
4.	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	Indonesia
5.	PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk	RMKO	Indonesia
6.	PT Sinar Terang Mandiri Tbk	MINE	Indonesia

8. Strategi Usaha

Sejalan dengan prospek industri batu bara dan nikel pada periode 2026–2027 yang menunjukkan peluang pertumbuhan selektif di tengah dinamika harga komoditas dan kebijakan produksi nasional, Perseroan menerapkan strategi usaha yang berfokus pada penguatan fundamental, diversifikasi usaha, serta peningkatan daya saing operasional secara berkelanjutan.

Penambahan Pemberi Kerja dan Diversifikasi Komoditas

Sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur pendapatan dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama saja, Perseroan secara aktif memperluas basis pelanggan dan portofolio proyek. Perolehan *Letter of Award* dari PT Position (POS) pada Januari 2026 yang menandai ekspansi ke komoditas nikel, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan prospek usaha yang berkelanjutan.

Peningkatan Efisiensi Biaya Operasional dan Penerapan *Good Mining Practice*

Dalam industri jasa pertambangan yang kompetitif, efisiensi dan produktivitas merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Perseroan secara konsisten mengoptimalkan utilisasi alat berat, pengendalian biaya

operasional, serta perencanaan pemeliharaan yang terstruktur guna memastikan kinerja proyek berjalan sesuai target waktu dan biaya.

Selain itu, Perseroan menerapkan pendekatan "***safety-driven performance***", dimana aspek keselamatan kerja menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas operasional. Budaya keselamatan yang kuat, kepatuhan terhadap standar K3, serta pengawasan yang disiplin diyakini tidak hanya menurunkan risiko kecelakaan kerja, tetapi juga secara langsung meningkatkan produktivitas, mengurangi *downtime* akibat insiden, serta menjaga kesinambungan operasional proyek.

Di sisi teknis, Perseroan mengimplementasikan program **"*preventive dan predictive maintenance*"**. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan melalui pemantauan parameter operasional, analisa berkala, serta sistem monitoring kesehatan alat berat. Dengan demikian, risiko *breakdown* mendadak dapat diminimalkan, umur pakai komponen lebih optimal, dan biaya perawatan menjadi lebih terkendali.

Pendekatan terintegrasi antara efisiensi biaya, disiplin keselamatan, serta pengelolaan keandalan alat ini tidak hanya menjaga stabilitas margin usaha, tetapi juga memperkuat reputasi Perseroan sebagai kontraktor yang andal, adaptif, dan mampu memenuhi ekspektasi pemberi kerja dalam jangka panjang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan meyakini bahwa kompetensi dan integritas sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan usaha. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapabilitas teknis dan manajerial, tetapi juga pada pembentukan budaya operasional yang menekankan keselamatan, keandalan, dan kinerja berkelanjutan.

Selain itu, Perseroan mengusung prinsip **"*Capability Creates Competitive Advantage*"**, yaitu membangun keunggulan daya saing melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Program pelatihan teknis, sertifikasi profesi, pengembangan kepemimpinan, serta pembinaan sikap kerja profesional dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan setiap karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan etos kerja yang unggul. Perseroan meyakini bahwa semakin tinggi kapabilitas tim, semakin kuat posisi kompetitif perusahaan dalam memenangkan kontrak dan mempertahankan kepercayaan pelanggan.

Melalui strategi pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi, Perseroan berupaya memperkuat fondasi organisasi yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan di tengah dinamika industri pertambangan.

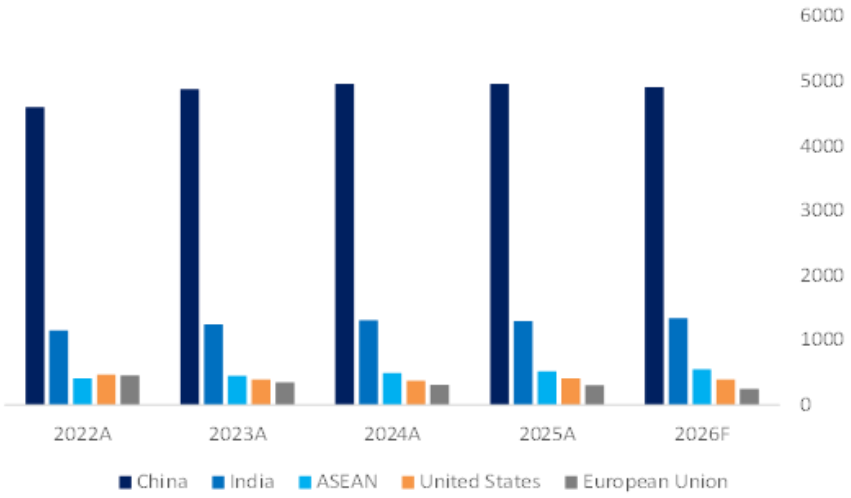
9. Prospek Usaha

Prospek usaha jasa kontraktor pertambangan batu bara di Indonesia pada tahun 2026–2027 diperkirakan tetap menunjukkan peluang yang menarik, meskipun dihadapkan pada dinamika harga komoditas dan penyesuaian kebijakan produksi nasional, kebutuhan terhadap jasa kontraktor yang efisien, adaptif, dan berpengalaman tetap menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan operasional para pemilik tambang.

Industri Batu Bara

Permintaan batu bara global masih relatif terjaga, terutama dari negara-negara dengan kebutuhan energi berbasis pembangkit listrik tenaga uap seperti China dan India. Berdasarkan berbagai publikasi lembaga internasional seperti International Energy Agency, konsumsi batu bara di kawasan Asia diperkirakan tetap menjadi penopang utama permintaan global dalam jangka menengah.

Global coal consumption



Source: IEA

Dari sisi domestik berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, proyeksi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diperkirakan rata-rata sebesar 5,3% per tahun. Untuk memenuhi pertumbuhan tersebut, pemerintah melalui PT PLN (Persero) merencanakan penambahan kapasitas pembangkit yang signifikan, termasuk pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, serta sistem distribusi dalam skala besar.

Meskipun terdapat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT), struktur bauran energi nasional hingga tahun 2034 masih menunjukkan peran strategis energi fosil, khususnya batubara, sebagai tulang punggung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Hal ini terutama terlihat pada sistem Jawa–Madura–Bali yang menjadi pusat konsumsi listrik terbesar di Indonesia.

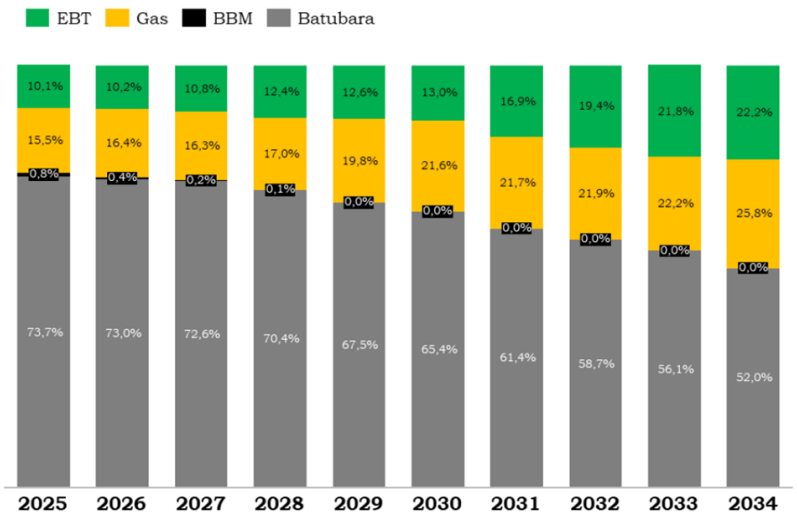
Dengan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik yang stabil serta kebutuhan kapasitas pembangkitan yang terus meningkat, di sisi lain bauran energi pembangkitan nasional masih menunjukkan dominasi batubara, dengan komposisi sekitar 73% pada tahun 2026 dan diperkirakan tetap sebesar 52% pada tahun 2034. Komposisi tersebut menegaskan bahwa batubara tetap menjadi sumber energi utama dalam mendukung keandalan pasokan listrik nasional dalam jangka menengah, sehingga mencerminkan keberlanjutan kebutuhan terhadap pasokan batubara beserta jasa dan infrastruktur pendukungnya.

Berikut adalah rangkuman data RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034 terkait prospek usaha:

a. proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 5,3% (lima koma tiga persen);
b. total rencana pembangunan pembangkit termasuk fasilitas penyimpanan energi (energy storage system) sebesar 69.512 MW (enam puluh sembilan ribu lima ratus dua belas megawatt), dengan rincian:
    1) pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sebesar 42.569 MW (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan megawatt) dan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan energi (energy storage system) sebesar 10.256 MW (sepuluh ribu dua ratus lima puluh enam megawatt);
    2) pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi fosil sebesar 16.687 MW (enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh megawatt).
c. Target bauran energi baru dan terbarukan pembangkitan pada akhir tahun 2034 sebesar 34,3% (tiga puluh empat koma tiga persen);
d. Total rencana pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.758 kms (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan kilometer sirkuit);

e. Total rencana pembangunan gardu induk sebesar 107.950 MVA (seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh megavolt ampere);
f. Total rencana pembangunan jaringan distribusi sebesar 197.998 kms (seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kilometer sirkuit); dan
g. Total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 18.407 MVA (delapan belas ribu empat ratus tujuh megavolt ampere).

Proyeksi komposisi energi mix yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan tenaga listrik di Jawa, Madura, dan Bali adalah sebagai berikut:



Gambar 5.41 Komposisi *Energi Mix* Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa, Madura dan Bali (%) – Skenario RE *Base*

Source: RUPTL PLN 2025-2034

Selain proyeksi kebutuhan batubara yang masih signifikan sebagaimana tercermin dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengendalian produksi guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga batubara di pasar domestik maupun global. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi volume produksi pemilik tambang dan secara tidak langsung dapat berdampak pada volume pekerjaan kontraktor.

Meskipun demikian, model bisnis industri pertambangan di Indonesia pada umumnya tetap mengandalkan kontraktor pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan operasional utama, seperti pengupasan lapisan tanah penutup (*overburden removal*), penambangan, dan pengangkutan. Dengan demikian, selama kegiatan operasional tambang tetap berjalan sesuai rencana produksi yang ditetapkan, kebutuhan terhadap jasa kontraktor pertambangan diperkirakan tetap terjaga.

Dengan tetap terjaganya permintaan ekspor dan kebutuhan domestik, prospek jasa kontraktor batu bara pada 2026–2027 diperkirakan berada pada kondisi yang stabil, dengan kecenderungan pertumbuhan yang moderat dan selektif. Kontraktor yang memiliki efisiensi biaya, rekam jejak operasional yang baik, serta kemampuan menjaga produktivitas akan berada pada posisi yang lebih kompetitif.

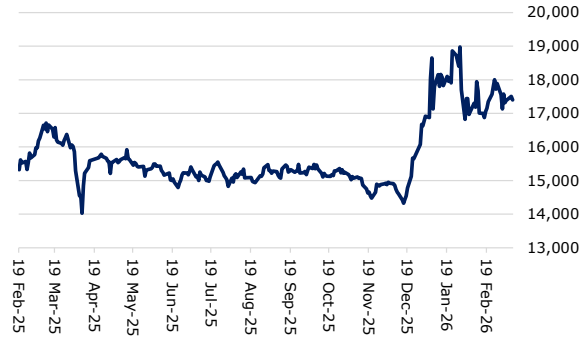
Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menunjukkan penguatan fundamental melalui perolehan *Letter of Award* dari PT Position (POS) pada Januari 2026. Ekspansi ke komoditas nikel ini merupakan langkah strategis dalam memperluas portofolio usaha dan mengurangi ketergantungan pada dua klien utama. Transformasi menuju basis pelanggan yang lebih terdiversifikasi diharapkan dapat memperkuat stabilitas pendapatan, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Industri Nikel

Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen nikel utama dunia dan memegang peran strategis dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global. Permintaan nikel dalam jangka menengah didorong oleh pengembangan industri hilirisasi, pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, serta agenda transisi energi global.

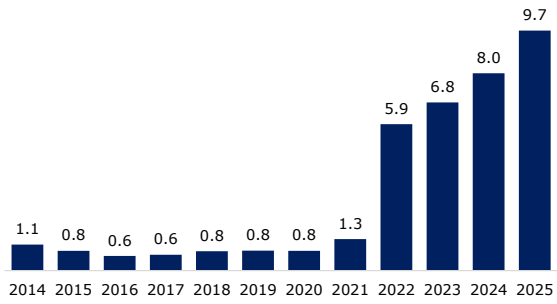
Harga nikel turun ke sekitar USD17.200/ton pada Maret, memperpanjang penurunan dan mengikuti pelemahan logam industri lainnya seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu sentimen risk-off di pasar manufaktur. Lonjakan harga Brent crude serta penguatan dolar AS turut menekan komoditas industri dan mendorong investor mengurangi eksposur pada logam siklikal. Dari sisi pasokan, smelter di Indonesia yang bergantung pada sulfur dari Timur Tengah, sekitar 75% dari kebutuhan mereka, berpotensi menghadapi kenaikan biaya dan kemungkinan pengurangan produksi jika gangguan pengiriman terus berlanjut, yang dapat memperketat ketersediaan bahan baku dan menekan operasi. Sementara itu dari sisi permintaan, pabrik baja di Tiongkok meningkatkan harga tender NPI berkadar tinggi, mengindikasikan permintaan yang tetap kuat dan berpotensi membatasi penurunan harga lebih lanjut. Selain itu, kuota bijih nikel Indonesia untuk 2026 sebesar 260 hingga 270 juta wmt, membatasi pemanfaatan penuh kapasitas RKEF dan HPAL nasional yang mencapai 2,7 juta ton, sehingga tingkat utilisasi pengolahan diperkirakan turun menjadi sekitar 70–75% pada tahun ini. Menurut basis data perdagangan internasional United Nations COMTRADE Database, nilai ekspor nikel Indonesia mencapai USD 9,73 miliar pada 2025.

Exhibit 1. Harga Nikel (USD/t)



Source: Bloomberg

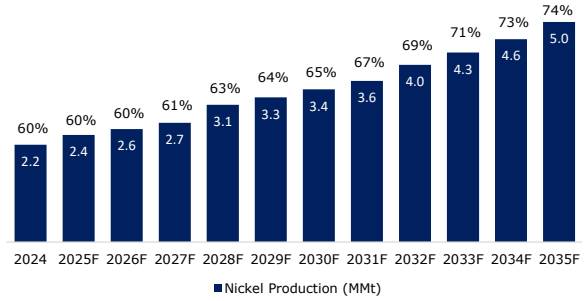
Exhibit 2. Nilai Ekspor Nikel Indonesia (USDbn)



Source: Tradingeconomics

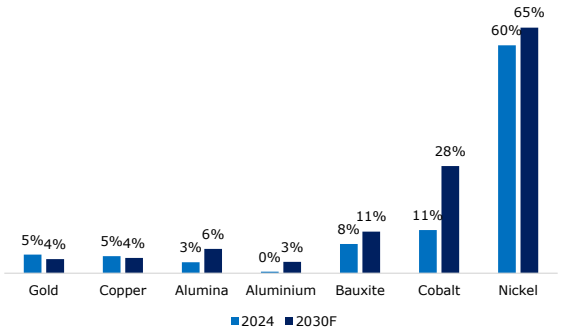
Dari sisi pasokan, Indonesia tetap menjadi pemain utama baik di segmen tambang maupun hilir. Pada 2024, Indonesia menyumbang lebih dari 60% produksi nikel tambang global. Sejak 2015, produksi nikel Indonesia meningkat sangat pesat, terutama dari bijih laterit, sementara sejumlah negara lain seperti Filipina, New Caledonia, Australia, dan Kanada justru mencatat penurunan produksi. Ke depan, produksi bijih nikel Indonesia masih diperkirakan tumbuh hingga 2030, meskipun laju pertumbuhannya berpotensi melambat setelahnya seiring kekhawatiran atas penurunan kualitas sumber daya dan potensi deplesi cadangan. Di sisi hilir, produksi nikel olahan Indonesia juga terus meningkat dan tumbuh lebih cepat dibandingkan Tiongkok pada 2024, terutama didorong oleh ferronickel, nickel pig iron, matte, serta produk antara untuk bahan baku baterai seperti MSP dan MHP. Tiongkok memang masih menjadi produsen utama bahan kimia nikel akhir, termasuk nikel sulfat, tetapi Indonesia diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan hingga 2040 sejalan dengan strategi memperluas nilai tambah industri domestik.

Exhibit 3. Produksi Nikel dan Persentase Produksi Indonesia



Source: S&P Global

Exhibit 4. Persentase Supply Mineral Indonesia di Global

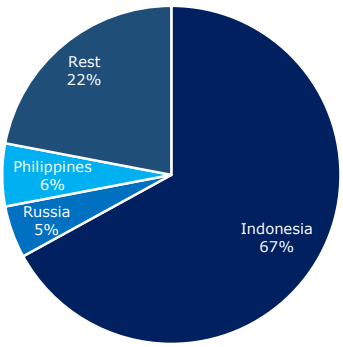


Source: S&P Global

Dari sisi permintaan, struktur konsumsi nikel terus mengalami perubahan. Secara historis, permintaan nikel terutama berasal dari penggunaannya pada paduan untuk baja nirkarat dan aplikasi logam non-ferrous, yang mencakup sekitar 75% dari total permintaan nikel pada 2020. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, komposisi permintaan mulai bergeser ke teknologi energi, seiring meningkatnya penggunaan nikel pada baterai berkadar nikel tinggi serta energi terbarukan seperti angin dan panas bumi. Pada 2024, teknologi energi menyumbang hampir 20% dari total permintaan nikel global, dan porsi ini diperkirakan terus meningkat hingga lebih dari 40% pada 2040. Permintaan nikel global naik 6% menjadi 3,4 juta ton pada 2024, terutama didorong oleh pertumbuhan penggunaan pada baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. Meskipun tren baterai LFP menekan proyeksi permintaan nikel dibandingkan perkiraan sebelumnya, kimia baterai berbasis nikel diperkirakan tetap memegang peranan penting, khususnya di luar Tiongkok serta di pasar kendaraan jarak jauh di Amerika Utara dan Eropa. Secara regional, Tiongkok tetap menjadi konsumen nikel terbesar dengan porsi sekitar 60% dari permintaan global, diikuti Indonesia sebagai konsumen terbesar kedua, meskipun pertumbuhan konsumsi Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan baja nirkarat.

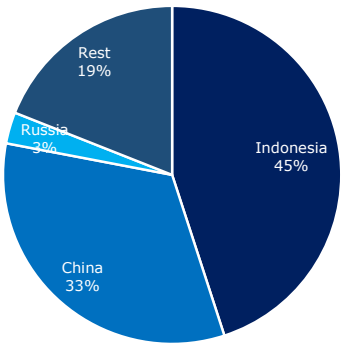
Dalam jangka pendek, pasar nikel global masih cenderung mengalami surplus akibat tingginya investasi beberapa tahun terakhir, khususnya di Indonesia. Namun, setelah 2030, surplus tersebut diperkirakan mulai menyusut seiring revisi turun pada proyeksi pasokan di sejumlah negara produsen akibat harga yang rendah, penundaan proyek, pengurangan skala, dan pembatalan investasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, prospek jasa kontraktor pertambangan nikel pada periode 2026–2027 dinilai tetap positif. Peluang pertumbuhan akan lebih optimal bagi kontraktor yang memiliki kompetensi operasional yang kuat, struktur biaya yang efisien, manajemen risiko yang baik, serta kemampuan memenuhi standar lingkungan dan tata kelola yang semakin ketat.

Exhibit 7. Top Tiga Penghasil Nikel Mining



Source: IEA

Exhibit 8. Top Tiga Penghasil Nikel Refining



Source: IEA

10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Secara umum, kegiatan operasional pertambangan Perseroan dipengaruhi oleh faktor cuaca (sifat musiman). Curah hujan yang tinggi dapat membatasi jam kerja efektif dan menghambat kegiatan pengupasan tanah penutup (*overburden removal*) serta pengangkutan, yang berpotensi memengaruhi volume produksi Perseroan.

11. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Perseroan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Pemerintah, Pemasok, dan Pelanggan

a. Ketergantungan Pelanggan

Mengingat karakteristik bisnis kontraktor pertambangan, Perseroan memiliki ketergantungan pada pemberi kerja utama, yakni PT Budi Gema Gempita (BGG). Kontribusi pendapatan dari BGG tercatat sebesar 100% (2024) dan 94,03% (2025). Namun, ketergantungan ini berhasil diturunkan secara signifikan menjadi 52,25% per 30 Juni 2026. Penurunan ini membuktikan keberhasilan diversifikasi portofolio pelanggan, seiring masuknya pendapatan komersial dari pemberi kerja baru (antara lain SBS, POS, dan DBK).

b. Ketergantungan Industrial

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada siklus industri pertambangan dan fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi volume produksi pemberi kerja. Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperluas cakupan layanan ke berbagai komoditas mineral di luar batubara melalui akuisisi kontrak baru.

c. Ketergantungan Pemasok

Perseroan memiliki ketergantungan material terhadap pemasok armada alat berat (termasuk penyedia *spare parts* serta penyedia fasilitas pembiayaan/ leasing) dan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM). Perseroan memitigasi hal ini melalui manajemen persediaan suku cadang yang terpusat di lokasi tambang, serta menjalin kemitraan tidak hanya dengan agen resmi alat berat dan pemasok BBM, namun juga dengan vendor penyedia lain untuk memitigasi risiko ketergantungan terhadap agen tertentu.

d. Ketergantungan Pemerintah

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap proyek atau kontrak yang didanai oleh APBN maupun APBD. Seluruh kontrak kerja sama Perseroan murni bersifat komersial (Business-to-Business).

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen dalam laporannya pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan nomor 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 yang ditandatangani oleh Damajanti Tanumihardja, CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 2103) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dengan laporan auditor independen yang diterbitkan kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dengan nomor 00119/2.0829/AU.1/05/0671-3/1/V/2026 yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA., CPI., CFI., CLI., ACPACC., SH. (Registrasi Akuntan Publik No. 0671) yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham Modal dasar – 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.000.000.000 saham untuk tahun 2026 dan dengan nilai nominal 1.000.000 per saham untuk 10.500 saham tahun 2025, 2024 dengan 5.000 saham seri A dan 5.500 saham seri B serta 5.000 saham untuk tahun 2023	50.000.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	5.000.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.100.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	184.182.560.140	173.971.206.328	168.940.860.247	167.513.897.475
TOTAL EKUITAS	236.282.560.140	184.471.206.328	179.440.860.247	172.513.897.475

Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran Saham yang ditawarkan sebesar Rp[*] (* Rupiah) per lembar saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2026	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Modal saham Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham Modal dasar – 20.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.000.000.000 saham. untuk tahun 2026 dan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham untuk 10.500 saham, tahun 2025, 2024 dengan 5.000 saham seri A dan 5.500 saham seri B serta 5.000 saham untuk tahun 2023.	50.000.000.000	[*]	[*]
Tambahan modal disetor		[*]	[*]
Biaya Emisi		[*]	[*]
Saldo laba		[*]	[*]
Dicadangkan	2.100.000.000	[*]	[*]
Belum dicadangkan	184.182.560.140	[*]	[*]
JUMLAH EKUITAS	**236.283.000.000**	**[*]**	**[*]**

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2026 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, kinerja usaha Perseroan serta rencana pengembangan atau ekspansi oleh Perseroan.

Adapun besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam hal pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Sebagai tambahan, UUPT memungkinkan suatu Perseroan terbatas untuk membayarkan dividen interim sebelum penutupan tahun buku Perseroan terbatas tersebut. Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aktiva bersih Perseroan terbatas tersebut akan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan Perseroan terbatas tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada krediturnya.

Dividen dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Sejak pendirian hingga saat ini, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut sejalan dengan strategi Perseroan yang masih berfokus pada pertumbuhan kinerja dan penguatan struktur keuangan, sehingga laba ditahan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas operasional.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non- Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

a. Form-DGT 1 atau;
b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Perpajakan Atas Peralihan Saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan da ri Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat -lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 105 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 243 tanggal 28 Oktober 2026, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 25/2025.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

Berikut ini keterangan mengenai nilai penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan:

KETERANGAN	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp (Miliar)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Henan Putihrai Sekuritas	[**]	[**]	[**]
Jumlah	[**]	[**]	[**]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 17 November 2026, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada rentang Harga Penawaran Awal sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189,- (seratus delapan puluh sembilan Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[•],-. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia;

- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan Harga Penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
Citywalk Sudirman, Lantai 6
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Jakarta 10220 - Indonesia

Nama Rekan	:	Damajanti Tanumihardja, CPA
STTD	:	STTD.AP-68/PM.021/2025 tanggal 12 November 2025
Keanggotaan asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.3921
Pedoman kerja	:	Pedoman Kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik No. 367/AAP/EXT/VII/26 tanggal 2 Juli 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, 36 & 37/F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18
Jakarta 12710
Indonesia

Nama Rekan	:	Putu Suryastuti, S.H., M.H.
STTD	:	STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "HKHPM") No. 201423
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021

		tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 346/AAP/EXT/VII/26 tanggal 2 Juli 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum mengacu pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Jose Dima Satria S.H., M.Kn.
Jalan Madrasah,
Komplek Taman Gandaria Kav. 11A,
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420
Indonesia

STTD	:	STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia 0539819800414
Pedoman kerja	:	Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi
Surat Penunjukan	:	Surat Penunjukan Notaris No. 370/AAP/EXT/VII/26 tanggal 2 Juli 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120

Izin Usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Keanggotaan asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	:	Surat Penunjukan BAE No. 369/AAP/EXT/VII/26 tanggal 2 Juli 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan OJK yang berlaku yaitu berkoordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan atau Partisipan Admin terkait dengan data pemesanan dan penjatahan saham e-IPO, menyiapkan dan menyusun Laporan Hasil Penjatahan berdasarkan data pemesanan dan penjatahan saham e-IPO yang diterima dari Partisipan Admin dan melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Partisipan Admin dan KSEI terkait dengan saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke rekening efek pemodal, serta menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2026 *juncto* Akta No. 138/2026.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkum dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 serta Peraturan OJK No. 14/2025.

1. Ketentuan yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; (ii) Aktivitas Perusahaan Induk; (iii) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (v) Aktivitas Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan (vi) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

(i) **KBLI No. 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya):** Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

(ii) **KBLI No. 42992 (Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan):** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

(iii) **KBLI No. 43905 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator):**Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

b. Kegiatan usaha penunjang:

(i) **KBLI No. 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk):** Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Kelompok ini tidak mencakup (i) bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri; (ii) aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak; (iii) provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat; (iv) manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan.

(ii) **KBLI No. 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya):** Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

(iii) **KBLI No. 70203 (Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan):** Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia konsultasi Pemasaran, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait pembangunan strategi pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, membangun dan mengembangkan merek, memberikan layanan dan meningkatkan nilai penjualan dan fungsi manajemen lainnya di bidang pemasaran.

2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan permodalan Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

b. Setiap saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Perseroan harus disetor secara penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dijaminkan atau dalam pembebanan dengan cara apapun juga;
   (iii) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
   (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut wajib sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan hasil yang setara.

c. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar.

d. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
   (i) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
   (ii) Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang telah dikeluarkan Perseroan yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan sepanjang telah diperoleh persetujuan RUPS; dan/atau (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
   (iii) HMETD Perseroan dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   (iv) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
   (v) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, apabila terdapat pembeli siaga, maka efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   (vi) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan yang terlebih dahulu menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   (vii) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

e. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

f. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
   (i) telah memperoleh persetujuan RUPS, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
   (ii) telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ketentuan Anggaran Dasar tidak terpenuhi;

(v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.

3. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

a. RUPS terdiri atas:
   i. RUPS Tahunan;
   ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPSLB yang mana dapat diadakan sewaktu-waktu.

b. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLB, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

c. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam RUPS Tahunan:
   (I) Direksi menyampaikan:
      i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
      iii. laporan-laporan dan/atau informasi lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   (II) Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam laporan tahunan;
   (III) Ditetapkan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
   (IV) Dilakukan penunjukkan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
   (V) Dapat diputuskan atau dibahas mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

e. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali dalam hal terjadi perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindak pidana lainnya.

f. RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

g. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
   (I) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   (II) Dewan Komisaris.

   Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

4. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

a. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

b. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

c. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

d. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, dimana di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

c. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

d. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   i. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; dan
   ii. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain (penyertaan pertama kali) baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

6. Ketentuan yang mengatur Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, dimana di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komposisi anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
c. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
e. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 5 (lima) hari kerja dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan dokumen pendukung lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan aset serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan atau yang sedang dijalankan oleh Direksi.

7. Ketentuan Lainnya Terkait Pemegang Saham

a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS Anggaran Dasar mutatis *mutandis* berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan.
b. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan mereka pada masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:

a. secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada situs web www.e-ipo.co.id)

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Henan Putihrai Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:
   - identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("**SID**"), nomor SRE dan RDN);
   - jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
   - salinan kartu identitas;
   - informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

a. SID
b. SRE jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah (RDN)

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham.
c) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f) Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
g) Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.

h) Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i) Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang Rekening Efek di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
j) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
24 November 2026	00.00 – 23.59 WIB
25 November 2026	00.00 – 23.59 WIB
26 November 2026	00.00 – 23.59 WIB
27 November 2026	00.00 – 12.00 WIB

6. Penyediaan dana dan Pembayaran Pemesan Saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yan cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 November 2026.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No.25/2025 serta Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No.25/2025. Penawaran Umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang Ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	**Penyesuaian II**	**Penyesuaian III**
		2,5x ≤ X < 10x	**10x ≤ X < 25x**	**≥ 25x**
I (IPO ≤ Rp100 miliar)	Max (20% atau Rp10 miliar)	≥ 22,5%	≥ 25%	≥ 30%
II (Rp100 miliar < IPO ≤ Rp250 miliar)	Max (15% atau Rp20 miliar)	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Max (10% atau Rp37,5 miliar)	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
IV (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Max (7,5% atau Rp50 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
V (IPO > Rp1 triliun)	Max (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar-besarnya Rp316.764.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan III, dengan batasan minimal alokasi awal untuk Penjatahan Terpusat sebesar 10% atau Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih besar.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat untuk semua golongan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
    2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
    3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum setara dengan 90% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

i. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
ii. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

(1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;

(2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

(2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);

(3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

(4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :

(1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;

(3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

(4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebit sejumlah saham yang dipesan.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Telp.: (021) 2525 888
Fax.: (021) 5206 797
Email: ib@henanputihrai.com

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Lantai 2
Jakarta 10120
Telp.: (021) 350 8077
Email: deone@datindo.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Assegaf Hamzah & Partners
Indonesia

No. 3351/03/17/10/2026 Jakarta, 29 Oktober 2026

Kepada Yth.
PT Andalan Artha Primanusa Tbk ("Perseroan")
Jalan Plaju No. 11 Lt. 1, Kebon Melati,
Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Dengan hormat,

Kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H, selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2028 ("**kami**" atau "**AHP**"). Kami telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 346/AAP/EXT/VIII/26 tanggal 2 Juli 2026 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"). Adapun jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran awal sebesar Rp158 (seratus lima puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp189 (seratus delapan puluh sembilan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar-besarnya Rp316.764.000.000 (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Waran Seri I, atau setara dengan sebesar 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 7 (tujuh) Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp695 (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp166.403.155.000 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan, mulai dari tanggal 1 Juni 2027 sampai dengan tanggal 1 Desember 2028. Pemegang Waran Seri I tidak

mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Penawaran Umum Perdana Saham ini dijamin oleh PT Henan Putihrai Sekuritas ("**Henan**") dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 106 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 139 tanggal 14 September 2026; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 47 tanggal 8 Oktober 2026; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 243 tanggal 28 Oktober 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditandatangani dengan Perseroan dan Henan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 106 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 140 tanggal 14 September 2026 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 48 tanggal 8 Oktober 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Perseroan juga telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 106 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 142 tanggal 14 September 2026 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 50 tanggal 8 Oktober 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran**"), (ii) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 107 tanggal 24 Agustus 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 141 tanggal 14 September 2026 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Andalan Artha Primanusa Tbk No. 49 tanggal 8 Oktober 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Pernyataan Penerbitan Waran**") dan (ii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-030/SHM/KSEI/0826 tanggal 2 September 2026 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, Pernyataan Penerbitan Waran, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai ("**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham**").

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atas permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas berdasarkan surat No. S-12796/BEI.PP3/10-2026 tanggal 7 Oktober 2026 ("**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah dibuat secara tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Andalan Artha Primanusa No. 308 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, Perseroan akan menggunakan kode perdagangan efek "ANDA". Sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek:

1. Dalam hal permohonan Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif, maka permohonan kode perdagangan tersebut menjadi batal.

2. BEI akan mencatatkan efek Perseroan di Papan Pengembangan apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan BEI dipenuhi.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi seluruh ketentuan BEI yang berlaku terkait pencatatan saham pada Papan Pengembangan, termasuk ketentuan mengenai pemenuhan saham *free float* sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-A Tahun 2026 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan Berarti Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2026.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum No. 3222/03/17/10/2026 yang telah disampaikan pada tanggal 22 Oktober 2026.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. PT Andalan Artha Primanusa Tbk (dahulu didirikan dengan nama PT Nusa Karya Realti), berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusa Karya Realti No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (beserta segala perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17455.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (beserta segala perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0037493.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

   Dengan telah diperolehnya pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan dari Menkum, maka Perseroan telah berdiri dan berstatus sebagai badan hukum sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

   Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 308 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0072377.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0227937 tanggal 10 Agustus 2026, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0197245.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Agustus 2026 ("**Akta No. 308/2026**").

   Anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada:

   a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**");

   b. Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) No. KEP-179/BL/2008 Tahun 2008, yang mana telah dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal ("**Peraturan No. IX.J.1**");

   c. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");

d. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); dan

e. Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**").

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, anggaran dasar Perseroan telah memuat ketentuan penitipan kolektif sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Berdasarkan Akta No. 308/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan kepada masyarakat melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Andalan Artha Primanusa menjadi PT Andalan Artha Primanusa Tbk,dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

3. Menyetujui dalam rangka penawaran umum perdana:

   a. penerbitan sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) dari dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana, dimana para pemegang saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang ditawarkan tersebut dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana.

   b. penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 558.667.000 (lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru Perseroan (yang namanya akan tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal penjatahan sehubungan dengan penawaran umum perdana), yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI. Dalam hal ini, jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ialah sebanyak-banyaknya 558.667.000 (lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham. para pemegang saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I.

4. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan termasuk di dalamnya mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam akta dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 14/2025.

5. Menyetujui pencatatan atas seluruh saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya penawaran umum perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

6. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk:

   a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I;

   b. menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan;

   c. pengeluaran Saham Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran Saham Yang Ditawarkan dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; dan

   d. menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum perdana, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   a. membuat, mempersiapkan, menandatangani, dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum perdana dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penawaran umum perdana kepada OJK, KSEI dan BEI;

   b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan penawaran umum perdana, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

   c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*) dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

   d. menetapkan harga penawaran umum perdana sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

   e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

   f. menetapkan kepastian jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri I yang akan dikeluarkan, serta penentuan pelaksanaan rencana penerbitan Waran Seri I;

g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan KSEI;

h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI;

i. menetapkan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris;

j. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

k. melakukan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan untuk melaksanakan penawaran umum perdana;

l. melakukan segala tindakan yang diperlukan diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penawaran umum perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan;

n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun; dan

o. dalam hal penawaran umum perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya penawaran umum perdana.

2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini. Kegiatan usaha yang benar-benar dilakukan Perseroan saat ini (riil) ialah berusaha dalam aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sebagai pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan ruang lingkup yang diperbolehkan berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh Perseroan, yakni melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. pengangkutan: menggunakan truk; dan
b. penambangan: (i) pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup; (ii) penggalian batubara (*coal getting*) dan (iii) penggalian mineral (*mineral getting*)

sebagaimana tertera pada Izin Usaha Jasa Pertambangan Perseroan. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan jenis usaha yang diuraikan pada Pasal 124 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 137 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0014619.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068536 tanggal 3 Maret 2026, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp50.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp50.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 20.000.000.000 saham masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp10.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pertanyaan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0148196 tanggal 4 Maret 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 ("**Akta No. 23/2026**"), adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	Arief Ramon	250.000.000	2.500.000.000	5
2.	Billy Theristine Lim	1.500.000.000	15.000.000.000	30
3.	PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	2.500.000.000	5
4.	PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	12.500.000.000	25
5.	PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	12.500.000.000	25

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
6.	PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	5.000.000.000	10
Jumlah		**5.000.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**15.000.000.000**	**150.000.000.000**	**-**

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak terdapat larangan pengalihan kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Pihak pengendali Perseroan saat ini adalah Billy Theristine Lim. Penetapan pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik *juncto* Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penetapan pengendalian oleh Billy Theristine Lim yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 3 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0014619.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068536 tanggal 3 Maret 2026 yang kemudian ditegaskan melalui Akta No. 308/2026 dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan kepatuhan yang berlaku bagi Perseroan. Lebih lanjut, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Billy Theristine Lim melakukan pengendalian terhadap Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 44,25% (secara langsung sebesar 30% dan secara tidak langsung melalui (i) PT Bumi Artha Caraka sebesar 12,25% dan (ii) PT Tambang Lancar Indonesia sebesar 2%).

Penetapan Billy Theristine Lim sebagai pengendali tunggal Perseroan melalui RUPS didasarkan pada fakta dan riwayat keterlibatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis Perseroan. Billy Theristine Lim telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 31 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2024, di mana dalam kapasitasnya, ia secara nyata memiliki peran dominan dalam pengendalian kegiatan operasional, kebijakan dan arah strategis Perseroan. Selanjutnya, pada 7 Oktober 2024 Billy Theristine Lim juga menjadi pemegang saham terbesar Perseroan (*single largest shareholder*), sehingga semakin memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam struktur kepemilikan dan pengendalian atas Perseroan.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Billy Theristine Lim menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan yang mencerminkan kesinambungan peran pengendalian dan pengawasan atas Perseroan. Dengan mempertimbangkan kombinasi jabatan manajerial, kepemilikan saham, serta posisi pengawasan tersebut, penetapan Billy Theristine Lim sebagai Pengendali melalui RUPS dilakukan untuk mencerminkan kondisi pengendalian Perseroan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Billy Theristine Lim selaku pengendali Perseroan, Billy Theristine Lim menyatakan berkomitmen untuk tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Maret 2026, tidak terdapat saham-saham Perseroan yang sedang digadaikan atau dijaminkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas bukti pernyataan pemilik manfaat perseroan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 6 Februari 2026, pemilik manfaat Perseroan adalah Billy Theristine Lim, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 23/2026, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014 dan karenanya dapat bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

   Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

   Direksi

Direktur Utama	: Gahari Christine
Direktur	: Hanny Irawan
Direktur	: Christianto Citra

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Billy Theristine Lim
Komisaris	: Ivan Victor
Komisaris	: Freddy Hartono
Komisaris Independen	: Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Independen	: Muhammad Soni Lazuardi

   Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

5. Penunjukan Istiningtyas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, pengangkatan Ketua Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan isi Piagam Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Pedoman Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

   Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses pengajuan PKKPR untuk 3 *site*, yakni (i) PT Intan Bumi Persada ("**IBP**"); (ii) PT Daya Bumindo Karunia ("**DBK**"); dan (iii) PT Arkara Prathama Energi ("**APE**"). Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas bukti tangkapan layar halaman OSS, PKKPR Perseroan sedang dalam proses (i) verifikasi persyaratan untuk *site* DBK pada tanggal 19 Oktober 2026; (ii) proses inspeksi untuk *site* APE pada tanggal 19 Oktober 2026; dan (iii) menunggu verifikasi K/L untuk *site* IBP pada tanggal 19 Oktober 2026.

   Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan saat ini telah menunjuk sebanyak 2 (dua) konsultan eksternal untuk mendampingi proses pengurusan PKKPR Perseroan, yakni berdasarkan (i) Surat No. 545/SKL/X/2026 tanggal 16 Oktober 2026 tentang Pengurusan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang dan (ii) Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 2026 yang diterbitkan oleh ESAPRO Consultant. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, Perseroan juga telah secara proaktif menindaklanjuti proses berupa koordinasi langsung secara berkala dengan kantor PTSP setempat guna memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai status serta perkembangan proses penerbitan PKKPR dimaksud.

   Berdasarkan Pasal 355 Peraturan No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dapat berupa (i) peringatan; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pengenaan denda adminsitratif; (iv) pengenaan daya paksa polisional; (v) pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau (vi) pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), PKKPR merupakan salah satu persyaratan dasar dalam memulai perizinan berusaha berbasis risiko, dengan telah diterbitkannya NIB milik Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan izin pokok dan penting Perseroan.

   Lebih lanjut Perseroan telah memenuhi persyaratan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan dalam proses pengajuan PKKPR sehingga penyelesaian dan penerbitan PKKPR saat ini berada di luar kendali Perseroan. Lebih lanjut, belum diterbitkannya PKKPR tersebut

tidak akan serta merta menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kelangsungan proyek maupun kegiatan usaha Perseroan. Hal ini mengingat PKKPR dimaksud pada dasarnya diperlukan sebagai persyaratan administratif untuk penambahan lokasi usaha (*site*) pada NIB Perseroan serta pelaporan ketenagakerjaan dan bukan untuk kesesuaian ruang pada area pertambangan yang merupakan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan. Sementara itu, Perseroan telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan yang merupakan perizinan utama yang menjadi dasar bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, belum diperolehnya PKKPR pada saat ini tidak serta merta membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah memperoleh dasar perizinan yang diperlukan dan masih berlaku, sehingga berdasarkan kondisi yang diketahui pada saat ini, diperkirakan tidak terdapat indikasi adanya dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha maupun kelangsungan usaha Perseroan.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, kepemilikan atas aset atau harta kekayaan milik Perseroan yang material telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan harta kekayaan milik Perseroan yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada pihak ketiga sebagai berikut:

    a. Jaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk("**BMRI**") sehubungan dengan fasilitas pembiayaan Akta No. 41 Perjanjian Kredit Investasi 2 No. WCO.KP/2752/KI/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa:

        i. Mesin-Mesin (alat berat) atas nama Debitur berupa *Main Equipments*, *Road Maintenance Equipments* dan *Support Equipments* yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 184 tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W.10.01545298.AH.05.01.TAHUN 2024 tanggal 23 Desember 2024; dan

        ii. Mesin-Mesin (Alat Berat) atas nama Debitur berupa *Off Highway Truck* CAT 733, *Motor Grader* CAT 160K, *Dump Truck* HINO FM280JD, dan *Excavator* PC100-10MO, yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin (Alat Berat) No. 42 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.01348003.AH.05.01 TAHUN 2025 tanggal 7 November 2024.

b. Jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan:

i. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi *Refinancing* No. 11 tanggal 5 November 2025, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berupa Mesin-Mesin (Alat Berat) yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 5 November 2025, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.00944053.AH.05.01.TAHUN 2025 tanggal 10 November 2025; dan

ii. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi *Refinancing* No. 184 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berupa alat berat yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 184 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Deska Legira, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.00258653.AH.05.01 TAHUN 2026 tanggal 13 April 2026.

c. Jaminan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Intan Avita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 3 November 2025, yang dibuat di hadapan Nur Hayati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bandar Lampung berupa kendaraan-kendaraan yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 3 November 2025, yang dibuat di hadapan Nur Hayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.00981665.AH.05.01 TAHUN 2025 tanggal 21 November 2025.

d. Jaminan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 120/KMK/IDS-P/VIII/2024 tanggal 29 Juli 2024 berupa kendaraan-kendaraan yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 143 tanggal 29 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dewi Shinta Handini Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Metro dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.00484482.AH.05.01.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024.

e. Jaminan kepada PT BPR Bangun Solusi Bersama sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 7 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi berupa alat berat yang diikat secara fidusia berdasarkan:

i. Akta No. 11 tanggal 30 juni 2025, dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma,S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W.10.00550140.AH.05.01.TAHUN 2025 tanggal 10 Juli 2025; dan

ii. Akta No. 7 tanggal 24 Juni 2026, dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma,S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat berdasarkan sertifikat fidusia No. W10.00504780.AH.05.01 TAHUN 2026 tanggal 2 Juli 2026.

f. Jaminan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Kredit Investasi *Refinancing* Maksimum Rp55.400.000 No. 62 tanggal 13 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Doktor Muhammad Kholid Artha, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah dan bangunan gedung kantor di Jl. Plaju No. 11, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2026 tanggal 11 September 2026, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01390/2026.

g. Jaminan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Tentram Optimis Pusaka dan PT Bank Perekonomian Rakyat Akasia Mas sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 6 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Wilayah Kerja di Provinsi Banten berupa kendaraan yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 04 tanggal 6 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Wilayah Kerja di Provinsi Banten.

   Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, pendaftaran fidusia atas objek jaminan masih dalam proses pendaftaran sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No. 01/NOT.FRL/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang diterbitkan oleh Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Wilayah Kerja di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

    Berdasarkan hasil uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, seluruh transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 yang dilaksanakan oleh Perseroan telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun. Kami tidak memiliki kapasitas untuk secara independen menentukan atau menyimpulkan apakah suatu transaksi telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*), mengingat penilaian tersebut merupakan penilaian yang bersifat komersial dan faktual serta bergantung pada berbagai aspek yang berada di luar ruang lingkup penilaian hukum.

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan Dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Kepmen No. 365/2026**"), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat perjanjian antara Perseroan dan pihak yang terafiliasi yang berlaku dan mengikat Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini ("**Perjanjian Afiliasi Eksisting**") yang memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Kepmen 365/2026. Oleh karena itu, sepanjang tidak terdapat perubahan sifat hubungan afiliasi dalam Perjanjian Afiliasi Eksisting yang mengakibatkan Perjanjian Afiliasi Eksisting tersebut memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Kepmen No. 365/2026, maka setiap perpanjangan maupun perubahan atas syarat dan ketentuan Perjanjian Afiliasi Eksisting tidak memerlukan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 365/2026.

Namun demikian, apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengadakan perjanjian baru dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 365/2026, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah dibuat dan ditandatangani, mengikat Perseroan, masih berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

    Henan selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

    Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh Agus Setiawan selaku Direktur Utama Henan, dapat kami sampaikan bahwa Bapak Agus Setiawan adalah Direktur Utama Henan yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Henan Putihrai Sekuritas No. 7 tanggal 25 September 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta.

    Sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 12 ayat (4) huruf a Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Henan Putihrai Sekuritas No. 23 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 23/2022**"), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Henan.

    Dengan demikian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut mengikat Henan karena ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan UUPT dan Akta No. 23/2022. Selain itu, Bapak Agus Setiawan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.

15. Rencana Penerbitan Waran Seri I oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dimana Waran Seri I tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,(iii) pembentukan Peraturan Perusahaan, (iv) pelaporan Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, (v) pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dan (vi) Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit.

17. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

    1. Sekitar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) atau sebesar Rp107.010.219.050,00 (seratus tujuh miliar sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

        a. Sekitar 21,26% (dua puluh satu koma dua enam persen) akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas seluruh sisa pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk ("**Radana**"). Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman (Kreditur)	Radana
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Kreditur
Nomor dan Tanggal Perjanjian	i. Fasilitas 1: Akta Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. 94 dan No. 95 tanggal 22 April 2025 (Notaris Benhard Sihite, S.H.) ii. Fasilitas 2: (i) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010505 tanggal 13 Agustus 2025; (ii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010494 tanggal 13 Agustus 2025; (iii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010504 tanggal 13 Agustus 2025; (iv) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010499 tanggal 13 Agustus 2025 ; (v) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010502 tanggal 13 Agustus 2025; (vi) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000025010493 tanggal 13 Agustus 2025 dan (vii) Akta Perjanjian Jual dan Sewa Balik (*Sale & Lease Back*) No. 73 tanggal 12 Agustus 2025 iii. Fasilitas 3: (i) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000538 tanggal 27 Maret 2026; (ii)

	Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000539 tanggal 27 Maret 2026; (iii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000534 tanggal 27 Maret 2026; dan (iv) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000512 tanggal 27 Maret 2026. iv. Fasilitas 4: (i) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000521 tanggal 27 Maret 2026; (ii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik o. 1000026000530 tanggal 27 Maret 2026; dan (iii) Perjanjian Jual dan Sewa Balik No. 1000026000522 tanggal 27 Maret 2026
Nilai Fasilitas Pinjaman	Fasilitas 1: Rp35.874.090.000 Fasilitas 2: Rp40.479.722.000 Fasilitas 3: Rp13.716.901.671 Fasilitas 4: Rp11.283.102.327 Rp101.353.815.998 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)
Saldo Utang per 30 November 2026	Fasilitas 1: Rp22.648.149.006 Fasilitas 2: Rp25.633.432.445 Fasilitas 3: Rp8.934.033.306 Fasilitas 4: Rp7.791.656.298 Rp65.007.271.055 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)
Nilai Pinjaman yang Akan Dilunasi	Rp65.007.271.055 (gabungan Fasilitas 1 s.d. 4)
Saldo Utang Setelah Pelunasan Lebih Awal	Rp0 (seluruh fasilitas dibayar penuh / lunas)
Tingkat Bunga per Tahun & Jatuh Tempo	Fasilitas 1: Bunga 11,4% p.a (efektif) dan Jatuh Tempo 24 Maret 2029 Fasilitas 2: Bunga 14% p.a (efektif) dan Jatuh Tempo 20 Agustus 2028 Fasilitas 3: Bunga 7,47% p.a (*flat*) / setara 15,00% p.a (efektif) dan Jatuh Tempo 29 Februari 2028 Fasilitas 4: Bunga 7,47% p.a (*flat*) / setara 15,00% p.a. (efektif) dan Jatuh Tempo 6 Maret 2028
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Sewa Pembiayaan dan Modal Kerja (*Sale & Leaseback*)
Target Waktu & Prosedur Pelunasan	Pelunasan direncanakan pada bulan Desember 2026. Biaya denda pelunasan dipercepat sebesar 5% dari nilai pembiayaan yang masih terhutang (berlaku untuk seluruh fasilitas kecuali Fasilitas 2) akan ditanggung sepenuhnya oleh kas internal Perseroan.

Alasan Pelunasan Lebih Awal atas Seluruh Pinjaman	Pembayaran tersebut bertujuan untuk menurunkan beban bunga, memperbaiki rasio keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas arus kas operasional Perseroan.
Jaminan Fasilitas Kredit	Sehubungan dengan jaminan yang diberikan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Radana, untuk masing-masing fasilitas *leasing*, jaminan yang diberikan adalah barang yang dibiayai berdasarkan fasilitas leasing tersebut. Adapun rincian barang yang dijaminkan adalah sebagai berikut:
	• Fasilitas 1: — 2 (dua) unit Bulldozer
	• Fasilitas 2: — 4 (empat) unit Excavator 6 (enam) unit Rigid Dump Truck (RDT) 5 (lima) unit Dump Truck (DT) 1 (satu) unit Bulldozer 1 (satu) unit Motor Grader
	• Fasilitas 3 — 2 (dua) unit Excavator 4 (empat) unit Articulated Dump Truck (ADT) 4 (empat) unit Rigid Dump Truck (RDT)
	• Fasilitas 4 — 4 (empat) unit Articulated Dump Truck (ADT) 9 (sembilan) unit Dump Truck (DT)
	Dalam hal seluruh kewajiban berdasarkan fasilitas *leasing* terkait telah dilunasi sepenuhnya, jaminan atas barang yang dibiayai berdasarkan fasilitas leasing tersebut akan berakhir dan dilepaskan seluruhnya.

b. Sekitar 13,74% (tiga belas koma tujuh empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"). Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Pemberi pinjaman (Kreditur)	Bank Mandiri
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Kreditur

Nomor dan Tanggal Perjanjian	Akta No. 41 Perjanjian Kredit Investasi 2 No. WCO.KP/2752/KI/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum tanggal 9 Juli 2026 *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No, CMB.CM6/MNE.360/SPPK/2026 tanggal 24 Agustus 2026
Nilai Fasilitas Pinjaman	Rp203.000.000.000
Saldo Utang per 30 November 2026	Rp127.770.582.517
Nilai Pinjaman yang Akan Dibayar	Rp42.002.947.995
Saldo Utang Setelah Dibayar Sebagian	Rp85.767.634.522
Tingkat Bunga per Tahun	9,5% per tahun
Jatuh Tempo	11 Oktober 2028
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pembiayaan pembelian alat berat baru untuk *bouwheer* yang diaksep yaitu PT Budi Gema Gempita.
Target Waktu & Prosedur Pembayaran	Pembayaran sebagian pokok pinjaman direncanakan pada bulan Desember 2026. Denda pembayaran dipercepat sebesar 5% (lima persen) dari baki debet akan dibayarkan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan.
Alasan Percepatan Pembayaran Sebagian Pokok Pinjaman	Pembayaran tersebut bertujuan untuk menurunkan beban bunga, memperbaiki rasio keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas arus kas operasional Perseroan.
Jaminan Fasilitas Kredit	a. Mesin-mesin (alat berat) atas nama Perseroan berupa *Main Equipments, Road Maintenance Equipments* dan *Support Equipments* yang merupakan objek yang dibiayai oleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini; b. Mesin-mesin (alat berat) atas nama Perseroan berupa *Off Highway Truck* CAT 773, *Dump Truck* HINO FM280JD, dan *Excavator* PC200-10MO; c. Penjaminan Pribadi atas nama Billy Theristine Lim; d. Penjaminan Pribadi atas nama Tony Law; e. Penjaminan Pribadi atas nama Willy Christine;

	f. Jaminan Perusahaan dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Arkara Prathama Energi; g. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Billy Theristine Lim; h. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Ivan Victor; i. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada yang dimiliki oleh Freddy Hartono; dan j. Gadai saham dari PT Arkara Prathama Energi yang dimiliki oleh Ivan Victor. Jaminan akan dilepaskan apabila seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian fasilitas yang bersangkutan telah dilunasi secara penuh. Namun demikian, mekanisme pelepasan jaminan sehubungan dengan pelunasan sebagian fasilitas Bank Mandiri dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan mengikuti kebijakan dan prosedur internal Bank Mandiri.

2. Sisanya sekitar 65,00% (enam puluh lima koma nol nol persen) akan digunakan untuk Modal Kerja Operasional Perseroan, dengan rincian alokasi dari total dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

   a. Sekitar 20,14% untuk pembelian bahan bakar (*fuel*) armada dan alat berat secara lunas melalui mekanisme *Purchase Order* (PO) kepada pemasok pihak ketiga (non-afiliasi), seperti PT Pertamina Patra Niaga, PT Twin Berkah Energi, PT Sumber Karya Anugerah dan PT Indo Lautan Energi untuk periode Desember 2026 sampai dengan Mei 2027.

   b. Sekitar 30,98% untuk pembiayaan upah, tunjangan, dan fasilitas tenaga kerja operasional langsung di lapangan (operator alat berat, mekanik, dan kru pendukung) yang merupakan karyawan tetap Perseroan, untuk periode bulan Desember 2026 sampai dengan April 2027. Pembiayaan ini berkaitan dengan penambahan tenaga kerja guna mendukung operasional site yang sudah ada (*existing*), yaitu proyek PT Petrosea Tbk, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) karyawan, PT Budi Gema Gempita - Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) karyawan, PT Position - Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara sebanyak 212 (dua ratus dua belas) karyawan, dan PT Satria Bahana Sarana - Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) karyawan, serta untuk ekspansi operasional site baru, yaitu proyek PT Intan Bumi Persada - Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 81 (delapan puluh satu) karyawan, PT Bukit Bara Alam - Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karyawan, dan PT Arkara Prathama Energi - Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 21 (dua puluh satu) karyawan. Perseroan tidak memiliki tunggakan atas kewajiban gaji/upah karyawan.

   c. Sekitar 13,88% untuk pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance & repair*), meliputi pengadaan: suku cadang (*spareparts*); pelumas (*lubricants*); dan ban

(*tires*) untuk truk dan alat berat untuk periode Desember 2026 sampai dengan Mei 2027. Pengadaan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme *Purchase Order* (PO) kepada distributor resmi pihak ketiga (non-afiliasi) berdasarkan permohonan kebutuhan aktual setelah diterimanya dana hasil Penawaran Umum. Meskipun penerbitan PO dilakukan secara *on-demand,* Perseroan telah menyusun perencanaan pengadaan secara terukur dan terperinci, termasuk estimasi volume kebutuhan dan target distribusi untuk periode tersebut. Adapun estimasi waktu penerimaan suku cadang, pelumas, dan ban adalah sekitar 11 hari kerja sejak tanggal penerbitan PO, sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang berlaku:

KATEGORI	JUMLAH	DISTRIBUTOR*
Suku Cadang (*spareparts*) Contoh: Hitachi (Secondary Fuel Filter), Caterpillar (Steering Oil Filter), Volvo (Air Cleaner Outer)	±5.798 unit	PT United Tractors Tbk, PT Trakindo Utama, PT Kobexindo Tractors Tbk, PT Hexindo Adiperkasa Tbk, PT Indotruck Utama, PT Sany Perkasa, dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment
Pelumas (*lubricants*)	±150.840 liter pelumas	PT Prima Karya Nusa
Ban (*tires*) untuk Truk dan Alat Berat	±199 unit	PT Trakindo Utama, PT Kobexindo Tractors Tbk, PT Hexindo Adiperkasa Tbk, PT Sany Indonesia Heavy Equipment, dan PT Abuhasdha
**Mengingat Perseroan tidak memiliki kontrak induk jangka panjang dengan pemasok, maka dokumen Purchase Order (PO) itu sendiri secara hukum mengikat sebagai Perjanjian, yang diterbitkan berdasarkan kesesuaian harga, ketersediaan pasokan, dan spesifikasi teknis operasional Perseroan.*		

Nilai yang sebenarnya dibutuhkan oleh Perseroan untuk modal kerja operasional adalah sebesar Rp607.257.648.000 (enam ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Desember 2026 sampai dengan November 2027.

Kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dengan urutan skala prioritas sumber pendanaan sebagai berikut:

a. Porsi modal kerja dari hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham (sekitar 65,00%);

b. Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I (dalam hal Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang waran); dan

c. Sisa kekurangan kebutuhan modal kerja tersebut akan dipenuhi dari arus kas internal hasil operasional Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh para pemegang waran, akan dialokasikan seluruhnya untuk penambahan modal kerja operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan bakar (*fuel*), pembelian suku cadang (*spareparts*), pelumas (*lubricants*), dan ban (*tires*) untuk truk dan alat berat, serta pembiayaan operasional penunjang di lapangan.

Dalam hal hasil bersih Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase alokasi yang tercantum dalam Prospektus, dan kekurangannya akan dibiayai menggunakan arus kas internal Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK No. 17/2020**") dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam dalam POJK No. 17/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 dan pihak BMRI bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam angka 1 dan 2 di atas merupakan penggunaan dana oleh Perseroan sendiri pada level 1 penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam setiap RUPS tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang

Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib:

1. memperoleh persetujuan dari RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai diatas 10% dari total Penawaran Umum Perdana Saham; atau

2. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana Saham,sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Perdana sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan, maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Namun demikian, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami serta Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan sehubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami serta Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; atau atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

20. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana Saham telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

ASUMSI - ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami

dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut, dan (iv) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk terjemahan adalah terjemahan yang akurat dari versi bahasa utamanya, dan bahwa pemeriksaan kami atas dokumen terjemahan tersebut tidak membentuk opini apapun mengenai keakuratan terjemahan tersebut.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Bahwa, kami selaku konsultan hukum, tidak memiliki kapasitas untuk secara independen menentukan atau menyimpulkan apakah suatu transaksi telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*), mengingat penilaian tersebut merupakan penilaian yang bersifat komersial dan faktual serta bergantung pada berbagai aspek yang berada di luar ruang lingkup penilaian hukum. Oleh karena itu, pernyataan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini terkait pelaksanaan transaksi berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun dibuat berdasarkan keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami.

4. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat. Sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami tidak melakukan penyelidikan independen terkait aset milik Perseroan yang dibebani jaminan berdasarkan hukum Indonesia, baik hak tanggungan, fidusia, gadai, dan kami hanya berpedoman pada informasi mengenai aset tersebut sebagaimana diberikan oleh Perseroan.

5. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

6. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

7. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 29 Oktober 2026.

9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan

menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

10. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

11. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

12. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

13. Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

***

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 No.
HKHPM : 201423

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023/
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023

DAN/*AND*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023

D A F T A R I S I

C O N T E N T S

	Ekshibit/ *Exhibit*	
Pernyataan Direksi		***Directors' Statement***
Laporan Posisi Keuangan	A	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	B	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	C	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	D	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	E	*Notes to Financial Statements*
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***

ANDALAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Gahari Christine
   Alamat Kantor : Jl. Plaju No. 11, RT 011/RW 020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   Alamat Domisili : Pantai Mutiara Blok ZB No. 14, RT 011/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
   Nomor Telepon : (021) 66692918
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Christianto Citra
   Alamat Kantor : Jl. Plaju No. 11, RT 011/RW 020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   Alamat Domisili : Apartemen Metro Park Residence TWR Manhattan Lt.12 Unit AG RT005/RW 003 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
   Nomor Telepon : (021) 66692918
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023

We, the undersigned below:

1. *Name : Gahari Christine*
   Office Address : Jl. Plaju No. 11, RT 011/RW 020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Central Jakarta.
   Domicile Address : Pantai Mutiara Blok ZB No. 14, RT 011/RW 016, Pluit, Penjaringan, North Jakarta
   Phone Number : (021) 66692918
   Position : President Director

2. *Name : Christianto Citra*
   Office Address : Jl. Plaju No. 11, RT 011/RW 020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Central Jakarta.
   Domicile Address : Apartemen Metro Park Residence TWR Manhattan Lt.12 Unit AG RT005/RW 003 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
   Phone Number : (021) 66692918
   Position : Director

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company;*
2. *The financial statement of the Company have been prepared and presented in accordance with the Indonesian financial accounting standards;*
3. *a. All information contained in the financial statements of the Company have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements of the Company do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. *We are responsible for internal control system of the Company.*

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 23 Oktober 2026 / *Jakarta, 23 October 2026*

Gahari Christine	**Christianto Citra**
Direktur Utama / *President Director*	Direktur / *Director*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit A | ***Exhibit A***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 30 JUNI 2026,
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 JUNE 2026,
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 December 2023/ *31 December 2023*	
A S E T						***A S S E T S***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2e, 4	12.523.219.336	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	2f, 5	73.433.784.730	84.901.048.230	122.353.992.726	91.488.290.930	*Third parties*
Pihak berelasi	2f, 5, 24	-	6.757.680.000	-	-	*Related party*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	2f, 6	6.091.229.399	6.992.770.153	5.662.071.731	5.980.798.252	*Third parties*
Pihak berelasi	2f, 6, 24	5.172.187.500	20.790.002.447	-	-	*Related parties*
Persediaan	2g, 7	30.403.970.343	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864	*Inventories*
Aset kontrak	8	79.835.301.722	-	-	-	*Contract assets*
Pajak dibayar di muka	2t,14a	7.785.710.240	-	14.035.793.524	-	*Prepaid taxes*
Uang muka	2h, 9	16.149.170.907	8.609.165.200	6.831.385.853	4.922.689.815	*Advances*
Beban dibayar di muka	2h, 9	6.673.428.411	4.413.972.854	2.974.681.491	3.799.239.174	*Prepaid expenses*
Total Aset Lancar		238.068.002.588	173.203.511.535	184.724.376.884	138.199.613.277	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka aset tetap		8.113.295.366	6.167.567.576	4.344.144.150	3.171.934.699	*Advances for property, plant and equipment*
Aset tetap	2m, 10	436.419.633.067	414.275.903.367	453.470.131.346	209.463.520.029	*Property, plant and equipment*
Aset hak-guna	2o, 11	165.822.524.414	115.794.075.203	182.215.782.464	213.867.712.130	*Right-of-use assets*
Taksiran klaim pajak penghasilan	2t,14d	8.287.682.136	11.452.539.190	5.324.641.205	-	*Estimated claim tax refund*
Total Aset Tidak Lancar		618.643.134.983	547.690.085.336	645.354.699.165	426.503.166.858	***Total Non-Current Assets***
TOTAL ASET		856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit A/2 | ***Exhibit A/2***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 30 JUNI 2026,
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 JUNE 2026,
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 December 2023/ *31 December 2023*	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	15	46.548.288.549	48.037.638.373	37.461.506.281	11.674.173.656	*Short-term bank loans*
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	12	66.418.709.115	47.385.323.313	113.200.950.511	101.216.140.549	*Third parties*
Pihak berelasi	12, 24	9.048.153.053	-	-	-	*Related party*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak ketiga	13	25.625.615.628	10.980.912.500	53.364.798.822	9.142.929.188	*Third parties*
Pihak berelasi	13, 24	25.330.179.414	69.747.881.004	52.899.392.500	2.000.000.000	*Related parties*
Utang pajak	2t, 14b	561.480.388	446.984.505	330.633.549	6.356.352.683	*Taxes payable*
Beban akrual		54.012.924	5.241.209	4.099.232.222	-	*Accrued expenses*
Pendapatan diterima di muka		2.745.057.280	16.261.159.040	-	-	*Unearned revenue*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						*Current maturities of long-term liabilities:*
Pinjaman bank	16	93.700.590.254	212.706.747.169	91.709.154.144	59.967.184.556	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2o, 11	53.286.379.885	25.947.352.693	59.119.321.754	73.276.332.635	*Lease liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan	2o, 11	14.914.768.605	1.896.279.338	2.596.844.970	1.615.024.289	*Finance lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek		338.233.235.095	433.415.519.144	414.781.834.753	265.248.137.556	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						*Long-term liabilities - net of current portion:*
Pinjaman bank	16	169.753.696.639	6.060.782.102	172.302.086.522	40.630.099.377	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2o, 11	77.612.084.884	69.882.200.890	27.175.722.205	67.507.699.811	*Lease liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan	2o,11	11.356.466.437	981.225.964	1.690.313.807	875.587.703	*Finance lease liabilities*
Utang lain-lain – Pihak ketiga	13	2.459.720.000	7.730.534.000	18.272.238.000	3.805.252.822	*Other payables - Third parties*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2r, 17	7.297.145.728	8.270.856.441	7.868.205.264	6.114.344.911	*Liabilities for employee benefits*
Liabilitas pajak tangguhan	2t, 14e	13.716.228.648	10.081.272.002	8.547.815.251	8.007.760.480	*Deferred tax liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		282.195.342.336	103.006.871.399	235.856.381.049	126.940.745.104	***Total Non-Current Liabilities***
Total Liabilitas		620.428.577.431	536.422.390.543	650.638.215.802	392.188.882.660	***Total Liabilities***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit A/3 | ***Exhibit A/3***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 30 JUNI 2026,
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 JUNE 2026,
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 December 2023/ *31 December 2023*	
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham Modal dasar – 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.000.000.000 saham untuk tahun 2026 dan dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham untuk 10.500 saham tahun 2025, 2024 dengan 5.000 saham seri A dan 5.500 saham seri B serta 5.000 saham untuk tahun 2023	2p, 18	50.000.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	5.000.000.000	*Share capital – par value Rp 10 per share Authorized – 20,000,000,000 shares Issued and fully paid capital – 5,000,000,000 shares for 2026 and with a par value of Rp 1,000,000 per share for 10,500 shares for 2025 and 2024, consisting of 5,000 Series A shares and 5,500 Series B shares, and 5,000 shares for 2023,*
Saldo laba						*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	18	2.100.000.000	-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		184.182.560.140	173.971.206.328	168.940.860.247	167.513.897.475	*Unappropriated*
Total Ekuitas		236.282.560.140	184.471.206.328	179.440.860.247	172.513.897.475	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		856.711.137.571	720.893.596.871	830.079.076.049	564.702.780.135	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit B | ***Exhibit B***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited) AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026 (Enam bulan) (Diaudit)/ *30 June 2026 (Six months) (Audited)*	30 Juni 2025 (Enam bulan) (Tidak diaudit)/ *30 June 2025 (Six months) (Unaudited)*	31 Desember 2025 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2025 (One year) (Audited)*	31 Desember 2024 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2024 (One year) (Audited)*	31 Desember 2023 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2023 (One year) (Audited)*	
PENDAPATAN NETO	2s,19	200.115.618.505	219.150.940.820	368.823.532.926	415.427.104.287	517.030.479.808	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2s,20	(148.305.843.044)	(175.973.672.855)	(294.197.632.515)	(346.863.185.348)	(363.000.264.005)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		51.809.775.461	43.177.267.965	74.625.900.411	68.563.918.939	154.030.215.803	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	2s,21	(24.277.365.408)	(20.909.019.600)	(33.231.161.592)	(36.287.891.197)	(36.144.960.965)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	22	7.135.409.129	761.089.476	6.144.460.063	829.418.167	1.853.299.158	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	2s, 22	(137.426.413)	-	(2.917.366.064)	(2.446.024.759)	(1.285.283.873)	*Other operating expenses*
LABA USAHA		34.530.392.769	23.029.337.841	44.621.832.818	30.659.421.150	118.453.270.123	***OPERATING PROFIT***
Pendapatan keuangan	23	1.176.536.325	81.103.584	208.004.190	111.522.879	52.377.551	*Finance income*
Beban keuangan	23	(20.451.293.055)	(19.849.220.400)	(38.174.316.452)	(29.086.015.414)	(32.718.877.033)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		15.255.636.039	3.261.221.025	6.655.520.556	1.684.928.615	85.786.770.641	***PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							***INCOME TAX EXPENSES***
K i n i	2t,14c	-	-	-	-	(13.054.514.223)	*Current*
Tangguhan	2t, 14e	(3.483.008.274)	-	(1.513.278.852)	(477.995.207)	(5.878.028.120)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO		(3.483.008.274)	-	(1.513.278.852)	(477.995.207)	(18.932.542.343)	***INCOME TAX EXPENSES - NET***
LABA NETO TAHUN BERJALAN		11.772.627.765	3.261.221.025	5.142.241.704	1.206.933.408	66.854.228.298	***NET PROFIT FOR THE YEAR***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit B/2 | ***Exhibit B/2***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited) AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026 (Enam bulan) (Diaudit)/ *30 June 2026 (Six months) (Audited)*	30 Juni 2025 (Enam bulan) (Tidak diaudit)/ *30 June 2025 (Six months) (Unaudited)*	31 Desember 2025 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2025 (One year) (Audited)*	31 Desember 2024 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2024 (One year) (Audited)*	31 Desember 2023 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2023 (One year) (Audited)*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak diakui ke dalam laporan laba rugi							***Items that will not be recognized to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	2r, 17	690.674.419	-	(91.717.724)	282.088.928	-	*Actuarial gain (loss) from defined benefit plan*
Beban pajak penghasilan terkait	2t,14e	(151.948.372)	-	(20.177.899)	(62.059.564)	-	*Related income tax expense*
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN - Neto		538.726.047	-	(111.895.623)	220.029.364	-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) - Net***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		12.311.353.812	3.261.221.025	5.030.346.081	1.426.962.772	66.854.228.298	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR	2u, 25	2,84	3,11	4,79	1,36	133,71	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit C | ***Exhibit C***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo Laba/ *Retained Earning*				
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-in capital*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	5.000.000.000	-	102.286.572.090	-	107.286.572.090	***Balance as of 1 January 2023***
Penyesuaian atas penerapan PSAK 116	-	-	(1.626.902.913)	-	(1.626.902.913)	*Adjustment from the initial application of PSAK 116*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	66.854.228.298	-	66.854.228.298	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	5.000.000.000	-	167.513.897.475	-	172.513.897.475	***Balance as of 31 December 2023***
Setoran modal	5.500.000.000	-	-	-	5.500.000.000	*Paid in capital*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	1.206.933.408	(62.059.564)	1.144.873.844	*Total comprehensive income for the year*
Keuntungan aktuaria	-	-	-	282.088.928	282.088.928	*Actuarial gain*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	10.500.000.000	-	168.720.830.883	220.029.364	179.440.860.247	***Balance as of 31 December 2024***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	5.142.241.704	(20.177.899)	5.122.063.805	*Total comprehensive income for the year*
Kerugian aktuaria	-	-	-	(91.717.724)	(91.717.724)	*Actuarial loss*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	10.500.000.000	-	173.863.072.587	108.133.741	184.471.206.328	***Balance as of 31 December 2025***
	Catatan 18/ *Notes 18*					

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit C/2 | ***Exhibit C/2***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-in capital*	Saldo Laba/ *Retained Earning*		Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Total ekuitas/ *Total equity*	
		Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	10.500.000.000	-	168.720.830.883	220.029.364	179.440.860.247	***Balance as of 31 December 2024***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	3.261.221.025	-	3.261.221.025	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 30 Juni 2025 (Tidak diaudit)	10.500.000.000	-	171.982.051.908	220.029.364	182.702.081.272	***Balance as of 30 June 2025*** *(Unaudited)*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	10.500.000.000	-	173.863.072.587	108.133.741	184.471.206.328	***Balance as of 31 December 2025***
Setoran modal	39.500.000.000	-	-	-	39.500.000.000	*Paid in capital*
Cadangan saldo laba	-	2.100.000.000	(2.100.000.000)	-	-	*Appropriation of retained earning*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	11.772.627.765	(151.948.372)	11.620.679.393	*Total comprehensive income for the year*
Keuntungan aktuaria	-	-	-	690.674.419	690.674.419	*Actuarial gain*
Saldo pada tanggal 30 Juni 2026	50.000.000.000	2.100.000.000	183.535.700.352	646.859.788	236.282.560.140	***Balance as of 30 June 2026***
	Catatan 18/ *Notes 18*	**Catatan 18/** *Notes 18*				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit D | ***Exhibit D***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026 (Enam bulan) (Diaudit)/ *30 June 2026 (Six months) (Audited)*	30 Juni 2025 (Enam bulan) (Tidak diaudit)/ *30 June 2025 (Six months) (Unaudited)*	31 Desember 2025 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2025 (One year) (Audited)*	31 Desember 2024 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2024 (One year) (Audited)*	31 Desember 2023 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2023 (One year) (Audited)*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		124.989.158.523	214.844.624.480	415.470.291.462	384.561.402.491	446.432.383.562	*Cash receipts from customers*
Pengeluaran kas untuk pemasok		(39.519.437.200)	(79.387.145.761)	(207.122.118.772)	(203.202.728.557)	(188.981.046.302)	*Cash disbursements for suppliers*
Pengeluaran kas untuk karyawan		(48.869.458.866)	(36.482.974.275)	(64.294.815.543)	(58.057.330.281)	(50.181.626.208)	*Cash disbursements to employees*
Penerimaan (pengeluaran) kas untuk aktivitas operasi lainnya		11.205.017.225	(18.448.232.357)	16.405.462.579	(27.312.410.329)	(10.480.981.180)	*Cash receipts (disbursements) for other operating expenses*
Arus kas diperoleh dari operasi		47.805.279.682	80.526.272.087	160.458.819.726	95.988.933.324	196.788.729.872	*Cash flow provided in operations*
Penerimaan bunga		1.176.536.325	81.103.584	208.004.190	111.522.879	52.377.552	*Receipts of interest income*
Pembayaran beban keuangan	23	(20.451.293.055)	(19.849.220.400)	(38.174.316.452)	(29.086.015.414)	(32.718.877.033)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan		(2.123.821.054)	(2.414.427.138)	(6.427.227.246)	(6.157.952.244)	(12.227.664.363)	*Payments of income tax*
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		26.406.701.898	58.343.728.133	116.065.280.218	60.856.488.545	151.894.566.028	***Net cash flows provided By operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	10	(59.184.405.117)	(7.968.747.189)	(9.987.415.999)	(217.674.354.755)	(56.338.518.900)	*Acquisitions of property and equipment*
Penjualan aset tetap		6.193.300.000	-	300.000.000	-	1.275.000.000	*Sales of property and equipment*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(52.991.105.117)	(7.968.747.189)	(9.687.415.999)	(217.674.354.755)	(55.063.518.900)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	15	-	-	15.021.087.396	27.015.909.083	10.133.335.010	*Proceeds of short-term bank loans*
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	15	-	-	(4.444.955.306)	(1.228.576.461)	-	*Payment of short-term bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	16	80.400.000.000	-	41.400.000.000	227.358.023.690	37.266.116.164	*Proceeds from long-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	16	(27.886.638.646)	(44.279.861.877)	(86.643.711.394)	(63.887.951.952)	(66.529.237.527)	*Payments of long-term loans*
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	24	(105.097.983.984)	(13.518.992.569)	(25.351.511.496)	(29.600.607.500)	-	*Payments of related parties payable*
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	24	60.680.282.394	37.200.000.000	42.200.000.000	80.500.000.000	-	*Proceeds of related parties payable*
Pembayaran liabilitas sewa		(29.085.260.717)	(27.226.807.297)	(83.512.748.550)	(92.539.049.253)	(71.090.043.127)	*Payments of lease liabilities*
Tambahan modal disetor		39.500.000.000	-	-	5.500.000.000	-	*Additional share capital*
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		18.510.399.047	(47.825.661.743)	(101.331.839.350)	153.117.747.607	(90.219.829.480)	***Net cash flows provided by (used in) financing activities***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit D/2 | ***Exhibit D/2***

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2026 (Enam bulan) (Diaudit)/ *30 June 2026 (Six months) (Audited)*	30 Juni 2025 (Enam bulan) (Tidak diaudit)/ *30 June 2025 (Six months) (Unaudited)*	31 Desember 2025 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2025 (One year) (Audited)*	31 Desember 2024 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2024 (One year) (Audited)*	31 Desember 2023 (Satu tahun) (Diaudit)/ *31 December 2023 (One year) (Audited)*	
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK		(8.074.004.172)	2.549.319.201	5.046.024.869	(3.700.118.603)	6.611.217.648	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		20.597.223.508	15.551.198.639	15.551.198.639	19.251.317.242	12.640.099.594	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	4	12.523.219.336	18.100.517.840	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE PERIOD/YEAR***

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 26

The additional information for activities not effecting cash flows was stated in Note 26

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Andalan Artha Primanusa ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Nusa Karya Realti berdasarkan Akta Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H. di Jakarta No. 36 tanggal 16 Juni 2014, yang kemudian berubah menjadi PT Andalan Artha Primanusa berdasarkan Akta perubahan No. 31 tanggal 13 Februari 2020 dari notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.030130300.Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, di Jakarta No. 23 tanggal 3 Maret 2026, mengenai perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059579.AH.01.22.TAHUN 2026 tanggal 4 March 2026.

Status Perusahaan berubah dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka sesuai akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn, di Jakarta, sehingga nama Perusahaan yang sebelumnya PT Andalan Artha Primanusa menjadi PT Andalan Artha Primanusa Tbk. Perubahan akta ini telah mendapat persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0046849.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026, mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bidang industri jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas perusahaan holding, konstruksi bangunan sipil pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan penyewaan alat konstruksi.

Perusahaan memulai operasinya sejak tahun 2014. Saat ini, kegiatan Perusahaan terutama dalam bidang aktivitas industri jasa penunjang pertambangan, penggalian lainnya dan penyewaan alat konstruksi.

Perusahaan berdomisili di Jalan Plaju No. 11 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pihak pengendali Perusahaan terakhir adalah Billy Theristine Lim.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and General Information

PT Andalan Artha Primanusa (the "Company") was established under the name PT Nusa Karya Realti based on the Deed of Notary Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H. in Jakarta No. 36 dated 16 June 2014, which later changed to PT Andalan Artha Primanusa based on the Deed of Amendment No. 31 dated 13 February 2020 from notary Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H. This deed of establishment has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0130300.Year 2020 dated 9 March 2020.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 23 in Jakarta dated 3 March 2026 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, concerning amendments to the Articles of Association, which have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0059579.AH.01.22.TAHUN 2026 dated 4 March 2026.

The Company changed its status from a private company to a public company pursuant to the Deed of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta, resulting in the change of the Company's name from PT Andalan Artha Primanusa to PT Andalan Artha Primanusa Tbk. The amendment to the deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0046849.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 4 March 2026, in connection with the Company's proposed Initial Public Offering (IPO).

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes supporting services for mining and other excavation industries, holding company activities, civil construction for mining projects, other management consulting activities, and the rental of construction equipment.

The Company started its commercial operations since 2014. Currently, the Company's activities are primarily focused on providing supporting services for the mining, other excavation industries, and the rental of construction equipment.

The Company is domiciled at Jalan Plaju No. 11 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta.

The ultimate beneficial owner of the company is Billy Theristine Lim.

1. **U M U M** (Lanjutan) | 1. ***GENERAL*** *(Continued)*

b. **Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan** | b. ***Board of Commissioners, Directors and Employees***

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors are as follows:

		2026	2025	2024	2023		
Dewan Komisaris							***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Billy Theristine Lim	Billy Theristine Lim	Billy Theristine Lim	-	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Ivan Victor	Willy Christine	Willy Christine	Arief Ramon	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Freddy Hartono	-	-	-	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Yohanes Yudha Indrajati	-	-	-	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Muhammad Soni Lazuardi	-	-	-	:	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi							***Board of Director***
Direktur Utama	:	Gahari Christine	Gahari Christine	Gahari Christine	Billy Theristine Lim	:	*President Director*
Direktur	:	Hanny Irawan	-	-	-	:	*Director*
Direktur	:	Christianto Citra	-	-	-	:	*Director*

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Board of Commissioners and Directors are the Company's key management personnel.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, susunan Komite audit adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the composition of the Company's Audit Committee are as follows:

		2026	2025	2024	2023		
Ketua	:	Yohanes Yudha Indrajati	-	-	-	:	*Chairman*
Anggota	:	Muhammad Soni Lazuardi	-	-	-	:	*Member*
Anggota	:	Ariedho Daulay	-	-	-	:	*Member*

Berdasakan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 3 Maret 2026, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris akta perubahan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0059579.AH.01.22.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026.

Based on Notarial Deed No. 23 dated 3 March 2026 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., there was a change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0059579.AH.01.22.TAHUN 2026 dated 4 March 2026.

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 3.165.161.290, Rp 3.575.000.000, Rp 3.425.000.000 dan Rp 1.200.000.000 untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Total remuneration for the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp 3,165,161,290, Rp 3,575,000,000, Rp 3,425,000,000, and Rp 1,200,000,000, respectively, for the six-month period ended 30 June 2026 and for the years ended 31 December 2025, 2024, and 2023.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. **U M U M** (Lanjutan)

   b. **Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan** (Lanjutan)

   Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 762, 446, 600 dan 502 orang karyawan tetap (tidak di audit).

1. ***GENERAL*** *(Continued)*

   b. ***Board of Commissioners, Directors and Employees*** *(Continued)*

   As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the Company had 762, 446, 600 and 502 permanent employees (unaudited), respectively.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL**

   a. **Pernyataan Kepatuhan**

   Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan.

   b. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

   Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

   Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

   Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

   Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

   Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES***

   a. ***Statement of Compliance***

   The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which is comprised of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and capital market regulatory regulation, namely Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. This policy has been consistently applied to all period presented.

   b. ***Basis of Preparation of the Financial Statements***

   The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

   The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

   The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash on hand and in banks classified into operating, investing and financing activities.

   The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is also the Company functional currency.

   The preparation of the financial statements in compliance with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires Company management to exercise judgement in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the financial statements and their effect are disclosed in Note 3.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

b. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar baru, amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2026

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"

  Amendemen PSAK 109 ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*. Amendemen PSAK 109 juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

  Amandemen ini mengubah persyaratan 'penggunaan sendiri' dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Amendemen ini hanya berlaku untuk kontrak yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak-kontrak ini dikenal sebagai 'kontrak dengan referensi listrik yang bergantung pada alam'.

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang belum efektif

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

b. ***Basis of Preparation of the Financial Statements*** *(Continued)*

Changes in Accounting Policies

New standards, amendments and improvements of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2026

The adoption of these amended standards, which are effective beginning 1 January 2026 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported for the current or prior financial years are as follows:

- *Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 "Disclosure relating to Classification and Measurement of Financial Instruments"*

  The amendment PSAK 109 adds and clarifies provisions in PSAK 109 regarding the derecognition of financial liabilities and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with environmental, social and governance (ESG)-linked features, financial assets with non-recourse features and contractually linked instruments such as tranches. The amendment PSAK 109 also modifies provisions in PSAK 107 related to disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flow.

- *Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 of Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*

  The amendments modify the 'own use' and hedge accounting requirements of PSAK 109 and introduce specific disclosure requirements for PSAK 107. These amendments apply only to contracts that involve variability in electricity generation due to uncontrollable natural conditions, like weather. These contracts are known as 'contracts referencing nature-dependent electricity'.

New standards, interpretations and amendments that are not yet effective

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and so the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

b. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang belum efektif (Lanjutan)

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

  PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional". PSAK 118 menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

  Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

  Manajemen saat ini sedang menilai secara rinci implikasi penerapan standar baru ini pada laporan keuangan Perusahaan. Dari penilaian awal, secara garis besar, dampak potensial berikut telah diidentifikasi:

  1) Meskipun adopsi PSAK 118 tidak akan berpengaruh pada laba neto Perusahaan, Perusahaan mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi. Dari penilaian dampak garis besar yang dilakukan Perusahaan, pos-pos berikut mungkin berpotensi memengaruhi laba operasi:

     (a) Perbedaan nilai tukar yang saat ini digabungkan dalam pos 'pendapatan lain dan keuntungan/ (kerugian) lain - neto' dalam laba operasi mungkin perlu dipisahkan, dengan beberapa keuntungan atau kerugian dari nilai tukar disajikan di bawah laba operasi.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

b. ***Basis of Preparation of the Financial Statements*** *(Continued)*

Changes in Accounting Policies *(Continued)*

New standards, interpretations and amendments that are not yet effective *(Continued)*

- *PSAK 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

  PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss". PSAK 118 determines a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the company's financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118.

  Even though PSAK 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

  Management is currently assessing the detailed implications of applying the new standard on the Company's financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the following potential impacts have been identified:

  1) Although the adoption of PSAK 118 will have no impact on the Company's net profit, the Company expects that Grouping items of income and expenses in the statement of profit or loss into the new categories will impact how operating profit is calculated and reported. From the high-level impact assessment that the Company has performed, the following items might potentially impact operating profit:

     (a) Foreign exchange differences currently aggregated in the line item 'other income and other gains/(losses) - net' in operating profit might need to be disaggregated, with some foreign exchange gains or losses presented below operating profit.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

b. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang belum efektif (Lanjutan)

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" (Lanjutan)

1) Meskipun adopsi PSAK 118 tidak akan berpengaruh pada laba neto Perusahaan, Perusahaan mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi. Dari penilaian dampak garis besar yang dilakukan Perusahaan, pos-pos berikut mungkin berpotensi memengaruhi laba operasi: (Lanjutan)

(b) PSAK 118 memiliki persyaratan khusus mengenai kategori di mana keuntungan atau kerugian derivatif diakui - yaitu kategori yang sama dengan pendapatan dan beban yang dipengaruhi oleh risiko yang dikelola oleh derivatif tersebut. Meskipun Perusahaan saat ini mengakui beberapa keuntungan atau kerugian dalam laba operasi dan lainnya dalam biaya keuangan, mungkin akan terjadi perubahan mengenai tempat di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui, dan Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi kebutuhan untuk melakukan perubahan.

2) Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama mungkin akan berubah akibat penerapan konsep 'ringkasan terstruktur yang berguna' dan prinsip yang ditingkatkan mengenai agregasi dan disaggregasi. Selain itu, karena *goodwill* akan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, Perusahaan akan memisahkan *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya serta menyajikannya secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3) Perusahaan tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam informasi yang saat ini diungkapkan dalam catatan, karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi material etap tidak berubah; namun, cara pengelompokan informasi tersebut mungkin berubah sebagai akibat dari prinsip agregasi/disaggregasi.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

b. ***Basis of Preparation of the Financial Statements*** *(Continued)*

Changes in Accounting Policies *(Continued)*

New standards, interpretations and amendments that are not yet effective *(Continued)*

- *PSAK 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements" (Continued)*

1) Although the adoption of PSAK 118 will have no impact on the Company's net profit, the Company expects that Grouping items of income and expenses in the statement of profit or loss into the new categories will impact how operating profit is calculated and reported. From the high-level impact assessment that the Company has performed, the following items might potentially impact operating profit: (Continued)

(b) PSAK 118 has specific requirements on the category in which derivative gains or losses are recognised - which is the same category as the income and expenses affected by the risk that the derivative is used to manage. Although the Company currently recognises some gains or losses in operating profit and others in finance costs, there might be a change to where these gains or losses are recognised, and the Company is currently evaluating the need for change.

2) The line items presented on the primary financial statements might change as a result of the application of the concept of 'useful structured summary' and the enhanced principles on aggregation and disaggregation. In addition, since goodwill will be required to be separately presented in the statement of financial position, the Company will disaggregate goodwill and other intangible assets and present them separately in the statement of financial position.

3) The Company does not expect there to be a significant change in the information that is currently disclosed in the notes because the requirement to disclose material information remains unchanged; however, the way in which the information is grouped might change as a result of the aggregation/disaggregation principles.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

b. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang belum efektif (Lanjutan)

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" (Lanjutan)

4) Selain itu, akan ada pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan untuk:

(i) UKTM;
(ii) rincian jenis beban untuk pos-pos yang disajikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi laporan laba rugi - rincian ini hanya diperlukan untuk beberapa jenis beban tertentu; dan

(iii) untuk periode tahunan pertama penerapan PSAK 118, rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara angka yang telah disajikan ulang berdasarkan penerapan PSAK 118 dan angka yang sebelumnya disajikan berdasarkan PSAK 201.

5) Dari perspektif laporan arus kas, akan ada perubahan cara penyajian bunga diterima dan bunga dibayar. Bunga dibayar akan disajikan sebagai arus kas pendanaan dan bunga diterima akan disajikan sebagai arus kas investasi, yang merupakan perubahan dari penyajian saat ini sebagai bagian dari arus kas operasi.

c. **Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang**

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:
i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan, atau
iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas dan bank kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

b. ***Basis of Preparation of the Financial Statements*** *(Continued)*

Changes in Accounting Policies *(Continued)*

New standards, interpretations and amendments that are not yet effective *(Continued)*

- *PSAK 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements" (Continued)*

4) In addition, there will be significant new disclosures required for:

(i) MPM;
(ii) a break-down of the nature of expenses for line items presented by function in the operating category of the statement of profit or loss - this break-down is only required for certain nature expenses; and
(iii) for the first annual period of application of PSAK 118, a reconciliation for each line item in the statement of profit or loss between the restated amounts presented by applying PSAK 118 and the amounts previously presented applying PSAK 201.

5) From a cash flow statement perspective, there will be changes to how interest received and interest paid are presented. Interest paid will be presented as financing cash flows and interest received as investing cash flows, which is a change from current presentation as part of operating cash flows.

c. ***Current and Non-Current Classification***

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading, or
iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash on hand or in banks unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan) | 2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

c. **Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang** (Lanjutan) | c. ***Current and Non-Current Classification*** *(Continued)*

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:
i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

A liability is current when it is:
i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. **Aset Keuangan** | d. ***Financial Assets***

1. **Klasifikasi** | 1. ***Classification***

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika, dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *financial assets at fair value (whether through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *financial assets measured at amortized cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is made. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has exercised the irrevocable choice upon initial recognition to record the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when, and only when, the business model for managing those assets changes.

2. **Pengukuran** | 2. ***Measurement***

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

d. **Aset Keuangan** (Lanjutan)

2. **Pengukuran** (Lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi

  Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Penghasilan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

  Perusahaan memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berupa kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain jangka pendek, piutang lain-lain jangka panjang dan dana yang dibatasi penggunaannya.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")

  Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

  Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain.

  Penghasilan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

  Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVOCI pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

d. ***Financial Assets*** *(Continued)*

2. ***Measurement*** *(Continued)*

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

- *Amortized cost*

  A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

  The Company's financial assets measured at amortized cost include cash on hand and in banks, trade receivables, short-term other receivables, long-term other receivables and restricted funds.

- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI)*

  Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI.

  Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses).

  Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.

  The Company has no financial assets measured at FVOCI as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

d. **Aset Keuangan** (Lanjutan)

2. **Pengukuran** (Lanjutan)

Instrumen utang (Lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

  Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau FVTPL diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan neto dalam laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

  Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut.

Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Perusahaan tidak memiliki investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasi sebagai aset keuangan.

3. **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha diakui berdasarkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 109 menggunakan matriks provisi dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur.

Selama proses ini, probabilitas non-pembayaran piutang usaha dinilai. Probabilitas ini kemudian dikalikan dengan jumlah kerugian yang diharapkan yang timbul dari wanprestasi untuk menentukan perkiraan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk piutang usaha.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*d. **Financial Assets** (Continued)*

*2. **Measurement** (Continued)*

Debt instrument (Continued)

- *Fair value through profit or loss (FVTPL)*

  Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVTPL are measured at fair value through profit or loss.

  A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.

  The Company has no financial assets measured at FVTPL as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023.

Equity instrument

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment.

Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at FVTPL are recognized in other gain/(losses) in the profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

The Company's does not have investment in equity instrument classified as financial assets.

*3. **Impairment of Financial Assets***

Impairment provisions for trade receivables are recognised based on the simplified approach within PSAK 109 using a provision matrix in the determination of the lifetime expected credit losses.

During this process the probability of the non-payment of the trade receivables is assessed. This probability is then multiplied by the amount of the expected loss arising from default to determine the lifetime expected credit loss for the trade receivables.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

d. **Aset Keuangan** (Lanjutan)

3. **Penurunan Nilai Aset Keuangan** (Lanjutan)

Ketentuan penurunan nilai piutang dari pihak pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak-pihak berelasi diakui berdasarkan model kerugian kredit ekspektasian. Metodologi yang digunakan untuk menentukan jumlah provisi didasarkan pada apakah telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal aset keuangan.

Aset keuangan yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan bersama dengan penghasilan bunga bruto diakui. Aset keuangan yang memiliki risiko kredit telah meningkat secara signifikan, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur bersama dengan penghasilan bunga bruto diakui.

Aset keuangan yang dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur serta penghasilan bunga secara neto diakui.

4. **Penghentian Pengakuan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara subtansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

e. **Kas dan bank**

Kas dan bank terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

d. ***Financial Assets*** *(Continued)*

3. ***Impairment of Financial Assets*** *(Continued)*

Impairment provisions for other receivables are recognized based on a forward-looking expected credit loss model. The methodology used to determine the amount of the provision is based on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition of the financial asset.

Financial assets where the credit risk has not increased significantly since initial recognition of the financial asset, 12 months expected credit losses along with gross interest income are recognised. Financial assets for which credit risk has increased significantly, lifetime expected credit losses along with the gross interest income are recognised.

Financial assets that are determined to be credit impaired lifetime expected credit losses along with interest income on a net basis are recognised.

4. ***Derecognition***

The Company derecognises financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Company transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company are recognised as assets or liabilities separately.

In transactions in which the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company derecognises the assets if the Company do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate.

In transfers in which control over the asset is retained, the Company continues to recognise the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which the Company are exposed to changes in the value of the transferred assets.

e. ***Cash on Hand and in Banks***

Cash on hand and in Banks consist of cash and bank balances that are unencumbered and unrestricted in their use.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

f. **Piutang Usaha dan Lain-lain**

Piutang usaha dan lain-lain adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan dan jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

g. **Persediaan**

Persediaan yang terdiri dari bahan bakar dan suku cadang dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup harga pembelian serta biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung hingga persediaan berada dalam kondisi dan lokasi siap digunakan.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

h. **Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka**

Uang muka diakui sebesar biaya perolehan pada saat pembayaran dilakukan untuk pembelian barang, jasa atau aset tetap yang belum diterima. Ketika barang, jasa atau aset tetap diterima, uang muka akan diterapkan ke utang terkait.

Beban dibayar di muka dibebankan ke laba rugi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. **Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Pihak-pihak yang dianggap berelasi dengan Perusahaan adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dirujuk sebagai "entitas pelapor"), sebagai berikut:

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

f. ***Trade and Other Receivables***

Trade and other receivables are amounts payable from customers for sales and service rendered in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts payable arising from transactions outside the ordinary course of business. If receivables are expected to be collectible within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the statement of financial position.

Trade and other receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

g. ***Inventories***

Inventories, consisting of fuel and spare parts, are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method and includes purchase price and other costs directly attributable to bringing the inventories to their present location and condition.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the costs necessary to make the sale.

h. ***Advances and Prepaid Expenses***

Advances are recognized at cost when payment is made for the purchase of goods, services or property, plant and equipment that has not been received. When goods, services or property, plant and equipment are received, the advance will be applied to the related payables.

Prepaid expenses are charged to profit or loss over their useful lives using the straight-line method.

i. ***Transactions with Related Parties***

Parties considered to be related to the Company are those persons or entities related to the entity whom preparing financial statements (referred to as "reporting entity"), as follows:

(1) A person or family member has a relationship with a reporting entity if that person:
   a. has control or joint control over the reporting entity;
   b. has significant influence over the reporting entity; or
   c. key management personnel of the reporting entity or of the parent of the reporting entity.

(2) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
   a. the entity and the reporting entity are members of the same business Company (i.e., a parent, subsidiaries, and entities associated with the next subsidiaries of another entity);

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

i. **Transaksi dengan Pihak Berelasi** (Lanjutan)

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

b. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama) yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
c. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
f. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam paragraf 1;
g. orang yang diidentifikasi dalam sub-paragraf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
h. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

j. **Liabilitas Keuangan**

1. **Klasifikasi dan Pengukuran**

(i) **Liabilitas keuangan diukur pada FVTPL**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

i. ***Transactions with Related Parties*** *(Continued)*

(2) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following: (Continued)

b. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture) of a member of a business Company, which the other entity is a member;
c. both entities are joint ventures of the same third party;
d. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
e. the entity has a post-employment benefits plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related entities to the reporting entity;
f. entities controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph 1;
g. person identified in subparagraph (1) (a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the entity's parent entity);
h. the entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

j. ***Financial Liabilities***

1. ***Classification and Measurement***

(i) ***Financial liabilities measured at FVTPL***

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held-for-trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held-for-trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held-for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

j. **Liabilitas Keuangan** (Lanjutan)

1. **Klasifikasi dan Pengukuran** (Lanjutan)

(i) **Liabilitas keuangan diukur pada FVTPL** (Lanjutan)

Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

(ii) **Liabilitas keuangan lainnya**

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal. Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

2. **Penghentian Pengakuan**

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

j. ***Financial Liabilities*** *(Lanjutan)*

1. ***Classification and Measurement*** *(Continued)*

(i) ***Financial liabilities measured at FVTPL*** *(Continued)*

Derivative liabilities are also classified as held-for-trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Company does not have financial liabilities measured at FVTPL as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023.

(ii) ***Other financial liabilities***

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability. This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

Other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method. At the date of the statements of financial position, accrued interest is recorded separately from the principal borrowings in the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized as well as through the amortization process using the effective interest rate method.

The Company has other financial liabilities in the form of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loans and lease liabilities.

2. ***Derecognition***

The Company derecognises financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

k. **Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pengungkapan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

Tingkat 1:	Harga kuotasian (tanpa disesuaikan) di pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identik dan dapat diakses pada tanggal pengukuran
Tingkat 2:	*Input* selain harga kuotasian yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga)
Tingkat 3:	*Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah transfer telah terjadi antara tingkat dalam hierarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

k. ***Fair Value***

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Disclosures of the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

Level 1:	*Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date*
Level 2:	*Inputs other than quoted price included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g., prices) or indirectly (for example, derivatives prices)*
Level 3:	*Unobservable inputs for the asset or liability*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

k. **Nilai Wajar** (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga pemintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi.

Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif. Bila Perusahaan memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, Perusahaan memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas *exposure* risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai.

Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi.

Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau sebanding) dan pendekatan penghasilan (misalnya mengkonversi jumlah masa depan ke suatu jumlah tunggal saat ini).

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hierarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

l. **Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Perusahaan berintensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

k. ***Fair Value*** *(Continued)*

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.

Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market. Where the Company has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, the Company has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate.

For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances.

Valuation techniques include the market approach (i.e., using prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable assets, liabilities or a Company of assets and liabilities) and the income approach (i.e., converting future amounts to a single current amount).

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

l. ***Offsetting***

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if and only if there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Company intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the statement of financial position.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

m. **Aset Tetap**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap masa depan yang tidak dapat dihindari.

Setelah pengukuran awal, aset tetap, kecuali tanah, diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah apabila ada kemungkinan manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Perusahaan, dan biayanya dapat diukur secara andal. Beban pemeliharaan dan perbaikan lainnya dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*
Bangunan	20
Mesin dan alat berat	8
Peralatan	4-8
Inventaris kantor	4-8
Kendaraan	8
Unit pendukung	4-8

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara propesktif, jika diperlukan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2n).

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun "Aset tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

m. ***Property, Plant and Equipment***

Property, plant and equipment initially are recognized at acquisition cost including acquisition cost and directly attributable costs to bring property, plant and equipment to the desired location and condition and ready to used and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

After initial recognizition, property, plant and equipment, except land, is recognized at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

The costs after initial acquisition are recognized as part of the carrying value or as a separate asset if it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the Company, and the cost of the asset can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation of property, plant and equipment is computed using the straight-line method, over the estimated useful lives of the assets as follows:

Building	
Machinery and heavy equipments	
Equipments	
Office equipments	
Vehicles	
Supporting units	

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year-end and adjusted prospectively, if necessary.

When an indication of impairment exists, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the assets carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2n).

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Constructions-in-progress are stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Property, plant and equipment" account when the construction is completed and ready for its intended use.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

n. **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit-Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

n. Impairment of Non-Financial Assets

An individual asset's recoverable amount is determined by the higher between the fair value asset or Cash-Generating-Unit's (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from assets or Company of other assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written-down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized immediately in profit or loss.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuation or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the entity estimates the recoverable amount.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

o. **S e w a**

Sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait semua perjanjian sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Untuk kontrak sewa ini, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal awal sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap (termasuk secara substansi pembayaran tetap), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal awal sewa;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli, jika cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika Perusahaan ketentuan sewa merefleksikan eksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (dengan menggunakan metode suku bunga efektif) dan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna terkait) apabila:

- Masa sewa dirubah atau terdapat kejadian signifikan atau perubahan keadaan yang mengakibatkan perubahan penilaian atas opsi membeli aset pendasar, dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian;

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

o. ***Leases***

As lessee

The Company assess whether a contract is or contains a lease, at inception of the contract. The Company recognize a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognize the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company use the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price of purchase option, is it is reasonably certain to exercise the option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever:

- *The lease term has changed or there is a significant event or change in circumstances resulting in a change in the assessment of exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

o. **Sewa** (Lanjutan)

Sebagai penyewa (Lanjutan)

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna terkait) apabila: (Lanjutan)

- Pembayaran sewa berubah akibat perubahan indeks atau suku bunga atau perubahan jumlah pembayaran yang diharapkan dalam nilai residual terjamin, yang dalam hal ini, liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto awal (kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan suku bunga mengambang, dalam hal ini digunakan tingkat diskonto revisian); atau

- Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tersebut tidak dicatat sebagai sewa terpisah, yang dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian pada tanggal efektif modifikasi.

Perusahaan tidak melakukan penyesuaian seperti itu selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal awal sewa dikurangi dengan insentif sewa diterima, dan biaya langsung awal. Selanjutnya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.

Apabila Perusahaan mempunyai kewajiban untuk biaya membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, sepanjang menyangkut aset hak-guna, maka biaya-biaya tersebut dimasukkan sebagai biaya perolehan, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Aset hak-guna didepresiasi selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka aset hak-guna didepresiasi selama masa manfaat aset pendasar. Depresiasi dimulai dari tanggal awal sewa.

Aset hak-guna disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan . Perusahaan menerapkan PSAK 236, "Penurunan Nilai Aset" untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aset hak-guna dan pencatatan atas penurunan nilai aset tetap seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi atas penurunan aset.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

o. ***Leases*** *(Continued)*

As lessee (Continued)

Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever: (Continued)

- *The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*

- *A lease contract is modified, and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate at the effective date of the modification.*

The Company did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurement of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received and any initial direct costs. The right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incur an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, to the extent the costs are related to a right-of-use asset, the costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying asset. If a lease transfers ownership of the underlying asset or the cost of the right-of-use asset reflects that the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position. The Company applies PSAK 236, "Impairment of Assets" to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

o. **Sewa** (Lanjutan)

Sebagai penyewa (Lanjutan)

Sewa variabel yang tidak tergantung pada suatu indeks atau suku bunga, tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran tersebut dicatat sebagai beban pada periode kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dimasukkan dalam beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai tindakan praktis, PSAK 116, "Sewa" memungkinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen non-sewa, dan sebagai gantinya memperhitungkan setiap sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai pengaturan tunggal. Perusahaan belum menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa tambahan, Perusahaan mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan dudukan agregat harga-sendiri komponen non-sewa.

Jual dan sewa-balik

Pada saat Perusahaan mengalihkan aset ke entitas lain dan menyewa kembali aset tersebut, Perusahaan mencatat kontrak pengalihan aset dan sewa, dengan terlebih dahulu menerapkan persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset tersebut dapat diakui sebagai penjualan.

Jika pengalihan aset memenuhi persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

- Perusahaan mengukur aset hak pakai yang timbul dari sewa-balik sebesar proporsi nilai tercatat sebelumnya dari aset yang terkait dengan hak-guna yang dimiliki oleh Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan hanya mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan.

Jika nilai wajar imbalan penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran sewa tidak menggunakan harga pasar, Perusahaan membuat penyesuaian berikut untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- Seluruh keadaan *below-market* diakui sebagai pembayaran dimuka; dan
- Seluruh keadaan *below-market* diakui sebagai tambahan pembiayaan dari pesewa kepada penyewa.

Jika pengalihan aset tidak memenuhi persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" untuk dicatat sebagai penjualan, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan dan mengakui liabilitas keuangan yang setara dengan hasil transfer.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

o. ***Leases*** *(Continued)*

As lessee (Continued)

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurement of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occurs and are included in the line 'Other operating expenses' in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 116, "Leases" permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Company has not used this practical expedient. For a contract that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Sale and leaseback

When the Company transfers an asset to another entity and leases that asset back, the Company accounts for the transfer contract and the lease, by first applying the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" when a performance obligation is satisfied to determine whether the transfer of the asset is accounted for as a sale.

If the transfer of asset satisfies the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" to be accounted for as a sale, the transaction is accounted for as follows:

- *The Company measures the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use assets retained by the Company. Accordingly, the Company recognizes only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred.*

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Company makes the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *Any below-market terms accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *Any above-market terms accounted for as additional financing provided by the lessor to the lessee.*

If the transfer of asset does not satisfy the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" to be accounted for as a sale, the Company continues to recognize the transferred asset and recognizes a financial liability equal to the transfer proceeds.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

p. **Modal Saham**

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan terhadap penerbitan saham biasa atau opsi biasa, setelah dikurangi pajak, diakui sebagai pengurang ekuitas.

Apabila modal saham Perusahaan dibeli kembali, maka imbalan yang dibayarkan, termasuk semua kenaikan biaya yang dapat diatribusikan langsung (setelah dikurangi pajak), dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan terhadap pemegang ekuitas Perusahaan sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Pembelian kembali saham diklasifikasikan sebagai saham treasuri dan disajikan dalam cadangan saham treasuri.

Apabila saham treasuri dijual dan selanjutnya diterbitkan kembali, semua imbalan yang diterima, diakui sebagai kenaikan di dalam ekuitas dan surplus atau defisit yang timbul pada transaksi tersebut disajikan sebagai agio saham.

q. **Tambahan Modal Disetor**

Pada saat saham terjual pada premium, selisih antara penerimaan dan nilai nominal dikreditkan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan. Pada saat saham ditempatkan dengan kompensasi selain kas, penerimaan diukur dengan nilai wajar kompensasi yang diterima. Apabila saham ditempatkan untuk menghapus atau melunaskan liabilitas Perusahaan, saham harus diukur baik pada nilai wajar saham yang ditempatkan atau nilai wajar liabilitas yang dilunasi, mana yang lebih dapat ditentukan secara andal.

Biaya langsung yang terjadi sehubungan dengan penerbitan ekuitas, seperti biaya *underwriting*, akuntansi dan legal, biaya percetakan dan pajak dapat dibebankan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan.

r. **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Program Manfaat Pasti

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Penyisihan tersebut diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaria independen dengan menggunakan metode *"Projected-Unit-Credit"*.

Liabilitas atau aset imbalan kerja neto adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

p. ***Share Capital***

Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares or options, net of tax effects, are recognized as a deduction from the equity.

Where the Company's equity share are repurchased, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of any tax effects) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Repurchased shares are classified as treasury shares and are presented in the treasury share reserve.

When treasury shares are sold and subsequently reissued, any consideration received is recognized as an increase in equity and the resulting surplus or deficit on the transaction is presented within share premium.

q. ***Additional Paid-In Capital***

When the shares are sold at premium, the difference between the proceeds and the par value is credited to the "Additional paid-in capital" account in the statement of financial position. When shares are issued for a consideration other than cash, the proceeds are measured by the fair value of the consideration received. In case the shares are issued to extinguish or settle the liability of the Company, the shares shall be measured either at the fair value of the shares issued or fair value of the liability settled, whichever is more reliably determinable.

Direct costs incurred related to equity issuance, such as underwriting, accounting and legal fees, printing costs and taxes are chargeable to the "Additional paid-in capital" account in the statement of financial position.

r. ***Liabilities for Employee Benefits***

Defined Benefit Plan

The Company recognised employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 on Job Creation. Perppu Cipta Kerja 2/2022 has been enacted into law on 31 March 2023, based on Law No. 6 of 2023.

The allowance is estimated based on independent actuarial calculations using the "Projected-Unit-Credit" method.

The net employee benefit liability or assets is the aggregate of the present value of the defined benefit liabilities at the end of the reporting period less the fair value of plan assets (if any), adjusted for the effect of limiting the net defined benefit assets to the asset ceiling.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

r. **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan** (Lanjutan)

Program Manfaat Pasti (Lanjutan)

Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

Biaya imbalan pasti terdiri dari biaya jasa kini diakui dalam laba rugi, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, diakui dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, diakui dalam laba rugi, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja jangka panjang.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

s. **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perusahaan melakukan 5 langkah penilaian sebelum mengakui pendapatan sebagai berikut:
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

*2. **SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

*r. **Liabilities for Employee Benefits** (Continued)*

Defined Benefit Plan (Continued)

The asset ceiling is the present value of the economic benefits available in the form of a refund from the plan or a reduction in future contributions.

Defined benefit cost consists of current service cost recognized in profit or loss, past service cost and gain or loss on settlement, recognized in profit or loss, net interest on the net defined benefit liability (asset), recognized in profit or loss, and remeasurement of the liability (asset) net defined benefit in other comprehensive income.

Other long-term benefits

The cost of providing long-term benefits is determined using the Projected-Unit-Credit method. Past service cost and actuarial gains or losses are recognized immediately in profit or loss.

The long-term employee benefits obligation recognized in the statements of financial position represents the present value of the long-term employee benefits obligation.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

*s. **Revenue and Expenses Recognition***

Revenue from contract with customers

The Company perform 5 steps assessment before recognizing revenue as follows:
1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

s. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (Lanjutan)

Perusahaan melakukan 5 langkah penilaian sebelum mengakui pendapatan sebagai berikut: (Lanjutan)

4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan jasa

Perusahaan memperoleh pendapatan terutama dari penyediaan jasa pertambangan sebagai kontraktor tambang, termasuk kegiatan penambangan kontrak, pemindahan lapisan penutup tanah (*overburden removal*), pengambilan batubara (*coal getting*), dan penanganan kembali batubara (*coal rehandling*). Perusahaan juga dapat memperoleh pendapatan dari jasa pendukung kegiatan pertambangan, seperti penyewaan alat berat dan jasa penunjang lainnya.

Perusahaan membuat kontrak layanan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan kontrak, Perusahaan menambah aset yang dikendalikan pelanggan atau pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak jasa diakui sepanjang waktu berdasarkan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

s. ***Revenue and Expenses Recognition*** *(Continued)*

Revenue from contract with customers (Continued)

The Company perform 5 steps assessment before recognizing revenue as follows: (Continued)

4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligations that have been fulfilled.

Rendering of services

The Company primarily generates revenue from mining services as a mining contractor, including contract mining activities, overburden removal, coal getting, and coal rehandling. The Company may also earn revenue from supporting mining services, such as heavy equipment rental and other ancillary services.

The Company enters into short-term and long-term service contracts with customers. Under the terms of the contracts, the Company enhances assets which the customers control or the customers simultaneously receive and consume the benefit of the Company's performance. Revenue from service contracts is therefore recognized over time based on the stage of completion of the contract at the end of the reporting period.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

s. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Pendapatan jasa (Lanjutan)

Tingkat penyelesaian dapat ditentukan dengan metode yang dapat mengukur jasa secara andal jasa yang diberikan. Bergantung pada jenis jasa dan sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

a. Survei atas pekerjaan yang telah dilakukan;
b. Nilai pekerjaan yang diselesaikan ditentukan berdasarkan harga untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang mengidentifikasi nilai pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu nilai pendapatan harus diakui;
c. Jasa yang dilakukan hingga saat ini sebagai persentase dari total jasa yang telah dilakukan; atau
d. Proporsi biaya kontrak yang timbul untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai saat ini relatif terhadap estimasi total biaya kontrak.

Pendapatan dari kontrak konstruksi

Perusahaan membuat kontrak konstruksi jangka panjang dengan pelanggan. Kewajiban pelaksanaan keseluruhan proyek, yang diatur dalam kontrak, mengingat bahwa jasa yang berbeda saling bergantung, terintegrasi, dan ditujukan untuk transfer proyek ke pelanggan secara keseluruhan, mewakili hasil gabungan yang terdapat di kontrak oleh pelanggan.

Berdasarkan persyaratan kontrak, Perusahaan meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu dengan metode input biaya-ke-biaya, yaitu berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan hingga saat ini dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Manajemen menganggap bahwa metode ini adalah ukuran yang tepat untuk kemajuan dalam memenuhi kewajiban kinerja untuk kontrak konstruksi jangka panjang Perusahaan.

Jika hasil dari kewajiban pelaksanaan tidak dapat diukur secara wajar, dan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan diperkirakan dapat dipulihkan, maka pendapatan diakui hanya sejumlah biaya yang terjadi.

Jika kemungkinan besar biaya yang terjadi untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan akan melebihi pendapatan kontrak, kerugian segera diakui.

Tidak terdapat komponen pembiayaan yang signifikan dalam kontrak konstruksi karena rata-rata jangka waktu kredit adalah di bawah 1 tahun.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

s. ***Revenue and Expenses Recognition*** *(Continued)*

Rendering of services (Continued)

The stage of completion may be determined based on methods that can reasonably measure the services performed. Depending on nature of the service contracts, the methods may include:

a. Surveys of work performed;
b. Value of work completed determined based on schedule of rates for each of the activities performed which identify value for the work performed and hence the value of the revenue to be recognized;
c. Services performed to date as a percentage of total services to be performed; or
d. The proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs.

Rendering from construction contracts

The Company enters into long-term construction contracts with customers. The performance obligation is usually the entire project, as provided for in the contract, given that the different services are highly interdependent, integrated, and are aimed at transferring the project to the customer as a whole, representing the combined output for which the customer has contracted.

Under the terms of the contracts, the Company enhances assets which the customers control. Revenue from construction contracts is therefore recognized over time on a cost-to-cost input method, i.e. based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. Management considers that this input method is an appropriate measure of the progress towards complete satisfaction of these performance obligations for long-term construction contracts of the Company.

Where the outcome of a performance obligation cannot be reasonably measured, and the costs incurred in satisfying the performance obligation are expected to be recoverable, the revenue is recognized only to the extent of the costs incurred.

When it is probable that the cost incurred in satisfying a performance obligation will exceed the contract revenue, the expected loss is recognized immediately.

There is no significant financing component in construction contracts as the average credit term is below 1 year.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

s. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Pendapatan dari kontrak konstruksi (Lanjutan)

Perusahaan menyajikan saldo kontraknya, berdasarkan basis per kontrak, dalam posisi aset kontrak atau liabilitas bersih, secara terpisah dari piutang usaha. Aset kontrak dan piutang usaha keduanya merupakan hak atas imbalan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang telah dialihkan Perusahaan kepada pelanggan. Namun, klasifikasi tersebut bergantung pada apakah hak tersebut hanya tergantung pada kondisi waktu (piutang usaha) atau apakah juga tergantung pada hal lain (aset kontrak), seperti pemenuhan kewajiban pelaksanaan selanjutnya berdasarkan kontrak. Liabilitas kontrak adalah jumlah kumulatif yang diterima dan piutang kontraktual oleh Perusahaan yang melebihi hak imbalan yang dihasilkan dari kinerja Perusahaan berdasarkan kontrak tertentu.

B e b a n

i. Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115 dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

ii. Beban-beban lainnya

Beban-beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

t. **Perpajakan**

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi. Pajak final tidak termasuk lingkup pajak penghasilan berdasarkan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subyek pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode/tahun berjalan dan dicatat sebagai beban pajak final. Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

s. ***Revenue and Expenses Recognition*** *(Continued)*

Rendering from construction contracts (Continued)

The Company presents its contract balances, on a contract-by-contract basis, in a net contract asset or liability position, separately from its trade receivables. Contract assets and trade receivables are both rights to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer; however, the classification depends on whether such right is only conditional on the passage of time (trade receivables) or if it is also conditional on something else (contract assets), such as the satisfaction of further performance obligations under the contract. A contract liability is the cumulative amount received and contractually receivable by the Company that exceeds the right to consideration resulting from the Company's performance under a given contract.

Expenses

i. Expenses from contract with customers

Costs that are directly related to the contract, generating resources to fulfill the contract ("cost to fulfill") or incremental to obtain a contract ("cost to acquire") and expected to be recovered. These expenses thus meet the capitalization requirements based on PSAK 115 and recognized as an asset. These expenses are amortized on a systematic basis in line with the delivery of the goods or services associated with the asset.

ii. Other expenses

Other expenses are recognized when incurred.

t. ***Taxation***

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions. Final tax is scoped out from income tax based on PSAK 212, "Income Tax".

Tax expense related to income subject to final tax is recognised in proportion to total income recognised during the current period/year for accounting purposes and recorded as final tax expense. The differences between the final tax paid and the amount charged as final tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income is recognised as prepaid tax or tax payable.

Income Tax Expense

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

t. **Perpajakan** (Lanjutan)

Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan)

i. **Pajak Kini**

Beban pajak penghasilan kini di hitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum di bayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. **Pajak Tangguhan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Pengakuan awal *goodwill*
- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Perusahaan mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Perusahaan yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

t. ***Taxation*** *(Continued)*

Income Tax Expense *(Continued)*

i. ***Current Tax***

The current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognised as a component of income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

ii. ***Deferred Tax***

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- *The initial recognition of goodwill*
- *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and*
- *Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Company is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.*

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- *The same taxable company, or*
- *Different Company entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

t. **Perpajakan** (Lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui neto dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

Hal-hal perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika diajukan banding, pada saat hasil banding yang ditetapkan.

u. **Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

v. **Segmen Operasi**

Segmen operasi adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen operasi termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

w. **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila jumlahnya material.

3. **PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontingensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. ***SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

t. ***Taxation*** *(Continued)*

Value Added Tax (VAT)

Revenue, expenses and assets are recognised net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the tax authority, in which case the VAT is recognised as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

Other Taxation Matter

Amendments to taxation obligations are recorded when a Tax Assessment Letter is received or, if aasealed against, when the results of the appeal are determined.

u. ***Earnings per Share***

Basic earnings per share are computed by dividing profit attributable to owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

v. ***Operating Segment***

An operating segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Operating segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as items that can be allocated on an adequate basis to the segment. Operating segments are determined before inter-Company balances and transactions are eliminated as part of the consolidation process.

w. ***Events After the Reporting Period***

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements.

Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. ***MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS***

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

3. **PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Pajak Penghasilan

Dalam menentukan total yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan total provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontijensi" dan ISAK 123, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Perusahaan membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menginterpretasikan peraturan pajak yang kompleks mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Perusahaan menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif, menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk diskon tarif dan perkiraan arus kas masa depan. Dalam hal itu, perkiraan nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat dibuktikan dengan perbandingan dengan pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak mampu disadari dengan segera.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 30.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements:

Income Taxes

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and ISAK 123, "Uncertainty over Income Tax Treatments".

The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

Significant judgment is involved in interpreting the complex tax regulation which lead to the uncertainty in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Estimates and Assumption

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

Fair Value of Financial Instruments

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The Company determines the fair value of financial instruments that are not traded in active markets, using valuation techniques. The technique is significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows. In such cases, reduced fair value estimates may not always be demonstrable by comparison with independent markets and, in many cases, may not be realized immediate.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial assets and liabilities are disclosed in Note 30.

3. **PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi piutang usaha secara berkala untuk menilai risiko kredit pelanggan. Sebagian besar piutang dinilai menggunakan pendekatan kolektif melalui matriks provisi, yang menghitung kerugian kredit ekspektasian (ECL) sepanjang umur berdasarkan pengalaman historis, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi pasar di masa depan. Untuk pelanggan tertentu yang menunjukkan risiko kredit signifikan atau indikasi ketidakmampuan membayar, Perusahaan melakukan penilaian individual dan membentuk provisi spesifik, dengan mempertimbangkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk jangka waktu hubungan dengan pelanggan, status kredit dari catatan pihak ketiga, serta faktor pasar yang relevan. Baik provisi kolektif maupun provisi spesifik dievaluasi kembali dan disesuaikan secara berkala apabila terdapat informasi baru yang memengaruhi estimasi kerugian kredit, sehingga penyisihan piutang usaha mencerminkan risiko kredit secara wajar dan sesuai dengan PSAK 109.

Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 73.433.784.730, Rp 91.658.728.230, Rp 122.353.992.726 dan Rp 91.488.290.930. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

Nilai tercatat persediaan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 30.403.970.343, Rp 20.141.649.143, Rp 17.315.252.920 dan Rp 12.757.277.864. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 7.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 1 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

***Estimates and Assumption** (Continued)*

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company evaluates its trade receivables on a regular basis to assess customer credit risk. The majority of receivables are assessed collectively using a provision matrix, which calculates the expected credit loss (ECL) over the lifetime of the receivables based on historical experience, current conditions, and forward-looking market information. For certain customers that present significant credit risk or show indications of an inability to pay, the Company performs an individual assessment and establishes specific provisions, taking into account available facts and circumstances, including the length of the relationship with the customer, credit status from third-party records, and relevant market factors. Both collective and specific provisions are reviewed and adjusted periodically if new information affects the estimated credit losses, ensuring that the allowance for trade receivables reflects credit risk fairly and in accordance with PSAK 109.

The carrying amount of the Company's trade receivables as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 73,433,784,730, Rp 91,658,728,230, Rp 122,353,992,726 and Rp 91,488,290,930, respectively. Further details are disclosed in Note 5.

Allowance for Decline in Market Value and Inventory Obsolescence

Allowance for impairment of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of inventories on hand, market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs incurred for sales. Provisions are re-evaluated and adjusted if there is additional information that affects the estimated amount.

The carrying value of inventory as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 30,403,970,343, Rp 20,141,649,143, Rp 17,315,252,920 and Rp 12,757,277,864, respectively. Further details are disclosed in Note 7.

Useful Lifes of Property, Plant and Equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these property, plant and equipment to be within 1 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. **PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Masa Manfaat Aset Tetap (Lanjutan)

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 382.253.563.701, Rp 414.275.903.367, Rp 453.470.131.346 dan Rp 209.463.520.029. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas seluruh beda waktu antara komersial dan fiskal. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 14e.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan, selain *Goodwill*

Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai semua aset non-keuangan, selain *goodwill*, pada setiap tanggal pelaporan. Aset non-keuangan diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini memerlukan estimasi nilai unit penghasil kas.

Estimasi nilai mengharuskan Perusahaan untuk membuat perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan dari Unit Penghasil Kas dan juga memilih tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut. Apabila terdapat nilai yang tidak bisa diestimasi secara andal, jumlah yang dapat dipulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.297.145.728, Rp 8.270.856.441, Rp 7.868.205.264 dan Rp 6.114.344.911. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 17.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

***Estimates and Assumption** (Continued)*

Useful Lifes of Property, Plant and Equipment (Continued)

The net carrying amount of the Company's property, plant and equipment as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 382,253,563,701, Rp 414,275,903,367, Rp 453,470,131,346 and Rp 209,463,520,029, respectively. Further details are disclosed in Note 10.

Deferred Tax

Deferred tax are recognized for timing differences between commercial and fiscal bases. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income, together with future tax planning strategies. Further explanations are disclosed in Note 14e.

Impairment of Non-Financial Assets, other than Goodwill

The Company assess whether there are any indications of impairment for all non-financial assets, other than goodwill, at each reporting date. Non-financial assets are tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable. This requires an estimation of the value in use of the cash generating-units.

Value estimation requires the Company to make estimates of the expected future cash flows from the Cash Generating Units and select an appropriate discount rate to calculate the present value of those cash flows. If a value cannot be estimated reliably, the recoverable amount is based on fair value less costs to sell.

Employee Benefits

The determination of the Company employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, future annual salary increase, retirement age, annual employee turn-over rate and mortality rate. Actual results that differ from the Company assumptions are recognised immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income as and when they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company actual experiences or significant changes in the Company assumptions may materially affect its liability for employee benefits and net employee benefits expense.

The carrying amount of the Company estimated liabilities for employee benefits as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 7,297,145,728, Rp 8,270,856,441, Rp 7,868,205,264 dan Rp 6,114,344,911, respectively. Further details are disclosed in Note 17.

3. **PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL** (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

S e w a

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa selama jangka waktu sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Penentuan jangka waktu sewa dan suku bunga pinjaman inkremental tersebut seringkali melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak sewa) hanya dimasukkan dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan), dimana penentuan jangka waktu sewa yang cukup pasti membutuhkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

***Estimates and Assumption** (Continued)*

L e a s e

Determination whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments during the lease term, discounted using the Company's incremental borrowing rate. Determination of the lease term and the incremental borrowing rates often involves significant estimates and judgments.

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options of lease contract) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated), whereby the determination of reasonably certain lease term requires significant estimation and judgment.

4. **KAS DAN BANK** / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Kas	35.812.760	144.652.222	79.302.679	49.548.140	***Cash on hand***
Kas di bank					***Cash in bank***
Dalam Rupiah					***In Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.330.983.772	16.906.172.958	14.722.171.578	18.296.495.454	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.813.241.978	507.896.177	593.707.031	635.625.192	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.321.835.991	2.854.424.056	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPR Universal	11.451.733	460.156	-	-	*PT BPR Universal*
PT Bank Central Asia Tbk	8.681.953	183.617.939	156.017.351	269.648.456	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT BPR Inti Dana Sentosa	1.211.149	-	-	-	*PT BPR Inti Dana Sentosa*
Sub-total	12.487.406.576	20.452.571.286	15.471.895.960	19.201.769.102	*Sub-total*
T o t a l	12.523.219.336	20.597.223.508	15.551.198.639	19.251.317.242	***T o t a l***

Tingkat suku bunga tahunan atas penempatan kas di bank dikenakan tingkat suku bunga berkisar 0,40% – 3,00%.

The annual interest rates on cash placements at banks ranges from 0.40% to 3.00%.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Budi Gema Gempita	56.494.022.121	83.043.441.030	122.353.992.726	91.488.290.930	*PT Budi Gema Gempita*
PT Petrosea Tbk	12.855.953.171	-	-	-	*PT Petrosea Tbk*
PT Satria Bahana Sarana	4.083.809.438	1.857.607.200	-	-	*PT Satria Bahana Sarana*
Sub-total	73.433.784.730	84.901.048.230	122.353.992.726	91.488.290.930	*Sub-total*
Pihak berelasi					***Related party***
(Catatan 24)	-	6.757.680.000	-	-	*(Note 24)*
T o t a l	73.433.784.730	91.658.728.230	122.353.992.726	91.488.290.930	***T o t a l***

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, analisa umur piutang usaha di atas adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the aging analysis of the above trade receivables are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Belum jatuh tempo	30.963.962.850	10.750.895.926	13.678.462.903	18.879.920.532	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Past due:*
1 – 30 hari	13.044.100.235	24.044.183.221	41.299.797.944	45.025.633.634	*1 – 30 days*
31 – 60 hari	19.740.328.814	28.395.295.188	41.706.024.356	20.851.564.640	*31 – 60 days*
61 – 90 hari	9.685.392.831	-	25.669.707.523	6.731.172.124	*61 – 90 days*
Lebih dari 90 hari	-	28.468.353.895	-	-	*More than 90 days*
T o t a l	73.433.784.730	91.658.728.230	122.353.992.726	91.488.290.930	***T o t a l***

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen atas kolektibilitas piutang pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, termasuk penelaahan umur piutang, riwayat pembayaran pelanggan, serta tidak adanya indikasi kesulitan keuangan signifikan dari pelanggan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas piutang usaha.

Based on management's evaluation of the collectibility of trade receivables as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, including a review of the aging schedule, customers' payment history, and the absence of significant indications of financial difficulties of the customers, management believes that there is no impairment of trade receivables.

6. PIUTANG LAIN-LAIN / *6. OTHER RECEIVABLES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Position (Catatan 28)	5.765.508.784	-	-	-	*PT Position (Note 28)*
PT Asha Wirakrama Caraka	-	6.193.300.000	6.193.300.000	6.193.300.000	*PT Asha Wirakrama Caraka*
PT Andalan Bhumi Cakrawala	-	1.540.899.694	-	-	*PT Andalan Bhumi Cakrawala*
Lain-lain	325.720.615	187.565.459	88.101.731	97.163.252	*O t h e r s*
Cadangan piutang tak tertagih	-	(928.995.000)	(619.330.000)	(309.665.000)	*Allowance for bad debt*
Sub-total	6.091.229.399	6.992.770.153	5.662.071.731	5.980.798.252	*Sub-total*
Pihak berelasi					***Related parties***
(Catatan 24)	5.172.187.500	20.790.002.447	-	-	*(Note 24)*
T o t a l	11.263.416.899	27.782.772.600	5.662.071.731	5.980.798.252	***T o t a l***

6. **PIUTANG LAIN-LAIN** (Lanjutan) / *OTHER RECEIVABLES (Continued)*

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, analisa umur piutang lain-lain di atas adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the aging analysis of the above other receivables are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Belum jatuh tempo	11.263.416.899	22.518.467.600	88.101.731	97.163.252	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Past due:*
Lebih dari 90 hari	-	6.193.300.000	6.193.300.000	6.193.300.000	*More than 90 days*
Cadangan piutang tak tertagih	-	(928.995.000)	(619.330.000)	(309.665.000)	*Allowance for bad debt*
T o t a l	11.263.416.899	27.782.772.600	5.662.071.731	5.980.798.252	***T o t a l***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment of receivable are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Saldo awal	(928.995.000)	(619.330.000)	(309.665.000)	-	*Beginning balance*
Penambahan	-	(309.665.000)	(309.665.000)	(309.665.000)	*Additions*
Pemulihan (Catatan 22)	928.995.000	-	-	-	*Recovery (Note 22)*
T o t a l	-	(928.995.000)	(619.330.000)	(309.665.000)	***T o t a l***

Piutang lain-lain pada PT Position merupakan piutang yang timbul dari perjanjian pembangunan sarana penunjang (Catatan 28).

Other receivables from PT Position represent of receivables arising from the agreement for the construction of supporting facilities (Note 28).

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that the allowance for impairment on others receivable is adequate to cover any possible losses on uncollectible accounts.

7. **PERSEDIAAN** / *INVENTORIES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Suku cadang	22.095.447.909	13.894.938.201	15.028.563.289	10.974.001.433	*Spareparts*
Bahan bakar minyak	8.308.522.434	6.246.710.942	2.286.689.631	1.783.276.431	*F u e l*
T o t a l	30.403.970.343	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864	***T o t a l***

Berikut mutasi persediaan akhir tahun yang dimiliki oleh Perusahaan:

The following represents the movement of year-end inventories held by the Company:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Persediaan barang awal tahun	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864	7.190.319.898	*Inventory at beginning of the year*
Pembelian	52.974.818.541	125.238.354.651	173.452.550.967	204.056.348.426	*Purchase*
Barang tersedia untuk dipakai	73.116.467.684	142.553.607.571	186.209.828.831	211.246.668.324	*Goods available for use*
Pemakaian (Catatan 20)	(42.712.497.341)	(122.411.958.428)	(168.894.575.911)	(198.489.390.460)	*Usage (Note 20)*
Persediaan barang akhir tahun	30.403.970.343	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864	***Inventory at ending of the year***

7. **PERSEDIAAN** (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan sehingga Perusahaan tidak perlu penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan perlindungan asuransi atas persediaan yang dimiliki, mengingat jenis persediaan yang memiliki tingkat perputaran yang tinggi dan nilai yang tidak signifikan.

*7. **INVENTORIES** (Continued)*

Management believes that there has been no decline in the value of inventories, so the Company does not need to make provisions for impairment of inventories.

Management believes that insurance coverage for inventories is not necessary, considering the nature of the inventories, which have a high turnover rate and are not individually significant in value.

8. **ASET KONTRAK** / *8. CONTRACT ASSETS*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
PT Petrosea Tbk	18.770.406.618	-	-	-	*PT Petrosea Tbk*
PT Position	17.704.229.050	-	-	-	*PT Position*
PT Intan Bumi Persada	15.090.380.730				*PT Intan Bumi Persada*
PT Satria Bahana Sarana	14.063.548.614	-	-	-	*PT Satria Bahana Sarana*
PT Budi Gema Gempita	8.007.618.313	-	-	-	*PT Budi Gema Gempita*
PT Berkarya Sinar Bersama	6.199.118.397	-	-	-	*PT Berkarya Sinar Bersama*
T o t a l	79.835.301.722	-	-	-	***T o t a l***

Jumlah yang berkaitan dengan aset kontrak mencerminkan tagihan kepada pelanggan yang timbul ketika Perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan pencapaian tahapan (*milestone*) pekerjaan. Sebelum penagihan dilakukan, Perusahaan mengakui aset kontrak atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Jumlah tersebut akan direklasifikasi dari aset kontrak ke piutang usaha pada saat faktur/tagihan diterbitkan kepada pelanggan.

Amounts related to contracts assets reflect billings to customers that arise when the Company becomes entitled to receive payment in accordance with the achievement of work milestones. Prior to billing, the Company recognizes a contract asset for any work performed. Such amounts are reclassified from contract assets to trade receivables upon the issuance of invoices to customers.

Cadangan kerugian kredit untuk aset kontrak telah diukur dengan nilai yang setara dengan jangka waktu Kerugian Kredit Ekspetasian (KKE). KKE pada kontrak aset diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for credit losses for contract assets is measured at an amount equal to lifetime Estimated Credit Loss (ECL). The ECL on contract assets is estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtors and an analysis of the debtors' current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Cadangan kerugian kredit aset kontrak tidak dibentuk karena manajemen berpendapat bahwa aset kontrak dianggap tidak memiliki kerugian kredit yang material.

No allowance for credit losses for contract assets is recognized as management believes that contract assets are not subject to material credit losses.

9. **UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA** / *9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Uang muka					*Advances*
Pembelian solar	7.347.029.267	3.173.472.436	3.401.995.200	4.139.186.161	*Fuel purchase*
Pembelian suku cadang	5.665.116.743	5.092.886.681	2.692.381.668	180.773.654	*Sparepart purchase*
Jasa professional	1.471.257.926	48.106.083	283.597.985	-	*Professional services*
Sistem dan lisensi	1.665.766.971	294.700.000	294.700.000	-	*System and license*
Deposit	-	-	158.711.000	602.730.000	*Deposit*
Sub-total	16.149.170.907	8.609.165.200	6.831.385.853	4.922.689.815	*Sub-total*

9. **UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA** (Lanjutan) *9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (Continued)*

	30 Juni 2026/ 30 June 2026	31 Desember 2025/ 31 December 2025	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Beban dibayar di muka					*Prepaid expenses*
Asuransi dibayar di muka	3.394.744.236	2.170.888.059	1.440.959.251	591.040.125	*Prepaid insurance*
Biaya provisi dan admin	1.918.795.652	1.239.714.421	1.331.126.557	-	*Provision and administration fees*
Sewa dibayar di muka	1.359.888.523	1.003.370.374	202.595.683	3.208.199.049	*Prepaid lease*
Sub-total	6.673.428.411	4.413.972.854	2.974.681.491	3.799.239.174	*Sub-total*
T o t a l	22.822.599.318	13.023.138.054	9.806.067.344	8.721.928.989	***T o t a l***

10. **ASET TETAP** *10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

30 Juni 2026	**Saldo awal/ *Beginning balance***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	***30 June 2026***
Biaya perolehan						***C o s t***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
T a n a h	-	33.085.509.535	-	-	33.085.509.535	*L a n d*
Bangunan	-	9.175.740.466	-	-	9.175.740.466	*Building*
Mesin dan alat berat	668.266.609.816	1.982.984.187	-	-	670.249.594.003	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	7.320.918.220	3.718.054.702	-	-	11.038.972.922	*Equipments*
Inventaris kantor	1.830.887.950	278.659.099	-	-	2.109.547.049	*Office equipments*
Kendaraan	19.075.736.672	-	-	-	19.075.736.672	*Vehicles*
Unit pendukung	20.379.505.207	10.943.457.128	-	-	31.322.962.335	*Supporting units*
T o t a l	716.873.657.865	59.184.405.117	-	-	776.058.062.982	***T o t a l***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	-	78.522.837	-	-	78.522.837	*Building*
Mesin dan alat berat	281.318.311.334	32.258.485.069	-	-	313.576.796.403	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	3.434.524.350	980.112.962	-	-	4.414.637.312	*Equipments*
Inventaris kantor	1.100.425.600	225.046.851	-	-	1.325.472.451	*Office equipments*
Kendaraan	7.129.940.331	1.219.735.266	-	-	8.349.675.597	*Vehicles*
Unit pendukung	9.614.552.883	2.278.772.432	-	-	11.893.325.315	*Supporting units*
T o t a l	302.597.754.498	37.040.675.417	-	-	339.638.429.915	***T o t a l***
Nilai tercatat	414.275.903.367				436.419.633.067	***Carrying amount***

31 Desember 2025	**Saldo awal/ *Beginning balance***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification****	**Saldo akhir/ *Ending balance***	***31 December 2025***
Biaya perolehan						***C o s t***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	566.413.270.552	3.882.453.188	(10.085.000.000)	108.055.886.076	668.266.609.816	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	6.159.204.718	1.185.865.402	(24.151.900)	-	7.320.918.220	*Equipments*
Inventaris kantor	1.661.131.825	169.756.125	-	-	1.830.887.950	*Office equipments*
Kendaraan	17.071.418.815	2.004.317.857	-	-	19.075.736.672	*Vehicles*
Unit pendukung	19.457.905.207	921.600.000	-	-	20.379.505.207	*Supporting units*
T o t a l	610.762.931.117	8.163.992.572	(10.109.151.900)	108.055.886.076	716.873.657.865	***T o t a l***

*) Direklasifikasi (ke) dari Aset Hak-Guna (Catatan 11) **) Reclassified (to) from Right-of-Use Assets (Note 11)*

10. **ASET TETAP** (Lanjutan) *10. **PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (Continued)*

31 Desember 2025	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2025***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	142.644.740.709	87.464.708.450	(851.883.562)	52.060.745.737	281.318.311.334	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	1.964.508.912	1.474.134.500	(4.119.062)	-	3.434.524.350	*Equipments*
Inventaris kantor	714.145.881	386.279.719	-	-	1.100.425.600	*Office equipments*
Kendaraan	4.747.363.753	2.382.576.578	-	-	7.129.940.331	*Vehicles*
Unit pendukung	7.222.040.516	2.392.512.367	-	-	9.614.552.883	*Supporting units*
T o t a l	157.292.799.771	94.100.211.614	(856.002.624)	52.060.745.737	302.597.754.498	***T o t a l***
Nilai tercatat	453.470.131.346				414.275.903.367	***Carrying amount***

31 Desember 2024	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2024***
Biaya perolehan						***C o s t***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	267.436.263.516	249.450.315.316	-	49.526.691.720	566.413.270.552	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	3.511.020.721	2.648.183.997	-	-	6.159.204.718	*Equipments*
Inventaris kantor	1.284.350.218	376.781.607	-	-	1.661.131.825	*Office equipments*
Kendaraan	12.205.283.680	4.866.135.135	-	-	17.071.418.815	*Vehicles*
Unit pendukung	16.903.107.647	2.554.797.560	-	-	19.457.905.207	*Supporting units*
T o t a l	301.340.025.782	259.896.213.615	-	49.526.691.720	610.762.931.117	***T o t a l***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	82.637.716.990	45.891.629.940	-	14.115.393.779	142.644.740.709	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	933.832.253	1.030.676.659	-	-	1.964.508.912	*Equipments*
Inventaris kantor	402.509.485	311.636.396	-	-	714.145.881	*Office equipments*
Kendaraan	2.900.779.840	1.846.583.913	-	-	4.747.363.753	*Vehicles*
Unit pendukung	5.001.667.185	2.220.373.331	-	-	7.222.040.516	*Supporting units*
T o t a l	91.876.505.753	51.300.900.239	-	14.115.393.779	157.292.799.771	***T o t a l***
Nilai tercatat	209.463.520.029				453.470.131.346	***Carrying amount***

*) Direklasifikasi dari Aset Hak-Guna (Catatan 11) **) Reclassified from Right-of-Use Assets (Note 11)*

10. **ASET TETAP** (Lanjutan) *10. **PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (Continued)*

31 Desember 2023	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2023***
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	235.362.201.016	48.300.000.000	(16.225.937.500)	-	267.436.263.516	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	1.367.302.506	2.143.718.215	-	-	3.511.020.721	*Equipments*
Inventaris kantor	521.335.072	763.015.146	-	-	1.284.350.218	*Office equipments*
Kendaraan	10.755.263.429	1.450.020.251	-	-	12.205.283.680	*Vehicles*
Unit pendukung	14.395.643.369	2.507.464.278	-	-	16.903.107.647	*Supporting units*
Sub-total	262.401.745.392	55.164.217.890	(16.225.937.500)	-	301.340.025.782	*Sub-total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan alat berat	58.896.211.448	33.699.002.438	(9.957.496.896)	-	82.637.716.990	*Machine and heavy equipments*
Peralatan	496.379.765	437.452.488	-	-	933.832.253	*Equipments*
Inventaris kantor	185.676.205	216.833.280	-	-	402.509.485	*Office equipments*
Kendaraan	1.427.319.733	1.473.460.107	-	-	2.900.779.840	*Vehicles*
Unit pendukung	3.102.191.111	1.899.476.074	-	-	5.001.667.185	*Supporting units*
T o t a l	64.107.778.262	37.726.224.387	(9.957.496.896)	-	91.876.505.753	***T o t a l***
Nilai tercatat	198.293.967.130				209.463.520.029	***Carrying amount***

*) Direklasifikasi dari Aset Hak-Guna (Catatan 11)

Reklasifikasi aset tetap ke aset hak guna selama periode pelaporan dilakukan sehubungan dengan transaksi *refinancing* yang dilakukan oleh Perusahaan. Tidak ada laba rugi yang muncul akibat transaksi tersebut.

**) Reclassified from Right-of-Use Assets (Note 11)*

The reclassification of property, plant and equipment to right of use assets during the reporting period was made in connection with the refinancing transaction undertaken by the Company. No gain or loss was recognized from the transaction.

Analisa rugi (laba) atas penjualan aset tetap sebagai berikut:

An analysis of the loss (gain) on sale of property, plant and equipment are as follows:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Biaya perolehan	-	1.250.000.000	-	16.225.937.500	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	-	(851.883.562)	-	(9.722.803.403)	*Accumulated depreciation*
Nilai tercatat	-	398.116.438	-	6.503.134.097	*Carrying amount*
Harga jual	-	(300.000.000)	-	(6.805.000.000)	*Selling price*
Rugi (laba) pelepasan aset tetap (Catatan 22)	-	98.116.438	-	(301.865.903)	***Loss (gain) on sale of property, plant and equipment*** *(Note 22)*

10. **ASET TETAP** (Lanjutan) / *10. **PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (Continued)*

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut: / *Property, plant and equipment depreciation expenses is allocated as follow:*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	36.815.628.566	93.713.931.895	50.989.263.842	37.509.391.107	*Cost of revenues (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	225.046.851	386.279.719	311.636.397	216.833.280	*General and administrative expenses (Note 21)*
T o t a l	37.040.675.417	94.100.211.614	51.300.900.239	37.726.224.387	***T o t a l***

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the Company's management believes that there are no events or circumstances that indicate an impairment in the value of property, plant and equipment.

Peralatan berat Perusahaan yang dicatat sebagai aset tetap, antara lain *motor grader, articulated dump truck, excavator, dump truck,* multitele *handler,* dan *slurry pump,* telah diasuransikan pada PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Raksa Pratikara atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko kerugian lainnya (*all risks)* dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 437.241.459.430. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Perusahaan.

The Company's heavy equipment classified under property, plant and equipment, including motor graders, articulated dump trucks, excavators, dump trucks, multitele handlers, and slurry pumps, are insured under policies issued by PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Raksa to cover possible risks against fire, disasters and other risks (all risks) with a total sum insured amounting to Rp 437,241,459,430. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses that may arise for the Company.

Aset tetap Perusahaan diasuransikan berdasarkan polis asuransi dengan periode pertanggungan yang berlaku dari tanggal 5 November 2025 sampai dengan 5 November 2029.

The Company's fixed assets are insured under an insurance policy with a coverage period valid from 5 November 2025 to 5 November 2029.

Tanah dan bangunan, sebagian alat berat, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 15 dan 16).

Land and building, some heavy equipment, equipment and vehicles are used as collateral for bank loans (Notes 15 and 16).

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** / *11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES***

Perusahaan menyewa aset yang merupakan alat berat dengan rata-rata masa sewa adalah 3 (tiga) tahun.

The Company leases heavy equipment assets with an average lease term of 3 (three) years.

30 Juni 2026	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***30 June 2026***
Biaya perolehan						***C o s t***
Mesin dan alat berat	127.153.041.940	61.078.409.055	-	-	188.231.450.995	*Machinery and heavy equipments*
Kendaraan	-	4.815.297.642	-	-	4.815.297.642	*Vehicles*
Sub-total	127.153.041.940	65.893.706.697	-	-	193.046.748.637	*Sub-total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin dan alat berat	11.358.966.737	15.735.447.869	-	-	27.094.414.606	*Machinery and heavy equipments*
Kendaraan	-	129.809.617	-	-	129.809.617	*Vehicles*
Sub-total	11.358.966.737	15.865.257.486	-	-	27.224.224.223	*Sub-total*
Nilai tercatat	115.794.075.203				165.822.524.414	***Carrying amount***

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan) *11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

31 Desember 2025	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2025***
Biaya perolehan						***C o s t***
Mesin dan alat berat	235.208.928.015	-	-	(108.055.886.076)	127.153.041.939	*Machinery and heavy equipments*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin dan alat berat	52.993.145.551	10.426.566.922	-	(52.060.745.737)	11.358.966.736	*Machinery and heavy equipment*
Nilai tercatat	182.215.782.464				115.794.075.203	***Carrying amount***

31 Desember 2024	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2024***
Biaya perolehan						***C o s t***
Mesin dan alat berat	249.220.182.495	35.515.437.240	-	(49.526.691.721)	235.208.928.014	*Machinery and heavy equipments*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin dan alat berat	35.352.470.365	31.756.068.964	-	(14.115.393.779)	52.993.145.550	*Machinery and heavy equipment*
Nilai tercatat	213.867.712.130				182.215.782.464	***Carrying amount***

31 Desember 2023	**Saldo awal/** ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications*****	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	***31 December 2023***
Biaya perolehan						***C o s t***
Mesin dan alat berat	174.452.035.000	94.807.228.883	(1.454.243.483)	(18.584.837.905)	249.220.182.495	*Machinery and heavy equipments*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin dan alat berat	9.552.490.562	26.516.647.602	(196.928.805)	(519.738.994)	35.352.470.365	*Machinery and heavy equipment*
Nilai tercatat	164.899.544.438				213.867.712.130	***Carrying amount***

*) Direklasifikasi ke Aset Tetap (Catatan 10)
**) Penyesuaian atas penerapan PSAK 116.

) Reclassified to Property, Plant and Equipment (Note 10)
***) Adjustments from the implementation of PSAK 116.*

Reklasifikasi aset hak guna dari aset tetap selama periode pelaporan dilakukan sehubungan dengan transaksi *refinancing* yang dilakukan oleh Perusahaan. Tidak ada laba rugi yang muncul akibat transaksi tersebut.

The reclassification of right of use assets from property, plant and equipment during the reporting period was made in connection with the refinancing transaction undertaken by the Company. No gain or loss was recognized from the transaction.

Beban depresiasi aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of right of use assets expense is allocated as follows:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	15.865.257.486	10.426.566.923	31.756.068.964	26.516.647.602	*Cost of revenues (Note 20)*

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan) / *11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

Liabilitas sewa terdiri atas: / *Lease liabilities consist of:*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Analisis jatuh tempo:					*Maturity analysis:*
Tahun 1	67.828.816.057	41.592.911.225	60.819.307.277	85.264.220.111	*Year 1*
Tahun 2	60.791.306.274	33.537.024.602	24.721.767.260	46.856.971.897	*Year 2*
Tahun 3	27.130.314.912	23.577.123.058	5.041.128.199	11.153.452.430	*Year 3*
Tahun 4	1.419.262.568	-	-	-	*Year 4*
T o t a l	157.169.699.811	98.707.058.885	90.582.202.736	143.274.644.438	***T o t a l***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(68.201.148.490)	(27.843.632.031)	(61.716.166.724)	(74.891.356.924)	***Less current maturities***
Liabilitas sewa - neto setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	88.968.551.321	70.863.426.854	28.866.036.012	68.383.287.514	***Lease liabilities - net of current maturities***

a. Liabilitas sewa operasi terdiri atas: / *a. Operation lease liabilities operation consist of:*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:					*Details of lease liabilities based on lessor:*
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	57.230.417.315	66.802.620.990	-	-	*PT Radana Bhaskara Finance Tbk*
PT Caterpillar Finance Indonesia	43.585.104.616	16.919.122.051	31.508.341.741	8.757.991.409	*PT Caterpillar Finance Indonesia*
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	14.819.223.818	-	-	-	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
PT Buana Finance Tbk	7.444.673.397	10.386.680.495	-	-	*PT Buana Finance Tbk*
PT Orix Indonesia Finance	3.486.542.333	1.721.130.047	-	-	*PT Orix Indonesia Finance*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	3.290.430.015	-	-	-	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	1.042.073.275	-	-	-	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Indomobil Finance Indonesia	-	-	43.088.160.102	73.644.731.997	*PT Indomobil Finance Indonesia*
Sub-total (Dipindahkan)	130.898.464.769	95.829.553.583	74.596.501.843	82.402.723.406	*Sub-total (Brought forward)*

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan) / *11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

a. Liabilitas sewa operasi terdiri atas: (Lanjutan) / *a. Operation lease liabilities consist of: (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
Sub-total (Dipindahkan)	130.898.464.769	95.829.553.583	74.596.501.843	82.402.723.406	*Sub-total (Brought forward)*
PT Hexa Finance Indonesia	-	-	6.616.164.198	23.913.350.468	*PT Hexa Finance Indonesia*
PT SMFL Leasing Indonesia	-	-	5.082.377.918	10.377.537.056	*PT SMFL Leasing Indonesia*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	-	24.090.421.516	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
T o t a l	130.898.464.769	95.829.553.583	86.295.043.959	140.784.032.446	***T o t a l***

b. Liabilitas sewa pembiayaan terdiri atas: / *b. Financing lease liabilities consist of:*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:					*Details of lease **liabilities based on lessor:***
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	21.245.892.006	-	-	-	*PT Radana Bhaskara Finance Tbk*
PT Orix Indonesia Finance	1.856.360.064	-	-	-	*PT Orix Indonesia Finance*
PT Dipo Star Finance	1.528.895.705	-	-	-	*PT Dipo Star Finance*
PT Mandiri Utama Finance	899.102.744	1.187.191.406	153.691.290	-	*PT Mandiri Utama Finance*
PT BCA Finance	740.984.523	1.091.274.437	1.753.882.735	-	*PT BCA Finance*
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	537.418.422	1.657.688.334	-	*PT Mitsui Leasing Capital Indonesia*
PT Astra Credit Company	-	61.621.037	721.896.417	1.668.104.430	*PT Astra Credit Company*
PT Mandiri Tunas Finance	-	-	-	822.507.562	*PT Mandiri Tunas Finance*
T o t a l	26.271.235.042	2.877.505.302	4.287.158.776	2.490.611.992	***T o t a l***

Peralatan berat Perusahaan telah diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Wahana Tata, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, dan PT Asuransi Tri Prakarta. Pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 294.009.211.000, Rp 521.560.712.932, Rp 468.506.361.600 dan Rp 80.252.591.600.

The Company's heavy equipment has been insured with PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Wahana Tata, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, and PT Asuransi Tri Prakarta. As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the total sum insured amounted to Rp 294,009,211,000, Rp 521,560,712,932, Rp 468,506,361,600, and Rp 80,252,591,600, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Perusahaan.

Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses that may arise for the Company.

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan)

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CLIPAN)

Pada tanggal 30 April 2026, Perusahaan dan CLIPAN menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 16.964.119.350. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 November 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,50% per tahun.

PT Astra Sedaya Finance (ASF)

Pada tanggal 23 April 2026, Perusahaan dan ASF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 1.127.228.260. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 April 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,50% per tahun.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF)

Pada tanggal 18 Februari 2026, Perusahaan dan ADMF menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa dengan total sebesar Rp 3.780.486.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 18 Januari 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,25% per tahun.

PT Orix Indonesia Finance (ORIX)

Pada tanggal 20 April 2026, Perusahaan dan ORIX menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa masing-masing sebesar Rp 1.345.920.000 dan Rp 479.232.000. Fasilitas sewa berakhir pada 30 April 2029. Tingkat suku bunga masing-masing fasilitas adalah 5,39% dan 5,95% per tahun.

Pada tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan dan ORIX menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 504.984.000. Fasilitas sewa berakhir pada 26 Februari 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,25% per tahun.

Pada tanggal 21 November 2025, Perusahaan dan ORIX menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 1.762.680.000. Fasilitas sewa berakhir pada 28 November 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

Pada tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 3.001.523.250. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 27 Juli 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

Pada tanggal 19 Februari 2026, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 33.371.481.225. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 27 Juli 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

Pada tanggal 20 September 2024, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 23.354.400.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 29 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 9,99% per tahun.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 8.214.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 16 Agustus 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,99% per tahun.

*11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CLIPAN)

On 30 April 2026, the Company and CLIPAN entered into credit facility for lease amounted to Rp 16,964,119,350. This lease facility will end on 25 November 2028. The facility interest rate is 10.50% per annum.

PT Astra Sedaya Finance (ASF)

On 23 April 2026, the Company and ASF entered into credit facility for lease amounted to Rp 1,127,228,260. This lease facility will end on 22 April 2028. The facility interest rate is 10.50% per annum.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF)

On 18 February 2026, the Company and ADMF entered into several credit facility for lease amounted to Rp 3,780,486,000. This lease facility will end on 18 January 2029. The facility interest rate is 9.25% per annum.

PT Orix Indonesia Finance (ORIX)

On 20 April 2026, the Company and ORIX entered into several credit facility for lease amounted to Rp 1,345,920,000 and Rp 479,232,000 respectively. This lease facility will end on 30 April 2029. The interest rates for each facility are 5.39% and 5.95% per annum.

On 23 February 2026, the Company and ORIX enteres into credit facility for lease amounted to Rp 504,984,000. This lease facility will end on 26 February 2029. The facility interest rate is 9.25% per annum.

On 21 November 2025, the Company and ORIX enteres into credit facility for lease amounted to Rp 1,762,680,000. This lease facility will end on 28 November 2028. The facility interest rate is 11.00% per annum.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

On 23 February 2026, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 3,001,523,250. This lease facility will end on 27 July 2029. The facility interest rate is 8.75% per annum.

On 19 February 2026, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 33,371,481,225. This lease facility will end on 27 July 2029. The facility interest rate is 8.75% per annum.

On 20 September 2024, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 23,354,400,000. This lease facility will end on 29 October 2027. The facility's interest rate is 9,99% per annum.

On 30 July 2024, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 8,214,000,000. This lease facility will end on 16 August 2027. The facility's interest rate is 11.99% per annum.

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan)

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI) (Lanjutan)

Pada tanggal 19 September 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 7.104.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 Agustus 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

Pada tanggal 9 September 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 4.817.400.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 9 Agustus 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2022, Perusahaan dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 7.104.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 21 Juni 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10,99% per tahun.

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL)

Pada tanggal 29 Mei 2023, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 1.203.240.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 1 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 1.776.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 9 September 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 3.043.176.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 September 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 8 Juni 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13.390.617.579. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 8 Juni 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 1.032.849.600. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 July 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 22.317.695.965. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 24 Mei 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,25% per tahun.

Pada tanggal 25 Maret 2022, Perusahaan dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 2.352.625.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 Maret 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 13,75% per tahun.

PT Buana Finance Tbk

Pada tanggal 28 Agustus 2025, Perusahaan dan Buana Finance menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 3.960.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 15% per tahun.

*11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

***PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)** (Continued)*

On 19 September 2022, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 7,104,000,000. This lease facility will end on 19 August 2025. The facility's interest rate is 10.99% per annum.

On 9 September 2022, the Company and CFI entered into credit facility for amounted to Rp 4,817,400,000. This lease facility will end on 9 August 2025. The facility's interest rate is 10.99% per annum.

On 20 June 2022, the Company and CFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 7,104,000,000. This lease facility will end on 21 June 2025. The facility's interest rate is 10.99% per annum.

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL)

On 29 May 2023, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 1,203,240,000. This lease facility will end on 1 June 2026. The facility's interest rate is 13.25% per annum.

On 15 May 2023, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 1,776,000,000. This lease facility will end on 30 June 2026. The facility's interest rate is 13.25% per annum.

On 9 September 2022, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 3,043,176,000. This lease facility will end on 19 September 2026. The facility's interest rate is 13.25% per annum.

On 8 June 2022, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 13,390,617,579. This lease facility will end on 8 June 2025. The facility's interest rate is 13.25% per annum.

On 21 July 2022, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 1,032,849,600. This lease facility will end on 22 July 2025. The facility's interest rate is 13.25% per annum.

On 24 May 2022, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 22,317,695,965. This lease facility will end on 24 May 2025. The facility's interest rate is 13,25% per annum.

On 25 March 2022, the Company and CSUL entered into credit facility for lease amounted to Rp 2,352,625,000. This lease facility will end on 25 March 2025. The facility's interest rate is 13.75% per annum.

PT Buana Finance Tbk

On 28 August 2025, the Company and Buana Finance entered into credit facility for lease amounted to Rp 3.960.000.000. This lease facility will end on 19 September 2028. The facility's interest rate is 15% per annum.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan)

PT Buana Finance Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Juni 2025, Perusahaan dan Buana Finance menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 9.471.000.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 24 Mei 2028 dan 26 Mei 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 15% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan dan HFI menandatangani beberapa fasilitas kredit untuk sewa dengan total sebesar Rp 24.871.450.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 14 Maret 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

Pada tanggal 4 Oktober 2022, Perusahaan dan HFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 8.538.675.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 4 Oktober 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 6.287.040.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11% per tahun.

PT Indomobil Finance Indonesia (IFI)

Pada tanggal 22 Desember 2022, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 12.076.642.468. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 Desember 2025. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2023, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 4.004.966.400. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 20 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

Pada tanggal 19 Juni 2023, Perusahaan dan IFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 53.940.249.600. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 19 Juni 2026. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 12% per tahun.

PT Radana Bhaskara Finance Tbk (RBF)

Pada tanggal 27 Maret 2026, Perusahaan dan RBF menandatangani beberapa fasilitas kredit jual dan sewa balik dengan total sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas jual dan sewa balik berakhir pada tanggal 29 Februari 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

Pada tanggal 12 Agustus 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 17.549.950.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 28 Agustus 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

*11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

***PT Buana Finance Tbk** (Continued)*

On 21 June 2025, the Company and Buana Finance entered into credit facility for lease amounted to Rp 9,471,000,000. This lease facility will end on 24 May 2028 and 26 May 2028. The facility's interest rate is 15% per annum.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

On 14 March 2022, the Company and HFI entered into several credit facility for lease amounted to Rp 24,871,450,000. This lease facility will end on 14 March 2025. The facility's interest rate is 11.5% per annum.

On 4 October 2022, the Company and HFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 8,538,675,000. This lease facility will end on 4 October 2025. The facility's interest rate is 11.5% per annum.

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

On 11 October 2022, the Company and SMFL entered into credit facility for lease amounted to Rp 6,287,040,000. This lease facility will end on 11 October 2025. The facility's interest rate is 11% per annum.

PT Indomobil Finance Indonesia (IFI)

On 22 December 2022, the Company and IFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 12,076,642,468. This lease facility will end on 22 December 2025. The facility's interest rate is 12% per annum.

On 20 June 2023, the Company and IFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 4,004,966,400. This lease facility will end on 20 June 2026. The facility's interest rate is 12% per annum.

On 19 June 2023, the Company and IFI entered into credit facility for lease amounted to Rp 53,940,249,600. This lease facility will end on 19 June 2026. The facility's interest rate is 12% per annum.

PT Radana Bhaskara Finance Tbk (RBF)

On 27 March 2026, the Company and RBF entered into several credit facility for lease amounted to Rp 25,000,000,000. This sale and leaseback facility will end on 29 February 2028. The facility's interest rate is 14% per annum.

On 12 August 2025, the Company and RBF entered into credit facility for lease amounted to Rp 17,549,950,000. This lease facility will end on 28 August 2029. The facility's interest rate is 14% per annum.

11. **ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA** (Lanjutan)

PT Radana Bhaskara Finance Tbk (RBF) (Lanjutan)

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit jual dan sewa balik sebesar Rp 22.929.772.000. Fasilitas jual dan sewa balik berakhir pada tanggal 13 Agustus 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 14% per tahun.

Pada tanggal 22 April 2025, Perusahaan dan RBF menandatangani fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 35.874.090.000. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 22 April 2030. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,4% per tahun.

PT Dipo Star Finance (DIPO)

Pada tanggal 13 Maret 2026, Perusahaan dan DIPO menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.347.200.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 13 Maret 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

Pada tanggal 29 Mei 2026, Perusahaan dan DIPO menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 306.360.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 29 April 2029. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,00% per tahun.

PT BCA Finance

Pada tanggal 24 Juli 2024, Perusahaan dan BCA menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 2.080.000.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 24 Juli 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 7,48% per tahun.

PT Mandiri Utama Finance

Pada tanggal 11 Desember 2024, Perusahaan dan Mandiri menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 300.300.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 11 Desember 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 4,93% per tahun.

Pada tanggal 24 Januari 2025, Perusahaan dan Mandiri menandatangani fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.457.300.000. Fasilitas pembiayaan berakhir pada 24 Januari 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 4,93% per tahun.

*11. **RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES** (Continued)*

***PT Radana Bhaskara Finance Tbk (RBF)** (Continued)*

On 13 August 2025, the Company and RBF entered into credit facility for lease amounted to Rp 22,929,772,000. This sale and leaseback facility will end on 13 August 2028. The facility's interest rate is 14% per annum.

On 22 April 2025, the Company and RBF entered into credit facility for lease amounted to Rp 35,874,090,000. This lease facility will end on 22 April 2030. The facility's interest rate is 11.4% per annum.

PT Dipo Star Finance (DIPO)

On 23 March 2026, the Company and DIPO entered into a consumer financing facility amounting to Rp 1,347,000,000. The financing facility will mature on 13 March 2029. The facility bears an interest rate of 11.00% per annum.

On 29 May 2026, the Company and DIPO entered into a consumer financing facility amounting to Rp 306,360,000. The financing facility will mature on 29 April 2029. The facility bears an interest rate of 11.00% per annum.

PT BCA Finance

On 24 July 2026, the Company and BCA entered into a consumer financing facility amounting to Rp 2,080,000,000. The financing facility will mature on 24 Juli 2027. The facility bears an interest rate of 7.48% per annum.

PT Mandiri Utama Finance

On 11 December 2026, the Company and Mandiri entered into a consumer financing facility amounting to Rp 300,300,000. The financing facility will mature on 11 December 2027. The facility bears an interest rate of 4.93% per annum.

On 24 January 2025, the Company and Mandiri entered into a consumer financing facility amounting to Rp 1,457,300,000. The financing facility will mature on 24 January 2028. The facility bears an interest rate of 4.93% per annum.

12. **UTANG USAHA** / *12. **TRADE PAYABLES***

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Prima Karya Nusa	4.933.333.722	1.862.419.492	1.822.808.274	381.683.022	*PT Prima Karya Nusa*
Jaya Bersama Diesel	4.544.710.423	4.544.710.423	4.544.710.423	4.544.710.423	*Jaya Bersama Diesel*
Mitra Jaya Diesel	4.422.411.377	4.422.411.377	4.422.411.977	5.971.189.629	*Mitra Jaya Diesel*
PD Diesel Cahaya Pratama	3.736.053.783	3.736.053.783	3.736.053.783	3.736.053.783	*PD Diesel Cahaya Pratama*
Sub-total (Dipindahkan)	17.636.509.305	14.565.595.075	14.525.984.457	14.633.636.857	*Sub-total (Brought forward)*

12. **UTANG USAHA** (Lanjutan) *12. **TRADE PAYABLES** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
Sub-total (Pindahan)	17.636.509.305	14.565.595.075	14.525.984.457	14.633.636.857	*Sub-total (Carried forward)*
Anugrah Jaya Diesel	3.690.619.976	3.690.619.976	3.690.619.976	3.690.619.976	*Anugrah Jaya Diesel*
Berkah Sejahtera Dieselindo	3.633.984.826	3.633.984.826	3.633.984.826	3.633.984.826	*Berkah Sejahtera Dieselindo*
CV Putra Mandiri Teknik	2.924.064.463	2.924.064.463	2.924.064.463	4.005.268.276	*CV Putra Mandiri Teknik*
Prima Teknik Diesel	2.655.832.083	2.655.832.083	2.655.832.082	4.818.906.889	*Prima Teknik Diesel*
Diesel Power Indonesia	2.611.831.946	2.611.831.946	2.611.831.945	4.819.037.555	*Diesel Power Indonesia*
PT Citra Anugerah Sukses	2.289.371.598	208.972.818	-	-	*PT Citra Anugerah Sukses*
PT Paruh Artho Moro	2.246.238.180	388.500.000	-	-	*PT Paruh Artho Moro*
Tom n Jerry	2.234.731.690	2.234.731.690	2.234.731.691	3.695.149.376	*Tom n Jerry*
PT Indonesia Weda Bay Industri	2.168.367.337	-	-	-	*PT Indonesia Weda Bay Industri*
PT Servistama Pro Indonesia	1.576.381.459	1.467.201.087	3.060.743.372	673.214.129	*PT Servistama Pro Indonesia*
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.476.009.322	46.124.224	1.177.880.197	1.626.848.826	*PT Hexindo Adiperkasa Tbk*
PT Karya Sukses Mandiri	1.069.185.000	31.200.000	-	-	*PT Karya Sukses Mandiri*
PT Pacific Firstrack Indonesia	811.891.387	23.377.475	1.220.234.893	678.215.909	*PT Pacific Firstrack Indonesia*
PT Kobexindo Tractors Tbk	782.505.679	14.387.062	2.940.425.905	112.957.099	*PT Kobexindo Tractors Tbk*
PT Trakindo Utama	634.346.867	1.419.875.035	1.432.409.293	104.590.961	*PT Trakindo Utama*
PT Indonusa Mitra	421.512.172	187.195.728	1.721.558.577	37.690.050	*PT Indonusa Mitra*
PT Abuhasdha	411.588.000	-	4.955.373.000	839.700.000	*PT Abuhasdha*
PT Mulia Abadi Partindo	339.259.568	146.262.376	1.080.418.210	15.665.088	*PT Mulia Abadi Partindo*
CV Karya Lestari Listrindo	282.505.225	282.426.290	10.399.326.833	5.171.533.151	*CV Karya Lestari Listrindo*
PT Riodi Jaya	-	35.168.639	3.592.793.277	891.876.300	*PT Riodi Jaya*
CV Prima Internusa	-	-	19.585.213.910	18.958.047.970	*CV Prima Internusa*
PT Selaras Bhakti	-	-	7.436.431.746	7.486.181.746	*PT Selaras Bhakti*
PT Akindo Inti Manunggal	-	-	6.406.313.693	9.155.563.693	*PT Akindo Inti Manunggal*
Lain-lain (di bawah Rp 1 Miliar)	16.521.973.032	10.817.972.520	15.914.778.165	16.167.451.872	*Other (below Rp 1 Billion)*
Sub-total	66.418.709.115	47.385.323.313	113.200.950.511	101.216.140.549	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 24)	9.048.153.053	-	-	-	***Related party** (Notes 24)*
T o t a l	75.466.862.168	47.385.323.313	113.200.950.511	101.216.140.549	***T o t a l***

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, analisa umur utang usaha di atas adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the aging analysis of the above trade payables are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Belum jatuh tempo:	28.748.572.025	8.396.158.295	15.712.656.347	30.242.865.417	*Not yet due*
Jatuh tempo					*Post due:*
1 – 30 hari	7.059.946.164	5.184.658.068	7.455.220.298	16.258.329.467	*1 - 30 days*
31 – 60 hari	3.504.446.181	2.183.238.417	5.570.168.722	17.170.079.304	*31 - 60 days*
61 – 90 hari	2.474.032.420	18.847.816	3.596.191.188	4.141.317.167	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	33.679.865.378	31.602.420.717	80.866.713.956	33.403.549.194	*More than 90 days*
T o t a l	75.466.862.168	47.385.323.313	113.200.950.511	101.216.140.549	***T o t a l***

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Batu Energi Perdana	15.036.678.082	-	-	-	*PT Batu Energi Perdana*
Tn. Oey Albert	13.001.372.000	18.711.446.500	28.768.886.000	-	*Mr. Oey Albert*
PT Trakindo Utama	-	-	39.062.898.000	-	*PT Trakindo Utama*
PT Budi Gema Gempita	-	-	3.805.252.822	9.513.132.010	*PT Budi Gema Gempita*
PT Hexindo Adi Perkasa Tbk	-	-	-	3.435.050.000	*PT Hexindo Adi Perkasa Tbk*
Lain-lain	47.285.546	-	-	-	*O t h e r s*
Sub-total	28.085.335.628	18.711.446.500	71.637.036.822	12.948.182.010	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 24)	25.330.179.414	69.747.881.004	52.899.392.500	2.000.000.000	***Related parties*** *(Note 24)*
Total	53.415.515.042	88.459.327.504	124.536.429.322	14.948.182.010	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(50.955.795.042)	(80.728.793.504)	(106.264.191.322)	(11.142.929.188)	***Less current maturities***
Bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.720.000	7.730.534.000	18.272.238.000	3.805.252.822	***Net of current portion***

Berdasarkan akta No. 9 tanggal 14 Agustus 2024 dan akta No. 7 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh notaris Inggraini Yamin S.H., Perusahaan menerima pinjaman dari Tn. Oey Albert untuk keperluan operasional dengan total pinjaman masing-masing Rp 18.975.000.000 dan Rp 12.650.000.000. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Based on Notarial Deed No. 9 dated 14 August 2024 and Notarial Deed No. 7 dated 14 October 2024 drawn up by Notary Inggraini Yamin, S.H., the Company obtained loans from Mr. Oey Albert for operational purposes amounting to Rp 18,975,000,000 and Rp 12,650,000,000, respectively. The loans are non-interest bearing with a term of 36 months.

Pada tanggal 2 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Batu Energi Perdana, dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000 digunakan untuk keperluan modal kerja dan pembiayaan kegiatan umum Perusahaan, dengan bunga sebesar 5% per tahun dan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2026.

On 2 June 2026, the Company entered into a Loan Agreement with PT Batu Energi Perdana, whereby the Company obtained the loan amounting to Rp 15,000,000,000, and is intended for the Company's working capital and general business activities, bears interest at 5% per annum, and matures on 31 December 2026.

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. **Pajak Dibayar di Muka** / *a. Prepaid Taxes*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
PPN Masukan	3.507.884.653	-	14.035.793.524	-	*VAT In*
Deposit pajak	4.277.825.587	-	-	-	*Tax deposits*
T o t a l	7.785.710.240	-	14.035.793.524	-	***T o t a l***

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) *14. **TAXATION** (Continued)*

b. **Utang Pajak** *b. **Taxes Payable***

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
PPN Keluaran	-	228.842.919	-	5.186.117.969	*VAT out*
Pajak penghasilan:					*Income tax:*
Pasal 4(2)	39.651.285	42.391.588	30.762.102	57.481.791	*Article 4(2)*
Pasal 21	485.866.000	175.749.998	542.180	13.112.322	*Article 22*
Pasal 23	35.963.103	-	85.360.122	52.360.417	*Article 23*
Pasal 25	-	-	213.969.145	190.043.957	*Article 25*
Pasal 29	-	-	-	857.236.227	*Article 29*
T o t a l	561.480.388	446.984.505	330.633.549	6.356.352.683	***T o t a l***

c. **Pajak Penghasilan Badan** *c. **Corporate Income Tax***

Beban pajak penghasilan Perusahaan terdiri dari:

The income tax expense of the Company is consisting of the following:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Beban pajak kini	-	-	-	13.054.514.223	*Current tax expense*
Pajak tangguhan	3.483.008.274	1.513.278.852	477.995.207	5.878.028.120	*Deferred tax*
T o t a l	3.483.008.274	1.513.278.852	477.995.207	18.932.542.343	***T o t a l***

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak serta perhitungan beban pajak kini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income and calculation of current tax expense for the year ended 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Laba sebelum pajak penghasilan	15.255.636.039	6.655.520.556	1.684.928.615	85.786.770.641	***Profit before income tax***
Ditambah (dikurangi):					*Add (deduct):*
Beda temporer					***Temporary differences***
Imbalan kerja	(283.036.294)	310.933.453	2.035.949.281	6.114.344.911	*Employee benefit*
Cadangan piutang	(928.995.000)	309.665.000	309.665.000	309.665.000	*Allowance for bad debt*
Aset hak guna	(16.393.161.137)	(47.752.188.791)	(43.137.732.768)	(33.142.319.546)	*Right of use of assets*
Beda permanen					***Permanent differences***
Biaya konsumsi	131.785.110	80.601.641	86.021.459	65.859.550	*Consumable cost*
Pengobatan	304.421.274	350.422.232	513.278.182	256.758.009	*Medical*
Beban pajak	404.602.852	-	-		*Tax expenses*
Penghasilan bunga	(81.154.041)	(208.004.190)	(111.522.879)	(52.377.551)	*Interest income*
(Taksiran rugi fiskal) penghasilan kena pajak tahun berjalan	(1.589.901.197)	(40.253.050.099)	(38.619.413.110)	59.338.701.014	***(Estimated fiscal loss) taxable income for the current period***
Beban pajak kini	-	-	-	13.054.514.223	*Current tax expense*
Akumulasi kerugian fiskal:					***Accumulated fiscal loss:***
2026	(1.589.901.197)	-	-	-	*2026*
2025	(40.253.050.099)	(40.253.050.099)	-	-	*2025*
2024	(38.619.413.110)	(38.619.413.110)	(38.619.413.110)	-	*2024*
T o t a l	(80.462.364.406)	(78.872.463.209)	(38.619.413.110)	-	***T o t a l***

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) *14. **TAXATION** (Continued)*

c. **Pajak Penghasilan Badan** (Lanjutan) *c. **Corporate Income Tax** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Dikurangi pajak dibayar di muka:					***Less prepaid tax:***
PPh Pasal 22	96.078.720	100.119.085	78.568.917	144.771.520	*Income tax article 22*
PPh Pasal 23	2.063.705.431	5.385.871.483	2.750.218.184	10.342.113.041	*Income tax article 23*
PPh Pasal 25	-	641.907.417	2.495.854.104	1.710.393.435	*Income tax article 25*
Jumlah kredit pajak	2.159.784.151	6.127.897.985	5.324.641.205	12.197.277.996	*Total taxes credit*
(Taksiran klaim pajak) utang pajak - Pasal (28a) 29	(2.159.784.151)	(6.127.897.985)	(5.324.641.205)	857.236.227	***(Estimate claim tax refund) tax payable - Article (28a) 29***

Taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2025 yang akan dilaporkan oleh Perusahaan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2025 adalah berdasarkan angka yang dinyatakan di atas. Taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2024, seperti dinyatakan di atas, telah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan pada SPT tahun 2024 yang dilaporkan ke Kantor Pajak. Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun 2023, seperti dinyatakan di atas, telah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan pada SPT tahun 2023 yang dilaporkan ke Kantor Pajak.

The Company's estimated fiscal loss for 2025, which will be reported by the Company in its 2025 Annual Tax Return (SPT), is based on the amount stated above. The Company's estimated fiscal loss for 2024, as stated above, is in accordance with the amount reported in the 2024 SPT filed with the Tax Office. The Company's estimated taxable income for 2023, as stated above, is in accordance with the amount reported in the 2023 SPT filed with the Tax Office.

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	15.255.636.039	6.655.520.556	1.684.928.615	85.786.770.641	***Profit before income tax expense per the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	3.356.239.929	1.464.214.522	370.684.295	18.873.089.541	*Income tax expense based on the applicable tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap:					*Tax effect of permanent differences:*
Biaya konsumsi	28.992.724	17.732.361	18.924.721	14.489.167	*Consumable cost*
Pengobatan	66.972.680	77.092.891	112.921.224	56.486.696	*Medical*
Beban pajak	89.012.628	-	-	-	*Tax expense*
Penghasilan bunga	(17.853.889)	(45.760.922)	(24.535.033)	(11.523.061)	*Interest income*
Penyesuaian	(40.355.798)	-	-	-	*Adjustment*
Beban pajak penghasilan, neto menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.483.008.274	1.513.278.852	477.995.207	18.932.542.343	***Income tax expense, net per the statement of profit or loss and other comprehensive income***

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semua 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On 7 October 2021, the Government ratified the Draft Law on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law No. 7 of 2021 which stipulates, among other things, an increase in the rate of Value-Added Tax (VAT) from all 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% starting on 1 January 2025. In addition, canceling the reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from the original 20% down to a fixed 22% which will take effect in the 2022 fiscal year.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable profit resulting from the reconciliation becomes the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) *14. **TAXATION** (Continued)*

d. **Taksiran Klaim Pajak Penghasilan** *d. **Estimated Claim for Tax Refund***

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
2026	2.159.784.151	-	-	-	*2026*
2025	6.127.897.985	6.127.897.985	-	-	*2025*
2024	-	5.324.641.205	5.324.641.205	-	*2024*
Total	8.287.682.136	11.452.539.190	5.324.641.205	-	***Total***

e. **Pajak Tangguhan** *e. **Deferred Tax***

	31 Desember 2025/ ***31 December 2025***	**Dikreditkan ke laba rugi/** ***Credited to statement of profit or loss***	**Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/** ***Charged to other comprehensive income***	**Penyesuaian/** ***Adjustment***	**30 Juni 2026/** ***30 June 2026***	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax (liabilities) assets***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.779.232.619	(62.267.985)	(151.948.372)	40.355.798	1.605.372.060	*Provision for employee benefits*
Cadangan kerugian kredit nilai piutang usaha	204.378.900	(204.378.900)	-	-	-	*Allowance for bad debt*
Aset hak guna	(29.416.825.403)	(3.606.495.450)	-	-	(33.023.320.853)	*Right of use of asset*
Rugi fiskal	17.351.941.882	349.778.263	-	-	17.701.720.145	*Fiscal loss*
Total	(10.081.272.002)	(3.523.364.072)	(151.948.372)	40.355.798	(13.716.228.648)	***Total***

	31 Desember 2024/ ***31 December 2024***	**Dikreditkan ke laba rugi/** ***Credited to statement of profit or loss***	**Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/** ***Charged to other comprehensive income***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax (liabilities) assets***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.731.005.158	68.405.360	(20.177.899)	1.779.232.619	*Provision for employee benefits*
Cadangan kerugian kredit nilai piutang usaha	136.252.600	68.126.300	-	204.378.900	*Allowance for bad debt*
Aset hak guna	(18.911.343.869)	(10.505.481.534)	-	(29.416.825.403)	*Right of use of asset*
Rugi fiskal	8.496.270.860	8.855.671.022	-	17.351.941.882	*Fiscal loss*
Total	(8.547.815.251)	(1.513.278.852)	(20.177.899)	(10.081.272.002)	***Total***

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) *14. **TAXATION** (Continued)*

e. **Pajak Tangguhan** (Lanjutan) *e. **Deferred Tax** (Continued)*

	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax (liabilities) assets***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.345.155.880	447.908.842	(62.059.564)	1.731.005.158	*Provision for employee benefits*
Cadangan kerugian kredit nilai piutang usaha	68.126.300	68.126.300	-	136.252.600	*Allowance for bad debt*
Aset hak guna	(9.421.042.660)	(9.490.301.209)	-	(18.911.343.869)	*Right of use of asset*
Rugi fiskal	-	8.496.270.860	-	8.496.270.860	*Fiscal loss*
T o t a l	(8.007.760.480)	(477.995.207)	(62.059.564)	(8.547.815.251)	***T o t a l***

	31 Desember 2022/ *31 December 2022*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax (liabilities) assets***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	-	1.345.155.880	-	1.345.155.880	*Provision for employee benefits*
Cadangan kerugian kredit nilai piutang usaha	-	68.126.300	-	68.126.300	*Allowance for bad debt*
Aset hak guna	(2.129.732.360)	(7.291.310.300)	-	(9.421.042.660)	*Right of use of asset*
T o t a l	(2.129.732.360)	(5.878.028.120)	-	(8.007.760.480)	***T o t a l***

f. **Surat Ketetapan Pajak** *f. **Tax Assessment Letter***

Nomor surat ketetapan pajak/ *Tax assessment letter number*	**Tanggal/** *Date*	**Masa pajak/** *Tax period*	**Tahun/** *Year*	**Jenis pajak/** *Taxes*	**Nilai (Rp)/** *Amount (Rp)*
00054/406/24/046/26	29/04/2026	–	2024	SKPLB Pajak Penghasilan/ *Tax Overpayment Assesment Letter for Income Tax*	5.324.908.853
00063/201/24/046/26	29/04/2026	Januari s.d Desember/ *January to December*	2024	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21/ *Tax Underpayment Assesment Letter for Income Tax Article 21*	2.169.844
00130/203/24/046/26	29/04/2026	Desember/ *December*	2024	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23/ *Tax Underpayment Assesment Letter for Income Tax Article 23*	8.607.302
00215/207/24/046/26 – 00220/207/24/046/26	29/04/2026	Januari-Juni/ *January-June*	2024	SKPKB Pajak Pertambahan Nilai/ *Tax Underpayment Assesment Letter for Value Added Tax*	583.000

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK / *15. SHORT-TERM BANK LOAN*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
PT Bank Central Asia Tbk	19.721.694.478	19.705.429.611	19.684.342.215	8.371.225.675	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Saqu Indonesia	11.981.794.072	11.987.409.367	16.277.164.066	3.302.947.981	*PT Bank Saqu Indonesia*
PT BPR Universal	14.844.799.999	14.844.799.395	-	-	*PT BPR Universal*
PT BPR Bangun Solusi Bersama	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	*PT BPR Bangun Solusi Bersama*
T o t a l	46.548.288.549	48.037.638.373	37.461.506.281	11.674.173.656	***T o t a l***

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 12 April 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit ("SPPK") No. 00123 GMD SPPK 2022 dengan plafon sebesar Rp 6.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 2,65% per tahun. Fasilitas tersebut mensyaratkan penempatan deposito berjangka pada BCA sebesar Rp 6.000.000.000 atas nama Arief Ramon serta pembukaan rekening giro pada BCA.

Pada tanggal 14 April 2022 dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 00293/0980S/SPPK/2022 Perusahaan dan BCA menyetujui perubahan fasilitas yaitu kredit lokal dengan plafon sebesar Rp 5.000.000.000 dan kredit investasi sebesar Rp 7.000.000.000 dengan suku bunga masing-masing 8% per tahun.

Pada tanggal 22 Juli 2024 BCA dan Perusahaan melakukan perubahan perjanjian kredit dengan No. 00434/PPK/GMD/2024 yang mengubah ketentuan pasal 2 Perjanjian kredit menjadi pemberian fasilitas kredit lokal dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 16.000.000.000 dengan tujuan untuk membiayai persediaan barang dan piutang usaha. Perusahaan diwajibkan untuk membayar bunga sebesar suku bunga tertinggi deposito berjangka yang diserahkan sebagai Agunan ditambah 0,9% per tahun.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk:

a. Menyerahkan *copy* akta perubahan pengurus dan pemegang saham Debitor setiap kali ada perubahaan baik sebelum maupun sesudah *Initial Public Offering* (IPO).

b. Apabila terdapat *Corporate Action* berupa Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maka Debitor wajib memberitahukan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan tersebut.

c. Debitor wajib memberikan informasi tertulis mengenai susunan pemegang saham setiap 1 (satu) bulan sekali.

d. Debitor wajib mempertahankan pengendalian atas Perseroan berada pada Ibu Billy Theristine Lim (baik secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan efektif saham sebesar sekurang-kurangnya 20,73% dari modal disetor.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On 12 April 2022, the Company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") based on Letter of Notification of Credit Facility ("SPPK") No. 00123 GMD SPPK 2022, with a facility limit of Rp 6,000,000,000 and an interest rate of 2.65% per annum. The facility required the placement of a time deposit with BCA amounting to Rp 6,000,000,000 under the name of Arief Ramon, as well as the opening of a current account with BCA.

On 14 April 2022, with Credit Grant Notification Letter (SPPK) No. 00293/0980S/SPPK/2022, The Company and BCA approved changes to the facilities, namely a local credit facility with a ceiling of Rp 5,000,000,000 and an investment credit facility of Rp 7,000,000,000 with interest rates of 8% per annual.

On 22 July 2024, BCA and the Company amended the credit agreement No. 00434/PPK/GMD/2024, which amended the provisions of Article 2 of the Credit Agreement to provide local credit facilities with a credit limit not exceeding Rp 16,000,000,000 for the purpose of financing inventory and accounts receivable. The Company is required to pay interest at the highest interest rate on time deposits submitted as collateral plus 0.9% per annum.

As long as the credit remains outstanding, the Company is required to:

a. To submit a copy of the deed of amendment to the Debtor's management and shareholders whenever there is any change, either before or after the Initial Public Offering (IPO).
b. In the event of a Corporate Action involving changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Debtor is required to provide written notice no later than 14 (fourteen) calendar days from the date the General Meeting of Shareholders approves such changes.
c. The Debtor is required to provide written information regarding the composition of its shareholders on a monthly basis.
d. The Debtor is required to maintain control over the Company with Mrs. Billy Theristine Lim, either directly or indirectly, with an effective shareholding of at least 20.73% of the paid-up capital.

15. **UTANG BANK JANGKA PENDEK** (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk: (Lanjutan)

e. Selama terdapat pinjaman di BCA, Debitor wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila:

- Mengubah anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham publik) Perusahaan dengan kondisi kepemilikan saham *ultimate shareholder* dari Bu Billy Theristine Lim dan keluarga (secara langsung dan tidak langsung) adalah mayoritas atau minimal sebesar 27,96%.

- Melakukan pembagian dividen selama masih memenuhi *financial covenant* dan memenuhi kewajiban debitur di BCA (perubahan syarat dividen baru berlaku apabila debitur melakukan IPO dan menyerahkan akta terbaru Perusahaan).

f. Debitor harus menyerahkan minimal 1 (satu) set prospectus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO serta setiap tahun menyerahkan *company profile* tahun kepada BCA.
g. Seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada laporan keuangan.
h. Menjaga rasio DSC ≥ 1x, C/R ≥1x DAN D/E ≤ 3x.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Memperoleh pinjaman uang/kredit/hutang/*leasing* baru/tambahan bank/lembaga keuangan/pihak lain lebih dari Rp 500.000.000 kecuali tambahan hutang *back to back*, termasuk mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain.
b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitor;
d. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.

Fasilitas ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 17 Juni 2025 dengan addendum perjanjian pemberian fasilitas kredit No. 00168/GMD/SPPK/2025 untuk perpanjangan fasilitas kredit yang berakhir menjadi 21 April 2027.

Pada tanggal 14 April 2026, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 275/GMD/SPPK/2026 dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). Melalui SPPK tersebut, BCA menyetujui pemberian fasilitas Kredit Lokal 1 sebesar Rp 3.750.000.000 dengan suku bunga 10% per tahun dan Kredit Lokal 2 sebesar Rp 16.000.000.000 dengan suku bunga 3,9% per tahun, sehingga total fasilitas mencapai Rp 19.750.000.000. Perusahaan menyerahkan agunan berupa bilyet deposito berjangka milik Sukamdani Kencana Y dan properti milik Arief Ramon.

*15. **SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

***PT Bank Central Asia Tbk (BCA)** (Continued)*

As long as the credit remains outstanding, the Company is required to: (Continued)

e. As long as there are outstanding loans with BCA, the Debtor is required to provide written notification to BCA if:

- *To amend the Articles of Association, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the public shareholders of the Company, provided that the share ownership of the ultimate shareholder, Mrs. Billy Theristine Lim and her family, directly and indirectly, remains the majority or at least 27.96%.*
- *To distribute dividends, provided that the Debtor continues to comply with the financial covenants and fulfills its obligations to BCA (the revised dividend terms shall only apply once the Debtor conducts an Initial Public Offering (IPO) and submits the latest deed of the Company).*

f. The Debtor must submit at least 1 (one) set of the Company's prospectus to BCA no later than the IPO date and submit the Company's annual company profile to BCA every year.
g. All assets and liabilities financed by BCA must be recorded in the financial statements.
h. Maintain a DSC ratio of ≥ 1x, a C/R of ≥ 1x, and a D/E ratio of ≤ 3x.

As long as the credit remains outstanding, the Company is not permitted to:

a. To obtain any new or additional loans/credit/debt/leasing facilities from banks, financial institutions, or other `parties in excess of Rp 500,000,000, except for additional back-to-back debt, including acting as a guarantor or surety in any form or under any name and/or pledging the Debtor's assets as collateral to other parties.
b. To lend money, including but not limited to, to its affiliated companies, except in the ordinary course of business.
c. To make investments, equity participation, or establish new businesses outside the Debtor's core business;
d. To carry out any merger, consolidation, acquisition, dissolution, or liquidation.

This facility has undergone several changes, most recently on 17 June 2025, with an addendum to the credit facility agreement No. 00168/GMD/SPPK/2025 to extend the facility, which now expires on 21 April 2027.

On 14 April 2026, the Company received a Credit Approval Letter (SPPK) No. 275/GMD/SPPK/2026 from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). Through this SPPK, BCA approved a Local Credit 1 facility amounting to Rp 3,750,000,000 with an interest rate of 10% per annum and a Local Credit 2 facility amounting to Rp 16,000,000,000 with an interest rate of 3.9% per annum, totaling Rp 19,750,000,000. The Company submits collateral in the form of time deposit certificates owned by Sukamdani Kencana Y and property owned by Arief Ramon.

15. **UTANG BANK JANGKA PENDEK** (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait perubahan status kelembagaan Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dan perubahan syarat kredit Perusahaan setelah melakukan IPO berdasarkan surat No. 00401/SLK/2026 dan No. 00397/SLK/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Pada tanggal 12 Juni 2026, Perusahaan dan BCA menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 00171/PPK/GMD/2026 untuk fasilitas Kredit Lokal 2 sebesar Rp 16.000.000.000. Perjanjian ini mengatur perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 21 Juni 2026, serta akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan penghentian dari para pihak.

Pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 Perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 13.604.756.880, dan nihil dan melakukan pembayaran masing-masing nihil, Rp 2.333.333.340 dan Rp 2.333.333.340.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 19.721.694.478, Rp 19.705.429.611, Rp 19.684.342.215 dan Rp 8.371.225.675.

PT Bank Saqu Indonesia (dahulu BJJ)

Pada tanggal 6 April 2022, SAQU dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Membuka Kredit No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 dengan batas fasilitas awal sebesar Rp 4.500.000.000 untuk modal kerja. Pada tanggal 15 Agustus 2024, berdasarkan Addendum No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 Tamb.I, SAQU dan Perusahaan menyetujui perubahan fasilitas menjadi Fasilitas Pinjaman Aksep dengan peningkatan plafon sebesar Rp 12.000.000.000. Pada tanggal 6 April 2026, Perusahaan dan SAQU menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kredit yang memperpanjang jangka waktu fasilitas dari semula berakhir pada 6 April 2026 menjadi berakhir pada 6 April 2027. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 4 lembar Bilyet Deposito Bank Saqu Indonesia dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000.

PT Bank Saqu Indonesia telah menyetujui permohonan Perusahaan atas pencabutan ketentuan terkait pembagian dividen dan pembayaran sebelum jatuh tempo atas utang pihak ketiga, serta penyesuaian ketentuan terkait perubahan susunan pengurus, perubahan anggaran dasar, pengalihan saham pengendali, merger/akuisisi, dan perubahan status perseroan melalui surat No. 1524/RB/IV/2026 tanggal 6 April 2026 dan surat No. 2222/RB/V/2026 tanggal 13 Mei 2026.

*15. **SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

***PT Bank Central Asia Tbk (BCA)** (Continued)*

PT Bank Central Asia Tbk has approved the Company's request regarding the change in the Company's institutional status from a private company to a public company, as well as changes to the composition of the Company's management and shareholders and company credit tems following the IPO, based on Letter No. 00401/SLK/2026 and No. 00397/SLK/2026 dated 25 May 2026.

On 12 June 2026, the Company and BCA executed the Amendment to Credit Agreement No. 00171/PPK/GMD/2026 for Local Credit Facility 2 amounting to Rp 16,000,000,000. This agreement stipulates the extension of the Credit Facility Availability Period from 21 May 2026 until 21 June 2026, and shall be automatically extended for subsequent 1 (one) year periods unless a non-extension notice is served by either party.

As of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024, and 2023, the Company received loan proceeds amounting to nil, nil, Rp 13,604,756,880, and nil, respectively, and made repayments amounting to nil, Rp 2,333,333,340 and Rp 2,333,333,340, respectively.

The loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, and 2024 amounted to Rp 19,721,694,478 Rp 19,705,429,611, Rp 19,684,342,215 and Rp 8,371,225,675, respectively.

PT Bank Saqu Indonesia (previously BJJ)

On 6 April 2022, SAQU and the Company signed a Credit Agreement No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 with an initial facility limit of Rp 4,500,000,000 for working capital purposes. On 15 August 2024, based on Addendum No. 3813/Krd/JJMK/04/2022 Tamb.I, SAQU and the Company agreed to modify the facility into Acceptance Loan Facility with an increased facility limit of Rp 12,000,000,000. On 6 April 2026, the Company and SAQU signed a Credit Extension Agreement extending the maturity date of the facility from 6 April 2026 to 6 April 2027. This credit facility is collateralized by 4 Time Deposit Certificates of Bank Saqu Indonesia with a nominal value of Rp 3,000,000,000.

PT Bank Saqu Indonesia approved the Company's request for the waiver of covenants relating to dividend distributions and prepayment of third-party debt, as well as the adjustment of covenants regarding changes in management, amendments to the Articles of Association, shareholding transfers, mergers/acquisitions, and changes in corporate status through letter No. 1524/RB/IV/2026 dated 6 April 2026 and letter No. 2222/RB/V/2026 dated 13 May 2026.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON 30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON 31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah, unless otherwise stated)

15. **UTANG BANK JANGKA PENDEK** (Lanjutan)

PT Bank Saqu Indonesia (dahulu BJJ) (Lanjutan)

Pada tahun 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 Perusahaan tidak menerima pinjaman selama tahun tersebut dan melakukan pembayaran masing-masing nihil, Rp 5.650.187.168, Rp 6.717.256.377, dan Rp 5.898.070.608.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 11.981.794.072, Rp 11.987.409.367, Rp 16.277.164.066 dan Rp 3.302.947.981.

PT BPR Universal

Pada tanggal 1 Oktober 2025 PT BPR Universal dan Perusahaan melakukan perjanjian pemberian fasilitas kredit dengan No. 368/U-BTR/X/2025 yang berupa:

a. Pinjaman Revolving Reguler 1 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 10 Oktober 2025 dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan bunga 14,5% per tahun dan jangka waktu 12 bulan yang terhitung dari tanggal perjanjian ditandatangani. Agunan dari fasilitas ini adalah sebagai berikut:
   - Sertifikat Hak Milik NIB No. 09.03.0000337939.0/ Kembangan Selatan atas nama Arief Ramon.
   - Sertifikat Hak Milik NIB No. 09.03.000037906.0/ Kembangan Selatan atas nama Arief Ramon.
   - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6571/Pegadungan atas nama Arief Ramon.
   - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6548/Pegadungan atas nama Arief Ramon.

b. Pinjaman *Revolving Reguler* 2 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 011/BTR/UKD/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan limit kredit sebesar Rp 5.000.000.000 yang digunakan untuk *stand by loan* untuk jasa penambang batubara Perusahaan dengan bunga 7% per tahun dan jangka waktu 12 bulan yang terhitung dari tanggal perjanjian ditandatangani.

Agunan dari fasilitas ini adalah Deposito Berjangka PT BPR Universal sejumlah Rp 5.000.000.000 atas nama Arief Ramon berikut dengan segala bentuk perpanjangan, penambahan dan/atau perubahan atas Deposito Berjangka tersebut.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:
a. Merubah susunan pengurus dan anggaran dasar Perusahaan.
b. Merubah susunan pemegang saham Perusahaan.

PT BPR Universal telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan surat No. 195/AAP-BPRU/EXT/IV/26.

*15. **SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

***PT Bank Saqu Indonesia (previously BJJ)** (Continued)*

As of 30 June 2026, 31 Desember 2025, 2024, and 2023, the Company did not obtain any new borrowings and made loan repayments of nil, Rp 5,650,187,168, Rp 6,717,256,377 and Rp 5,898,070,608, respectively.

The loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, and 2024 amounted to Rp 11,981,794,072, Rp 11,987,409,367, Rp 16,277,164,066 and Rp 3,302,947,981, respectively.

PT BPR Universal

As of 1 October 2025, BPR Universal and the Company entered into a credit facility agreement No. 368/U-BTR/X/2025, which consists of the following:

a. Revolving Loan Facility – Regular 1 based on Credit Agreement Deed No. 27 dated 10 October 2025 with a credit limit of Rp 10,000,000,000, intended for the Company's working capital, bearing interest at 14.5% per annum and with a tenor of 12 months commencing from the date the agreement was signed. The collateral for this facility is as follow:
   - *Freehold Land Title Certificate with NIB No. 09.03.0000337939.0/Kembangan Selatan, under the name of Arief Ramon.*
   - *Freehold Land Title Certificate with NIB No. 09.03.000037906.0/Kembangan Selatan, under the name of Arief Ramon.*
   - *Building Use Right Certificate No.6571/Pegadungan, under the name of Arief Ramon.*
   - *Building Use Right Certificate No. 6548/Pegadungan, under the name of Arief Ramon.*

b. Revolving Loan Facility – Regular 2 based on Credit Agreement No. 011/BTR/UKD/X/2025 dated 10 October 2025 with a credit limit of Rp 5,000,000,000, intended as a standby loan for the Company's coal mining services, bearing interest at 7% per annum and with a tenor of 12 months commencing from the date the agreement was signed.

The collateral for this facility is a time deposit at PT BPR Universal amounting to Rp 5,000,000,000 under the name of Arief Ramon, including any extensions, additions, and/or amendments to such time deposit.

As long as the credit remains outstanding, the Company is not permitted to:
a. To change the composition of the Company's management and its Articles of Association.
b. To change the composition of the Company's shareholders.

PT BPR Universal has approved the Company's application letter regarding the revocation of the bank's requirements related to changes in the composition of the Company's management and Articles of Association, based on Letter No. 195/AAP-BPRU/EXT/IV/26.

15. **UTANG BANK JANGKA PENDEK** (Lanjutan) *15. **SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

PT BPR Universal (Lanjutan) ***PT BPR Universal** (Continued)*

Pada tahun 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan menerima pinjaman sebesar nihil dan Rp 15.000.000.000 dan melakukan pembayaran di 30 Juni 2026 dan 31 December 2025 sebesar nihil dan Rp 155.200.605.

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, the Company received loan drawdowns amounting to nil and Rp 15,000,000,000 and made a repayment of nil and Rp 155,200,605 as of 30 June 2026 and 31 December 2025.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 14.844.799.999, Rp 14.844.799.395, nihil dan nihil.

The loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, and 2024 amounted to Rp 14,844,799,999, Rp 14,844,799,395, nil and nil, respectively.

PT BPR Bangun Solusi Bersama ***PT BPR Bangun Solusi Bersama***

Pada tanggal 27 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT BPR Bangun Solusi Bersama di dalam Akta No. 11, yang dibuat dihadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Perusahaan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Baru, dengan limit kredit sebesar Rp 1.500.000.000 dan jangka waktu 12 bulan terhitung dari tanggal 27 Juni 2024 sampai 27 Juni 2025.

On 27 June 2024, the Company entered into a credit agreement with PT BPR Bangun Solusi Bersama based on Deed No. 11, of Notary Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn.in Bekasi. The Company obtained a New Working Capital Credit facility with a credit limit of Rp 1,500,000,000 and a term of 12 months commencing from 27 June 2024 to 27 June 2025.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 24 Juni 2026 berdasarkan Akta No. 7, berupa perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan tanggal 24 Juni 2028.

The agreement has been amended several times, most recently on 24 June 2026, based on Deed No. 7, which extended the credit facility until 24 June 2028.

Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pinjaman tersebut disajikan sebagai utang bank jangka panjang. Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil, Rp 1.500.000.000, Rp 1.500.000.000 dan nihil.

As of 30 June 2026, the outstanding balance was presented as long-term bank loans. The loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to nil, Rp 1,500,000,000, Rp 1,500,000,000 and nil, respectively.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** *16. **BANK LOANS - LONG-TERM***

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	**31 Desember 2025/ *31 December 2025***	**31 Desember 2024/ *31 December 2024***	**31 Desember 2023/ *31 December 2023***	
Rupiah					***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	151.202.885.274	162.023.527.025	223.519.879.781	57.010.757.798	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.938.333.333	-	8.935.500.000	14.296.800.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	44.485.000.000	40.530.000.000	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPR Arta Kedaton	7.170.918.685	9.681.843.977	14.999.000.000	7.256.943.846	*PT BPR Arta Kedaton*
PT BPR Intidana	4.157.149.601	6.532.158.269	9.949.543.190	4.393.892.267	*PT BPR Intidana*
PT BPR Bangun Solusi Bersama	1.500.000.000	-	-	-	*PT BPR Bangun Solusi Bersama*
PT Bank Jasa Jakarta	-	-	6.607.317.695	17.638.890.022	*PT Bank Jasa Jakarta*
Sub-total	263.454.286.893	218.767.529.271	264.011.240.666	100.597.283.933	***Sub-total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(93.700.590.254)	(212.706.747.169)	(91.709.154.144)	(59.967.184.556)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	169.753.696.639	6.060.782.102	172.302.086.522	40.630.099.377	***Long-term portion***

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian pinjaman bank jangka panjang yang dilakukan oleh Perusahaan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 10 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. SME.AJPM/0339/P3/2022.

Fasilitas atas Perjanjian Kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Investasi, dengan limit kredit sebesar Rp 49.000.000.000 yang bersifat *Non-Revolving* dengan jangka waktu fasilitas selama 42 bulan terhitung dari tanggal 10 November 2022. Jangka waktu angsuran 36 bulan terhitung dari tanggal sejak penarikan kredit.
b. Fasilitas Kredit Mandiri SME Card dengan limit kredit sebesar Rp 500.000.000 yang bersifat *unadvised* dan *uncommitted* dengan jangka waktu berlaku sesuai dengan periode yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja sama.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah sebagai berikut:

a. Objek investasi akan diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar total Rp 70.375.691.200 atas nama Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
   i. 4 unit ADT Volvo A40G dengan nominal Rp 29.557.243.200.
   ii. 8 unit DT Hino FM 280 JD dengan nominal Rp 10.212.448.000.
   iii. Rigid Terex TR50D dengan nominal Rp 30.636.000.000.
b. *Personal Guarantee* dan *Cashflow Deficit Guarantee* atas nama Billy Theristine Lim dan atas nama Arief Ramon yang akan dilakukan pembaharuan secara notarial.

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Selama kredit belum lunas, Perusahaan diwajibkan untuk antara lain:
a. Menjaga CASA minimal sebesar 5% dari total limit kredit dan menjaga ketersediaan saldo blokir sebesar minimal 2 (dua) kali kewajiban angsuran.
b. Menyerahkan laporan kondisi obyek Kredit Investasi setiap triwulan yang meliputi laporan penggunaan dan kondisi kelayakan operasional yang dirinci per bulan dan diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 30 hari sejak periode laporan.
c. Melakukan perubahan status hukum atau Anggaran Dasar (AD) Perusahaan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank Mandiri, kecuali dalam hal peningkatan modal cukup dilaporkan kepada Bank Mandiri.

*16. **BANK LOANS - LONG-TERM** (Continued)*

The following are long-term bank loan agreements entered into by the Company:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On 10 November 2022, the Company signed a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on credit agreement No. SME.AJPM/0339/P3/2022.

The facilities under this Credit Agreement are as follows:

a. Investment Credit Facility, with a credit limit of Rp 49,000,000,000 on a non-revolving basis with a facility period of 42 months starting from 10 November 2022. The installment period is 36 months from the date of credit withdrawal.
b. Mandiri SME Card Credit Facility with a credit limit of Rp 500,000,000, which is unadvised and uncommitted, with a validity period in accordance with the period specified in the Cooperation Agreement.

The collateral/guarantees for Investment Loans are as follows:

a. The investment object will be bound by a fiduciary agreement with a total value of Rp 70,375,691,200 by the Company with the following details:
   i. 4 units of Volvo A40G ADT with a nominal value of Rp 29,557,243,200.
   ii. 8 units of DT Hino FM 280 JD with a total value of Rp 10,212,448,000.
   iii. Rigid Terex TR50D with a total value of Rp 30,636,000,000.
b. Personal Guarantee and Cashflow Deficit Guarantee in the names of Billy Theristine Lim and Arief Ramon, which will be renewed through a notarial deed.

The limitations in granting this credit facility are as follows:

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to, among other things, to:
a. Maintain a minimum CASA balance of 5% of the total credit limit and maintain a blocked balance equivalent to at least two (2) times the installment obligation.
b. Submit a quarterly report on the condition of the Investment Credit object, including a detailed monthly report on usage and operational feasibility, to be received by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk within 30 days after the end of each reporting period.
c. Make changes to the Company's legal status or Articles of Association (AoA), including changes in shareholders, Directors and/or Commissioners, nominal share value, mergers, acquisitions, or disposal of assets, without prior approval from Bank Mandiri, except for capital increases which shall be sufficiently notified to Bank Mandiri.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:
a. Mengambil bagian dividen.
b. Mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi termasuk dalam bentuk piutang kepada pemegang saham.
c. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman lain dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
d. Melunasi atau menurunkan hutang kepada pemegang saham atau pihak berelasi.
e. Menambah atau memberikan piutang kepada pemegang saham atau pihak berelasi.
f. Memindahkan aset yang dibiayai berdasarkan fasilitas kredit di lokasi tambang PT Budi Gema Gempita ke lokasi lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri.

Perjanjian kredit No. SME.AJPM/0339/P3/2022 telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 23 Januari 2026, sehingga ketentuan pembatasan yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 40 atas Kredit Investasi dengan limit Rp 14.749.798.333 dan Akta No. 41 atas Kredit Investasi dengan limit Rp 203.000.000.000 dengan tujuan untuk pembelian alat berat, yang berlaku sampai dengan 29 April 2026 dengan bunga sebesar 9,5% per tahun.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah sebagai berikut:
a. Mesin-mesin (alat berat) milik Debitur yang terdiri atas *Main Equipment, Road Maintenance Equipment,* dan *Support Equipment*, khusus untuk akta No. 40;
b. Mesin-mesin (alat berat) milik Debitur yang terdiri atas Off Highway Truck CAT 773, Motor Grader CAT 160K, Dump Truck HINO FM280JD, dan Excavator PC200-10MO. Aset tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai objek sebesar Rp 253.968.350.000 berdasarkan nilai pembelian, khusus untuk akta No. 40;
c. Alat berat yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 284.148.350.000, khusus untuk Akta No.41;
d. *Personal Guarantee* atas nama nyonya Billy Theristine Lim, tuan Tony Law, dan nyonya Willy Christine;
e. *Personal Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Arkara Prathama Energi; dan
f. Gadai saham dari PT Satrio Energy Persada dan PT Arkara Prathama Energi.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk memelihara rasio laporan keuangan yang tercermin sejak posisi tanggal 31 Desember 2025 dengan parameter sebagai berikut:

a. *Debt Security Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar atau sama dengan 1,25.
b. Total EBITDA lebih kecil atau sama dengan 2,00.
c. *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 2,00.
d. *Net Cash Flow* operasional positif.

16. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (Continued)*

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to:
a. Declare or distribute dividends.
b. Withdraw paid-up capital for purposes outside the Company's business activities or for personal interests, including in the form of receivables to shareholders.
c. Obtain other credit/loan facilities from third parties, except in the ordinary course of business.
d. Repay or reduce debts owed to shareholders or related parties.
e. Increase or grant receivables to shareholders or related parties.
f. Moving assets financed under a credit facility from the PT Budi Gema Gempita mining site to another location without prior approval from Bank Mandiri.

The credit agreement No. SME.AJPM/0339/P3/2022 was fully repaid by the Company on 23 January 2026, and the restrictive covenants stipulated in the credit agreement are no longer applicable.

On 11 October 2024, the Company entered into a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pursuant to Deed No. 40 for an Investment Loan with a limit of Rp 14,749,798,333 and Deed No. 41 for an Investment Loan with a limit of Rp 203,000,000,000 for the purpose of purchasing heavy equipment, valid through 29 April 2026, at an interest rate of 9.5% per year.

Collateral/security for the provision of the Investment Credit loan is as follows:
a. Machinery (heavy equipment), consisting of Main Equipment, Road Maintenance Equipment and Support Equipment, for Deed No. 40;
b. The Debtor's machinery (heavy equipment) consists of an Off Highway Truck CAT 773, Motor Grader CAT 160K, Dump Truck HINO FM280JD, and Excavator PC200-10MO. The assets will be secured by a fiduciary security interest with an object value of Rp 253,968,350,000 based on the purchase price, for Deed No. 40;
c. Heavy equipment to be pledged under fiduciary security amounting to Rp 284,148,350,000, for Deed No. 41;
d. Personal Guarantee in the name of Mrs. Billy Theristine Lim, Mr. Tony Law and Mrs. Willy Christine;
e. Personal Guarantee and Cash Deficit Guarantee from PT Arkara Prathama Energi; and
f. Pledge of shares by PT Satrio Energy Persada and PT Arkara Prathama Energi.

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to maintain the financial statement ratios as reflected as of 31 December 2025, with the following parameters:
a. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) greater than or equal to 1.25.
b. Total EBITDA less than or equal to 2.00.
c. Debt to Equity Ratio less than or equal to 2.00.
d. Positive operating Net Cash Flow.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Mengadakan *merger*, akuisisi atau mengubah permodalan, perubahan pengurus pemegang saham pengendali serta komposisi kepemilikan saham.
b. Melakukan perubahan pemegang saham.
c. Memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali untuk transaksi yang wajar.
d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari pihak kreditur lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative, kecuali fasilitas kredit dari anak usaha Bank selama memenuhi *financial covenant*.
e. Melunasi hutang kepada pihak terkait, afiliasi, atau pemegang saham.
f. Membagikan dividen.

Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Akta No. 40 telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 23 April 2026. Pada 30 Juni 2026 tidak terdapat saldo terutang atas fasilitas berdasarkan Akta No. 40, sedangkan fasilitas berdasarkan Akta No. 41 masih terutang sebesar Rp 151.202.885.274

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus Perusahaan, Penawaran Umum Perusahaan, pembagian dividen dan pembatasan keuangan berdasarkan surat No. CMB.CM6/MNE.125/SPPK/2026 tanggal 10 April 2026.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait *Waiver Covenant* mengenai perolehan fasilitas kredit baru PT Bank Perkreditan Rakyat Universal, perolehan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia, pengikatan diri sebagai Corporate Guarantor serta persetujuan pelaksanaan negative covenant pelunasan utang pemegang saham berdasarkan surat No. CMB.CM6/MNE.1701/SPPK/2026 tanggal 29 April 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 201.123.023.690, dan Rp 21.182.216.160 dan melakukan pembayaran masing masing Rp 10.820.641.798, Rp 61.496.352.762, Rp 34.613.901.710 dan Rp 29.570.325.263.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 151.202.885.274, Rp 162.023.527.025, Rp 223.519.879.781 dan Rp 57.010.757.798.

PT BPR Arta Kedaton Makmur

Pada tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT BPR Arta Kedaton Makmur di dalam Akta No. 26, yang dibuat dihadapan Intan Avita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung atas Fasilitas Kredit sejumlah Rp 15.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak 24 Juli 2024 dengan *grace period* 6 bulan.

*16. **BANK LOANS LONG-TERM** (Continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (Continued)*

As long as the credit remains outstanding, the Company is not permitted to:

a. Enter into a merger, acquisition, or change in its capital structure, change the management of the controlling shareholders, or change the composition of share ownership.
b. Make changes to the shareholders.
c. Transfer the collateral other than receivables and inventories, act as a guarantor for any debt, or pledge the Debtor's assets to other parties, except for ordinary-course transactions.
d. Obtain credit facilities or new loans from other creditors that increase risk, including but not limited to derivative transactions, except for credit facilities from the Bank's subsidiaries, provided that the financial covenants are complied with.
e. Repay any debts owed to related parties, affiliates, or shareholders.
f. Distribute dividends.

The Investment Credit Facility under Deed No. 40 was fully repaid by the Company on 23 April 2026. As of 30 June 2026, there was no outstanding balance under the facility based on Deed No. 40, while the facility based on Deed No. 41 remained outstanding at Rp 151,202,885,274.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has approved the Company's request letter regarding the revocation of bank provisions on changes to the Company's management structure, the Company's public offering, dividend distribution, and financial restrictions, based on letter No. CMB.CM6/MNE.125/SPPK/2026 dated 10 April 2026.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has approved the Company's application letter regarding the Waiver Covenant in relation to the obtaining of new credit facilities from PT Bank Perkreditan Rakyat Universal and PT Bank Rakyat Indonesia, the Company's undertaking as a Corporate Guarantor, as well as the approval for the implementation of the negative covenant concerning the repayment of shareholder loans, based on Letter No. CMB.CM6/MNE.1701/SPPK/2026 dated 29 April 2026.

As of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024, and 2023, the Company received loan proceeds amounting to nil, nil, Rp 201,123,023,690 and Rp 21,182,216,160, respectively, and made repayments of Rp 10,820,641,798, Rp 61,496,352,762, Rp 34,613,901,710 and Rp 29,570,325,263, respectively.

The loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 151,202,885,274, Rp 162,023,527,025, Rp 223,519,879,781 and Rp 57,010,757,798, respectively.

PT BPR Arta Kedaton Makmur

On 24 June 2024, the Company signed a credit agreement with PT BPR Arta Kedaton Makmur under Deed No. 26, executed before Intan Avita Sari, S.H., M.Kn., Notary in Bandar Lampung, for a credit facility in the amount of Rp 15,000,000,000 with a term of 36 months, starting from 24 July 2024, with a 6-month grace period.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT BPR Arta Kedaton Makmur (Lanjutan)

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
a. 6 unit Volvo Articulated 40T Load Capacity.
b. 1 unit Komatsu Motor Grader GD705A-4.
c. 1 unit Komatsu Motor Grader GD535-5.
d. 1 unit Doosan-Hydraulic Excavator DX225LCA.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:
a. Menerima kredit dari bank lain.
b. Mengingatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
c. Memindahtangankan barang jaminan.
d. Meminjamkan atau menyewakan barang jaminan.

Berdasarkan surat No. 224/AAP-BAK/EXT/IV/26 tanggal 30 April 2026 PT BPR Arta Kedaton Makmur telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait perubahan redaksi ketentuan perjanjian kredit yang memperkenankan menerima fasilitas kredit dari bank lain dan mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dengan persetujuan tertulis dari pihak PT BPR Arta Kedaton Makmur.

Pada tahun 2026, 2025, 2024, dan 2023, Perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 26.235.000.000, dan nihil serta melakukan pembayaran masing-masing Rp 2.982.301.460, Rp 8.891.541.549, Rp 1.284.656.810 dan nihil.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.170.918.685, Rp 9.681.843.977, Rp 14.999.000.000 dan Rp 7.256.943.846.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 17 Maret 2026, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjiian Fasilitas Kredit No.184. Perusahaan mendapatkan fasilitas atas Perjanjiian Kredit ini adalah Kredit Investasi (*Refinancing*) dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal 17 Maret 2026 dengan bunga sebesar 9% per tahun yang bertujuan untuk membiayai kembali 3 unit alat berat dengan total project cost sebesar Rp 12.954.913.889.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah objek investasi yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 12.954.913.889.

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Komposisi Aktiva Lancar (tidak termasuk piutang karyawan dan piutang afiliasi ke grup usaha) dikurangi komposisi Hutang Lancar (tidak termasuk hutang jangka panjang bank yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun) harus positif.

*16. **BANK LOANS LONG-TERM** (Continued)*

***PT BPR Arta Kedaton Makmur** (Continued)*

The collateral/guarantees for the credit facility agreement are as follows:
a. 6 units of Volvo Articulated 40T Load Capacity.
b. 1 unit of Komatsu Motor Grader GD705A-4.
c. 1 unit of Komatsu Motor Grader GD535-5.
d. 1 unit of Doosan Hydraulic Excavator DX225LCA.

As long as the credit remains outstanding, the Company is not permitted to:
a. Obtaining credit from other banks.
b. Acting as a guarantor for any third party.
c. Transferring the collateral assets.
d. Lending or leasing the collateral assets to other parties.

Based on letter No. 224/AAP-BAK/EXT/IV/26 dated 30 April 2026 PT BPR Arta Kedaton Makmur has approved the Company's request to amend the wording of the credit agreement provisions to permit the Company to obtain credit facilities from other banks and to enter into agreements with third parties subject to prior written approval from PT BPR Arta Kedaton Makmur.

In 2026, 2025, 2024, and 2023, the Company received loan proceeds amounting to nil, nil, Rp 26,235,000,000, and nil, respectively, and made repayments of Rp 2,982,301,460, Rp 8,891,541,549, Rp 1,284,656,810 and nil respectively.

The outstanding loan balance as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp 7,170,918,685, Rp 9,681,843,977 and Rp 14,999,000,000 and Rp 7,256,943,846, *respectively.*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On 17 March 2026, the Company executed a Credit Facility Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk under Credit Facility Agreement Deed No. 184. The Company obtained an Investment Credit (Refinancing) facility with a credit limit of Rp 10,000,000,000 and a term of 36 months commencing from 17 March 2026 bearing an interest rate of 9% per annum intended to refinance three units of heavy equipment with a total project cost of Rp 12,954,913,889.

The collateral for the Investment Credit facility consists of the financed investment assets, which are secured by a fiduciary transfer of ownership with a collateral value of Rp 12,954,913,889.

The covenants under this credit facility are as follows:

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Net current assets (excluding employee receivables and receivables from affiliated parties within the group), calculated as current assets less current liabilities (excluding the current portion of long-term bank loans), must remain positive.*

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut: (Lanjutan)

- EBITDA dan Laba Bersih tahun berjalan harus positif.
- *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal sebesar 200%.
- Komposisi total kewajiban terhadap ekuitas maksimal 400%.
- DSCR (EBITA / Kewajiban Angsuran Pokok dan Bunga) minimal sebesar 1,1x.
- Menjaga komposisi rasio aset berupa alat berap yang dibiayai terhadap pinjaman bank BRI sebesar 125%.
- Menjaga *coverage* modal kerja selalu terjaga minimal 143%.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

a. Melakukan penjualan asset perusahaan senilai lebih dari 50% total assetnya.
b. Melunasi hutang kepada pemegang saham atau menurunkan hutang pemegang saham/hutang afiliasi/hutang pada persero serta memberikan piutang kepada pemegang saham/piutang afiliasi/hutang pada persero serta memberikan piutang kepada pemegang saham/piutang afiliasi/piutang pada persero tanpa seizin dari Bank BRI.
c. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
d. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain.
e. Melakukan perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan yang dapat mengganggu cashflow usaha debitur dalam jangka waktu 1 tahun.
f. Mengikat Gadai Notariil dan pengikatan selanjutnya atas agunan kredit Bank BRI kepada pihak/kreditur lain.
g. Menyewakan aset yang diagunkan di Bank BRI, apabila telah timbul perjanjian sewa menyewa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit oleh pihak Debitur dan pihak Bank, Debitur wajib melakukan addendum perjanjian sewa menyewa tersebut dengan pihak penyewa dan menambahkan klausula sewa – menyewa.

Pada tanggal 5 November 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. R.1645-RO-JKT/COD/11/2025 atas Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*) dengan limit kredit sebesar Rp 41.400.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan terhitung dari tanggal 5 November 2025 yang bertujuan untuk membiayai kembali 11 unit alat berat dengan total *project cost* sebesar Rp 41.400.000.000.

Agunan/jaminan dalam pemberian pinjaman Kredit Investasi adalah objek investasi yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 54.078.129.167.

*16. **BANK LOANS LONG-TERM** (Continued)*

***PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** (Continued)*

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to maintain the following financial ratios: (Continued)

- *EBITDA and net profit for the current year must remain positive.*
- *The Interest Coverage Ratio (ICR) must be maintained at a minimum of 200%.*
- *The total liabilities-to-equity ratio must not exceed 400%.*
- *The Debt Service Coverage Ratio (DSCR), calculated as EBITA divided by principal and interest repayment obligations, must be maintained at a minimum of 1.1x.*
- *The ratio of heavy equipment financed by Bank BRI to the outstanding Bank BRI loan must be maintained at a minimum of 125%.*
- *The working capital coverage ratio must be maintained at a minimum of 143%.*

As long as the loan remains outstanding, the Company is prohibited from:

a. Disposing of assets representing more than 50% of its total assets.
b. Repay or reduce shareholder loans, affiliated party loans, or intercompany loans, or extend loans or advances to shareholders, affiliated parties, or other companies within the group, without the prior written consent of Bank BRI.
c. Act as a guarantor for any third party and/or pledge the Company's assets as security for the obligations of any third party.
d. Make investments, capital contributions, or provide long-term loans to any third party.
e. Undertake business expansion or dispose of the Company's assets in a manner that could adversely affect the Debtor's cash flows within one year.
f. Create a notarial pledge or establish any subsequent security interest over collateral pledged to Bank BRI in favor of any other party or creditor.
g. Lease out assets pledged as collateral to Bank BRI. If a lease agreement already exists prior to the execution of the Credit Agreement between the Debtor and Bank BRI, the Debtor shall execute an amendment to such lease agreement with the lessee to incorporate the required leasing provisions.

On 5 November 2025, the Company signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Credit Agreement No. R.1645-RO-JKT/COD/11/2025 for an Investment Loan (Refinancing) Facility with a credit limit of Rp 41,400,000,000 and a term of 48 months starting from 5 November 2025, intended to refinance 11 units of heavy equipment with a total project cost of Rp 41,400,000,000.

The collateral/security provided for the Investment Credit facility consists of the financed investment objects, secured by way of fiduciary transfer with a secured amount of Rp 54,078,129,167.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pembatasan dalam pemberian fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Net Working Capital* selalu positif.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 300%.
- *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 150%.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1x.
- Menjaga komposisi rasio aset berupa alat berat yang dibiayai terhadap pinjaman sebesar 125%.
- CASA Rasio minimal ≥ 15% dan harus terpenuhi minimal 6 bulan sejak tanggal realisasi. Jika rasio CASA yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka akan dikenakan suku bunga counter yang berlaku.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

a. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan *go public*.
b. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
c. Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
d. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang arus kas tidak terganggu serta NWC Positif.
e. Memberikan piutang kepada pemegang saham, kecuali yang sudah ada saat ini.
f. Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
g. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
h. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
i. Menerima pinjaman baru dari bank lain atau Lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
j. Melakukan perikatan dengan pihak lain yang berhubungan dengan proyek yang dibiayai dan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain.
k. Melakukan penjualan aset yang diagunkan nasabah.
l. Mengikat hak tanggungan dan pengikatan selanjutnya atas agunan kredit BRI kepada pihak/kreditur lain.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait pencabutan pembatasan perbankan atas merger dan akuisisi, penjualan aset dan penawaran umum Perusahaan, perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan permodalan, pembagian dividen, serta ketentuan Interest Coverage Ratio (ICR) minimum 150%.

*16. **BANK LOANS LONG-TERM** (Continued)*

***PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** (Continued)*

The covenants under this credit facility are as follows:

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Net Working Capital shall at all times be positive.*
- *Debt to Equity Ratio shall not exceed 300%.*
- *Interest Coverage Ratio shall be at least 150%.*
- *Debt Service Coverage Ratio shall be at least 1.1x.*
- *The ratio of financed heavy equipment assets to the outstanding loan amount shall be maintained at a minimum of 125%.*
- *The CASA ratio shall be maintained at a minimum of ≥15% and must be fulfilled for at least 6 months from the date of disbursement. If the stipulated CASA ratio is not met, the applicable counter interest rate shall be imposed.*

As long as the loan remains outstanding, the Company is not permitted to:

a. Conducting mergers, acquisitions, disposal of company assets, or going public.
b. Acting as a guarantor for any third party or pledging the Company's assets as security to any other party, except for those already existing.
c. Amending the articles of association or changing the composition of the management, shareholders, or capital structure.
d. Making equity investments, except those already existing and provided that cash flow remains unaffected and Net Working Capital remains positive.
e. Granting loans/receivables to shareholders, except those already existing.
f. Repaying or settling debts to shareholders or affiliated parties prior to the full settlement of the loan with BRI.
g. Declaring or distributing dividends to shareholders, unless such dividends are reinvested as additional paid-in capital of the Company.
h. Entering into transactions with any person or entity, including but not limited to affiliated companies, in a manner inconsistent with reasonable and customary business practices, including purchasing at above-market prices or selling below-market prices.
i. Obtaining new loans from other banks or financial institutions, except for normal trade transactions.
j. Entering into agreements with other parties relating to the financed project and assets pledged to BRI.
k. Selling assets pledged as collateral by the Company.
l. Creating any mortgage (hak tanggungan) or any subsequent encumbrance over the collateral securing the BRI credit facility in favor of any other party/creditor.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has approved the Company's request regarding the removal of banking restrictions on the Company's mergers and acquisitions, asset sales and the Company's initial public offering; changes in the composition of management, shareholders, and capital structure; dividend distributions; and the requirement for a minimum Interest Coverage Ratio (ICR) of 150%.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan surat No. R.525-RO.08-JKT/COD/02/2026 tanggal 16 Maret 2026, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Adendum I Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi *Refinancing* No. 183 pada tanggal 17 Maret 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai Penawaran Umum Perusahaan, perubahan susunan pengurus Perusahaan, pembagian dividen, *Interest Coverage Ratio* minimal 150% berdasarkan surat No. 130/AAP-BRI/EXT/II/26 tanggal 24 Februari 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah menyetujui permohonan pencabutan beberapa kovenan pembatas *(negative covenants)* pada Perjanjian Kredit 1 dan 2 dalam rangka menyelaraskan ketentuan kredit dengan rencana IPO Perusahaan berdasarkan surat No. 212/AAP-BRI/EXT/IV/26 tanggal 17 April 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,1x berdasarkan surat No. 270/AAP-BRI/EXT/V/26 tanggal 29 Mei 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui permohonan Perusahaan terkait pembebasan dan/atau pernyataan tidak ada keberatan atas potensi ketidakterpenuhan rasio keuangan Perusahaan, serta menyetujui agar evaluasi terhadap pemenuhan rasio keuangan dilakukan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2026 berdasarkan surat No. 308/AAP-BRI/EXT/VII/26 tanggal 29 Juni 2026.

Pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan menerima pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 41.400.000.000 serta melakukan pembayaran sebesar Rp 6.045.000.000 and Rp 870.000.000.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 December 2025, sebesar Rp 44.485.000.000 dan Rp 40.530.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 13 Mei 2026, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Notaris Dr. M. Kholid Artha, S.H., M.Kn No. 62 atas perjanjian kredit investasi *refinancing* dengan limit Rp 55.400.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan terhitung sejak 12 Mei 2026 dengan bunga sebesar 9% per tahun yang bertujuan untuk membiayai kembali pembelian Gedung kantor di Jl. Plaju No. 11 Jakarta Pusat.

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor di Jl. Plaju No. 11 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 1039 (sedang proses balik nama).

b. *Company Guarantee* PT XAX Lintas Nusantara.

16. ***BANK LOANS LONG-TERM*** *(Continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *(Continued)*

Based on Letter No. R.525-RO.08-JKT/COD/02/2026 dated 16 March 2026, which was subsequently incorporated into Addendum I to the Refinancing Investment Credit Facility Agreement No. 183 on 17 March 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has approved the Company's request letter regarding the waiver of certain bank provisions, including those related to the Company's public offering, changes in the composition of the Company's management, dividend distribution, and a minimum Interest Coverage Ratio of 150%, based on letter No. 130/AAP-BRI/EXT/II/26 dated 24 February 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) approved the Company's request to remove certain restrictive covenants (negative covenants) under Credit Agreements 1 and 2 in order to align the credit terms with the Company's IPO plan based on Letter No. 212/AAP-BRI/EXT/IV/26 dated 17 April 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has approved the Company's request letter regarding the waiver of certain bank provisions, including those related to the minimum Debt Service Coverage Ratio of 1.1x, based on letter No. 270/AAP-BRI/EXT/V/26 dated 29 May 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has approved the Company's request letter regarding the grant of a waiver and/or no-objection statement for potential non-compliance with the Company's financial ratios, and agreed that the evaluation of financial ratio compliance be conducted based on the financial statements as of 31 December 2026, based on letter No. 308/AAP-BRI/EXT/VII/26 dated 29 June 2026.

As of 30 Juni 2026 and 31 December 2025, the Company obtained a loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 10,000,000,000 and Rp 41,400,000,000, respectively and made repayment amounting Rp 6,045,000,000 and Rp 870,000,000.

The outstanding loan balance as of 30 June 2026 and 31 December 2025, amounted to Rp 44,485,000,000 and Rp 40,530,000,000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On 13 May 2026, the Company entered into a credit facility agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk under Notarial Deed Dr. M. Kholid Artha, S.H., M.Kn No. 62 for a refinancing investment loan with a limit of Rp 55,400,000,000 and a term of 120 months starting 12 May 2026, bearing an interest rate of 9% per annum, intended to refinance the purchase of the office building at Jl. Plaju No. 11, Central Jakarta.

The collateral provided under the credit facility agreement consists of the following:

a. Land and office building located at Jl. Plaju No. 11, Kebon Melati Subdistrict, Tanah Abang District, Central Jakarta, evidenced by Land Use Rights Certificate (SHGB) No. 1039 (currently undergoing the title transfer process).
b. Corporate Guarantee issued by PT XAX Lintas Nusantara.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

a. Mempertahankan *Current Ratio* minimal 1,0x, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.

b. Mempertahankan *Debt to Equity Ratio* maksimum 2,20x, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.

c. Mempertahankan *Debt Service Coverage* minimal 100%, wajib dipenuhi pada laporan keuangan 31 Desember 2026.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

a. Memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, dan/atau memberikan hak atas agunan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain atau menjadikannya di bawah penguasaan pihak lain.
b. Menggadaikan atau dengan cara lain membebankan agunan dalam bentuk apa pun, termasuk saham perusahaan, kepada pihak mana pun.
c. Menjual, menyewakan, atau menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada BNI kepada pihak lain.
d. Memindahtangankan usaha/barang yang dibiayai oleh fasilitas kredit kepada pihak lain.
e. Memperoleh kredit dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali apabila pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
f. Mengubah Anggaran Dasar (kecuali peningkatan modal perusahaan), termasuk memindahtangankan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
g. Melakukan akuisisi atau pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
h. Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan saham perusahaan lain.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit No. PLM/2/453/R atas kredit investasi dengan limit Rp 26.500.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak 29 Agustus 2023.

Agunan/jaminan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. 1 unit mobil Dump Truck Hino FM 260 JD tahun 2019 senilai Rp 785.000.000.
b. 6 unit mobil Dump Trcuk Hino Profia 700 ZS 4141 tahun 2018 senilai Rp 6.317.00.000.
c. Kendaraan dan atau alat berat dengan total nilai RAB Rp 38.295.000.000.
d. Persediaan senilai Rp 7.527.244.636.

16. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** (Continued)*

As long as the loan remains outstanding, the Company is required to maintain the following financial ratios:

a. Maintain a minimum Current Ratio of 1.0x, a requirement that must be met in the financial statements as of 31 December 2026.
b. Maintain a maximum Debt-to-Equity Ratio (DER) of 2.20x, requirement that must be met in the financial statements as of 31 December 2026.
c. Maintain a minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 100%, requirement that must be met in the financial statements as of 31 December 2026.

As long as *the loan remains outstanding, the Company is prohibited from the following actions:*

a. Transferring, leasing, lending, and/or granting any rights over the collateral, in whole or in part, to any third party, or placing the collateral under the control of any third party.
b. Pledging or otherwise encumbering the collateral in any form, including the Company's shares, in favor of any party.
c. Selling, leasing, or pledging any assets that have been pledged as collateral to BNI to any third party.
d. Transferring the business or assets financed under the credit facility to any third party.
e. Obtaining additional credit facilities and/or borrowings from financial institutions or other third parties (including the issuance of bonds), except for borrowings incurred in the ordinary course of trade directly related to the Company's business.
f. Amending the Company's Articles of Association (except for capital increases), including transferring shares that would result in a change of the ultimate controlling shareholder.
g. Acquiring or taking over assets owned by any third party.
h. Making investments, capital contributions, or acquiring shares in other companies.

On 30 June 2026, the Company has fulfilled all the loan requirements mentioned above as stated in the related credit agreement.

On 29 August 2023, the Company signed a credit facility agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk under Credit Agreement No. PLM/2/453/R for an investment loan with a limit of Rp 26,500,000,000 and a term of 48 months effective 29 August 2023.

The collateral/guarantees for this credit facility are as follows:

a. One (1) unit of Hino FM 260 JD Dump Truck, year 2019, valued at Rp 785,000,000.
b. Six (6) units of Hino Profia 700 ZS 4141 Dump Trucks, year 2018, valued at Rp 6,317,000,000.
c. Vehicles and/or heavy equipment with a total estimated cost (RAB) of Rp 38,295,000,000.
d. Inventories valued at Rp 7,527,244,636.

16. **UTANG BANK JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

a. Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
b. Mengubah susunan Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
c. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
d. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
e. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
f. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
g. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
h. Menarik kembali modal yang sudah disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing masing sebesar Rp 55.400.000.000, nihil, nihil dan Rp 16.083.900.000 dan melakukan pembayaran masing masing Rp 461.666.667, Rp 8.936.000.000, Rp 5.361.300.000 dan Rp 1.787.100.000. Pada 31 Desember 2025 Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 54.938.333.333 nihil, Rp 8.935.500.000 dan Rp 14.296.800.000.

PT Bank Inti Dana Sentosa (BPR Intidana)

Pada tanggal 29 Juli 2024 BPR Intidana dan Perusahaan melakukan perjanjian pemberian pinjaman uang kepada Perusahaan sebesar Rp 11.235.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja dengan bunga sebesar 8% pertahun, dengan jangka waktu 36 bulan sampai dengan tanggal 29 Juli 2027. Perusahaan menyerahkan kepada Bank barang jaminan berupa, 2 unit Hitachi Hydraulic Excavator dan 5 unit Landasan Mobil Barang Hino FM260JD.

PT BPR Inti Dana Sentosa telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait pencabutan ketentuan bank mengenai perubahan susunan pengurus anggaran dasar, perubahan kepemilikan, dan pembagian dividen berdasarkan surat No. 152/AAP-BPRI/EXT/III/2026 tanggal 1 Februari 2026.

Pada tahun 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 perusahaan menerima pinjaman masing-masing nihil, nihil, Rp 11.235.000.000, dan nihil dan melakukan pembayaran masing-masing Rp 1.903.632.500, Rp 3.418.184.921, Rp 1.284.656.810 dan nihil.

Nilai pinjaman tercatat pada tanggal 30 Juni 2026, 31 December 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.157.149.601, Rp 6.532.158.269, Rp 9.949.543.190 dan nihil.

*16. **BANK LOANS LONG-TERM** (Continued)*

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** (Continued)*

As long as the loan remains outstanding, the Company is prohibited from:

a. Carrying out mergers, acquisitions, reorganizations, or investments/equity participation in other companies.
b. Changing the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Company's shareholding structure.
c. Making investments, capital participation, or acquiring shares in other companies.
d. Repaying all or part of the Company's debts to shareholders and/or affiliated companies that have been subordinated to the BNI credit facility.
e. Granting loans to other parties, except in the ordinary course of business and/or reasonable commercial transactions as assessed by BNI.
f. Selling and/or leasing assets or collateral.
g. Conducting intercompany financing with affiliated companies, the parent company, and/or subsidiaries, except those related to the Company's operational activities.
h. Withdrawing paid-up capital.

In 30 Juni 2026 and 31 December 2025, 2024, and 2023, the Company received loan proceeds of Rp 55,400,000,000, nil, nil, and Rp 16,083,900,000, respectively, and made repayments of Rp 461,666,667, Rp 8,936,000,000, Rp 5,361,300,000 and Rp 1,787,100,000, respectively. As of 31 December 2025, the Company has fully repaid its loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The carrying amount of the loan as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024, and 2023 amounted to Rp 54,938,333,333, nil, Rp 8,935,500,000 and Rp 14,296,800,000, respectively.

PT Bank Inti Dana Sentosa (BPR Intidana)

On 29 July 2024, BPR Intidana and the Company entered into a loan agreement under which BPR Intidana provided the Company with a loan of Rp 11,235,000,000 to be used as working capital, bearing interest at 8% per annum, with a term of 36 months ending on July 29, 2027. The Company has provided the Bank with collateral in the form of 2 Hitachi hydraulic excavators and 5 Hino FM260JD flatbed trucks.

PT BPR Inti Dana Sentosa has approved the Company's request letter regarding the revocation of bank provisions concerning changes in the board of directors and articles of association, changes in ownership, and dividend distributions, as per letter No. 152/AAP-BPRI/EXT/III/2026 dated 1 February 2026.

As of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024, and 2023, the Company received loan proceeds of nil, nil, Rp 11,235,000,000, and nil, respectively, and made repayments of Rp 1,903,632,500, Rp 3,418,184,921, Rp 1,284,656,810, and nil, respectively.

The carrying amount of the loan as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024, and 2023 amounted to Rp 4,157,149,601, Rp 6,532,158,269, Rp 9,949,543,190 and nil, respectively.

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWAYAN / *17. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS*

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nirmala yang ditandatangani oleh aktuari Jayanthi Nirmala, FSAI, aktuaris independent dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The estimated liabilities for employee benefits in 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023 was calculated by Kantor Konsultan Aktuaria *(KKA) Nirmala, sign by Jayanthi Nirmala, FSAI an independent actuaries using the "Projected Unit Credit" method.*

a. **Beban Imbalan Kerja Karyawan** / *a. Employee Benefits Expenses*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Beban jasa kini	1.507.950.882	3.000.529.541	2.773.664.853	3.618.994.788	*Current service cost*
Biaya jasa lalu akibat perubahan program	(305.635.567)	(886.487.490)	(821.548.820)	2.495.350.123	*Past service cost impact from benefit changes*
Beban bunga	371.769.331	560.216.215	409.049.675	-	*Interest cost*
T o t a l (Catatan 21)	1.574.084.646	2.674.258.266	2.361.165.708	6.114.344.911	***T o t a l*** *(Note 21)*

(Keuntungan) kerugian aktuaria yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain disebabkan oleh perubahan faktor-faktor sebagai berikut:

Actuarial (gains) loss charged to other comprehensive income are due to changes in the following factors:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Perubahan asumsi keuangan	(690.674.419)	91.717.724	(282.088.928)	-	*Changes in financial assumption*

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Liabilities for employee benefits of the Company are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan	7.297.145.728	8.270.856.441	7.868.205.264	6.114.344.911	*Present value of liabilities for employee benefits*

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movements in the liabilities for employee benefits of the Company's employees are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Saldo awal tahun	8.270.856.441	7.868.205.264	6.114.344.911	-	*Balance at beginning of the year*
Biaya jasa kini	1.507.950.882	3.000.529.541	2.773.664.853	3.618.994.788	*Current cost service*
(Keuntungan) Kerugian aktuaria	(690.674.419)	91.717.724	(282.088.928)	-	*Acturial (gain) loss*
Pembayaran manfaat	(1.857.120.940)	(2.363.324.813)	(325.216.427)	-	*Benefits paid*
Biaya jasa masa lalu	(305.635.567)	(886.487.490)	(821.548.820)	2.495.350.123	*Past service cost*
Biaya bunga	371.769.331	560.216.215	409.049.675	-	*Interest cost*
Saldo akhir tahun	7.297.145.728	8.270.856.441	7.868.205.264	6.114.344.911	***Balance at end of the year***

17. **LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWAYAN** (Lanjutan) *17. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (Continued)*

b. **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan** *b. Liabilities for Employee Benefits*

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan metode "*Projected Unit Credit*" adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining the liabilities for employee benefits based on the "Projected Unit Credit" method are as follows:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Tingkat diskonto	7,28%	6,48%	7,12%	6,69%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV	*Defect rate*
Umur pensiun normal	55	55	55	55	*Normal retirement age*

Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang memungkinkan untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible changes of each significant assumption on the present value of the defined benefit obligation as of the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Tingkat diskonto:					*Discount rates:*
Kenaikan 1%	6.629.394.462	8.236.499.351	7.832.657.765	6.087.391.088	*Increase 1%*
Penurunan 1%	7.458.253.036	8.305.800.896	7.904.353.273	6.141.752.369	*Decrease 1%*
Tingkat kenaikan gaji per tahun:					*Annual salary increase:*
Kenaikan 1%	7.465.082.709	8.804.520.576	8.367.470.563	6.488.701.150	*Increase 1%*
Penurunan 1%	6.670.734.118	7.791.196.765	7.422.352.015	5.778.563.885	*Decrease 1%*

c. **Keuntungan aktuaria dalam penentuan manfaat program pensiun** *c. Actuarial gain on defined benefit pension plan*

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Saldo awal	(190.371.204)	(282.088.928)	-	-	*Beginning balances*
(Keuntungan) kerugian aktuaria	(690.674.419)	91.717.724	(282.088.928)	-	*Actuarial (gain) loss*
Akumulasi OCI pada akhir periode	(881.045.623)	(190.371.204)	(282.088.928)	-	*Accumulated OCI at the end of the period*

18. **MODAL SAHAM** *18. SHARE CAPITAL*

Berikut adalah susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***			
Pemegang saham/ ***Shareholders***	**Jumlah saham/** ***Total shares***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage of ownership***	**Nilai per lembar saham/** ***Value per share*** **(Rp)**	**Jumlah/** ***Total***
Billy Theristine Lim	1.500.000.000	30%	10	15.000.000.000
PT Bumi Artha Caraka	1.250.000.000	25%	10	12.500.000.000
PT Arkara Danatama Nusantara	1.250.000.000	25%	10	12.500.000.000
PT Bhumi Caraka Persada	500.000.000	10%	10	5.000.000.000
PT Tambang Lancar Indonesia	250.000.000	5%	10	2.500.000.000
Arief Ramon	250.000.000	5%	10	2.500.000.000
T o t a l	5.000.000.000	100%		50.000.000.000

18. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Berikut adalah susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023: (Lanjutan)

*18. **SHARE CAPITAL** (Continued)*

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 are as follows: (Continued)

	31 Desember 2025 dan 2024/ *31 December 2025 and 2024*				
Pemegang saham/ ***Shareholders***	**Jumlah saham/** ***Total shares***	**Seri saham/** ***Stock series***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage of ownership***	**Nilai per lembar saham/** ***Value per share* (Rp)**	**Jumlah/** ***Total***
Billy Theristine Lim	4.000	Seri B/*Series B*	38%	1.000.000	4.000.000.000
PT Tambang Lancar Indonesia	2.500	Seri A/*Series A*	24%	1.000.000	2.500.000.000
	1.500	Seri B/*Series B*	14%	1.000.000	1.500.000.000
Arief Ramon	2.500	Seri A/*Series A*	24%	1.000.000	2.500.000.000
T o t a l	10.500		100%		10.500.000.000

	31 Desember 2023/ *31 December 2023*				
Pemegang saham/ ***Shareholders***	**Jumlah saham/** ***Total shares***	**Seri saham/** ***Stock series***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage of ownership***	**Nilai per lembar saham/** ***Value per share* (Rp)**	**Jumlah/** ***Total***
PT Tambang Lancar Indonesia	2.500	Seri A/*Series A*	50%	1.000.000	2.500.000.000
Arief Ramon	2.500	Seri A/*Series A*	50%	1.000.000	2.500.000.000
T o t a l	5.000		100%		5.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 3 Maret 2026 yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris serta Peralihan Saham.

Based on Notarial Deed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 dated 3 March 2026, which has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 4 March 2026 regarding the Change of Directors and Commissioners as well as the Share Transfer.

Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham sebanyak 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.500.000.000 milik PT Tambang Lancar Indonesia kepada Ny. Billy Theristine Lim setelah efektifnya Perubahan Nilai Nominal Saham.

The shareholders approved the transfer of 150,000,000 shares with a nominal value of Rp 1,500,000,000 owned by PT Tambang Lancar Indonesia to Mrs. Billy Theristine Lim after the effective date of the Change in Nominal Value.

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi Ny. Billy Theristine Lim sebanyak 1.500.000.000 saham dengan saldo Rp 15.000.000.000, Tuan Arief Ramon sebanyak 250.000.000 saham dengan saldo Rp 2.500.000.000, PT Tambang Lancar Indonesia sebanyak 250.000.000 saham dengan saldo Rp 2.500.000.000, PT Bumi Artha Caraka sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000, PT Arkara Danatama Nusantara sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000, dan PT Bhumi Caraka Persada sebanyak 500.000.000 saham dengan saldo Rp 5.000.000.000.

The composition of the Company's shareholders is as follows: Mrs. Billy Theristine Lim with 1,500,000,000 shares amounting to Rp 15,000,000,000, Mr. Arief Ramon with 250,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Tambang Lancar Indonesia with 250,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Bumi Artha Caraka with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, PT Arkara Danatama Nusantara with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, and PT Bhumi Caraka Persada with 500,000,000 shares amounting to Rp 5,000,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 3 Maret 2026 yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0046849.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melakukan perubahan atas struktur permodalannya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2026.

Based on Notarial Deed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 21 dated 3 March 2026, which has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0046849.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 3 March 2026 regarding the Amendment to the Company's Articles of Association, the Company made changes to its capital structure in connection with its plan to conduct an Initial Public Offering and list its shares on the Indonesia Stock Exchange in 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2026, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sebesar Rp 50.000.000.000 yang terdiri atas 5.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 10 per saham.

As of 30 June 2026, the Company's issued and fully paid-up capital amounted to Rp 50,000,000,000, consisting of 5,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp 10 per share.

18. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Para pemegang saham menyetujui Penawaran Umum Perdana dari Perusahaan melalui penerbitan saham baru dari portepel Perusahaan, perubahan status Perusahaan dari Perseroan terbatas menjadi Perseroan terbatas terbuka dan perubahan nama menjadi PT Andalan Artha Primanusa Tbk serta tempat kedudukan Perusahaan dari sebelumnya Jakarta Utara menjadi Jakarta Pusat, perubahan nilai nominal masing-masing saham Perusahaan semula sebesar Rp 100 menjadi masing-masing sebesar Rp 10 per saham, penerbitan sebanyak 1.700.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau sebanyak 25,37% dari portepel Perusahaan, serta penerbitan Waran Seri I sebanyak 485.714.286 Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi Ny. Billy Theristine Lim sebanyak 1.350.000.000 saham dengan saldo Rp 13.500.000.000, PT Tambang Lancar Indonesia sebanyak 400.000.000 saham dengan saldo Rp 4.000.000.000, Tuan Arief Ramon sebanyak 250.000.000 saham dengan saldo Rp 2.500.000.000, PT Bumi Artha Caraka sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000, PT Arkara Danatama Nusantara sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000 dan PT Bhumi Caraka Persada sebanyak 500.000.000 saham dengan saldo Rp 5.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 3 Maret 2026 yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris serta Peralihan Saham.

Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham sebanyak 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.500.000.000 milik PT Tambang Lancar Indonesia kepada Ny. Billy Theristine Lim setelah efektifnya Perubahan Nilai Nominal Saham. Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi Ny. Billy Theristine Lim sebanyak 1.500.000.000 saham dengan saldo Rp 15.000.000.000, Tuan Arief Ramon sebanyak 250.000.000 saham dengan saldo Rp 2.500.000.000, PT Tambang Lancar Indonesia sebanyak 250.000.000 saham dengan saldo Rp 2.500.000.000, PT Bumi Artha Caraka sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000, PT Arkara Danatama Nusantara sebanyak 1.250.000.000 saham dengan saldo Rp 12.500.000.000, dan PT Bhumi Caraka Persada sebanyak 500.000.000 saham dengan saldo Rp 5.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 05 Februari 2026 yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0022103.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perusahaan.

Para pemegang saham menyetujui reklasifikasi saham sehingga hanya terdapat 1 (satu) klasifikasi saham biasa atas nama, peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 10.500.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp 10.500.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000, serta perubahan nilai nominal masing-masing saham dari semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100 per saham.

*18. **SHARE CAPITAL** (Continued)*

The shareholders approved the Initial Public Offering of the Company through the issuance of new shares from the Company's portfolio, the change of the Company's status to a public limited liability company and the change of the Company's name to PT Andalan Artha Primanusa Tbk, as well as the relocation of the Company's domicile from North Jakarta to Central Jakarta, the change in nominal value per share from Rp 100 to Rp 10 per share, the issuance of 1,700,000,000 new shares with a nominal value of Rp 10 per share or 25.37% from the Company's portfolio, and the issuance of 485,714,286 Series I Warrants in connection with the Initial Public Offering.

The composition of the Company's shareholders is as follows: Mrs. Billy Theristine Lim with 1,350,000,000 shares amounting to Rp 13,500,000,000, PT Tambang Lancar Indonesia with 400,000,000 shares amounting to Rp 4,000,000,000, Mr. Arief Ramon with 250,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Bumi Artha Caraka with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, PT Arkara Danatama Nusantara with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000 and PT Bhumi Caraka Persada with 500,000,000 shares amounting to Rp 5,000,000,000.

Based on Notarial Deed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 dated 3 March 2026, which has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0059579.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 4 March 2026 regarding the Change of Directors and Commissioners as well as the Share Transfer.

The shareholders approved the transfer of 150,000,000 shares with a nominal value of Rp 1,500,000,000 owned by PT Tambang Lancar Indonesia to Mrs. Billy Theristine Lim after the effective date of the Change in Nominal Value. The composition of the Company's shareholders is as follows: Mrs. Billy Theristine Lim with 1,500,000,000 shares amounting to Rp 15,000,000,000, Mr. Arief Ramon with 250,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Tambang Lancar Indonesia with 250,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Bumi Artha Caraka with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, PT Arkara Danatama Nusantara with 1,250,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, and PT Bhumi Caraka Persada with 500,000,000 shares amounting to Rp 5,000,000,000.

Based on Notarial Deed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 23 dated 5 February 2026, which has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0022103.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 6 February 2026 regarding the increase in the Company's issued/paid-up capital.

The shareholders approved the reclassification of shares into a single class of common shares, the increase in the Company's authorized capital from Rp 10,500,000,000 to Rp 200,000,000,000, the increase in the Company's issued and paid-up capital from Rp 10,500,000,000 to Rp 50,000,000,000, and the change in the nominal value per share from Rp 1,000,000 to Rp 100 per share.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

18. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi Ny. Billy Theristine Lim sebanyak 135.000.000 saham dengan saldo Rp 13.500.000.000, PT Tambang Lancar Indonesia sebanyak 40.000.000 saham dengan saldo Rp 4.000.000.000, Tuan Arief Ramon sebanyak 25.000.000 saham saldo Rp 2.500.000.000, PT Bumi Artha Caraka sebanyak 125.000.000 saham saldo Rp 12.500.000.000, PT Arkara Danatama Nusantara sebanyak 125.000.000 saham saldo Rp 12.500.000.000, dan PT Bhumi Caraka Persada sebanyak 50.000.000 saham saldo Rp 5.000.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 07 Pasal 5 tanggal 7 Oktober 2024, klasifikasi saham Perusahaan terdiri dari (i) Seri A dengan hak untuk memperoleh dividen yang berasal dari laba bersih yang diperoleh Perusahaan sejak pendirian Perusahaan dan (ii) Seri B dengan hak untuk memperoleh dividen yang berasal dari laba bersih yang diperoleh Perusahaan sejak saham Seri B tercatat atas nama, dan para pemegang saham Perusahaan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan Akta Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., No. 7 tanggal 7 Oktober 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0217468.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perusahaan.

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi Tuan Arief Ramon, sebanyak 2.500 saham Seri A, PT Tambang Lancar Indonesia sebanyak 2.500 saham Seri A dan 1.500 saham Seri B, dan Ny. Billy Theristine Lim, sebanyak 4.000 saham Seri B.

Para pemegang saham menyetujui penetapan klasifikasi saham, Saham Seri A, adalah saham yang telah ditempatkan dan disetorkan oleh pemegang saham, yaitu sebanyak 5.000 saham. Saham Seri B adalah saham yang akan diterbitkan Perusahaan sehubungan dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam keputusan dan berhak untuk memperoleh dividen yang berasal dari laba bersih. Para pemegang saham menyetujui penambahan modal dari semua Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 10.500.000.000 yang terbagi atas 10.500 saham: 5.000 saham Seri A dan 5.500 Seri B.

Pada tanggal 17 Juni 2026, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 169, pemegang saham Perusahaan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, menetapkan penggunaan laba bersih sebesar Rp 5.142.241.704 dengan alokasi Rp 2.100.000.000 sebagai dana cadangan dan sisanya untuk investasi serta pengembangan usaha tanpa pembagian dividen.

*18. **SHARE CAPITAL** (Continued)*

The composition of the Company's shareholders is as follows: Mrs. Billy Theristine Lim with 135,000,000 shares amounting to Rp 13,500,000,000, PT Tambang Lancar Indonesia with 40,000,000 shares amounting to Rp 4,000,000,000, Mr. Arief Ramon with 25,000,000 shares amounting to Rp 2,500,000,000, PT Bumi Artha Caraka with 125,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, PT Arkara Danatama Nusantara with 125,000,000 shares amounting to Rp 12,500,000,000, and PT Bhumi Caraka Persada with 50,000,000 shares amounting to Rp 5,000,000,000.

Based on the Shareholders' Resolution in Lieu of a General Meeting No. 07 Article 5 dated 7 October 2024, the classification of the Company's shares consists of (i) Series A shares, which are entitled to receive dividends derived from the net profit earned by the Company since its establishment, and (ii) Series B shares, which are entitled to receive dividends derived from the net profit earned by the Company since the Series B shares are registered in the shareholder's name, and the shareholders of the Company may adopt valid resolutions without convening a General Meeting of Shareholders, provided that all shareholders have been notified in writing and all shareholders have given their approval to the proposed resolutions in writing and have signed such approval.

Based on Notarial Deed Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., No. 7 dated 7 October 2024, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No.AHU-0217468.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 10 October 2024 regarding the increase in the Company's issued/paid-up capital.

The composition of the company's shareholders is as follows: Mr. Arief Ramon, with 2,500 Series A shares; PT Tambang Lancar Indonesia, with 2,500 Series A shares and 1,500 Series B shares; and Mrs. Billy Theristine Lim, with 4,000 Series B shares.

The shareholders approved the classification of shares, Series A shares are shares that have been issued and paid up by the shareholders, amounting to 5,000 shares. Series B shares are shares that will be issued by the Company in connection with the capital increase as referred to in the decision and are entitled to receive dividends from net profits. The shareholders approved to increase Rp 5,000,000,000 was increased to Rp 10,500,000,000, divided into 10,500 shares: 5,000 Series A shares and 5,500 Series B shares.

On 17 June 2026, based on the Deed of Shareholders' Resolution No. 169, the shareholders of the Company approved the Annual Report and the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, resolved the appropriation of the Company's 2025 net profit amounting to Rp 5,142,241,704, with Rp 2,100,000,000 allocated to the statutory reserve and the remaining balance retained for investment and business development without any dividend distribution.

19. PENDAPATAN / *19. REVENUES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pengupasan lapisan tanah	155.461.565.091	178.794.293.732	292.908.409.610	380.124.444.895	448.997.572.330	*Overburden removal*
Sewa alat berat	24.627.809.788	6.583.161.843	20.801.659.709	-	-	*Heavy machine rental*
Pengumpulan batu bara	11.464.638.629	32.522.635.211	53.862.613.573	35.302.659.392	68.032.907.478	*Coal getting*
Pengupasan tanah	3.509.144.952	-	-	-	-	*Top soil*
Batuan mentah	2.147.016.277	-	-	-	-	*Uncrushed rock*
Penambangan biji limonit	2.014.611.674	-	-	-	-	*Limonite*
Pembersihan lahan	657.159.867	-	-	-	-	*Land clearing*
Penambangan biji saprolit	173.104.311	-	-	-	-	*Saprolite*
Penggalian	44.324.703	-	-	-	-	*Cut*
Penimbunan	16.243.213	-	-	-	-	*Fill*
Rehandling	-	1.250.850.034	1.250.850.034	-	-	*Rehandling*
T o t a l	200.115.618.505	219.150.940.820	368.823.532.926	415.427.104.287	517.030.479.808	***T o t a l***

Rincian pendapatan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan:

Detail of revenue from a customer exceeding 10% of revenue:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	%	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	%	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	%	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	%	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	%	
PT Budi Gema Gempita	104.545.276.107	52	212.567.778.977	97	348.342.020.610	94	415.427.104.287	100	517.030.479.808	100	*PT Budi Gema Gempita*
PT Petrosea Tbk	30.564.859.068	15	-	-	-	-	-	-	-	-	*PT Petrosea Tbk*
PT Satria Bahana Sarana	26.011.755.152	13	-	-	-	-	-	-	-	-	*PT Satria Bahana Sarana*
T o t a l	161.121.890.327	80	212.567.778.977	97	348.342.020.610	94	415.427.104.287	100	517.030.479.808	100	***T o t a l***

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *20. COST OF REVENUES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	52.680.886.052	53.088.583.203	104.140.498.817	82.745.332.806	64.026.038.709	*Depreciation (Notes 10 and 11)*
Gaji	33.208.839.264	22.765.067.360	44.046.284.494	45.140.689.843	37.453.596.424	*Salaries*
BBM produksi/ solar (Catatan 7)	30.491.987.421	54.767.763.131	87.472.715.434	132.851.332.730	135.068.519.261	*Fuel production/ diesel (Note 7)*
Suku Cadang (Catatan 7)	12.220.509.920	29.327.667.662	34.939.242.994	36.043.243.181	63.420.871.199	*Sparepart (Note 7)*
Sewa alat berat	6.614.308.355	1.716.923.076	2.037.932.361	4.926.039.994	3.204.264.045	*Heavy equipment rental*
Pelumas	2.854.124.695	4.673.546.944	5.937.184.218	9.248.404.405	6.845.241.467	*Lubricant*
Tunjangan hari raya	2.107.877.501	1.962.998.575	2.676.221.240	2.370.302.599	1.501.642.863	*Allowance*
Sub-total (Dipindahkan)	140.178.533.208	168.302.549.951	281.250.079.558	313.325.345.558	311.520.173.968	***Sub-total** (Brought forward)*

20. **BEBAN POKOK PENDAPATAN** (Lanjutan) *20. **COST OF REVENUES** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Sub-total (Pindahan)	140.178.533.208	168.302.549.951	281.250.079.558	313.325.345.558	311.520.173.968	***Sub-total** (Carried forward)*
Konsumsi	1.878.803.890	2.952.751.823	4.585.323.556	5.542.137.165	4.919.987.435	*Consumption*
B a n	1.713.411.200	1.052.560.340	1.939.701.023	10.128.361.830	3.127.957.917	*T i r e*
Sewa kendaraan	1.464.399.465	631.110.968	1.078.637.798	1.262.715.436	-	*Vehicle rental*
Transportasi	1.402.992.538	479.393.430	917.095.273	1.198.168.327	815.224.141	*Transportation*
Perlengkapan	960.899.602	584.339.809	954.606.975	1.516.170.346	1.404.138.597	*Equipment*
Perlengkapan kesehatan, keselamatan dan lingkungan	360.399.846	129.569.184	403.842.052	393.721.658	324.640.228	*Health, safety and environmental equipment*
Perbaikan dan perawatan	182.175.105	43.418.389	43.418.389	1.957.557.113	1.837.928.718	*Repair and maintenance*
Barang habis pakai	131.785.110	38.990.495	80.601.641	86.021.460	65.859.850	*Consumable goods*
Telekomunikasi	32.443.080	1.291.191	22.694.165	14.144.125	10.874.279	*Telecommunication*
Biaya sub-kontraktor	-	1.757.697.275	2.921.632.085	11.438.842.330	38.973.478.872	*Sub-contractor expense*
T o t a l	148.305.843.044	175.973.672.855	294.197.632.515	346.863.185.348	363.000.264.005	***T o t a l***

Berikut mutasi BBM produksi/solar dan suku cadang tahun yang dimiliki oleh Perusahaan:

The following represents the movement of year-end fuel production/ diesel and sparepart held by the Company:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Persediaan barang awal tahun	20.141.649.143	17.315.252.920	12.757.277.864	7.190.319.898	*Inventory at beginning of the year*
Pembelian	52.974.818.541	125.238.354.651	173.452.550.967	204.056.348.426	*Purchase*
Barang tersedia untuk dipakai	73.116.467.684	142.553.607.571	186.209.828.831	211.246.668.324	*Goods available for use*
Persediaan barang akhir tahun	(30.403.970.343)	(20.141.649.143)	(17.315.252.920)	(12.757.277.864)	*Inventory at ending of the year*
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	42.712.497.341	122.411.958.428	168.894.575.911	198.489.390.460	***Cost of revenue (Note 20)***

Berikut klasifikasi beban pokok pendapatan berdasarkan jenis usaha:

The following is a classification of cost of revenue by business activity:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Jasa kontrak pertambangan	127.916.075.659	173.505.425.614	275.399.670.309	346.863.185.348	363.000.264.005	*Mining contracting services*
Sewa alat berat	20.389.767.385	2.468.247.241	18.797.962.206	-	-	*Rental heavy equipment*
T o t a l	148.305.843.044	175.973.672.855	294.197.632.515	346.863.185.348	363.000.264.005	***T o t a l***

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Gaji dan tunjangan	11.391.199.887	7.598.935.927	11.036.878.682	13.995.137.208	7.945.311.552	*Salary and allowance*
Biaya konsultan	2.132.884.475	3.069.031.507	4.440.097.888	3.623.918.367	5.646.183.672	*Consultation expense*
Asuransi	2.038.246.233	2.077.403.361	3.648.004.050	4.351.776.594	4.743.941.133	*Insurance*
Administrasi dan umum	1.674.745.600	1.421.457.780	2.000.253.972	810.643.645	549.736.936	*Administration and general*
Mobilisasi	1.606.882.480	1.841.624.533	3.174.970.224	4.935.970.422	4.375.780.915	*Mobilization*
Beban imbalan kerja (Catatan 17)	1.574.084.646	1.771.120.079	2.674.258.266	2.361.165.708	6.114.344.911	*Employee benefit expenses (Note 17)*
Transportasi umum dan akomodasi	1.016.375.598	1.311.071.992	2.117.666.654	2.072.928.755	1.612.639.801	*Public transport and accommodation*
Biaya pajak	703.335.412	176.339.600	244.249.200	444.219.100	142.682.133	*Tax expense*
Sewa lahan dan bangunan	546.764.078	372.068.661	781.253.887	863.174.442	488.132.765	*Rental land and building*
Utilitas	362.930.876	548.036.955	894.915.678	586.591.336	410.587.599	*Utilities*
Perlengkapan	360.064.692	245.022.059	376.593.815	662.076.111	2.259.723.057	*Supplies*
Pengobatan	304.421.274	61.437.484	350.422.232	513.278.182	256.758.009	*Medical*
Penyusutan (Catatan 10)	225.046.851	184.524.860	386.279.719	311.636.397	216.833.280	*Depreciation (Note 10)*
Sumbangan	113.988.000	3.300.000	196.168.987	161.219.100	262.850.202	*Donation*
Keamanan	106.331.901	134.437.231	374.000.000	205.000.000	750.000.000	*Security*
Alat tulis	104.271.996	89.362.671	127.779.549	64.536.085	54.743.200	*Stationary*
Ekspedisi	15.791.409	3.844.900	97.703.789	14.954.745	5.046.800	*Expedition*
Cadangan piutang tak tertagih	-	-	309.665.000	309.665.000	309.665.000	*Bad debt expense*
T o t a l	24.277.365.408	20.909.019.600	33.231.161.592	36.287.891.197	36.144.960.965	***T o t a l***

22. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO / *22. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pendapatan lain-lain						***Other operating income***
Pendapatan denda dan penalti	5.172.187.500	-	-	-	-	*Penalty and fine income*
Klaim asuransi	1.033.151.149	-	5.255.598.928	522.025.228	358.308.932	*Insurance claim*
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 6)	928.995.000	-	-	-	-	*Recovery of allowance for doubtful accounts (Note 6)*
Pendapatan penjualan barang bekas	1.000.000	225.000	6.455.000	-	-	*Sale of used goods*
Pendapatan penggantian material	75.480	30.864.476	52.376.135	22.526.846	30.650.000	*Material Reimbursement income*
Sub-total (Dipindahkan)	7.135.409.129	31.089.476	5.314.430.063	544.552.074	388.958.932	***Sub-total*** *(Brought forward)*

22. **PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA – NETO** (Lanjutan) *22. **OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pendapatan lain-lain						***Other operating income***
Sub-total (Pindahan)	7.135.409.129	31.089.476	5.314.430.063	544.552.074	388.958.932	***Sub-total** (Carried forward)*
Retur pembelian	-	730.000.000	830.030.000	2.724.680	-	*Purchase return*
Penyesuaian penerapan PSAK 116	-	-	-	282.141.413	1.045.139.468	*Post-employment benefit interest expense*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 10)	-	-	-	-	301.865.903	*Gain from sales of property plant and equipments (Note 10)*
Biaya reservasi	-	-	-	-	75.000.000	*Booking fee*
Sewa kendaraan	-	-	-	-	42.334.855	*Rent vehicle*
T o t a l	7.135.409.129	761.089.476	6.144.460.063	829.418.167	1.853.299.158	***T o t a l***
Beban lain-lain						***Other operating expenses***
Beban pajak	137.426.413	-	2.819.249.626	2.446.024.759	1.285.283.873	*Tax expenses*
Rugi penjualan aset (Catatan 10)	-	-	98.116.438	-	-	*Loss for sale of asset (Note 10)*
T o t a l	137.426.413	-	2.917.366.064	2.446.024.759	1.285.283.873	***T o t a l***

23. **PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN - NETO** *23. **FINANCE INCOME (EXPENSES) - NET***

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Pendapatan jasa giro	81.154.074	81.103.584	208.004.190	111.522.879	52.377.551	*Interest income*
Pendapatan bunga - pinjaman	1.095.382.251	-	-	-	-	*Interest income - loan*
Biaya bunga sewa	(7.545.234.695)	(15.503.549.778)	(30.830.595.851)	(22.538.158.897)	(25.932.423.345)	*Leasing interest expense*
Biaya bunga	(12.906.058.360)	(4.345.670.622)	(7.343.720.601)	(6.547.856.517)	(6.786.453.688)	*Interest expense*
T o t a l	(19.274.756.730)	(19.768.116.816)	(37.966.312.262)	(28.974.492.535)	(32.666.499.482)	***T o t a l***

24. **SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** *24. **BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES***

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain berupa piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan tersebut mempunyai hubungan berelasi karena mempunyai kesamaan pemilikan dan/atau pengurus dengan Perusahaan.

In normal business activities, the Company conducts transactions with related party, including trade receivables and other receivables. These entities are related because they has the same ownership and/or management with the Company.

24. **SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (Lanjutan) / *BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Pihak berelasi/ *Related parties*	***Sifat dan hubungan/ Relationships***	***Sifat dari transaksi/ Nature of transactions***
Arief Ramon	Pemegang saham/*Shareholder*	Utang lain-lain/*Other payables*
Billy Theristine Lim	Pemegang saham/*Shareholder*	Utang lain-lain/*Other payables*
PT Andalan Bhumi Nusantara	Afiliasi/*Affiliated*	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Pendapatan/ Beban Pokok Pendapatan/ *Trade Receivables, Other receivables, Account payable, Revenue, Cost of revenues*
PT Bukit Bara Alam	Afiliasi/*Affiliated*	Piutang lain-lain dan Pendapatan lain-lain/ *Other receivables and other operating income*

					Persentase terhadap total Aset/ ***Percentage to total Assets (%)***			
	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	**30 Juni 2026/** ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***
Piutang usaha (Catatan 5)/ ***Trade receivables (Note 5)***								
PT Andalan Bhumi Nusantara	-	6.757.680.000	-	-	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%
Piutang lain-lain (Catatan 6)/ ***Other receivables (Note 6)***								
PT Bukit Bara Alam	5.172.187.500	-	-	-	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
PT Andalan Bhumi Nusantara	-	20.790.002.447	-	-	0,00%	2,88%	0,00%	0,00%
T o t a l	5.172.187.500	20.790.002.447	-	-	0,60%	2,88%	0,00%	0,00%

					Persentase terhadap total Utang/ ***Percentage to total Liabilities (%)***			
	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	**30 Juni 2026/** ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***
Utang usaha (Catatan 12)/ ***Trade payables (Note 12)***								
PT Andalan Bhumi Nusantara	9.048.153.053	-	-	-	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang lain-lain (Catatan 13)/ ***Other payables (Note 13)***								
Arief Ramon	16.038.734.620	5.758.558.504	8.000.000.000	2.000.000.000	2,59%	1,07%	1,23%	0,51%
PT Andalan Bhumi Nusantara	9.291.444.794	-	-	-	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Billy Theristine Lim	-	63.989.322.500	44.899.392.500	-	0,00%	11,93%	6,90%	0,00%
T o t a l	25.330.179.414	69.747.881.004	52.899.392.500	2.000.000.000	4,09%	13,00%	8,13%	0,51%

24. **SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (Lanjutan)

24. ***BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*** *(Continued)*

						Persentase terhadap total Pendapatan/ *Percentage to total Revenue (%)*				
	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*
Pendapatan/ ***Revenue***										
PT Andalan Bhumi Nusantara	-	-	6.088.000.000	-	-	0,00%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%
Pendapatan lain-lain (Catatan 22)/ ***Other operating income*** *(Note 22)*										
PT Bukit Bara Alam	5.172.187.500	-	-	-	-	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

						Persentase terhadap total Beban/ *Percentage to total Expenses (%)*				
	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*
Beban pokok pendapatan/ ***Cost of revenue***										
PT Andalan Bhumi Nusantara	5.220.000.000	-	-	-	-	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rincian jenis transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the types of transactions with related parties as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023 are as follows:

Piutang usaha pada 31 Desember 2025 kepada PT Andalan Bhumi Nusantara adalah piutang atas sewa alat berat (Catatan 28).

Trade receivables as of 31 December 2025 from PT Andalan Bhumi Nusantara represent receivables from heavy equipment rental (Note 28).

Pada tanggal 5 Mei 2026, Perusahaan telah menerima pelunasan seluruh piutang usaha dan piutang lain-lain dari PT Andalan Bhumi Nusantara.

On 5 May 2026, the Company received full settlement of all trade receivables and other receivables from PT Andalan Bhumi Nusantara.

Piutang lain-lain pada 31 Desember 2025 kepada PT Andalan Bhumi Nusantara adalah piutang yang muncul dari sewa alat berat dan piutang kepada PT Bukit Bara Alam yang merupakan pembayaran kompensasi atas pembatalan sewa alat berat (Catatan 28).

Other receivables as of 31 December 2025 from PT Andalan Bhumi Nusantara represent receivables arising from heavy equipment rental and receivables from PT Bukit Bara Alam represent compensation receivables arising from the cancellation of the heavy equipment rental (Note 28).

Utang usaha pada 30 Juni 2026 kepada PT Andalan Bhumi Nusantara adalah utang yang muncul dari penyewaan alat berat.

As of 30 June 2026, trade payables to PT Andalan Bhumi Nusantara arose from heavy equipment rental transactions.

Utang lain-lain dari Billy Theristine Lim dan Arief Ramon merupakan pinjaman yang diberikan untuk Perusahaan yang digunakan untuk operasional, tidak dikenai bunga, tidak disertai jaminan dan dapat ditagih sesuai dengan permintaan pemberi pinjaman (Catatan 28).

Other payables to Billy Theristine Lim and Arief Ramon represent loans provided to the Company for operational purposes, which are non-interest bearing, unsecured, and repayable on demand by the lenders (Note 28).

24. **SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (Lanjutan) / *BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Pendapatan dari PT Andalan Bhumi Nusantara merupakan pendapatan atas sewa rental alat berat (Catatan 28).

Revenue from PT Andalan Bhumi Nusantara represents revenue from heavy equipment rental (Note 28).

Beban pokok pendapatan kepada PT Andalan Bhumi Nusantara merupakan beban atas sewa rental alat berat (Catatan 28).

Cost of revenue from PT Andalan Bhumi Nusantara represents heavy equipment rental expenses (Note 28).

Pendapatan lain-lain dari PT Bukit Bara Alam merupakan pendapatan atas penalti pembatalan kontrak kerja (Catatan 22).

Other income from PT Bukit Bara Alam represents income arising from contract termination penalties (Note 22).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada manajemen kunci yang terdiri dari komisaris dan direksi, pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 serta 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Salaries and allowances paid to the key management consist of Boards of Commissioners and Directors, as of 30 June 2026 and 2025 and 31 December 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Dewan komisaris						***Board of commissioner***
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	980.000.000	720.000.000	1.560.000.000	1.440.000.000	600.000.000	*Salaries and other allowances*
Dewan direksi						***Board of directors***
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	2.185.161.290	930.000.000	2.015.000.000	1.985.000.000	600.000.000	*Salaries and other allowances*

25. **LABA PER SAHAM DASAR** / *BASIC EARNINGS PER SHARE*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Total laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	12.311.353.812	3.261.221.025	5.030.346.081	1.426.962.772	66.854.228.298	*Total net profit attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (nilai penuh)	4.341.666.667	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	500.000.000	*The weighted average number of ordinary shares outstanding (full amount)*
Laba per saham dasar	2,84	3,11	4,79	1,36	133,71	***Earnings per share***

26. SEGMEN OPERASI / *26. OPERATING SEGMENT*

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasikan sebagai pengambil keputusan operasional utama Perusahaan, dalam mengambil keputusan strategis.

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, who have been identified as the Company's main operational decision maker, in making strategic decisions.

Perusahaan menggolongkan segmen usaha dalam dua segmen utama yaitu jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat.

The company classifies its business segments into two main segments mining contracting services and heavy equipment rental.

Segmen jasa kontrak pertambangan meliputi kontrak pertambangan secara menyeluruh mulai dari pengupasan lapisan penutup tanah, pengeboran, peledakan, pengangkutan, penggalian, jasa penambangan. Sedangkan segmen jasa meliputi penyediaan fasilitas sewa alat berat.

The mining contracting services segment covers comprehensive mining contract including overburden stripping, drilling, blasting, lifting, hauling, mine services. Meanwhile the services segment covers facilities of rental heavy equipments.

Perseroan memperoleh pendapatan signifikan dari PT Budi Gema Gempita masing-masing sebesar Rp 104.545.276.107 miliar atau 52% dari total pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, serta sebesar Rp 348.021.873.217 miliar atau 94% dari total pendapatan pada tahun 2025, serta sebesar 100% dari total pendapatan pada tahun 2024 dan 2023 atau masing-masing sebesar Rp 415.427.104.287 dan Rp 517.030.479.808. PT Petrosea Tbk sebesar Rp 30.564.859.068 atau 15% untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan PT Satria Bahana Sarana sebesar Rp 26.011.755.152 atau 13% untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026. Pendapatan tersebut berasal dari segmen jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat.

The Company derived significant revenue from PT Budi Gema Gempita, amounting to Rp 104,545,276,107, representing 52% of total revenue for the six-month period ended 30 June 2026, Rp 348,021,873,217, representing 94% of total revenue for the year ended 31 December 2025, and 100% of total revenue for the years ended 31 December 2024 and 2023, amounting to Rp 415,427,104,287 and Rp 517,030,479,808, respectively. In addition, revenue from PT Petrosea Tbk amounting to Rp30,564,859,068, representing 15% of total revenue, while revenue from PT Satria Bahana Sarana amounting to Rp 26,011,755,152, representing 13% of total revenue, for the six-month period ended 30 June 2026. Such revenue was derived from the mining contract services and heavy equipment rental segments.

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*			
	Jasa kontrak pertambangan/ *Mining contracting services*	**Sewa alat berat/ Rental heavy equipment**	**T o t a l/ *T o t a l***	
Pendapatan	175.487.808.717	24.627.809.788	200.115.618.505	*Revenue*
Laba bruto	47.571.733.059	4.238.042.402	51.809.775.461	*Gross profit*
Beban umum dan administrasi	(21.289.600.925)	(2.987.764.483)	(24.277.365.408)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	1.825.795.216	5.172.187.500	6.997.982.716	*Other operating income*
Laba usaha	28.107.927.350	6.422.465.419	34.530.392.769	*Operating profit*
Pendapatan keuangan	1.031.742.465	144.793.860	1.176.536.325	*Finance income*
Beban keuangan	(17.934.395.278)	(2.516.897.777)	(20.451.293.055)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	11.205.274.537	4.050.361.502	15.255.636.039	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(3.483.008.274)	-	(3.483.008.274)	*Income tax expenses*
Laba neto untuk tahun berjalan	7.722.266.263	4.050.361.502	11.772.627.765	***Net profit for the year***
Aset segmen	713.097.435.626	143.613.701.945	856.711.137.571	***Segment assets***
Liabilitas segmen	549.576.218.311	70.852.359.120	620.428.577.431	***Segment liabilities***

26. **SEGMEN OPERASI** (Lanjutan) / *26. **OPERATING SEGMENT** (Continued)*

	31 Desember 2025/ 31 December 2025			
	Jasa kontrak pertambangan/ *Mining contracting services*	**Sewa alat berat/ *Rental heavy equipments***	**T o t a l/ *T o t a l***	
Pendapatan	348.021.873.217	20.801.659.709	368.823.532.926	*Revenue*
Laba bruto	72.622.202.908	2.003.697.503	74.625.900.411	*Gross profit*
Beban umum dan administrasi	(32.569.321.877)	(661.839.715)	(33.231.161.592)	*General and administrative expenses*
Beban (pendapatan) operasi lainnya	3.227.093.999	-	3.227.093.999	*Other operating loss (income)*
Laba usaha	43.279.975.030	1.341.857.788	44.621.832.818	*Operating profit*
Pendapatan keuangan	208.004.190	-	208.004.190	*Finance income*
Beban keuangan	(38.174.316.452)	-	(38.174.316.452)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	5.313.662.768	1.341.857.788	6.655.520.556	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(1.513.278.852)	-	(1.513.278.852)	*Income tax expenses*
Laba neto untuk tahun berjalan	3.800.383.916	1.341.857.788	5.142.241.704	***Net profit for the year***
Aset segmen	685.736.960.560	35.156.636.311	720.893.596.871	***Segment assets***
Liabilitas segmen	467.898.639.506	68.523.751.037	536.422.390.543	***Segment liabilities***

	31 Desember 2024/ *31 December 2024*			
	Jasa kontrak pertambangan/ *Mining contracting services*	**Sewa alat berat/ *Rental heavy equipments***	**T o t a l/ *T o t a l***	
Pendapatan	415.427.104.287	-	415.427.104.287	*Revenue*
Laba bruto	68.563.918.939	-	68.563.918.939	*Gross profit*
Beban umum dan administrasi	(36.287.891.197)	-	(36.287.891.197)	*General and administrative expenses*
Beban operasi lainnya	(1.616.606.592)	-	(1.616.606.592)	*Other operating loss*
Laba usaha	30.659.421.150	-	30.659.421.150	*Operating profit*
Pendapatan keuangan	111.522.879	-	111.522.879	*Finance income*
Beban keuangan	(29.086.015.414)	-	(29.086.015.414)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	1.684.928.615	-	1.684.928.615	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(477.995.207)	-	(477.995.207)	*Income tax expenses*
Laba neto untuk tahun berjalan	1.206.933.408	-	1.206.933.408	***Net profit for the year***
Aset segmen	830.079.076.049	-	830.079.076.049	***Segment assets***
Liabilitas segmen	650.638.215.802	-	650.638.215.802	***Segment liabilities***

26. **SEGMEN OPERASI** (Lanjutan) *26. **OPERATING SEGMENT** (Continued)*

	31 Desember 2023/ *31 December 2023*			
	Jasa kontrak pertambangan/ *Mining contracting services*	**Sewa alat berat/ *Rental heavy equipments***	**T o t a l/ *T o t a l***	
Pendapatan	517.030.479.808	-	517.030.479.808	*Revenue*
Laba bruto	154.030.215.803	-	154.030.215.803	*Gross profit*
Beban umum dan administrasi	(36.144.960.965)	-	(36.144.960.965)	*General and administrative expenses*
Beban operasi lainnya	568.015.285	-	568.015.285	*Other operating loss*
Laba usaha	118.453.270.123	-	118.453.270.123	*Operating profit*
Pendapatan keuangan	52.377.551	-	52.377.551	*Finance income*
Beban keuangan	(32.718.877.033)	-	(32.718.877.033)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	85.786.770.641	-	85.786.770.641	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(18.932.542.343)	-	(18.932.542.343)	*Income tax expenses*
Laba neto untuk tahun berjalan	66.854.228.298	-	66.854.228.298	***Net profit for the year***
Aset segmen	564.702.780.135	-	564.702.780.135	***Segment assets***
Liabilitas segmen	392.188.882.659	-	392.188.882.659	***Segment liabilities***

Tidak terdapat transaksi antar segmen antara jasa kontrak pertambangan dan sewa alat berat.

There were no inter-segment transactions between mining contracting services and heavy equipment rental services.

27. **INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS** *27. **INFORMATION SUPPLEMENTARY CASH FLOW***

Transaksi non-kas ***Non-cash transaction***

30 Juni 2026/ *30 June 2026*	**30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)***	**31 Desember 2025/ *31 December 2025***	**31 Desember 2024/ *31 December 2024***	**31 Desember 2023/ *31 December 2023***	
					Activities not effecting cash flows
219.988.593.780	57.897.037.601	115.794.075.202	182.215.782.464	213.867.712.130	*Increase in value of right-of-use assets*
(115.794.075.202)	(91.107.891.232)	(182.215.782.464)	(213.867.712.130)	(164.899.544.438)	*Decrease in value of right-of-use assets*
104.194.518.578	(33.210.853.631)	(66.421.707.262)	(31.651.929.666)	48.968.167.692	***Ending balance***

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

27. **INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS** (Lanjutan) *27. **INFORMATION SUPPLEMENTARY CASH FLOW** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*	30 Juni 2025 (tidak diaudit)/ *30 June 2025 (unaudited)*	31 Desember 2025/ *31 December 2025*	31 Desember 2024/ *31 December 2024*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Saldo awal	212.986.104.121	294.338.998.165	410.695.902.593	274.130.939.935	269.313.162.899	***Beginning balance***
Arus kas	(51.304.117.786)	(81.352.894.044)	(174.601.415.250)	(157.655.577.666)	(137.619.280.654)	*Cash flows*
Penambahan pinjaman bank	65.416.264.867	-	56.421.087.396	254.373.932.776	47.399.451.170	*Additional bank loan*
Penambahan uang muka aset tetap	-	-	1.823.423.426	-	-	*Additional advance payment for fixed assets*
Penambahan utang sewa	-	-	-	35.515.437.237	94.807.228.882	*Additional lease liabilities*
Penambahan utang pembiayaan	-	-	-	4.331.170.311	1.160.834.128	*Addition of financing liablities*
Pembayaran utang sewa	-	-	-	-	(930.456.490)	*Payment of lease liabilities*
Saldo akhir	227.098.251.202	212.986.104.121	294.338.998.165	410.695.902.593	274.130.939.935	***Ending balance***

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** *28. **COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT***

1. **Perjanjian Kerjasama PT Budi Gema Gempita (BGG)**

Pada tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT Budi Gema Gempita tentang Pekerjaan Jasa Penambangan Batubara yang berlokasi di Kabupaten Lahat, berdasarkan Perjanjian No. 09/BGG-AAP/VIII/2018, yang mana Perjanjian tersebut telah diadendum atas kontrak tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan addendum kontrak No. 02/ADDM-BGG-AAP/I/2022. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

2. **Perjanjian tentang pekerjaan pengadaan jasa produksi penunjang (SPPH-05852) PT Satria Bahana Sarana ("SBS")**

Pada tanggal 30 Desember 2024, SBS dan Perusahaan menandatangani Perjanjian No. 56A/PJJ-HO/DIR/XII/2024 terkait pengadaan jasa penunjang produksi (SPPH-05852). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berkewajiban menyediakan peralatan untuk menunjang kegiatan produksi SBS di wilayah kerja SBS di Tanjung Enim/USTE dan berhak menerima pembayaran berdasarkan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2029 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Total nilai pekerjaan dengan Alat Bulldozer CAT D10T/ setara kelas 600-700HP sebanyak 2 unit dengan asumsi jam kerja per bulan sebanyak 400 jam kerja. Dengan estimasi masa pekerjaan selama 60 bulan, dengan tarif (Rp/jam) berdasarkan perjanjian sebesar Rp 1.980.000 dengan nilai pekerjaan berdasarkan perjanjian sebesar Rp 95.040.000.000, nilai tersebut *exclude* PPN.

1. ***Cooperation Agreement with PT Budi Gema Gempita (BGG)***

On 8 August 2018, the Company entered into a Cooperation Agreement with PT Budi Gema Gempita concerning Coal Mining Services located in Lahat regency, based on Agreement No. 09/BGG AAP/VIII/2018. This Agreement has been amended, and the contract is effective as of 1 January 2022, pursuant to the contract addendum No. 02/ADDM-BGG-AAP/I/2022, based on Contract Addendum No. 02/ADDM-BGG-AAP/I/2022. This agreement is valid for a term of 7 (seven) years from the date of its signing.

2. ***Agreement on the Procurement of Production Support Services (SPPH-05852) with PT Satria Bahana Sarana ("SBS")***

On 30 December 2024, SBS and the Company signed Agreement No. 56A/PJJ-HO/DIR/XII/2024 regarding the procurement of production support services (SPPH-05852). Under this agreement, the Company is obligated to provide equipment to support SBS's production activities in SBS's operating area in Tanjung Enim/USTE and is entitled to receive payment based on the rates agreed upon in the agreement. This agreement expires on 29 December 2029, effective from the date of its signing.

The total contract value for the provision of 2 (two) units of Bulldozer CAT D10T and/or equivalent class of 600-700 HP, based on an assumed utilization of 400 (four hundred) working hours per month and an estimated term of work of 60 (sixty) months, at the contractual rate of Rp 1,980,000 (one million nine hundred eighty thousand Rupiah) per hour, amounts to Rp 95,040,000,000, exclude of Value Added Tax (VAT).

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan)

2. Perjanjian tentang pekerjaan pengadaan jasa produksi penunjang (SPPH-05852) PT Satria Bahana Sarana ("SBS") (Lanjutan)

Perusahaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), sebesar 5% (lima persen) dari total harga sewa pertahun yaitu dalam porsi mata uang Rupiah sebesar Rp 1.054.944.000 yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Bank Pemerintah/Devisa yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Addendum III No. 325/AAP-SBS/EXT/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 yang mengubah dan menambah ketentuan dalam perjanjian sebelumnya. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian judul perjanjian menjadi Pekerjaan Penambangan, Pengangkutan, dan Konstruksi Pertambangan, penambahan armada alat berat operasional beserta alat penunjang dan kewajiban penambahan jaminan pelaksanaan. Berdasarkan addendum tersebut, peningkatan target volume pekerjaan menjadi 2.236.971 BCM dan total nilai kontrak menjadi Rp 208.942.000.000.

3. **PT Position**

Perjanjian pekerjaan penambangan bijih nikel

Pada tanggal 1 April 2026, Perusahaan dan PT Position menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penambangan Bijih Nikel No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26 untuk pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi penambangan tanah penutup dan bijih nikel (limonit dan saprolit) di wilayah Desa Maba Sangaji dan Desa Wailukum, Halmahera Timur, Maluku Utara. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2026.

Selama periode 4 (empat) tahun perjanjian, total estimasi target penambangan bijih nikel (*ore*) adalah sebesar 5.728.000 WMT, dan estimasi total pekerjaan pemindahan tanah penutup (*waste*) adalah sebesar 2.511.000 BCM.

Selama masa berlakunya perjanjian, Perusahaan diwajibkan untuk mengadakan dan memelihara asuransi terkait kerugian aset atau alat berat, kompensasi karyawan, serta tanggungan atas cedera fisik dan kerusakan harta pihak ketiga.

*28. **COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT** (Continued)*

***2. Agreement on the Procurement of Production Support Services (SPPH-05852) with PT Satria Bahana Sarana ("SBS")** (Contunied)*

The Company shall provide a Performance Bond in the amount of 5% (five percent) of the total annual rental price, in the Rupiah portion amounting to Rp 1,054,944,000, issued by a Commercial Bank/State-Owned Bank/Foreign Exchange Bank, valid for a period of 12 (twelve) months.

This agreement has undergone several amendments, most recently through Addendum III No. 325/AAP-SBS/EXT/VI/2026 dated 19 June 2026, which modified and supplemented the provisions of the previous agreement. The key amendments include the adjustment of the agreement title to "Pekerjaan Penambangan, Pengangkutan, dan Konstruksi Pertambangan" (Mining, Hauling, and Mining Construction Works), the addition of operational heavy equipment fleets along with support units and accompanied by the requirement for an additional performance bond. Based on the addendum above, an increase in the target work volume become 2,236,971 BCM and the total contract value amounting to Rp 208,942,000,000.

*3. **PT Position***

Agreement for the execution of nickel ore mining activities

On 1 April 2026, the Company and PT Position signed Nickel Ore Mining Work Agreement No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26 for the management, implementation, and supervision of overburden and nickel ore (limonite and saprolite) mining operations in the areas of Maba Sangaji Village and Wailukum Village, East Halmahera, North Maluku. This agreement is valid for a term of 4 (four) years, effective as of 1 April 2026.

Over the 4 (four) year agreement period, the total estimated target for nickel ore mining is 5,728,000 WMT, and the total estimated overburden (waste) removal work is 2,511,000 BCM.

During the term of the agreement, the Company is obliged to procure and maintain insurance covering loss of assets or heavy equipment, employee compensation, as well as liability for physical injury and property damage to third parties.

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan)

3. **PT Position** (Lanjutan)

Perjanjian pembangunan sarana penunjang

Berdasarkan Perjanjian No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26, terdapat ketentuan tambahan mengenai pembangunan sarana penunjang berupa Mess Facility. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut, Perusahaan menerbitkan SPK No. 059/MGT/AAP-SPK/II/2026 kepada PT Andes Persada Nusantara sebagai subkontraktor dengan nilai kontrak Rp 9.235.116.000. Seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perusahaan dan dicatat sebagai piutang/tagihan reimbursement kepada PT Position. Setelah pembangunan Mess Facility selesai dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani, PT Position wajib mengganti seluruh biaya kepada Perusahaan, dan kepemilikan aset Mess Facility secara sah beralih sepenuhnya kepada PT Position.

4. **PT Petrosea Tbk (PTRO)**

Pada tanggal 14 April 2026, Perusahaan mengadakan Perjanjian Subkontraktor dengan PT Petrosea Tbk (PTRO) berdasarkan Perjanjian No. 4320001903 yang berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2029, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 991.735.241.096.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan melaksanakan jasa penambangan batubara yang meliputi *land clearing*, pemindahan top soil, dan pemindahan *overburden* di wilayah kerja PTRO di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

5. **PT Intan Bumi Persada (IBP)**

Pada tanggal 1 April 2026, Perusahaan dan IBP menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan No. 001/AGR/AAP/IBP/IV/2026 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2030. Perusahaan sepakat untuk melaksanakan jasa pertambangan yang meliputi antara lain *land clearing*, pengupasan *top soil*, *overburden removal*, kegiatan drilling dan *blasting*, *coal getting*, pengangkutan material penutup ke disposal area, pembangunan dan pemeliharaan jalan angkut, pengelolaan disposal area dan dewatering, serta pemuatan batubara ke armada kontraktor untuk pengangkutan ke *ROM stockpile*.

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan dan IBP menandatangani Perjanjian Pekerjaan *Cut & Fill* beserta Penunjang No. 002/IBP-AAP/WC/VI/26, di mana Perusahaan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan *cut & fill* (penggalian, pengangkutan material, dan penimbunan pemadatan berlapis) di wilayah Tambang Batubara IBP di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya *Work Order* No. IBP-SPK-06.1.2026-001 pada tanggal 6 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.

Ruang lingkup pekerjaan *cut & fill* mencakup total volume sebesar 325.000 BCM dengan tarif pengerjaan sebesar Rp 33.000 per BCM. Selain pelaksanaan pekerjaan, Perusahaan juga menyewakan alat berat penunjang kepada IBP berupa unit *Excavator, Bulldozer, Motorgrader, Compactor, Dump Truck, Fuel Truck,* dan *Water Truck* dengan sistem tarif *lumpsum* bulanan.

*28. **COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT** (Continued)*

*3. **PT Position** (Continued)*

Agreement for the construction of supporting facilities

Based on Agreement No. 183/AAP-POS/EXT/IV/26, there is an additional provision regarding the construction of supporting facilities in the form of a Mess Facility. To execute the construction, the Company issued Work Order No. 059/MGT/AAP-SPK/II/2026 to PT Andes Persada Nusantara as subcontractor with a contract value of Rp 9,235,116,000. All construction costs were initially advanced by the Company and recorded as reimbursement receivables from PT Position. Upon completion of the Mess Facility and the signing of the Certificate of Final Completion, PT Position is obliged to reimburse the Company in full, and ownership of the Mess Facility assets legally transfers entirely to PT Position

*4. **PT Petrosea Tbk (PTRO)***

On 14 April 2026, the Company entered into a Subcontractor Agreement with PT Petrosea Tbk (PTRO) based on Agreement No. 4320001903, which is effective until 31 December 2029, with a total contract value of Rp 991,735,241,096.

Under the agreement, the Company will perform coal mining services, including land clearing, topsoil removal, and overburden removal in PTRO's operating area in Murung Raya Regency, Central Kalimantan.

*5. **PT Intan Bumi Persada (IBP)***

On 1 April 2026, the Company and IBP signed Mining Services Agreement No. 001/AGR/AAP/IBP/IV/2026, which will remain effective until 31 December 2030. The Company agreed to provide mining services, including but not limited to land clearing, topsoil stripping, overburden removal, drilling and blasting activities, coal getting, transportation of overburden material to the disposal area, construction and maintenance of haul roads, management of disposal areas and dewatering, as well as loading coal onto the contractor's fleet for transportation to the ROM stockpile.

On 5 June 2026, the Company and IBP signed a Cut & Fill Work Agreement and its Supporting Activities No. 002/IBP-AAP/WC/VI/26, under which the Company acts as the contractor for cut & fill work (excavation, material transportation, and layered compaction filling) in IBP's Coal Mine area in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province.

This Agreement is effective from the issuance of Work Order No. IBP-SPK-06.1.2026-001 on 6 January 2026 until 30 June 2026.

The scope of the cut & fill work encompasses a total volume of 325,000 BCM at a work rate of Rp 33,000 per BCM. In addition to executing the work, the Company also leases supporting heavy equipment to IBP, consisting of Excavators, Bulldozers, Motorgraders, Compactors, Dump Trucks, Fuel Trucks, and Water Trucks under a monthly lumpsum rate system.

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan) *28.**COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT** (Continued)*

6. **PT Arkara Pratama Energi (APE)**

Pada tanggal 12 Maret 2026, Perusahaan melakukan Perjanjian Pekerjaan Jasa Pertambangan antara Perusahaan dengan APE terkait Pekerjaan Jasa Penambangan, berdasarkan Perjanjian No. 112/APE-AAP/OPR/LEG/III/2026 yang berlaku hingga 31 Desember 2030. Berdasarkan perjanjian kerja, Perusahaan berkewajiban melaksanakan kegiatan jasa pertambangan sesuai target produksi, rencana tambang, dan jadwal tambang yang ditetapkan untuk wilayah kerja APE di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembersihan lahan (*land clearing*), pemindahan tanah penutup (*overburden removal*) termasuk kegiatan penggalian, pemuatan, pengangkutan dan pembuangan material, pengelolaan area pembuangan (*disposal area*), pembangunan dan pemeliharaan jalan angkut, pengelolaan lingkungan dan air tambang termasuk dewatering, serta pengangkutan batubara yang didasarkan pada tonase hasil penimbangan dan survei bersama.

*6. **PT Arkara Pratama Energi (APE)***

On 12 March 2026, the Company entered into a Mining Services Work Agreement with APE in relation to mining services work, based on Agreement No. 112/APE-AAP/OPR/LEG/III/2026, which is valid until 31 December 2030. Under the agreement, the Company is obligated to carry out mining services activities in accordance with the established production targets, mine plans, and mining schedules in APE's operating area in Kutai Timur Regency, East Kalimantan. The scope of work includes land clearing, overburden removal including excavation, loading, hauling, and disposal of materials, disposal area management, construction and maintenance of haul roads, environmental and mine water management including dewatering, as well as coal hauling based on tonnage determined through weighing results and joint surveys.

7. **PT Andalan Bhumi Nusantara (ABN)**

Perjanjian Sewa Alat Berat

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan ("Penyewa") menandatangani Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. 004/AAP-ABN/SEWA/VI/26 dengan ABN ("Pemberi Sewa").

Perjanjian ini mencakup penyewaan alat berat pertambangan berupa *Excavator* (Hitachi ZX490, ZX350, dan ZX200), *Dump Truck* (Foton 380HP 30T), *Water Truck*, *Fuel Truck*, *Lube Truck*, serta *Crane Truck* untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan kepemilikan alat tetap berada pada Pemberi Sewa. Jangka waktu sewa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Tarif sewa ditetapkan per bulan berdasarkan jenis, jumlah unit, serta periode penggunaan.

Pada tanggal 1 April 2025, Perusahaan ("Pemberi Sewa") menandatangani Perjanjian Sewa Alat Berat No. 001/AAP-ABN/IV/25 dengan PT Andalan Bhumi Nusantara ("Penyewa"). Perjanjian ini mencakup penyewaan alat berat berupa *Bulldozer* (D8R dan D85ESS), *Motor Grader* (160K), *Light Vehicle* (DC 4x4), *Dump Truck* (4045), dan *Lighting Tower* (AS4006) untuk mendukung kegiatan operasional Penyewa, dengan kepemilikan alat tetap berada pada Pemberi Sewa. Masa sewa dimulai sejak alat tiba di lokasi proyek Penyewa dan berakhir pada tanggal yang disepakati bersama, serta pada akhir masa sewa alat wajib dikembalikan dalam kondisi semula dengan memperhatikan keausan wajar.

*7. **PT Andalan Bhumi Nusantara (ABN)***

Heavy Equipment Rental Agreement

On 5 June 2026, the Company (the "Lessee") entered into Heavy Equipment Rental Agreement No. 004/AAP-ABN/SEWA/VI/26 with ABN (the "Lessor").

The agreement covers the rental of mining heavy equipment, including Excavators (Hitachi ZX490, ZX350, and ZX200), Dump Trucks (Foton 380HP 30T), Water Trucks, Fuel Trucks, Lube Trucks, and Crane Trucks, to support the Company's operational activities in Murung Raya Regency, Central Kalimantan, with ownership of the equipment remaining with the Lessor. The lease term is valid for one (1) year commencing from 1 January 2026 until 31 December 2026 and may be extended upon mutual agreement between the parties. Rental fees are charged on a monthly basis based on equipment type, number of units, and usage period.

On 1 April 2025, The Company (the "Lessor") entered into Heavy Equipment Rental Agreement No. 001/AAP-ABN/IV/25 with PT Andalan Bhumi Nusantara (the "Lessee"). The agreement covers the rental of heavy equipment, including Bulldozers (D8R and D85ESS), Motor Grader (160K), Light Vehicles (DC 4x4), Dump Trucks (4045), and Lighting Towers (AS4006), to support the Lessee's operational activities, with ownership of the equipment remaining with the Lessor. The lease term commences upon delivery of the equipment to the Lessee's project site and ends on a mutually agreed date, and upon termination the equipment must be returned in the same condition as received, subject to normal wear and tear.

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan)

7. **PT Andalan Bhumi Nusantara (ABN)** (Lanjutan)

Perjanjian Sewa Alat Berat (Lanjutan)

Tarif sewa ditetapkan per bulan berdasarkan jenis dan jumlah unit dan ditagihkan setiap akhir tahun secara akumulatif sejak tanggal penyerahan alat, sehingga total nilai kontrak bergantung pada lamanya penggunaan.

8. **Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Billy Theristine Lim)**

Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 8 Oktober 2024, Perusahaan menerima pinjaman dari Billy Theristine Lim sebesar Rp 33.500.000.000. Jangka waktu pinjaman tersebut berlaku sampai dengan hutang Perusahaan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dinyatakan lunas. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dalam bentuk apapun.

Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham No. 002/AAP-BT/EXT/VI/24 tanggal 21 Oktober 2024 Perusahaan menerima pinjaman dari Billy Theristine Lim dengan limit pinjaman sebesar Rp 35.000.000.000 dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2026, tidak terdapat bunga atas pinjaman tersebut. Pada 30 Juni 2026, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman pemegang saham dari Billy Theristine Lim.

9. **Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Arief Ramon)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham No. 001/AAP-AR/EXT/VI/24 tanggal 3 Juni 2024 Perusahaan menerima pinjaman dari Arief Ramon dengan limit pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 2 tahun terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2026, tidak terdapat bunga atas pinjaman tersebut.

Pada tanggal 10 Februari 2026, terdapat Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 259/AAP-AR/EXT/II/26 untuk meningkatkan limit fasilitas pinjaman menjadi sebesar Rp 30.000.000.000.

Pada tanggal 2 Juni 2026 terdapat Addendum II Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan nomor 319/AAP-AR/EXT/VI/26 untuk melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang semula berakhir pada 3 Juni 2026 menjadi 3 Juni 2027.

10. **PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CLIPAN)**

Pada tanggal 8 Mei 2026, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 123 oleh Notaris Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn., dengan CLIPAN sebagai Lessor. Fasilitas sewa pembiayaan tersebut digunakan untuk pengadaan 10 unit *Dump Truck Foton* dan 2 unit *Hitachi Hydraulic Excavator* dengan nilai perolehan Rp 16.964.119.350 dengan jangka waktu 31 bulan sejak akta perjanjian ini.

*28. **COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT** (Continued)*

*7. **PT Andalan Bhumi Nusantara (ABN)** (Continued)*

***Heavy Equipment Rental Agreement** (Continued)*

Rental fees are charged on a monthly basis per equipment type and number of units and are invoiced annually on an accumulated basis from the delivery date, such that the total contract value depends on the duration of use.

*8. **Agreement for Shareholder Loan (Billy Theristine Lim)***

Based on the Debt Acknowledgment Deed No. 02 dated 8 October 2024, the Company obtained a loan from Billy Theristine Lim to Rp 33,500,000,000. The term of the loan is valid until the Company's debt to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is fully settled. The loan bears no interest..

Based on Shareholder Loan Agreement No. 002/AAP-BT/EXT/VI/24 dated 21 October 2024, the Company obtained a loan from Billy Theristine Lim with a loan facility limit of Rp 35,000,000,000. The term of the agreement is two (2) years commencing from 21 October 2024 until 21 October 2026. The loan bears no interest. As of 30 June 2026, the Company has fully repaid its shareholder loan to Billy Theristine Lim.

*9. **Agreement for Shareholder Loan (Arief Ramon)***

Based on Shareholder Loan Agreement No. 001/AAP-AR/EXT/VI/24 dated 3 June 2024, the Company obtained a loan from Arief Ramon with a loan facility limit of Rp 10,000,000,000. The term of the agreement is two (2) years commencing from 3 June 2024 until 3 June 2026. The loan bears no interest.

On 10 February 2026, an Addendum to Shareholder Loan Agreement No. 259/AAP-AR/EXT/II/26 was executed to increase the loan facility limit to Rp 30,000,000,000.

On 2 June 2026, there was Addendum II to the Shareholder Loan Agreement No. 319/AAP-AR/EXT/VI/26 to extend the term of the agreement, which originally expired on 3 June 2026, to 3 June 2027.

*10. **PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CLIPAN)***

On 8 May 2026, the Company signed Finance Lease Agreement Deed No. 123 by Notary Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn. with CLIPAN as the Lessor. The finance lease facility was used for the acquisition of 10 units of Foton Dump Trucks and 2 units of Hitachi Hydraulic Excavators with a total acquisition value of Rp 16,964,119,350 with a lease term of 31 months effective from the signing date of this deed.

28. **KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan)

11. **PT Astra Sedaya Finance (ASF)**

Pada tanggal 27 Agustus 2025, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate guarantee*) kepada ASF. Jaminan ini diberikan untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban utang ABN yang timbul dari satu perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan dengan No. 01100910002506177 pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk pengadaan 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G dengan nilai perolehan sebesar Rp 1.787.100.000. Jangka waktu perjanjian ini 36 bulan sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2028 dengan bunga sebesar 5,67% per tahun.

12. **PT Berkarya Sinar Bersama (BSB)**

Pada tanggal 5 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Alat Berat dengan BSB No. 001/AAP-BSB/SEWA/VI/26, dimana Perusahaan bertindak sebagai Pihak Pertama yang menyewakan sejumlah alat berat pertambangan untuk mendukung kegiatan usaha BSB di wilayah Bantuas, Palaran, Kalimantan Timur.

Perjanjian sewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Objek sewa meliputi unit alat berat berupa Excavator 30 Ton, Excavator 20 Ton, dan Dump Truck 20 Ton dengan skema perhitungan harga sewa berdasarkan tarif per jam (*rental rate per hour*) dan tarif bulanan (*rental rate per month*). Harga sewa tersebut sudah mencakup penyediaan operator, mekanik, biaya perawatan/perbaikan, serta perangkat keselamatan (*safety device*), namun belum termasuk PPN, PPh Pasal 23, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan Perjanjian, PT Berkarya Sinar Bersama berhak mengenakan denda berupa pemotongan tagihan kepada Perusahaan apabila kinerja alat berada di bawah standar yang disepakati, yaitu *Physical Availability* (PA) di bawah 85% dan *Mechanical Availability* (MA) di bawah 80%.

13. **PT Bukit Bara Alam (BBA)**

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perusahaan menandatangani Kesepakatan Bersama No. 001-KB/BBA-AAP/VI/2026 dengan BBA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Perusahaan dan BBA menyetujui pembatalan sewa alat berat dengan nilai sebesar Rp 6.896.250.000 dan BBA berkewajiban membayar kompensasi kepada Perusahaan sebesar Rp 5.172.187.500 yang setara dengan 75% dari nilai perjanjian sewa tersebut. Pembayaran kompensasi tersebut wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kesepakatan. Apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka BBA tetap berkewajiban membayar kompensasi tersebut beserta bunga sebesar 10% per tahun

*28. **COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENT** (Continued)*

*11. **PT Astra Sedaya Finance (ASF)***

On 27 August 2025, the Company signed a Corporate Guarantee Agreement to ASF. This guarantee is provided to secure the repayment of all debt obligations of ABN arising from one Investment Financing Agreement in the form of a Finance Lease, No. 01100910002506177, dated 27 August 2025, for the procurement of one unit of Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G with an acquisition value of Rp 1,787,100,000. This agreement has a tenor of 36 months from 27 August 2025 until 27 August 2028, with an interest rate of 5.67% per annum.

*12. **PT Berkarya Sinar Bersama (BSB)***

On 5 June 2026, the Company signed a Heavy Equipment Lease Agreement with BSB No. 001/AAP-BSB/SEWA/VI/26, where the Company acts as the First Party leasing several heavy mining equipment to support BSB business activities in Bantuas, Palaran, East Kalimantan.

This lease agreement is effective for a period of 1 (one) year, effective from 1 January 2026 to 31 December 2026.

The lease objects include heavy equipment units consisting of 30-Ton Excavators, 20-Ton Excavators, and 20-Ton Dump Trucks with rental fee calculations based on hourly rates and monthly rates. The rental fees include the provision of operators, mechanics, maintenance/repair costs, and safety devices, but exclude VAT, Income Tax Article 23, and fuel.

Under the Agreement, PT Berkarya Sinar Bersama reserves the right to impose penalties in the form of invoice deductions to the Company if the equipment's performance falls below the agreed standards, specifically Physical Availability (PA) below 85% and Mechanical Availability (MA) below 80%.

*13. **PT Bukit Bara Alam (BBA)***

On 29 June 2026, the Company entered into Joint Agreement No. 001-KB/BBA-AAP/VI/2026 with BBA. Based on the agreement, the Company and BBA agreed to the cancellation of the heavy equipment rental with a total value of Rp 6,896,250,000 and BBA is obligated to pay compensation to the Company amounting to Rp 5,172,187,500, equivalent to 75% of the agreement value. The compensation payment shall be made no later than 60 (sixty) calendar days from the date of the agreement. If the payment is not made within such period, BBA remains obligated to pay the compensation together with interest at 10% per annum.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan manajemen risiko keuangan bertujuan memberikan *early warning* kepada manajemen atas risiko-risiko keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan. Kebijakan ini akan memberikan arahan dalam melakukan identifikasi dan analisa atas risiko-risiko yang dihadapi dan memberikan batasan-batasan dalam menentukan rencana mitigasi yang akan dilaksanakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko-risiko yang ada.

Dewan Direksi memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Dewan Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Risiko keuangan yang paling signifikan terhadap Perusahaan dijelaskan di bawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak untuk instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan untuk pihak lain dengan tidak melepaskan kewajiban. Karena aktivitas Perusahaan investasi dan operasi, Perusahaan terkena potensi kerugian terkait kredit yang mungkin terjadi sebagai akibat dari *counterparty*, individu atau penerbit tidak mampu atau tidak ingin untuk menghormati kewajiban kontrak.

Eksposur risiko kredit Perusahaan terutama timbul dari pengelolan piutang usaha. Perusahaan melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan.

Untuk mengelola risiko kredit yang berhubungan dengan kepemilikan kas dan bank, Perusahaan mendiversifikasi tempat penyimpanan kas dan bank di beberapa institusi keuangan.

Tabel di bawah ini merangkum paparan maksimum *gross* risiko kredit dari setiap kategori aset keuangan sebelum memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The financial risk management policy aims to provide an early warning to management on financial risks owned and managed by management in carrying out the Company's operational activities. This policy will provide direction in identifying and analyzing the risks faced and providing limitations in determining the mitigation plan that will be implemented to reduce or eliminate the negative impacts of existing risks.

The Board of Directors has overall responsibility for establishing and overseeing the risk management framework. The Board of Directors has established a finance function that is responsible for developing and monitoring the Company's risk management policies. The most significant risk to the Company are described below.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss to another party by not releasing an obligation. Due to the Company's investment and operating activities, the Company is credited with potential losses that may occur as a result of the counterparty, individual or issuer being unable or unwilling to honor contractual obligations.

The Company's exposure to credit risk primarily arises from the management of trade receivables. The Company monitors the collectibility of trade receivables so that collections can be received in a timely manner and also conducts periodic reviews of individual customer receivables to assess the potential for collection failures.

To manage the credit risk associated with cash and bank holdings, the Company has diversified its cash and bank deposits in several financial institutions.

The table below summarizes the maximum gross credit risk exposure for each category of financial assets before taking into account collateral or other credit support as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023:

	30 Juni 2026/ ***30 June 2026***	**31 Desember 2025/** ***31 December 2025***	**31 Desember 2024/** ***31 December 2024***	**31 Desember 2023/** ***31 December 2023***	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Kas dan bank*	12.487.406.576	20.452.571.286	15.471.895.960	19.201.769.102	*Cash on hand and in banks**
Piutang usaha	73.433.784.730	91.658.728.230	122.353.992.726	91.488.290.930	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	11.263.416.899	27.782.772.600	5.662.071.731	5.980.798.252	*Other receivables*
Aset kontrak	79.835.301.722	-	-	-	*Contract assets*
T o t a l	177.019.909.927	139.894.072.116	143.487.960.417	116.670.858.284	***T o t a l***

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Contiued)*

a. Risiko Kredit (Lanjutan) ***a. Credit Risk** (Continued)*

* Tidak termasuk kas masing-masing sebesar Rp 35.812.760, Rp 144.652.222, Rp 79.302.679 dan Rp 49.548.140 pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

* *Excluding cash on hand amounting to Rp 35,812,760, Rp 144,652,222, Rp 79,302,679 and Rp 49,548,140 as of 30 June 2026, 31 December 2025, 2024 and 2023, respectively.*

	31 Juni 2026/ *30 June 2026*						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ ***Neither past due nor impaired***	***<30 Hari/Days***	***31-60 Hari/Days***	***61-90 Hari/Days***	***>90 Hari/Days***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/** ***Past due and impaired***	**T o t a l**
Biaya perolehan diamortisasi/ ***Amortized cost***							
Kas dan bank/ *Cash on hand and in banks*	12.487.406.576	-	-	-	-	-	12.487.406.576
Piutang usaha/ *Trade receivables*	30.963.962.850	13.044.100.235	19.740.328.814	9.685.392.831	-	-	73.433.784.730
Piutang lain-lain/ *Other receivables*	11.263.416.899	-	-	-	-	-	11.263.416.899
Aset kontrak/ *Contract assets*	79.835.301.722	-	-	-	-	-	79.835.301.722
T o t a l	134.550.088.047	13.044.100.235	19.740.328.814	9.685.392.831	-	-	177.019.909.927

	31 Desember 2025/ *31 December 2025*						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ ***Neither past due nor impaired***	***<30 Hari/Days***	***31-60 Hari/Days***	***61-90 Hari/Days***	***>90 Hari/Days***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/** ***Past due and impaired***	**T o t a l**
Biaya perolehan diamortisasi/ ***Amortized cost***							
Kas dan bank/ *Cash on hand and in banks*	20.452.571.286	-	-	-	-	-	20.452.571.286
Piutang usaha/ *Trade receivables*	10.750.895.926	24.044.183.221	28.395.295.188	-	28.468.353.895	-	91.658.728.230
Piutang lain-lain/ *Other receivables*	28.711.767.600	-	-	-	-	(928.995.000)	27.782.772.600
T o t a l	59.915.234.812	24.044.183.221	28.395.295.188		28.468.353.895	(928.995.000)	139.894.072.116

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

a. **Risiko Kredit** (Lanjutan) *a. **Credit Risk** (Continued)*

	31 Desember 2024/ *31 December 2024*						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ Neither past *due nor impaired*	***<30 Hari/Days***	***31-60 Hari/Days***	***61-90 Hari/Days***	***>90 Hari/Days***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**T o t a l**
Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*							
Kas dan bank/ *Cash on hand and in banks*	15.471.895.960	-	-	-	-	-	15.471.895.960
Piutang usaha/ *Trade receivables*	13.678.462.903	41.299.797.944	41.706.024.356	25.669.707.523	-	-	122.353.992.726
Piutang lain-lain/ *Other receivables*	6.281.401.731	-	-	-	-	(619.330.000)	5.662.071.731
T o t a l	35.431.760.594	41.299.797.944	41.706.024.356	25.669.707.523	-	(619.330.000)	143.487.960.417

	31 Desember 2023/*31 December 2023*						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ Neither past *due nor impaired*	***<30 Hari/Days***	***31-60 Hari/Days***	***61-90 Hari/Days***	***>90 Hari/Days***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**T o t a l**
Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*							
Kas dan bank/ *Cash on hand and in banks*	19.201.769.102	-	-	-	-	-	19.201.769.102
Piutang usaha/ *Trade receivables*	18.879.920.532	45.025.633.634	20.851.564.640	6.731.172.124	-	-	91.488.290.930
Piutang lain-lain/ *Other receivables*	6.290.463.252	-	-	-	-	(309.665.000)	5.980.798.252
T o t a l	44.372.152.886	45.025.633.634	20.851.564.640	6.731.172.124	-	(309.665.000)	116.670.858.284

Berikut adalah klasifikasi aset keuangan Perusahaan yang tidak lewat jatuh tempo atau penurunan nilai.

The following describes the classification of the Company's financial assets that are neither past due nor impaired.

30 Juni 2026	**Tingkat Atas/ *High Grade***	**Tingkat Standar/ *Standard Grade***	**T o t a l**	***30 June 2026***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Kas dan bank	12.487.406.576	-	12.487.406.576	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	-	30.963.962.850	30.963.962.850	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	11.263.416.899	11.263.416.899	*Other receivables*
Aset kontrak	-	79.835.301.722	79.835.301.722	*Contract assets*
T o t a l	12.487.406.576	122.062.681.471	134.550.088.047	***T o t a l***

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

a. **Risiko Kredit** (Lanjutan) *a. **Credit Risk** (Continued)*

31 Desember 2025	**Tingkat Atas/ *High Grade***	**Tingkat Standar/ *Standard Grade***	**T o t a l**	***31 December 2025***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Kas dan bank	20.452.571.286	-	20.452.571.286	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	-	10.750.895.926	10.750.895.926	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	28.711.767.600	28.711.767.600	*Other receivables*
T o t a l	20.452.571.286	39.462.663.526	59.915.234.812	***T o t a l***

31 Desember 2024	**Tingkat Atas/ *High Grade***	**Tingkat Standar/ *Standard Grade***	**T o t a l**	***31 December 2024***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Kas dan bank	15.471.895.960	-	15.471.895.960	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	-	13.678.462.903	13.678.462.903	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	6.281.401.731	6.281.401.731	*Other receivables*
T o t a l	15.471.895.960	19.959.864.634	35.431.760.594	***T o t a l***

31 Desember 2023	**Tingkat Atas/ *High Grade***	**Tingkat Standar/ *Standard Grade***	**T o t a l**	***31 December 2023***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Kas dan bank	19.201.769.102	-	19.201.769.102	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	-	18.879.920.532	18.879.920.532	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	6.290.463.252	6.290.463.252	*Other receivables*
T o t a l	19.201.769.102	25.170.383.784	44.372.152.886	***T o t a l***

Perusahaan telah menilai kualitas kredit kas dan bank dan dana yang dibatasi penggunaannya sebagai kelas tinggi karena ini disimpan di/atau dilakukan dengan bank terkemuka yang memiliki probabilitas rendah kebangkrutan.

The Company has assessed the credit quality of its cash on hand and in banks and restricted funds as high grade since these are deposited in/or transacted with reputable banks which have low probability of insolvency.

Aset keuangan lain Perusahaan dikategorikan berdasarkan pengalaman penagihan Perusahaan kepada rekanan. Definisi dari peringkat yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengevaluasi risiko kredit rekanan adalah sebagai berikut:

The Company's other financial assets are categorized based on the Company's collection experience with the counterparties. Definitions of the ratings being used by the Company to evaluate credit risk of its counterparties is as follows:

(1) Tingkat atas - Pelunasan diperoleh dengan mengikuti aturan dalam kontrak tanpa banyak usaha penagihan.
(2) Tingkat standar - Beberapa pengingat tindak lanjut dilakukan untuk memperoleh pelunasan dari pihak lawan.

(1) High grade – Repayment is obtained by following the rules in the contract without much collection effort.
(2) Standard grade – Several follow-up reminders were made to obtain repayment from the counterparty.

b. **Risiko Likuiditas** *b. **Liquidity Risk***

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan bertemu kesulitan dalam mewujudkan asetnya atau mengumpulkan dana untuk memenuhi komitmen terkait dengan liabilitas keuangannya.

Liquidity risk arises when the Company encounters difficulties in realizing its assets or raising funds to meet commitments related to its financial liabilities.

Perusahaan mengelola likuiditas dengan membuat rencana penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk perencanaan arus kas secara periodik dan melakukan monitoring atas realisasinya. Perusahaan menempatkan kelebihan atas kas dalam instrumen keuangan dengan risiko yang rendah namun memberikan imbal hasil yang memadai pada lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas dan *rating* yang dapat dipertanggungjawabkan.

The Company manages liquidity by planning receipts and disbursements in the form of periodic cash flow planning and monitoring its realization. The Company places excess cash in financial instruments with low risk but provides adequate returns to financial institutions that have credibility and an accountable rating.

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

b. **Risiko Likuiditas** (Lanjutan) *b. **Liquidity Risk** (Continued)*

Tabel di bawah menunjukan jatuh tempo kewajiban keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

The table below shows the maturity of the Company's financial obligations based on undiscounted contractual payments as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023:

30 Juni 2026	**Permintaan segera atau antara satu tahun/ *Immediate demand or between one year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**T o t a l**	***30 June 2026***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortised cost***
Utang bank jangka pendek	46.548.288.549	-	46.548.288.549	*Short-term bank loan*
Utang usaha	75.466.862.168	-	75.466.862.168	*Trade payables*
Utang lain-lain	50.955.795.042	2.459.720.000	53.415.515.042	*Other payables*
Beban akrual	54.012.924	-	54.012.924	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	65.438.542.829	86.705.813.946	152.144.356.775	*Lease liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan	2.762.605.661	2.262.737.375	5.025.343.036	*Finance lease liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang*	93.700.590.254	169.753.696.639	263.454.286.893	*Long-term bank loans**
T o t a l	334.926.697.427	261.181.967.960	596.108.665.387	***T o t a l***

*) Termasuk pembayaran bunga. **) Including interest payments.*

31 Desember 2025	**Permintaan segera atau antara satu tahun/ *Immediate demand or between one year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**T o t a l**	***31 December 2025***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortised cost***
Utang bank jangka pendek	48.037.638.373	-	48.037.638.373	*Short-term bank loan*
Utang usaha	47.385.323.313	-	47.385.323.313	*Trade payables*
Utang lain-lain	80.728.793.504	7.730.534.000	88.459.327.504	*Other payables*
Beban akrual	5.241.209	-	5.241.207	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	25.947.352.693	69.882.200.890	95.829.553.583	*Lease liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan	1.896.279.338	981.225.964	2.877.505.302	*Finance lease liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang*	212.766.747.169	6.060.782.102	218.827.529.270	*Long-term bank loans**
T o t a l	416.767.375.599	84.654.742.956	501.422.118.552	***T o t a l***

*) Termasuk pembayaran bunga. **) Including interest payments.*

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

b. **Risiko Likuiditas** (Lanjutan) *b. **Liquidity Risk** (Continued)*

31 Desember 2024	**Permintaan segera atau antara satu tahun/ *Immediate demand or between one year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**T o t a l**	***31 December 2024***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortised cost***
Utang bank jangka pendek	37.461.506.281	-	37.461.506.281	*Short-term bank loan*
Utang usaha	113.200.950.511	-	113.200.950.511	*Trade payables*
Utang lain-lain	106.264.191.322	18.272.238.000	124.536.429.322	*Other payables*
Beban akrual	4.099.232.222	-	4.099.232.222	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	59.119.321.754	27.175.722.205	86.295.043.959	*Lease liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan	2.596.844.970	1.690.313.807	4.287.158.777	*Finance lease liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang*	91.709.154.144	172.302.086.522	264.011.240.666	*Long-term bank loans**
T o t a l	414.451.201.204	219.440.360.534	633.891.561.738	***T o t a l***

*) Termasuk pembayaran bunga. **) Including interest payments.*

31 Desember 2023	**Permintaan segera atau antara satu tahun/ *Immediate demand or between one year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**T o t a l**	***31 December 2023***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortised cost***
Utang bank jangka pendek	11.674.173.656	-	11.674.173.656	*Short-term bank loan*
Utang usaha	101.216.140.549	-	101.216.140.549	*Trade payables*
Utang lain-lain	9.142.929.188	3.805.252.822	12.948.182.010	*Other payables*
Liabilitas sewa	73.276.332.635	67.507.699.811	73.276.332.635	*Lease liability*
Liabilitas sewa pembiayaan	1.615.024.289	875.587.703	2.490.611.992	*Finance lease liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang*	59.967.184.556	40.630.099.377	100.597.283.933	*Long-term bank loans**
T o t a l	256.891.784.873	112.818.639.713	302.202.724.775	***T o t a l***

*) Termasuk pembayaran bunga. **) Including interest payments.*

c. **Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka panjang Perusahaan dengan suku bunga mengambang. Instrumen keuangan tingkat bunga mengambang keuangan mengacu pada risiko tingkat suku bunga arus kas.

Perusahaan selalu melakukan análisis atas dampak dari tingkat suku bunga terhadap biaya operasional dan kemampuan Perusahaan sebelum menyetujui pinjaman tersebut. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan melakukan analisa pergerakan suku bunga dalam menentukan komposisi portofolio pinjaman suku bunga tetap dan variabel.

c. ***Interest Rate Risk Management***

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term bank loans with floating interest rates. Floating rate financial instruments are subject to cash flows interest rate risk.

The Company always performs an analysis of the impact of interest rates on operating costs and the ability of the Company before approving the loan. The Company manages its interest rate risk by analyzing the movement of interest rates in determining the composition of the loan portfolio of fixed and variable interest rates.

29. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan) / *29. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

c. **Manajemen Risiko Tingkat Bunga** (Lanjutan) / *c. **Interest Rate Risk Management** (Continued)*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga utang bank pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023. Dengan semua 94ava94ble lainnya tetap konstan, 94ava Perusahaan sebelum pajak dipengaruhi melalui dampak atas tarif mengambang utang bank sebagai berikut:

The table below demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on the bank loans as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023. With all other variables held constant, the Company's income before tax is affected through the impact on floating rate of bank loans as follows:

	Kenaikan/penurunan suku bunga/ *Increase/decrease in interest rates*	Efek pada laba sebelum pajak/ *Effect on income before tax*	
30 Juni 2026	+1.00	2.980.207.807	***30 June 2026***
	-1.00	(2.980.207.807)	
31 Desember 2025	+1.00	2.952.526.309	***31 December 2025***
	-1.00	(2.952.526.309)	
31 Desember 2024	+1.00	3.566.567.554	***31 December 2024***
	-1.00	(3.566.567.554)	
31 Desember 2023	+1.00	2.555.461.020	***31 December 2023***
	-1.00	(2.555.461.020)	

d. **Manajemen Permodalan** / *d. **Capital Management***

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

The main objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support the smooth running of its business and maximize shareholder value.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

The Company manages its capital structure and makes adjustments, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through loans. There were no changes to objectives, policies or processes as of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023.

30. **NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN** / *30. **FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS***

Ditetapkan di bawah ini adalah perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar semua instrumen keuangan Perusahaan:

Set out below is the comparison between the carrying and fair values of all the Company's financial instruments:

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*		**31 Desember 2025/** *31 December 2025*		
	Nilai tercatat/ *Value amount*	**Nilai wajar/** *Fair value*	**Nilai tercatat/** *Value amount*	**Nilai wajar/** *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial Assets***
Kas dan bank	12.487.406.576	12.487.406.576	20.452.571.286	20.452.571.286	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	73.433.784.730	73.433.784.730	91.658.728.230	91.658.728.230	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	11.263.416.899	11.263.416.899	27.782.772.600	27.782.772.600	*Other receivables*
Aset kontrak	79.835.301.722	79.835.301.722	-	-	*Contract assets*
T o t a l	177.019.909.927	177.019.909.927	139.894.072.116	139.894.072.116	***T o t a l***

30. **NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN** (Lanjutan) *30. **FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS** (Continued)*

	30 Juni 2026/ *30 June 2026*		**31 Desember 2025/ *31 December 2025***		
	Nilai tercatat/ *Value amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai tercatat/ *Value amount***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang bank jangka pendek	46.548.288.549	46.548.288.549	48.037.638.373	48.037.638.373	*Short-term bank loan*
Utang usaha	75.466.862.168	75.466.862.168	47.385.323.313	47.385.323.313	*Trade payables*
Utang lain-lain	53.415.515.042	53.415.515.042	88.459.327.504	88.459.327.504	*Other payables*
Beban akrual	54.012.924	54.012.924	5.241.209	5.241.209	*Accrued expense*
Liabilitas sewa	152.144.356.775	152.144.356.775	95.829.553.583	95.829.553.583	*Lease liability*
Liabilitas sewa pembiayaan	5.025.343.036	5.025.343.036	2.877.505.302	2.877.505.302	*Finance lease liability*
Utang bank jangka panjang	263.454.286.893	263.454.286.893	218.767.529.271	218.767.529.271	*Long-term bank loan*
T o t a l	596.168.665.387	596.168.665.387	501.362.118.555	501.362.118.555	***T o t a l***

	31 Desember 2024/ *31 December 2024*		**31 Desember 2023/ *31 December 2023***		
	Nilai tercatat/ *Value amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai tercatat/ *Value amount***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan					***Financial Assets***
Kas dan bank	15.471.895.960	15.471.895.960	19.201.769.102	19.201.769.102	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	122.353.992.726	122.353.992.726	91.488.290.930	91.488.290.930	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	5.662.071.731	5.662.071.731	5.980.798.252	5.980.798.252	*Other receivables*
T o t a l	143.487.960.417	143.487.960.417	116.670.858.284	116.670.858.284	***T o t a l***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang bank jangka pendek	37.461.506.281	37.461.506.281	11.674.173.656	11.674.173.656	*Short-term bank loan*
Utang usaha	113.200.950.511	113.200.950.511	101.216.140.549	101.216.140.549	*Trade payables*
Utang lain-lain	124.536.429.322	124.536.429.322	14.948.182.010	14.948.182.010	*Other payables*
Beban akrual	4.099.232.222	4.099.232.222	-	-	*Accrued expense*
Liabilitas sewa	86.295.043.959	86.295.043.959	140.784.032.446	140.784.032.446	*Lease liability*
Liabilitas sewa pembiayaan	4.287.158.777	4.287.158.777	2.490.611.992	2.490.611.992	*Finance lease liability*
Utang bank jangka panjang	264.011.240.666	264.011.240.666	100.597.283.933	100.597.283.933	*Long-term bank loan*
T o t a l	633.891.561.738	633.891.561.738	371.710.424.586	371.710.424.586	***T o t a l***

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

1. Kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Nilai tercatat dari utang bank jangka panjang mendekati nilai wajarnya disebabkan oleh pemakaian suku bunga mengambang atas instrumen tersebut, di mana Tingkat suku bunga tersebut selalu disesuaikan dengan pasar.
3. PSAK 113 (sebelumnya PSAK 68) "Pengukuran nilai wajar" tidak memasukkan liabilitas sewa dari persyaratan pengukuran dan pengungkapan.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar. Tidak ada transfer antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada transfer masuk dan keluar dari pengukuran nilai wajar Tingkat 3.

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each Company of the Company's financial instruments:

1. *Cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, short-term bank loan, trade payables, other payables, and accrued expenses approximate their carrying values due to their short-term nature.*
2. *The carrying amount of and long-term bank loan approximate to its fair value due to the use of floating interest rates on the instrument, where the interest rate is always adjusted to the market.*
3. *PSAK 113 (previously PSAK 68) "Fair value measurement" exclude lease liabilities from measurement and disclosure requirements.*

As of 30 June 2026 and 31 December 2025, 2024 and 2023, the Company do not have financial instruments recorded at fair value. There were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements and no transfer into and out of Level 3 fair value measurements.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 24 Juli 2026

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tanggal 24 Juli 2026 No. 297 di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0175927.AH.01.11.Tahun 2026 terdapat perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan terbatas terbuka menjadi Perusahaan terbatas tertutup.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 27 Juli 2026

Berdasarkan Akta Notaris tanggal 27 Juli 2026 No. 308 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0197245.AH.01.11.Tahun 2026 terdapat perubahan anggaran dasar Perusahaan, perubahan nama Perusahaan dan perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:

a. Menyetujui bahwa Penawaran Umum Perdana oleh Perusahaan kepada masyarakat melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan.

b. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari semula Perusahaan terbatas tertutup menjadi Perusahaan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan menjadi PT Andalan Artha Primanusa Tbk dengan tempat kedudukan di Jakarta Pusat.

c. Penawaran Umum Perdana

   Penerbitan sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau sebanyak-banyaknya 25,37% dari simpanan (portepel) Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana.

   Penerbitan 558.667.000 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Waran Seri I akan dicatatkan di BEI dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil bagian atas saham baru Perusahaan dengan nilai nominal Rp 10 per saham.

d. Menyetujui pencatatan atas seluruh saham Perusahaan di BEI setelah dilakukannya penawaran umum perdana dan pendaftaran saham Perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

e. Menegaskan kembali penunjukkan Billy Theristine Lim sebagai pihak pengendali tunggal Perusahaan sesuai dengan peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

31. SUBSEQUENT EVENT

Company

Amendment of the Company's Articles of Association dated 24 July 2026

Based on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 297 dated 24 July 2026 in Jakarta and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0175927.AH.01.11 of 2026, the Company's status was changed from a public limited liability Company to a private limited liability Company.

Amendment of the Company's Articles of Association dated 27 July 2026

Based on Notarial Deed No. 308 dated 27 July 2026, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta, and which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0197245.AH.01.11.Tahun 2026, there were amendments to the Company's Articles of Association and changes in the Company's purposes and objectives of as business activities, as follows:

a. Approved that the Company shall offer an Initial Public Offering to the public by issuing new shares from the Company's treasury (portepel).

b. Approved the changes of the Company's status from a private limited Company to a public limited Company and consequently, the Company's name changed to PT Andalan Artha Primanusa Tbk, domiciled in Central Jakarta.

c. Initial Public Offering

   The issuance of a maximum of 1,700,000,000 new shares with a nominal value of Rp 10 per share, representing up to 25.37% of the Company's treasury shares (portepel), to be offered to the public through an Initial Public Offering.

   The issuance of 558,667,000 Series I Warrants, which will be granted free of charge as an incentive to new shareholders in connection with the Initial Public Offering. The Series I Warrants will be listed on the IDX and entitle the holders to subscribe for new shares of the Company with a nominal value of Rp 10 per share.

d. Approved the listing of all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) following the initial public offering and the registration of the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

e. Reaffirmed the appointment of Billy Theristine Lim as the sole controlling party of the Company in accordance with OJK Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2026 DAN 2025 (Tidak diaudit)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
(Disajikan penuh dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDING ON
30 JUNE 2026 AND 2025 (Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2025, 2024 AND 2023
(Expressed full in Rupiah,
unless otherwise stated)

31. **PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN** (Lanjutan)

Persetujuan Pencabutan Ketentuan Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui perubahan pengurus, restrukturisasi permodalan, serta rencana IPO PT Andalan Artha Primanusa dengan syarat porsi pemegang saham pengendali atas nama Billy Theristine Lim tetap dipertahankan minimal 23,97% dan seluruh dana hasil IPO ditempatkan di Bank Mandiri berdasarkan No. WCO.KP/2752/KI/2024 tanggal 09 Juli 2026.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MNE.395/SPPK/2026 tanggal 14 September 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga telah menyetujui pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, perubahan porsi kepemilikan saham publik dan waran, serta penyesuaian *covenant* terkait pemegang saham pengendali dengan kewajiban mempertahankan kepemilikan efektif Sdri. Billy Theristine Lim sekurang-kurangnya sebesar 20,73%.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui surat permohonan dari Perusahaan terkait perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perusahaan setelah IPO berdasarkan surat no. 00731/SLK/2026 dan no. 00732/SLK/2026 tanggal 12 Agustus 2026.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 24 Agustus 2026, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan No. 366/AAP-BNI-EXT/VIII/26 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") terkait permohonan izin atas rencana perolehan tambahan fasilitas kredit dari Caterpillar Finance Indonesia dan BPR Tentram Optimis Pusaka.

Berdasarkan Surat BNI No. ENB3/1/132 tanggal 9 September 2026, BNI menyetujui permohonan Perusahaan untuk memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Caterpillar Finance Indonesia sebesar Rp 35.951.699.757 dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari BPR Tentram Optimis Pusaka sebesar Rp 6.000.000.000, dengan syarat sebagai berikut:

a. Perusahaan wajib menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) sesuai ketentuan BNI, yaitu:

   - Current Ratio (tidak termasuk Current Portion of Long-Term Debt) minimal 1,0x.
   - Debt to Equity Ratio (termasuk Subordinated Loan) maksimal 2,20x, yang wajib dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2026.
   - Debt Service Coverage minimal 100%.

   Dalam hal Perusahaan gagal memelihara rasio keuangan tersebut, pemegang saham bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk apabila diperlukan melakukan tambahan *Self Financing / Top Up* paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya laporan keuangan yang dijadikan acuan.

b. Perusahaan wajib menyerahkan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan Perjanjian Kredit (PK) atas fasilitas kredit dari Caterpillar Finance Indonesia dan BPR Tentram Optimis Pusaka beserta perubahan-perubahannya kepada BNI.

*31. **SUBSEQUENT EVENT** (Continued)*

Waiver of Bank Covenant Approval

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk approved the changes in the Company's management, capital restructuring, and the IPO plan of PT Andalan Artha Primanusa, subject to the controlling shareholder, Billy Theristine Lim, maintaining a minimum ownership interest of 23.97% and all proceeds from the IPO being placed with Bank Mandiri, based on Letter No. WCO.KP/2752/KI/2024 dated 9 July 2026.

Based on Letter No. CMB.CM6/MNE.395/SPPK/2026 dated 14 September 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has also approved the Company's Initial Public Offering (IPO) plan, changes in the proportion of public shareholding and warrants, as well as the adjustment of covenants concerning the controlling shareholder with the obligation to maintain Ms. Billy Theristine Lim's effective ownership at a minimum of 20.73%.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk has approved the Company's request regarding the changes to the composition of the Company's management and shareholders following the IPO, based on Letter no. 00731/SLK/2026 and no. 00732/SLK/2026 dated 12 August 2026.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On 24 August 2026, the Company submitted Application Letter No. 366/AAP-BNI-EXT/VIII/26 to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") regarding the request for approval for the planned additional credit facilities from Caterpillar Finance Indonesia and BPR Tentram Optimis Pusaka.

Based on BNI's Letter No. ENB3/1/132 dated 9 September 2026, BNI approved the Company's request to obtain additional credit facilities from Caterpillar Finance Indonesia amounting to Rp 35,951,699,757 and an Overdraft Facility (Pinjaman Rekening Koran) from BPR Tentram Optimis Pusaka amounting to Rp 6,000,000,000, subject to the following conditions:

a. The Company is required to maintain the financial ratio covenants in accordance with BNI's requirements, as follows:

   - *Minimum Current Ratio (excluding CPLTD) of 1.0x.*
   - *Maximum Debt to Equity Ratio (including Subordinated Loan) of 2.20x, to be met as of 31 December 2026.*
   - *Minimum Debt Service Coverage of 100%.*

   In the event the Company fails to maintain the stipulated financial ratios, the shareholders are responsible for rectifying the financial condition, including providing additional Self Financing/Top Up if necessary, no later than 3 (three) months from the issuance of the reference financial statements.

b. The Company is required to submit the Credit Approval Letter and Credit Agreement for the facilities from Caterpillar Finance Indonesia and BPR Tentram Optimis Pusaka, including any amendments thereto, to BNI.

31. **PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN** (Lanjutan)

Persetujuan Pencabutan Ketentuan Bank (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan Surat BNI No. ENB3/4/019/R dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 62 tanggal 22 Oktober 2026, BNI menyetujui permohonan Perusahaan untuk pelaksanaan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas Gedung Kantor Jl Plaju No 11 Jakarta Pusat paling lambat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027 atau 2 (dua) bulan setelah bangunan selesai direnovasi (mana yang lebih dahulu).

PT BPR Arta Kedaton Makmur

PT BPR Arta Kedaton Makmur telah menerima dan menyetujui informasi penerimaan fasilitas kredit Perusahaan mengenai rincian seluruh fasilitas kredit Perusahaan dari berbagai bank, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya tanpa keberatan berdasarkan Surat No. 450/AAP-BAKM/EXT/IX/26 tanggal 2 September 2026.

Perjanjian Kontrak Kerja

PT Bukit Bara Alam (BBA)

Pada tanggal 9 Juli 2026, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jasa Pemindahan Lapisan Tanah Penutup Tambang *Open Pit* No. 08/BBA-ANP/PPLP/VII/2026 dan Perjanjian Pekerjaan Penggalian Batubara No. 09/BBA-AAP/PPPB/VII/2026 dengan BBA untuk pekerjaan jasa penambangan batubara di lokasi tambang BBA yang terletak di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Perjanjian Pemindahan Lapisan Tanah Penutup berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2026 sampai dengan 31 Agustus 2031, sedangkan Perjanjian Penggalian Batubara berlaku efektif sejak tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan 31 Agustus 2031. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak paling lambat 90 hari sebelum berakhirnya masa Perjanjian.

Ruang lingkup Pekerjaan meliputi pembersihan lahan, pemisahan dan pengangkutan tanah pucuk, pengupasan, pembuangan dan pengangkutan lapisan penutup dengan target sebesar 52.514.000 BCM (toleransi perubahan target 5%), serta pekerjaan penggalian batubara, pemeliharaan jalan angkut, pembuatan ramp, dan pengelolaan sistem drainase/penirisan tambang.

Perusahaan wajib menyediakan peralatan alat berat, sarana penunjang, serta tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan spesifikasi dan standar K3LH yang ditetapkan. Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar disediakan oleh BBA sesuai dengan standar alokasi yang disepakati.

PT Trakindo Utama

Pada tanggal 8 Juli 2026, Perusahaan melakukan pembelian 2 (dua) unit Bulldozer Caterpillar D8T dan 2 (dua) unit Motor Grader Caterpillar 160K dari PT Trakindo Utama dengan total nilai pembelian sebesar Rp 36.562.290.000. Alat berat tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan di *Job Site* SBS.

*31. **SUBSEQUENT EVENT** (Continued)*

***Waiver of Bank Covenant Approval** (Continued)*

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** (Continued)*

Based on BNI Letter No. ENB3/4/019/R and Amendment Credit Agreement No. (1) 62 dated 22 October 2026, BNI approved the Company's request to extend the renewal of the Building Worthiness Certificate (Sertifikat Laik Fungsi or "SLF") for its office building located at Jl. Plaju No. 11, Central Jakarta not later than 31 October 2027 or within two (2) months after the completion of the building renovation, whichever occurs earlier.

PT BPR Arta Kedaton Makmur

PT BPR Arta Kedaton Makmur has acknowledged and approved the information regarding the Company's credit facilities, including details of all credit facilities obtained by the Company from various banks, financial institutions, and other related parties, without objection, based on Letter No. 450/AAP-BAKM/EXT/IX/26 dated 2 September 2026.

Cooperation Agreement

PT Bukit Bara Alam (BBA)

On 9 July 2026, the Company entered into an Open Pit Mine Overburden Removal Services Agreement No. 08/BBA-ANP/PPLP/VII/2026 and a Coal Getting Work Agreement No. 09/BBA-AAP/PPPB/VII/2026 with BBA for coal mining services at BBA's mine site located in Lahat Regency, South Sumatra Province.

The Overburden Removal Agreement is effective for a period of 5 years starting from 1 September 2026 until 31 August 2031, while the Coal Getting Agreement is effective from 9 July 2026 until 31 August 2031. The Agreements may be extended based on the written agreement of the Parties no later than 90 days prior to expiration.

The scope of Work includes land clearing, topsoil management, overburden stripping, disposal, and hauling with a target of 52,514,000 BCM (5% tolerance for target variation), as well as coal getting, haul road maintenance, ramp construction, and mine drainage management.

The Company is required to provide heavy equipment, supporting facilities, and competent manpower in accordance with the established specifications and HSE standards. Diesel fuel is supplied by BBA in accordance with the agreed fuel allowance standard.

PT Trakindo Utama

On 8 July 2026, the Company purchased 2 (two) units of Caterpillar D8T Bulldozers and 2 (two) units of Caterpillar 160K Motor Graders from PT Trakindo Utama with a total purchase value of Rp 36,562,290,000. The heavy equipment is used to support the Company's operations at the SBS Job Site.

31. **PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN** (Lanjutan)

Penambahan dan pembayaran utang usaha dan utang lain-lain

PT Andalan Bhumi Nusantara

Sampai dengan bulan Agustus 2026 terdapat penambahan utang usaha dan utang lain-lain kepada PT Andalan Bhumi Nusantara sebesar Rp 2.112.180.517 dan 2.686.376.000. Namun pada 14 September 2026, Perusahaan telah melunasi seluruh utang usaha dan utang lain-lain kepada PT Andalan Bhumi Nusantara sebesar Rp 11.160.333.570 dan Rp 11.977.820.794.

Tn. Arief Ramon

Sampai dengan bulan Agustus 2026, terdapat penambahan utang lain-lain kepada Tn. Arief Ramon sebesar Rp 3.000.000.000. Namun, pada 14 September 2026, Perusahaan telah melunasi seluruh utang lain-lain kepada Tn. Arief Ramon sebesar Rp 19.038.734.620.

Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit

PT BPR Universal

Berdasarkan Akta No. 25, yang dibuat dihadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2026, PT BPR Universal dan Perusahaan melakukan perpanjangan fasilitas kredit Revolving Reguler 1 selama 12 bulan sampai dengan 9 Oktober 2027.

Berdasarkan Addendum I tanggal 8 Oktober 2026 Perjanjian Kredit No. 008/BTR/UKD/C/2026, PT BPR Universal dan Perusahaan melakukan perpanjangan fasilitas kredit Revolving Reguler 2 selama 12 bulan sampai dengan 9 Oktober 2027.

Pinjaman Sindikasi

Berdasarkan Akta No. 1, yang dibuat di hadapan Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., pada tanggal 6 Oktober 2026, Perusahaan melakukan perjanjian pemberian pinjaman sindikasi sebesar Rp 6.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan rincian:

- PT BPR Tentram Optimis Pusaka sebagai ketua sindikasi sebesar Rp 500.000.000; dan
- PT BPR Akasia Mas sebagai anggota sindikasi sebesar Rp 5.500.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi memiliki jangka waktu 12 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian dengan suku bunga sebesar 15% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan:

- Sertifikat Hak Milik atas satu unit apartemen atas nama Arief Ramon;
- Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Arief Ramon;dan
- Satu unit kendaraan XCMG Dump Truck XDA40 tahun 2022 atas nama Perusahaan.

*31. **SUBSEQUENT EVENT** (Continued)*

Addition and payment of trade payables and other payables

PT Andalan Bhumi Nusantara

As of August 2026, there were additions to trade payables and other payables to PT Andalan Bhumi Nusantara amounting to Rp 2,112,180,517 and Rp 2,686,376,000, respectively. However, on 14 September 2026, the Company has fully paid all trade payables and other payables to PT Andalan Bhumi Nusantara amounting to Rp 11,160,333,570 and Rp 11,977,820,794, respectively.

Mr. Arief Ramon

As of August 2026, there were additions to other payables to Mr. Arief Ramon amounting to Rp 3,000,000,000. However, on 14 September 2026, the Company has fully paid all other payables to Mr. Arief Ramon amounting to Rp 19,038,734,620.

Extension and addition of Credit Facilities

PT BPR Universal

Based on Notarial Deed No. 25, of Tan Susy, S.H., dated 8 October 2026, PT BPR Universal and the Company agreed to extend the Revolving Regular 1 credit facility for an additional period of 12 months until 9 October 2027.

Based on Addendum I dated 8 October 2026 No. 008/BTR/UKD/C/2026 to Credit Agreement, PT BPR Universal and the Company agreed to extend the Revolving Regular 2 credit facility for an additional 12-month period until 9 October 2027.

Syndicated Loan

Based on Deed No. 1, of Fachrul Rozy Latuconsina, S.H., M.Kn., dated 6 October 2026, Bank Sindikasi and the Company agreed to a syndicated loan facility agreement amounting Rp 6,000,000,000 for working capital purposes with the following composition:

- *PT BPR Tentram Optimis Pusaka as the lead syndicate bank amounting Rp 500,000,000; and*
- *PT BPR Akasia Mas as a syndicate member amounting Rp 5,500,000,000.*

The syndicated loan facility has a tenure of 12 months commencing from the agreement date and carries an interest rate of 15% per annum. The facility is collateralized by:

- *A Certificate of Ownership of one apartment unit under the name of Arief Ramon;*
- *A Certificate of Ownership of land and building under the name of Arief Ramon; and*
- *One 2022 XCMG XDA40 Dump Truck owned by the Company.*

32. PENERBITAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023. Perubahan tersebut yaitu penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan Catatan 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 30 dan 31.

32. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENT

In connection with the proposed Initial Public Offering the Company have reissued the financial statements for the six-month periods ending on 30 June 2026 and 2025 (unaudited) and for the years ended on 31 December 2025, 2024 and 2023. The changes include additional disclosures in the notes to the financial statements, specifically Notes 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 30 and 31.

33. PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah difinalkan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2026.

33. COMPLETION FOR THE FINANCIAL STATEMENT

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which have been finalized and approved for publication on 23 October 2026.

Tel : +62-21 2555 6746
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant

Central Jakarta – Branch Office
Branch Licence No. 284/MK/SK/2025
Citywalk Sudirman, 6th Floor
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Jakarta 10220 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026

No. : 00178/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Andalan Artha Primanusa Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Andalan Artha Primanusa Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 30 June 2026 and 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the six-month period and for the one-year period then ended, and notes to financial statements including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 30 June 2026 and 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the six-month period and for the one-year period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas penurunan nilai aset tetap

Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 436.419.633.067. Kami telah menelaah kerugian penurunan nilai di tingkat Perusahaan dan kami menemukan tidak terdapat indikasi penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Kami mengidentifikasi hal ini sebagai Hal Audit Utama karena pencatatan dan penyusutan aset tetap melibatkan pertimbangan manajemen, khususnya dalam menentukan umur manfaat ekonomis dan evaluasi atas kemungkinan penurunan nilai aset.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan.

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai pengukuran aset tetapnya. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2 dan 9 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan untuk mengidentifikasi indikator potensi penurunan nilai aset tetap.
- Memastikan bahwa penilaian manajemen atas penurunan nilai dilakukan secara berkala sesuai dengan indikator penurunan nilai.
- Inspeksi fisik dilakukan terhadap seluruh aset tetap untuk menilai kondisi aktual aset pada tanggal pelaporan. Prosedur ini meliputi pemeriksaan kondisi fisik, tingkat keausan, kelengkapan komponen utama, serta status operasional aset.
- Melakukan pengujian data penyusutan dan pemeriksaan data aset tetap lainnya dilakukan untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan. Prosedur ini meliputi penelaahan metode penyusutan yang digunakan, estimasi umur manfaat, rekonsiliasi saldo awal dan akhir aset tetap, serta pengujian atas penambahan, pelepasan, dan reklasifikasi aset selama periode berjalan. Selain itu, dilakukan verifikasi kesesuaian antara daftar aset tetap dengan dokumen pendukung.
- Kami juga telah mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Assessment of impairment of property, plant and equipment

The carrying amount of the Company's property, plant and equipment as of 30 June 2026 amounted to Rp 436,419,633,067. We have assessed the impairment losses at the Company level and noted that there were no indicators of impairment for the six-month period ended 30 June 2026. We identified this matter as a Key Audit Matter because the recognition and depreciation of property, plant and equipment involve management judgment, particularly in determining the useful lives and evaluating the potential impairment of the assets.

All property, plant and equipment as of the reporting date are used to support the Company's operational activities.

The Company applies the cost model for the measurement of its property, plant and equipment, as disclosed in Note 2 dan 9 to the financial statements.

How our audit addressed key audit matter

- *Performed an evaluation of the Company's policies and procedures to identify indicators of potential impairment of property, plant and equipment.*
- *Ensured that management's impairment assessments are conducted periodically in accordance with identified impairment indicators.*
- *A physical inspection of property, plant and equipment was conducted to assess the actual condition of the assets as of the reporting date. The procedures included examining the physical condition, level of wear, completeness of main components, and operational status of the assets.*
- *Performed testing of depreciation data and other property, plant and equipment records to ensure their accuracy and completeness. The procedures included reviewing the depreciation methods applied and the estimated useful lives, reconciling the beginning and ending balances of property, plant and equipment, and testing additions, disposals, and reclassifications during the period. In addition, we verified the consistency of the fixed asset register with the supporting documentation.*
- *We have also considered the adequacy of the disclosures in financial statements.*

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal lain

Sebelumnya kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00177/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026 atas Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2026, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Indonesia. Laporan keuangan Perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 29 Mei 2026.

Laporan keuangan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Other matter

We previously issued Independent Auditor's Report No. 00177/3.0534/AU.1/02/2103-2/1/X/2026 dated 6 October 2026 on the Company's financial statements as of 30 June 2026, in connection with the planned initial Public Offering in Indonesia. The financial statements of the Company as of and for the year ended 31 December 2024 dan 31 Desember 2023 were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 29 May 2026.

These financial statements are issued in connection with a planned public offering in Indonesia and are not intended and should not be used for any other purpose.

Responsibilities of management and those charged with governance for financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements *(Continued)*

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama Audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements *(Continued)*

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significant in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan

00178

Damajanti Tanumihardja, CPA
NIAP AP. 2103/
License No. AP. 2103

23 Oktober 2026/ *23 October 2026*

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.